



HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN

2026–2030

**Mewujudkan Aparatur Berkelas Dunia
Menuju Riau Bedelau**

PEMERINTAH PROVINSI RIAU



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR: Kpts.1174/XII/2025

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TINGKAT INSTANSI (HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026-2030

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem manajemen Aparatur Sipil Negara yang harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, terukur dan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan Bab I Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 604/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Tingkat Instansi, menyebutkan setiap instansi pemerintah harus menyusun rencana pengembangan kompetensi tingkat instansi disertai dengan kebutuhan alokasi anggarannya untuk periode waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun di bawah koordinasi pejabat yang berwenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Tingkat Instansi (*Human Capital Development Plan*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tingkat Instansi (*Human Capital Development Plan*) Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai salah satu acuan strategis dalam penyelenggaraan program pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2025



Kata Pengantar

Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai Akselerator Terwujudnya "Riau Bedelau"

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rampungnya **Rencana Pengembangan Kompetensi Tingkat Instansi (Human Capital Development Plan) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026-2030.**

Dokumen ini hadir sebagai jawaban strategis atas tantangan era disrupsi global sekaligus sebagai instrumen kunci untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Kita telah menetapkan Visi **"Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)"** dalam RPJMD 2025-2029.

Visi besar ini tidak mungkin tercapai tanpa aparatur yang kompeten. HCDP ini adalah peta jalan kita untuk memastikan ASN memiliki kompetensi yang selaras untuk mengeksekusi seluruh Misi Pembangunan. Pengembangan kompetensi bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi esensial untuk menyukseskan Misi-Misi pembangunan lainnya, mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi, hingga penguatan budaya.

HCDP ini mengadopsi pendekatan *ASN Corporate University*. Kita mengubah paradigma dari sekadar pelatihan menjadi pembelajaran terintegrasi yang berdampak langsung pada kinerja. Arah Pembelajaran dalam dokumen ini telah diselaraskan dengan tahapan pencapaian RPJMD Provinsi Riau.

HCDP ini adalah kompas strategis, bukan sekadar pemenuhan administratif. Untuk itu, saya menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala BKD, Kepala BPSDM, hingga seluruh Kepala Perangkat Daerah, untuk mengawal dan mengimplementasikan HCDP ini secara serius. Saya juga mengajak seluruh ASN Provinsi Riau untuk proaktif dan memiliki kemauan belajar serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang sangat dinamis. Saya yakin, dengan komitmen bersama, HCDP ini akan mengakselerasi pencapaian Visi **"Riau Bedelau"** dan mewujudkan pelayanan publik yang unggul bagi masyarakat. Semoga Allah SWT meridhoi ikhtiar kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 29 Desember 2025

Pt. GUBERNUR RIAU,



S.E. HARIYANTO

Daftar Isi

Halaman Pengesahan i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi..... iii

Daftar Tabel..... iv

Daftar Gambar..... v

Bab I Pendahuluan..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan dan Manfaat 2

1.3 Dasar Hukum..... 4

2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja 6

2.2 Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Riau 6

 2.2.1 ASN Menurut Status Kepegawaian..... 6

 2.2.2 ASN Menurut Jabatan 7

 2.2.3 ASN Menurut Tingkat dan Latar Belakang Pendidikan..... 8

 2.2.4 ASN Menurut Usia 9

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Riau..... 10

2.4 Arah Pembelajaran Instansi..... 14

Bab III Rencana Kebutuhan Pembelajaran Strategis Instansi 19

3.1 Kebutuhan Pembelajaran Pegawai Instansi 19

 3.1.1 Diagnosis Kebutuhan Pembelajaran Instansi..... 19

3.2 Rencana Pengembangan Kompetensi Strategis..... 67

3.3 Rencana Monitoring dan Evaluasi..... 67

Bab IV Rencana Penempatan Kembali..... 69

Bab V Penutup..... 73

Lampiran 75

Daftar Tabel

Tabel 1. 1	Capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	2
Tabel 2. 1	Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026-2030	11
Tabel 2. 2	Arah Pembelajaran Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026-2030	15
Tabel 3. 1	Kompetensi manajerial dan sosial kultural	20
Tabel 3. 2	Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Peningkatan Pendidikan	24

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 ASN Pemerintah Provinsi Riau Menurut Status Kepegawaian.....	7
Gambar 2. 2 ASN Pemerintah Provinsi Riau Menurut Jabatan	7
Gambar 2. 3 ASN Pemerintah Provinsi Riau Menurut Tingkat dan	8
Gambar 2. 4 ASN Pemerintah Provinsi Riau Menurut Usia.....	9
Gambar 2.5 Pelaksanaan Inventarisasi Rencana Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025	19

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi dan percepatan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dinamis yang menuntut sektor publik untuk terus beradaptasi. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas, efisien, dan inovatif semakin meningkat. Dalam konteks ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran sebagai elemen kunci yang menentukan keberhasilan organisasi pemerintahan dalam menghadapi dan mengelola dinamika perubahan tersebut. Untuk itu, dibutuhkan sosok ASN yang kompeten, adaptif, dan profesional yang senantiasa melakukan pembelajaran berkelanjutan agar tetap relevan dengan tantangan zaman.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengamanatkan transformasi pengembangan kompetensi ASN melalui sistem pembelajaran terintegrasi, atau dikenal dengan pendekatan *ASN Corporate University* (ASN Corpu). Untuk menjamin agar pengembangan kompetensi ini berjalan efektif dan terintegrasi langsung dengan pekerjaan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Pengembangan Kompetensi Tingkat Instansi, atau *Human Capital Development Plan* (HCDP).

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (KEPLAN) Nomor 604/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Tingkat Instansi hadir sebagai acuan untuk memastikan HCDP disusun secara strategis, terstruktur, dan komprehensif. Dokumen HCDP ini menjadi krusial karena berfungsi sebagai peta jalan yang memuat kebutuhan pembelajaran, desain pembelajaran, hingga alokasi anggaran yang fokusnya selaras dengan pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Sejalan dengan mandat nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan visi pembangunan jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yaitu: "**Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)**". Visi ini mencerminkan cita-cita untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya maju secara ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga unggul secara sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan.

Meskipun Pemerintah Provinsi Riau telah menunjukkan tren peningkatan kinerja, tantangan dalam aspek SDM Aparatur masih tinggi dan membutuhkan intervensi terstruktur. Data dan analisis RPJMD 2025-2029 mengindikasikan adanya celah signifikan dalam **Indeks Profesionalitas (IP) ASN** dan tuntutan terhadap **Budaya Birokrasi BerAKHLAK** serta peningkatan **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**. Lebih lanjut, dinamika global dan regional menuntut ASN untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kompetensi manajerial dan sosial-kultural yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Tanpa perencanaan pengembangan kompetensi yang terintegrasi dan selaras dengan kebutuhan strategis daerah, capaian kinerja ASN berisiko stagnan, bahkan tidak mampu mengejar sasaran pembangunan yang ambisius.

Tabel 1. 1

Capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023-2024.

Tahun	IP ASN	IRB
2023	77,96%	74,63
2024	76,62%	83,97

Sumber: RPJMD Prov Riau, diolah

Untuk menjawab tantangan global sekaligus mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Riau 2025-2029, diperlukan transformasi fundamental pada modal manusia aparatur. Oleh karena itu, penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP) ASN Pemerintah Provinsi Riau tahun ini menjadi langkah strategis yang fundamental. Dokumen ini dirancang sebagai jembatan yang menghubungkan antara amanat regulasi nasional (KEPLAN 604/K.1/HKM.02.2/2025) dengan kebutuhan pencapaian sasaran strategis daerah (RPJMD Riau 2025-2029). HCDP ini akan menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa setiap upaya pengembangan kompetensi ASN Provinsi Riau berkontribusi langsung pada pembangunan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik unggul, demi terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) ASN Pemerintah Provinsi Riau ini memiliki tujuan utama sebagai berikut:

- Menyediakan dokumen acuan dan peta jalan (*roadmap*) yang terstruktur, strategis, dan terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

2. Memastikan keselarasan antara strategi pengembangan kompetensi ASN dengan Visi, Misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
3. Mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi (*learning needs*) yang bersifat kritis dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi dan individu.
4. Mewujudkan implementasi sistem pembelajaran terintegrasi (ASN *Corporate University*) sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Tingkat Instansi, guna menciptakan ASN yang profesional dan kompeten dalam mendukung Visi "Riau Bedelau".

Dengan tercapainya tujuan penyusunan HCDP, diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

1. Bagi Individu ASN:
 - a. Memberikan kejelasan dan arah yang lebih terstruktur dalam pengembangan kompetensi dan jalur karir.
 - b. Memperoleh kesempatan pengembangan diri yang relevan dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan strategis organisasi.
2. Bagi Perangkat Daerah (Organisasi):
 - a. Memiliki dasar yang kuat dan objektif dalam merencanakan program dan mengalokasikan anggaran pengembangan kompetensi.
 - b. Memastikan bahwa investasi dalam pengembangan SDM (*human capital investment*) memberikan dampak langsung (*return on investment*) terhadap peningkatan kinerja dan pencapaian target organisasi.
3. Bagi Pemerintah Provinsi Riau:
 - a. Mempercepat akselerasi terwujudnya Misi ke-5 RPJMD, yaitu "aparatur yang kompeten dan profesional" menuju *world class government*.
 - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan pengembangan SDM aparatur secara keseluruhan.
 - c. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas ASN.
4. Bagi Masyarakat Provinsi Riau:

Secara tidak langsung, masyarakat akan menerima manfaat berupa peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, profesional, dan inovatif sebagai hasil dari peningkatan kompetensi aparatur yang melayani.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen HCDP ini berlandaskan pada regulasi di tingkat nasional mengenai Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kerangka perencanaan pembangunan daerah, serta peraturan spesifik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

B. Peraturan Pemerintah (PP)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020)

C. Peraturan Presiden (Perpres)

1. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

D. Peraturan dan Keputusan Lembaga

1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (*Corporate University*)
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 604/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Tingkat Instansi

3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 605/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

E. Peraturan Daerah Provinsi Riau

1. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045
2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Bab II

Gambaran Umum Strategi Instansi

2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Riau menjadi dasar pemetaan kebutuhan kompetensi teknis dan fungsional. Berdasarkan **Surat Inventarisasi Rencana Bangkom ASN Prov Riau 2025**, struktur instansi Pemerintah Provinsi Riau mencakup **45 Perangkat Daerah (PD) dan Biro**, (Struktur terlampir pada lampiran 2.1) yang terdiri dari:

- Sekretariat Daerah (termasuk 9 Biro)
- Sekretariat DPRD
- Inspektorat Daerah
- 8 Badan
- 21 Dinas
- 3 RSUD
- Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam konteks *ASN Corporate University (Corpu)* (sesuai PerLAN 6/2023), struktur pembelajaran instansi akan melibatkan peran-peran kunci:

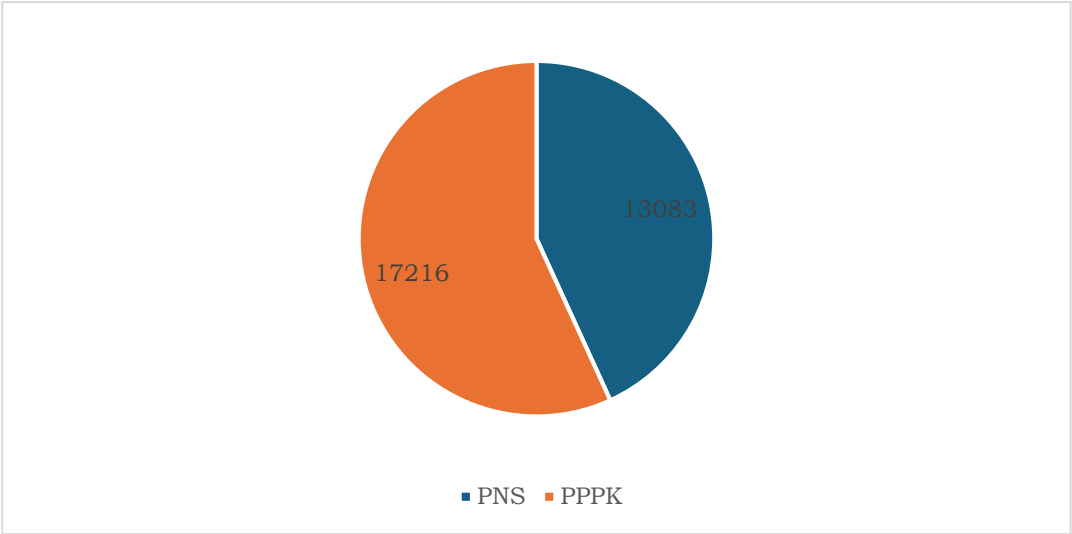
1. **Dewan Pengarah Pembelajaran (*Learning Council*)**: Dipimpin oleh Sekretaris Daerah, bertugas menetapkan arah kebijakan strategis pengembangan kompetensi yang selaras dengan 7 Misi RPJMD.
2. **Koordinator Pembelajaran (*Chief Learning Officer/CLO*)**: Dijabat oleh pimpinan unit yang bertanggung jawab di bidang SDM (misal: Kepala BKD/BPSDM), bertugas menerjemahkan strategi menjadi program pembelajaran.
3. **Kelompok Keahlian (*Faculty/Group Skills*)**: Terdiri dari Widyaiswara, Perencana, Analis Kebijakan, dan pakar internal/eksternal yang relevan dengan 7 Misi RPJMD.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kinerja *Corporate University* Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat pada Lampiran 2.2 dokumen ini.

2.2 Profil Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Riau

2.2.1 ASN Menurut Status Kepegawaian

Profil ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau menurut Status Kepegawaian dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah dengan total pegawai 30.299 orang yang terdiri dari 13.083 orang PNS dan 17.216 orang PPPK per tanggal 31 Desember 2025.



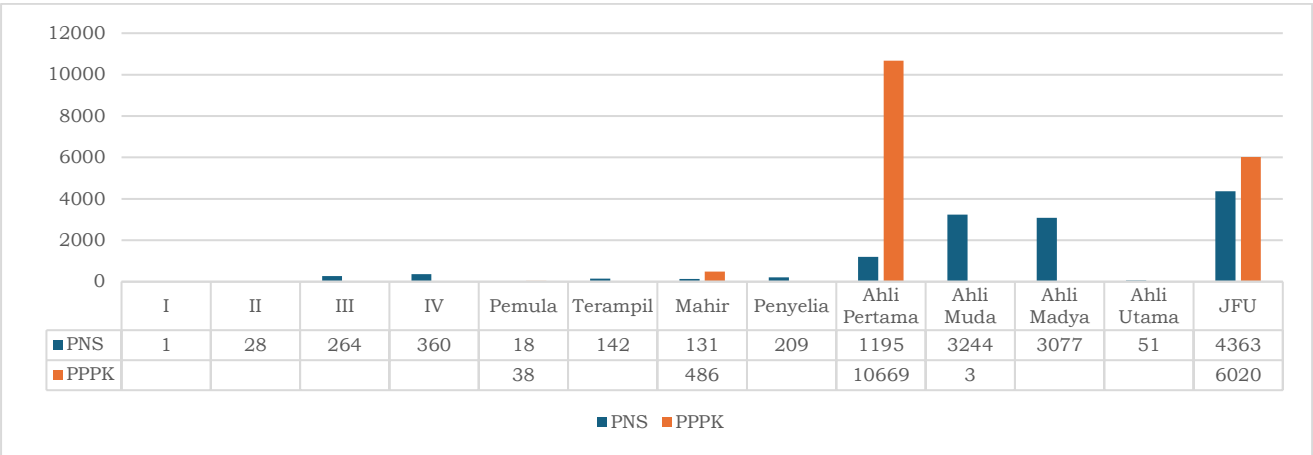
Sumber: BKD Prov Riau, 2025 (diolah)

Gambar 2. 1 ASN Pemerintah Provinsi Riau Menurut Status Kepegawaian

2.2.2 ASN Menurut Jabatan

Profil ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau menurut Jabatan dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah yang dibagi menurut eselon, tingkatan Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum.

Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri dari 45 Perangkat Daerah, di pimpin oleh Gubernur Riau dan Wakil Gubernur yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi. Gubernur dibantu oleh Jabatan Tinggi Madya atau Sekretaris Daerah yang menduduki Eselon I serta dibantu oleh Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Pengawas.



Sumber: BKD Prov Riau, 2025 (diolah)

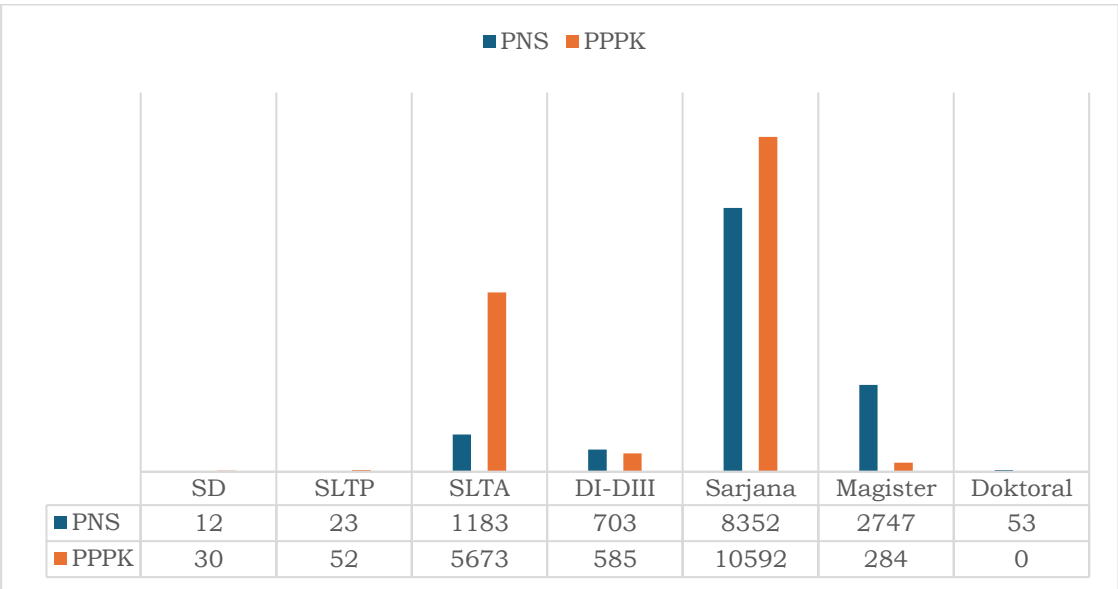
Gambar 2. 2 ASN Pemerintah Provinsi Riau Menurut Jabatan

Berdasarkan Gambar 2.2 yang menyajikan data ASN Pemerintah Provinsi Riau menurut jabatan (sumber: BKD Prov Riau, 2025), terlihat pola distribusi peran yang sangat kontras antara PNS dan PPPK. PNS memiliki sebaran yang lebih merata dan mendominasi seluruh jabatan struktural (eselon I hingga IV) serta jabatan fungsional jenjang karier tinggi, khususnya Ahli Muda 3.244 orang dan

Ahli Madya sebanyak 3.077 orang. Sebaliknya, tenaga PPPK terkonsentrasi secara masif pada jabatan fungsional tingkat dasar, dengan pembagian pada JFT Ahli Pertama yang mencapai 10.669 orang, JFU (Jabatan Fungsional Umum) dengan jumlah PPPK 6.020 orang dibandingkan PNS sebanyak 4.363 orang. Adapun distribusi ASN menunjukkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Pemerintah Provinsi Riau lebih banyak dari jabatan pelaksana atau Jabatan Fungsional Umum (JFU). Penyederhanaan birokrasi terhadap sistem kelas jabatan termasuk penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional seperti yang diamanatkan dalam telah meningkatkan jumlah JFT secara signifikan.

2.2.3 ASN Menurut Tingkat dan Latar Belakang Pendidikan

Profil ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau menurut Tingkat dan Latar Belakang Pendidikan dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah yang dibagi menurut Pendidikan formal yang telah diselesaikan.



Sumber: BKD Prov Riau, 2025 (diolah)

Gambar 2. 3 ASN Pemerintah Provinsi Riau Menurut Tingkat dan Latar Belakang Pendidikan

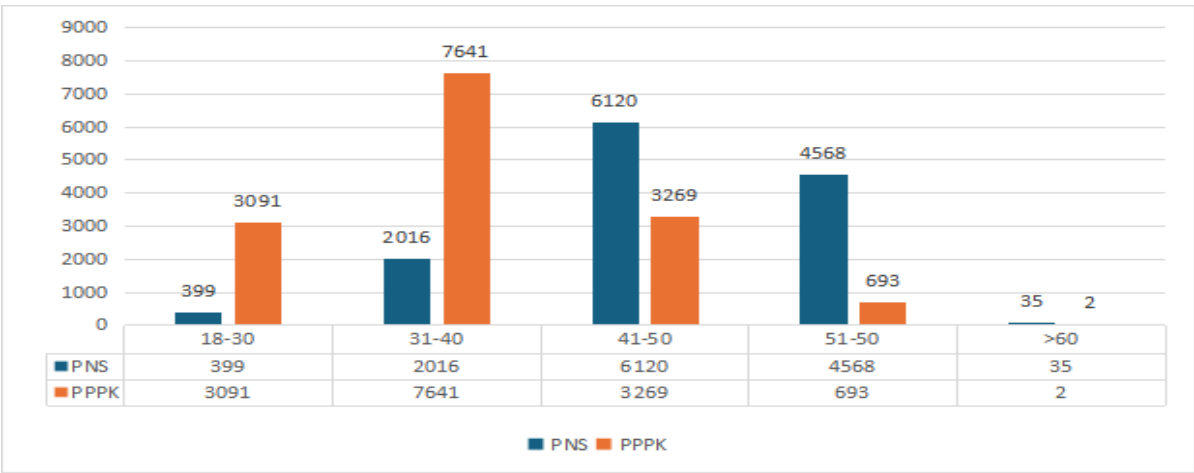
Berdasarkan Gambar 2.3 mengenai data ASN Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025, komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan sebaran yang bervariasi antara kategori PNS dan PPPK. Jenjang pendidikan Sarjana menjadi kelompok dengan jumlah terbanyak, yakni mencapai 8.352 orang PNS dan 10.592 orang PPPK. Pada tingkat pendidikan menengah (SLTA), terlihat perbedaan jumlah yang cukup signifikan di mana kategori PPPK mendominasi dengan 5.673 orang dibandingkan PNS yang berjumlah 1.183 orang. Sementara itu, pada jenjang Diploma (DI-DIII), tercatat sebanyak 703 orang PNS dan 585 orang PPPK.

Untuk latar belakang pendidikan tinggi lanjutan, kualifikasi Magister didominasi oleh unsur PNS sebanyak 2.747 orang, jauh melampaui jumlah PPPK yang hanya sebesar 284 orang. Pada level tertinggi, yaitu jenjang Doktoral, tercatat sebanyak 53 orang yang seluruhnya berasal dari kategori PNS, sedangkan pada kategori PPPK tidak terdapat pegawai dengan kualifikasi tersebut. Adapun untuk tingkat pendidikan dasar, jumlah pegawai cenderung rendah dengan rincian 12 PNS dan 30 PPPK lulusan SD, serta 23 PNS dan 52 PPPK lulusan SLTP. Secara umum, profil pendidikan ASN di Pemerintah Provinsi Riau saat ini terkonsentrasi pada lulusan Sarjana dan SLTA.

Komposisi dari kualifikasi pendidikan dianggap ideal untuk menjaga efisiensi anggaran, memastikan kepemimpinan berlapis, meningkatkan kualitas kebijakan maupun mendukung transformasi birokrasi digital. Implikasi kebijakan sumber daya manusia ASN agar dapat mencapai kondisi ideal, instansi perlu rekrutment selektif prioritas pada S1 dan S2, mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal yang terarah, talent pool yang berbasis kompetensi maupun pemetaan jabatan sesuai dengan kualifikasi.

2.2.4 ASN Menurut Usia

Profil ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau menurut Usia Pendidikan dapat dilihat pada gambar 2.4 di bawah yang dibagi menurut beberapa rentang usia mulai dari 18 hingga lebih dari 60 tahun.



Sumber: BKD Prov Riau, 2025 (diolah)
Gambar 2. 4 ASN Pemerintah Provinsi Riau Menurut Usia

Berdasarkan Gambar 2.4 di atas, struktur demografi ASN Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan polarisasi usia yang signifikan antara PNS dan PPPK. Tenaga PPPK mendominasi kelompok usia muda, terlihat dari tingginya angka pada rentang usia 18-30 tahun sebanyak 3.091 orang dan mencapai puncaknya pada kelompok usia 31-40 tahun dengan jumlah 7.641 orang, jauh melampaui

PNS yang hanya berjumlah 2.016 orang pada kategori tersebut. Sebaliknya, komposisi PNS terkonsentrasi pada kelompok usia yang lebih matang, di mana dominasi PNS mulai terlihat pada rentang usia 41-50 tahun dengan jumlah 6.120 orang dibandingkan 3.269 PPPK. Tren ini berlanjut pada kelompok usia 51 tahun ke atas (tertulis 51-50 pada grafik), di mana terdapat 4.568 PNS sementara jumlah PPPK menurun drastis menjadi 693 orang, dan tersisa sangat sedikit pegawai di atas 60 tahun (35 PNS dan 2 PPPK).

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Riau

Bab ini memetakan tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Riau yang menjadi target pencapaian kinerja kolektif. Sasaran ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dan merumuskan kebutuhan pengembangan SDM aparatur yang relevan dengan kebutuhan organisasi saat ini dan di masa depan.

HCDP ini berfokus pada pencapaian 7 (tujuh) Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Riau dalam konteks HCDP bersumber dari dokumen perencanaan formil, yaitu:

1. **Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045.
2. **Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Visi: “*Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)*”).
3. **Rencana Strategis (Renstra)** Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
4. **Kebutuhan organisasi di masa depan** yang diidentifikasi dari tantangan pembangunan daerah.

Untuk memastikan HCDP selaras dengan *core business* instansi, sasaran strategis RPJMD (sesuai Tabel 3.2 RPJMD) dipetakan ke dalam 7 Misi Kepala Daerah. HCDP ini dirancang untuk memastikan ASN memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengeksekusi seluruh misi tersebut.

Tabel 2. 1 Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026-2030

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1: Membangun Manusia Yang Sehat Dan Berkualitas Melalui Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata Dan Berkeadilan Serta Keberpihakan Pada Disabilitas Dan Kelompok Marginal	Meningkatkan sumber daya manusia sehat, cerdas, kreatif, unggul, sejahtera dan inklusi	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.06	10.18	10.30-10.31	10.42-10.43	10.55-10.56
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.63-13.64	13.70-13.71	13.77-13.79	13.84-13.86	13.91-13.93
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.58	74.87	75.16	75.44	75.73
		Meningkatnya kesetaraan gender & kualitas keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	81.32	81.90	82.39	82.81	83.16
Misi 2: Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Secara Optimal Dalam Kerangka Pembangunan Yang Berkelanjutan	1. Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing 2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan lestari	Meningkatnya kemandirian ekonomi & daya saing	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3.44	3.47	3.51	3.54	3.58
		Meningkatnya ketahanan pangan & kesejahteraan petani	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	73.46	75.04	76.64	78.28	79.95
			Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	175.67	182.65	189.91	197.45	205.3
		Peningkatan daya saing investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	32.92-33.09	32.84-33.18	32.76-33.28	32.68-33.37	32.60-33.46
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72.06	72.27	72.48	72.69	72.90
		Mengurangi Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBD)	Indeks	137.68	137.67	137.66	137.65	137.64
Misi 3: Memperkuat Infrastruktur Yang Handal, Guna Kemudahan Akses, Pelayanan Masyarakat Dan Perekonomian Serta Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah	Mewujudkan infrastruktur yang handal	Meningkatnya layanan transportasi	Rasio konektivitas transportasi	Poin	0.50	0.57	0.64	0.72	0.78
		Meningkatnya aksesibilitas	Tingkat kemantapan jalan	%	71.61	73.41	75.31	77.21	80.01
		Meningkatnya layanan infrastruktur dasar	Indeks layanan infrastruktur dasar	Indeks	76.19	77.27	78.35	79.43	80.51

Misi 4: Memerangi Kemiskinan, Pengangguran Dan Kesenjangan Antar Masyarakat Dan Antar Wilayah Serta Menjaga Keseimbangan Dan Pemerataan Pembangunan.	Menurunkan angka kemiskinan	Berkurangnya kesenjangan wilayah	Penduduk miskin desa	%	6.10	5.89	5.67	5.45	5.24
		Meningkatkan pemberdayaan & produktivitas	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3.39-3.60	3.23-3.54	3.08-3.48	2.94-3.42	2.80-3.36
		Meningkatnya perlindungan sosial	Persentase Penduduk (Q1) dengan jaminan sosial	%	25.74	27.10	28.46	29.82	31.18
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Berintegritas Serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dengan Dukungan Aparatur Yang Kompeten Dan Profesional Menuju Pemerintahan yang Berkelas Dunia (World Class Government).	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya budaya birokrasi berAKHLAK	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78.70	79.70	80.80	81.80	82.90
			Nilai Survey Indeks BerAKHLAK	Poin	73.64	75.00	76.00	77.00	78.00
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital	Nilai SAKIP	Poin	75.30	76.08	77.86	77.96	78.27
			Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN)	Indeks	52.55	53.60	54.65	55.70	56.75
Misi 6: Memperkuat Riset Dan Inovasi Serta Kerjasama Pembangunan Guna Akselerasi Capaian Pembangunan Melalui Multi Helix Partnership, Kerjasama Antar Daerah Maupun Kerjasama Antar Global	Penguatan ekosistem riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan daerah	Meningkatnya hasil riset dan inovasi	Indeks kapabilitas inovasi	Indeks	2.75	2.83	2.92	3.00	3.09
		Meningkatnya kerjasama pembangunan	Persentase Kerjasama pembangunan...	%	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
Misi 7: Mewujudkan Kebudayaan Melayu Sebagai Alat Pemersatu Dan Perwujudan Nilai - Nilai Kearifan Lokal Serta Mendorong Kehidupan Bermasyarakat Yang Kondusif, Aman, Nyaman Dan Adil Untuk Semua.	Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan pada kebudayaan Melayu yang agamis	Menguatnya nilai-nilai budaya Melayu	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	60.77-60.86	61.24-61.36	61.71-61.86	62.19-62.36	62.67-62.87
		Meningkatnya kerukunan sosial	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0
			Indeks Harmoni Religius	Indeks	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0

Sumber: diolah dari RPJMD Pemprov Riau 2025-2029

sasaran strategis RPJMD di atas tidak mungkin terwujud tanpa intervensi terencana terhadap kompetensi ASN sebagai pelaksana utama. HCDP ini berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan setiap ASN memiliki kapabilitas yang dibutuhkan untuk mengeksekusi setiap misi pembangunan:

1. **Dukungan HCDP terhadap Misi 1 (SDM):** ASN di sektor Pendidikan dan Kesehatan tidak hanya memerlukan kompetensi teknis (medis, pengajaran), tetapi juga kompetensi manajerial dalam mengelola layanan (Manajemen Puskesmas/Sekolah) dan kompetensi sosiokultural dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan berempati.
2. **Dukungan HCDP terhadap Misi 2 (Ekonomi):** ASN di Perangkat Daerah teknis (Pertanian, Perkebunan, Perindustrian, Pariwisata, Lingkungan Hidup dan Kehutanan) harus dibekali kompetensi teknis modern seperti *green economy*, *circular economy*, hilirisasi industri, dan agrikultur 4.0. Mereka juga perlu kompetensi manajerial untuk menarik investasi dan mengembangkan jejaring.
3. **Dukungan HCDP terhadap Misi 3 (Infrastruktur):** ASN di sektor PUPR dan Perhubungan membutuhkan penguatan kompetensi teknis dalam manajemen proyek konstruksi, perencanaan tata ruang (RDTR), skema KPBU, dan pengadaan barang/jasa yang akuntabel.
4. **Dukungan HCDP terhadap Misi 4 (Kemiskinan):** ASN di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Perangkat Daerah terkait harus memiliki kompetensi teknis dalam manajemen data kemiskinan (P3KE), desain program pemberdayaan, dan keterampilan pendampingan sosial. Kompetensi sosiokultural (empati) sangat krusial dalam melayani kelompok rentan.
5. **Dukungan HCDP terhadap Misi 5 (Tata Kelola Pemerintah):** Ini adalah *core business* HCDP, yang berfokus pada pengembangan kompetensi manajerial (kepemimpinan, manajemen kinerja), sosiokultural (BerAKHLAK, Budaya Melayu Riau), dan teknis inti (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Reformasi Birokrasi, Literasi Digital, Manajemen Aset) bagi seluruh ASN.
6. **Dukungan HCDP terhadap Misi 6 (Riset & Inovasi):** ASN, khususnya di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Badan Riset dan Inovasi Daerah serta Perangkat Daerah terkait, perlu dibekali kompetensi teknis dalam metodologi riset, analisis kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan manajemen inovasi sektor publik.

7. **Dukungan HCDP terhadap Misi 7 (Budaya & Kerukunan):** Seluruh ASN harus memiliki pemahaman mendalam (kompetensi sosiokultural) mengenai nilai Budaya Melayu Riau sebagai landasan pelayanan. ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Dinas Kebudayaan juga memerlukan kompetensi teknis dalam mediasi konflik dan pemajuan kebudayaan.

2.4 Arah Pembelajaran Instansi

Berdasarkan petunjuk **KEPLAN 604/K.1/HKM.02.2/2025**, Arah Pembelajaran Pemerintah Provinsi Riau ditetapkan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi untuk mendukung pencapaian seluruh Misi dan Sasaran Strategis RPJMD:

1. **Pendekatan *Top-Down*:** Arah pembelajaran strategis ditetapkan oleh Dewan Pengarah Pembelajaran (Sekretaris Daerah) berdasarkan Visi, Misi, dan Program Prioritas Kepala Daerah (7 Misi RPJMD). Fokusnya adalah pada kompetensi inti, manajerial, dan sosiokultural yang bersifat lintas-sektoral untuk mentransformasi birokrasi.
2. **Pendekatan *Bottom-Up*:** Kebutuhan pembelajaran teknis dan fungsional diidentifikasi dari setiap unit Perangkat Daerah (PD) berdasarkan analisis kesenjangan kinerja (*performance gap*) dan kesenjangan kompetensi (*competency gap*) yang spesifik di masing-masing urusan yang telah dilaksanakan pada Bulan Oktober 2025. Masing-masing ASN berkewajiban melengkapi data yang akan dihimpun pada tautan yang sudah disiapkan untuk masing-masing perangkat daerah.

Arah Pembelajaran ini dirancang secara bertahap sesuai Pentahapan Pembangunan RPJMD 2025-2029 (Tabel 3.2 RPJMD), dengan fokus yang berbeda setiap tahunnya untuk memastikan ASN siap mengeksekusi program prioritas pada tahun berjalan. Rincian Arah Pembelajaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Arah Pembelajaran Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026-2030

Misi RPJMD 2025-2029	Tahap I (2026): Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2027): Pemantapan Pembangunan	Tahap III (2028): Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Tahap IV (2029): Memantapkan Kesejahteraan	Tahap V (2030): Mewujudkan Visi "Riau Bedelau"
Misi 1: Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal	Arah Pembelajaran: Kompetensi perencanaan strategis infrastruktur dasar; Manajemen data stunting; <i>Kerjasama</i> lintas sektor (Dinkes, Disdik, PUPR); <i>Komunikasi</i> persuasif sosialisasi program; <i>Kepekaan</i> terhadap kebutuhan di daerah afirmasi.	Arah Pembelajaran: Manajemen layanan di daerah terpencil; <i>Orientasi pada hasil</i> (intensifikasi program stunting); Monitoring & evaluasi program pendidikan/kesehatan; <i>Pengembangan tim</i> layanan dasar.	Arah Pembelajaran: Manajemen program "1 Rumah 1 Sarjana"; Penjaminan mutu pendidikan/pesantren; <i>Pengambilan keputusan</i> berbasis data; <i>Adaptasi</i> terhadap teknologi pendidikan.	Arah Pembelajaran: Manajemen kesehatan masyarakat (promotif/preventif); Perluasan layanan berkualitas; <i>Integritas</i> dalam pengelolaan program; <i>Orientasi pada mutu</i> layanan.	Arah Pembelajaran: Manajemen layanan inklusif (disabilitas/marginal); Pengelolaan standar layanan tinggi (SLT); <i>Negosiasi</i> kemitraan layanan; <i>Perekat bangsa</i> dalam pemerataan layanan.
Misi 2: Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan	Arah Pembelajaran: Kompetensi teknis pembinaan IKM/UMKM; Analisis produktivitas pertanian/perkebunan; <i>Kerjasama</i> dengan dunia usaha/koperasi; <i>Komunikasi</i> pembinaan ekonomi kerakyatan.	Arah Pembelajaran: Pemasaran digital; Adopsi teknologi pertanian/pengolahan; Manajemen proses bisnis IKM; <i>Pengembangan jejaring</i> kemitraan; <i>Orientasi pada hasil</i> (perluasan industri).	Arah Pembelajaran: Hilirisasi hasil riset; Manajemen ketahanan pangan; <i>Inovasi</i> teknologi produktivitas; <i>Negosiasi</i> dagang; <i>Mengelola perubahan</i> (adopsi teknologi).	Arah Pembelajaran: Pengembangan hilirisasi komoditas unggulan; Manajemen rantai pasok; Diversifikasi produk; <i>Pengambilan keputusan</i> strategis (investasi).	Arah Pembelajaran: Pemasaran global; <i>Negosiasi</i> kerjasama internasional; Pengembangan bisnis berkelanjutan (SMEs); <i>Adaptasi</i> terhadap standar global.
Misi 3: Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah	Arah Pembelajaran: Perencanaan teknis infrastruktur (jalan, air, sanitasi); Manajemen proyek konstruksi; <i>Kerjasama</i> (Pusat/Kabupaten); <i>Kepekaan</i> sosial (pembangunan di daerah afirmasi).	Arah Pembelajaran: Manajemen aset infrastruktur; Teknik pemeliharaan jalan/bangunan; <i>Pengembangan tim</i> teknis; <i>Orientasi pada mutu</i> (standar infrastruktur).	Arah Pembelajaran: Tata ruang (kawasan strategis); <i>Urban planning</i> (kota tematik); <i>Mengelola perubahan</i> (penerapan teknologi infrastruktur); <i>Pengambilan keputusan</i> (prioritas).	Arah Pembelajaran: Manajemen pusat pertumbuhan (PKN/PKW); Mitigasi banjir/kawasan kumuh; <i>Problem solving</i> kompleks; <i>Integritas</i> dalam pengadaan.	Arah Pembelajaran: Perencanaan infrastruktur terintegrasi (antar-kawasan); Manajemen logistik; <i>Komunikasi</i> strategis (sinkronisasi program); <i>Pelayanan publik</i> (infrastruktur).
Misi 4: Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan.	Arah Pembelajaran: Manajemen data pensasaran (P3KE); Teknik pemberdayaan masyarakat; <i>Komunikasi empatik</i> ; <i>Integritas</i> (penyaluran bansos); <i>Kepekaan</i> sosial (di Kep. Meranti).	Arah Pembelajaran: Desain layanan sosial adaptif; Pengembangan ekonomi produktif keluarga miskin; <i>Kerjasama</i> (Baznas, stakeholder); <i>Orientasi pada hasil</i> (penurunan kemiskinan).	Arah Pembelajaran: Desain pelatihan keterampilan; Optimalisasi perlintsos; Pemetaan potensi desa (sektor basis); <i>Pengembangan jejaring</i> pemberdayaan.	Arah Pembelajaran: Desain perlintsos yang integratif dan adaptif; Pengembangan sektor basis perdesaan; <i>Mengelola perubahan</i> di tingkat komunitas; <i>Inovasi</i> sosial.	Arah Pembelajaran: Analisis makro pengentasan kemiskinan; Pengurangan kesenjangan; Pengembangan ekonomi desa inklusif; <i>Perekat bangsa</i> (keadilan sosial).

Misi RPJMD 2025-2029	Tahap I (2026): Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2027): Pemantapan Pembangunan	Tahap III (2028): Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Tahap IV (2029): Memantapkan Kesejahteraan	Tahap V (2030): Mewujudkan Visi "Riau Bedelau"
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia (<i>world class government</i>).	Arah Pembelajaran: Kapasitas dasar ASN (Core Values); Manajemen sarpras; <i>Integritas</i> ; <i>Pelayanan publik</i> dasar; <i>Komunikasi</i> efektif; <i>Kerjasama</i> tim.	Arah Pembelajaran: <i>Pelayanan publik</i> prima; Manajemen pemerintahan dasar; <i>Orientasi pada mutu layanan</i> ; <i>Pengembangan diri</i> dan orang lain.	Arah Pembelajaran: Transformasi digital; SPBE; Literasi TIK; <i>Adaptasi terhadap perubahan</i> (digitalisasi); <i>Inovasi</i> proses bisnis; Keamanan siber.	Arah Pembelajaran: Reformasi birokrasi; Analisis jabatan; Sistem merit; Manajemen talenta; <i>Kepemimpinan</i> (Leadership); <i>Pengambilan keputusan</i> .	Arah Pembelajaran: <i>World Class Government</i> (standar internasional); <i>Benchmarking</i> ; <i>Integritas</i> tinggi; <i>Negosiasi</i> (internasional); <i>Pelayanan publik</i> berkelas dunia.
Misi 6: Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui multi helix partnership, kerjasama antar daerah maupun kerjasama global.	Arah Pembelajaran: Metodologi riset; Inovasi digital; <i>Public-Private Partnership</i> (PPP); <i>Negosiasi</i> kemitraan; <i>Komunikasi</i> hasil riset; <i>Berpikir analitis</i> .	Arah Pembelajaran: Pengembangan ekosistem riset; Manajemen inovasi; <i>Kerjasama</i> (dunia usaha); <i>Orientasi pada hasil</i> (penerapan riset).	Arah Pembelajaran: <i>Evidence-based policy</i> (pemanfaatan riset); <i>Policy brief</i> ; Analisis data; <i>Pengambilan keputusan</i> berbasis riset; <i>Inovasi</i> kebijakan.	Arah Pembelajaran: Membangun atmosfer/budaya riset; <i>Mengelola perubahan</i> (budaya kerja); <i>Kepemimpinan</i> inovatif; <i>Pengembangan tim</i> riset.	Arah Pembelajaran: <i>Kerjasama</i> (Perguruan Tinggi/global); Manajemen SDM unggul; <i>Foresight planning</i> ; <i>Negosiasi</i> kemitraan riset global.
Misi 7: Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua.	Arah Pembelajaran: Manajemen sarpras budaya/agama; Promosi kebudayaan; Mediasi konflik; <i>Perekat bangsa</i> (kerukunan); <i>Kepekaan</i> sosial dan budaya.	Arah Pembelajaran: Manajemen aset budaya; Manajemen <i>event</i> (budaya/agama); <i>Komunikasi</i> lintas budaya; <i>Kerjasama</i> dengan lembaga adat/agama.	Arah Pembelajaran: Pemberdayaan kelembagaan adat/agama; <i>Pengembangan jejaring</i> komunitas; <i>Pelayanan publik</i> (bidang kebudayaan/agama).	Arah Pembelajaran: Pembinaan masyarakat (budaya/agama); Fasilitasi kegiatan keagamaan/adat; <i>Orientasi pada hasil</i> (pemantapan fungsi lembaga).	Arah Pembelajaran: Manajemen fungsi kelembagaan; Resolusi konflik; <i>Perekat bangsa</i> (keadilan, kerukunan); <i>Komunikasi</i> strategis kebangsaan.

Sumber: Tim HCDP

2.5 Kondisi ASN dan tantangan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus didukung oleh kualitas ASN yang memadai. Kualitas ASN menentukan efektivitas terhadap kualitas pelayanan publik maupun pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau. Kompetensi ASN di Pemerintah Provinsi Riau secara umum berada pada level cukup, namun belum sepenuhnya selaras dengan tuntutan pemerintah modern dan strategi pembangunan daerah. Pegawai cukup memahami prosedur dan regulasi dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan operasional. Perbedaan kompetensi (*gap competency*) masih cukup lebar jika ditinjau antar perangkat daerah, antar jabatan maupun antar wilayah.

Adapun kondisi saat ini terkait kompetensi manajerial pegawai ASN Provinsi Riau memahami prosedur dan regulasi, kepatuhan relatif baik dan pengalaman birokrasi cukup panjang, namun kemampuan berpikir strategis masih terbatas, orientasi kinerja dari segi *outcome* dan *impact* belum kuat serta kepemimpinan perubahan (*change leadership*) masih lemah. Pekerjaan yang dilakukan masih dominan administratif belum sepenuhnya transformasional.

Di level kompetensi teknis, ASN Pemerintah Provinsi Riau menguasai tugas rutin sesuai tugas, fungsi dan kompetensi teknis sektoral tersedia pada perangkat daerah tertentu. Pada level teknis, penguasaan analisis kebijakan dan data masih tergolong rendah, keterampilan digital yang dikuasai oleh pegawai juga belum merata, dan spesialisasi teknis terbatas pada beberapa individu, sehingga kondisi umum masih terbantu untuk operasional namun kurang untuk inovasi.

Pada kompetensi sosial kultural kondisi saat ini pegawai ASN cukup memahami konteks lokal dan budaya masyarakat Riau dan hubungan vertikal relatif baik, namun koordinasi lintas perangkat daerah masih lemah dan kolaborasi dengan pihak non-pemerintah masih terbatas, komunikasi publik juga belum optimal. Adaptif secara sosial, namun lemah secara kolaboratif.

Adapun faktor yang mempengaruhi kondisi kompetensi di Pemerintah Provinsi Riau disebabkan pola pengembangan kompetensi belum berbasis kebutuhan strategis, manajemen talenta ASN belum optimal masih pada tahap profiling dan budaya kerja birokratis dan hierakis, diklat masih dominan klasikal dan minim pembelajaran berbasis praktik, pelaksanaan magang masih sedikit dan masih terbatas didalam wilayah Provinsi Riau, perlunya penguatan dalam pelaksanaan *coaching* dan mentoring secara keseluruhan di setiap perangkat daerah. Adapun dampak terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Riau memberikan

implementasi kebijakan strategies yang kurang optimal, program inovatif terbatas, pelayanan publik belum merata secara kualitas dan respon terhadap isu strategies seperti lingkungan dan digitalisasi cenderung lambat. Kondisi kompetensi ASN di Provinsi Riau belum sepenuhnya siap mendukung transformasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Tantangan utama terletak pada kompetensi strategies, digital dan kolaboratif bukan pada kepatuhan administratif.

Bab III

Rencana Kebutuhan Pembelajaran Strategis Instansi

Bab ini menguraikan analisis kebutuhan pembelajaran strategis instansi (Pemerintah Provinsi Riau) sebagai dasar penyusunan HCDP, mengidentifikasi rencana pengembangan kompetensi strategis, serta merumuskan kerangka monitoring dan evaluasi.

3.1 Kebutuhan Pembelajaran Pegawai Instansi

3.1.1 Diagnosis Kebutuhan Pembelajaran Instansi

Sesuai amanat KEPLAN 604/K.1/HKM.02.2/2025, diagnosis kebutuhan pembelajaran strategis instansi diidentifikasi dari profil organisasi, mandat, *core business*, serta tujuan dan sasaran strategis. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Riau, *core business* utama adalah pelaksanaan 7 (tujuh) Misi RPJMD 2025-2029 untuk mewujudkan visi "Riau Bedelau".



Sumber: Dokumentasi Tim Penyusun HCDP, 2025

Gambar 2.5 Pelaksanaan Inventarisasi Rencana Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025

Diagnosis ini berfokus pada dua hal utama:

1. **Critical Occupational List (COL) / Jabatan Kritis:** Jabatan-jabatan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap pencapaian 7 Misi RPJMD. Ini mencakup Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sebagai pengambil kebijakan, Administrator dan Pengawas sebagai manajer lini, serta Jabatan Fungsional

teknis di bidang-bidang prioritas (misal: Analis Kebijakan, Perencana, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Widyaiswara, Auditor, serta Fungsional Teknis di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi).

- Jenis Kebutuhan Kompetensi:** Kebutuhan kompetensi ini dikelompokkan untuk memastikan ASN siap menjalankan peran strategis dan teknis.

a. Core Competencies (Kompetensi Inti)

Kompetensi ini wajib dimiliki seluruh ASN Pemprov Riau untuk mendukung Visi "Riau Bedelau" dan Misi 5 (Tata Kelola Pemerintahan). Kompetensi ini mencerminkan identitas dan budaya kerja yang diharapkan, berdasarkan PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Kompetensi manajerial dan sosial kultural

Kompetensi Manajerial		
No	Nama Kompetensi	Definisi
1	Integritas	Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya.
2	Kerjasama	Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.
3	Komunikasi	Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis; memastikan pemahaman; mendengarkan secara aktif dan efektif mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
4	Orientasi pada Hasil	Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi.
5	Pelayanan Publik	Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara professional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/golongan/partai politik
6	Pengembangan Diri dan dan Orang Lain	Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri; menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya.

7	Mengelola Perubahan	Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.
8	Pengambilan Keputusan	Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
Kompetensi Sosial Kultural		
No	Nama Kompetensi	Definisi
1	Perekat Bangsa	Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat; mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri, menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Kompetensi ini juga dikategorikan sebagai kompetensi yang bersifat umum (generik) dan diperlukan di semua tingkatan jabatan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif yaitu dengan berlandaskan Nilai-nilai Budaya Melayu dengan turut meningkatkan profesionalitas.

Kompetensi generik yang meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sesuai dengan standar kompetensi jabatan serta ketentuan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Kompetensi ini berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif adaptif, berintegritas, serta selaras dengan nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat Riau.

Berdasarkan data kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau, jumlah pejabat struktural yang menjadi sasaran pemenuhan kompetensi generik terdiri atas pejabat Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 28 orang, pejabat Eselon III (Jabatan Administrator) sebanyak 264 orang dan pejabat Eselon IV (Jabatan Pengawas) sebanyak 360 orang. Seluruh

pejabat struktural tersebut menjadi target pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural, mengingat kompetensi ini bersifat wajib dan melekat pada jabatan struktural yang diemban.

Pemenuhan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural dilakukan melalui jalur pengembangan kompetensi kepemimpinan sesuai jenjang jabatan, yaitu Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) bagi pejabat Eselon II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) bagi pejabat Eselon III, dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bagi pejabat Eselon

IV. Program-program tersebut dirancang untuk membangun kemampuan kepemimpinan strategis, manajerial operasional, pengambilan keputusan, pengelolaan kinerja, serta pengelolaan perubahan di lingkungan organisasi perangkat daerah.

Selain kompetensi manajerial, pengembangan kompetensi sosial kultural juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi generik pejabat struktural. Kompetensi sosial kultural, termasuk peran ASN sebagai perekat bangsa, dibutuhkan untuk memperkuat sikap toleransi, kemampuan bekerja dalam keberagaman, serta sensitivitas sosial dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Penguatan kompetensi ini diintegrasikan dalam pelaksanaan PKN II, PKA, dan PKP, serta melalui berbagai bentuk pengembangan kompetensi pendukung lainnya.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Riau telah memfasilitasi pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi pejabat struktural melalui pelaksanaan PKN/PKA/PKP dengan jumlah peserta masing-masing 2 (dua) orang Eselon II, 11 (sebelas) orang Eselon III, dan 48 (empat puluh delapan) orang Eselon IV. Fasilitasi ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan standar kompetensi jabatan sekaligus langkah awal dalam menutup kesenjangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural.

Ke depan, kebutuhan pengembangan kompetensi generik sebagaimana dimaksud akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan selama periode HCDP Provinsi Riau Tahun 2026–2030, dengan target seluruh pejabat struktural memenuhi kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai standar yang ditetapkan.

b. *Technical Competencies* (Kompetensi Teknis)

Kompetensi teknis atau dikategorikan sebagai kompetensi spesifik merupakan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi urusan (Perangkat Daerah) dan mendukung pencapaian Misi 1-7 RPJMD. Kebutuhan ini dipetakan secara rinci pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3. 2 Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Peningkatan Pendidikan
ASN Provinsi Riau Tahun 2026-2030**

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Akuntansi (Sektor Publik) 2. Hukum (Pidana/Perdata/ Tata Negara) 3. Administrasi Negara 4. Manajemen 5. Ilmu Pemerintahan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Ahli/Terampil 2. Teknis Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 3. Audit Ketaatan (Compliance Audit) 4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Digital 5. Tata Cara Audit Operasional Dasar - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Ekonomi Pembangunan 2. Statistika 3. Manajemen Keuangan Daerah 4. Teknik Sipil (untuk Audit Fisik) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Audit Barang Milik Daerah (BMD) & Aset 2. Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa 3. Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 4. Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi 5. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Dasar - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Komputer Akuntansi 3. Sains Data (Data Science) 4. Hukum Siber (Cyber Law) 5. Manajemen Sistem Informasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Audit Sistem Informasi & SPBE (Information System Audit) 2. Analisis Big Data Pengawasan (<i>Continuous Audit</i>) 3. Forensik Digital (<i>Digital Forensics</i>) untuk Auditor 4. Audit Keamanan Informasi (<i>Cyber Security Audit</i>) 5. Penggunaan Aplikasi Pengawasan (E-Audit) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Akuntansi Forensik 2. Kebijakan Publik 3. Manajemen Sumber Daya Manusia 4. Kriminologi 5. Ilmu Komunikasi (Negosiasi) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Audit Investigasi & Penghitungan Kerugian Negara (PKN) 2. Sertifikasi <i>Certified Forensic Auditor</i> (CFrA) 3. Peran Auditor sebagai Consulting Partner (Konsultansi) 4. Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik 5. Teknik Wawancara Investigatif (BAP) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Ilmu Lingkungan 2. Studi Pembangunan Berkelanjutan 3. Hubungan Internasional 4. Manajemen Strategis 5. Kajian Anti Korupsi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Audit Lingkungan (<i>Environmental Auditing</i>) & <i>Green Economy</i> 2. Audit Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 3. Sertifikasi Internasional (CIA, CISA, CFE) 4. <i>Quality Assurance</i> & Telaah Sejawat (Peer Review) 5. Kepemimpinan Strategis Pengawasan (<i>Strategic Oversight</i>) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Manajemen (SDM/Keuangan) 2. Ilmu Pemerintahan 3. Administrasi Negara 4. Hukum Administrasi Negara 5. Kearsipan 6. Teknologi Informasi 7. Psikologi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Teknis Pengelolaan Kinerja ASN 2. Diklat Manajemen Aset & BMD 3. Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis & Digitalisasi 4. Pelatihan Tata Naskah Dinas Elektronik 5. Pelatihan Bendahara & Keuangan Daerah 6. Pelatihan Pelayanan Prima 7. Bimtek Penyusunan SOP & Standar Pelayanan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Ilmu Administrasi Publik 2. Teknik Informatika (Siber) 3. Psikologi (Profesi) 4. Statistika / Data Science 5. Ilmu Komunikasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Manajemen Talenta ASN 2. Bimtek Penyusunan HCDP 3. Diklat Asesor SDM Aparatur (Assessment Center) 4. Pelatihan Analisis Jabatan (Anjab) & ABK 5. Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian (SIASN) 6. Pelatihan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan) 7. Diklat Teknis Manajemen Seleksi (CAT System) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Kebijakan Publik 3. Hukum 4. Psikologi Industri & Organisasi 5. Sistem Informasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Cybersecurity & Keamanan Data SPBE 2. Pelatihan People Analytics & Big Data HR 3. Pelatihan Advokasi Kebijakan Kepegawaian 4. Bimtek Audit Manajemen ASN & Investigatif 5. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Bangkom 6. Diklat Public Speaking & Kehumasan 7. Pelatihan Manajemen Resiko Sektor Publik - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Ilmu Administrasi 2. Kebijakan Publik 3. Manajemen Inovasi 4. Sosiologi (Resolusi Konflik) 5. Pengembangan Masyarakat 6. Psikologi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Coaching & Mentoring untuk Pimpinan 2. Pelatihan Manajemen Konflik & Disiplin Pegawai 3. Bimtek Penyelesaian Sengketa Kepegawaian 4. Pelatihan Budaya Kerja BerAKHLAK & Budaya Melayu 5. Diklat Manajemen Perubahan 6. Pelatihan Kepemimpinan Administrator 7. Workshop Kesehatan Mental di Lingkungan Kerja - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Ilmu Lingkungan 3. Studi Pembangunan 4. Psikologi 5. Hubungan Internasional - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. <i>Benchmarking</i> Sistem Merit & <i>World Class Bureaucracy</i> 2. Pelatihan <i>Strategic Workforce Planning</i> 3. Workshop <i>Green Government & Eco-Office</i> 4. Pelatihan Audit Kinerja Jabatan Fungsional 5. Pengembangan Assessment Digital 6. Evaluasi Dampak Kebijakan Manajemen ASN 7. Pelatihan Kepemimpinan Strategis - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Administrasi Perkantoran 2. Akuntansi (Audit Keuangan) 3. Manajemen 4. Ilmu Pemerintahan 5. Kearsipan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknis Pengawasan & Audit Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) 2. Tata Kelola Administrasi Hibah & Bansos Ormas 3. Manajemen Arsip Vital Dokumen Politik 4. Tata Naskah Dinas & Pelayanan <i>Front Office</i> 5. Dasar-Dasar Wawasan Kebangsaan bagi ASN - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Hukum (Tata Negara/Pidana) 2. Sosiologi (Konflik Sosial) 3. Psikologi Massa 4. Ilmu Politik 5. Ekonomi Pembangunan (Ketahanan Ekonomi) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sertifikasi Narasumber Pendidikan Politik Masyarakat 2. Teknik Deteksi Dini & Cegah Dini Konflik Sosial (Intelijen Dasar) 3. Verifikasi & Validasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 4. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 5. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan & Bela Negara - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	Informatika / Sistem Informasi 2. Ilmu Komunikasi (Digital) 3. Sains Data (<i>Data Science</i>) 4. Keamanan Siber (<i>Cyber Security</i>) 5. Statistik Politik - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Analisis Konten Media Sosial (<i>Hoax</i> & Ujaran Kebencian) 2. Sistem Informasi Ormas & Partai Politik Terintegrasi 3. Keamanan Siber Data Politik & Intelijen Daerah 4. Analisis Big Data Isu Strategis Daerah 5. Kampanye Digital Wawasan Kebangsaan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Kebijakan Publik 2. Magister Ilmu Pemerintahan 3. Manajemen Sumber Daya Manusia 4. Hukum Administrasi Negara 5. Manajemen Konflik - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sertifikasi Analis Kebijakan Publik (Jafung AK) 2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 3. Teknik Negosiasi & Mediasi Konflik Sosial 4. Widyaiswara Bidang Sosial Politik 5. Manajemen Risiko Politik & Keamanan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Hubungan Internasional 2. Kajian Strategik Ketahanan Nasional 3. Studi Pembangunan Berkelanjutan 4. Antropologi Budaya 5. Manajemen Strategis - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2. Strategi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Agama 3. Kepemimpinan Strategis Kewaspadaan Nasional 4. Penanganan Radikalisme & Terorisme Berkelanjutan 5. Kerjasama Antar Lembaga Intelijen Daerah (Kominda) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Manajemen Bencana (<i>Disaster Management</i>) 2. Teknik Sipil (Rekonstruksi) 3. Administrasi Negara 4. Manajemen Logistik 5. Kesehatan Masyarakat - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Dasar-Dasar Manajemen Bencana & Operasi SAR 2. Teknik Pemadaman Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla) 3. Pelatihan Reaksi Cepat (<i>Rapid Response</i>) & PPGD 4. Manajemen Logistik & Peralatan Kebencanaan 5. Penggunaan Aplikasi Pelaporan Bencana Dasar - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Geografi/Geologi 2. Teknik Lingkungan 3. Psikologi (Trauma Healing) 4. Perencanaan Wilayah (Mitigasi) 5. Ilmu Komunikasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana 2. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) 3. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (ICS) 4. Pencegahan & Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat (CBDRM) 5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Meteorologi & Klimatologi 3. Sains Data (Pemetaan) 4. Teknik Geodesi 5. Teknologi Pendidikan (Edukas) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi Geografis (GIS) Pemetaan Rawan Bencana 2. Operasional <i>Early Warning System</i> (EWS) Digital 3. Pemanfaatan Drone untuk Pemantauan Hotspot & Bencana 4. Analisis Data Cuaca & Iklim untuk Prediksi Bencana 5. Manajemen Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Cerdas - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Manajemen Bencana 2. Kebijakan Publik 3. Psikologi Klinis 4. Sosiologi Pedesaan 5. Hukum Tata Negara - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Manajemen Krisis 2. Komunikasi Krisis & Hubungan Media saat Bencana 3. <i>Trauma Healing & Dukungan Psikososial</i> 4. Manajemen Koordinasi Lintas Sektor (Pentahelix) 5. Advokasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Manajemen Lingkungan (Gambut) 3. Hubungan Internasional 4. Kajian Strategik Ketahanan Nasional 5. Kehutanan (Konservasi) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Adaptasi Perubahan Iklim & <i>Green Disaster Recovery</i> 2. Manajemen Ekosistem Gambut Berkelanjutan 3. Kerjasama Internasional Penanggulangan Bencana 4. Perencanaan Kota Tangguh Bencana (<i>Resilient City</i>) 5. Standar Internasional Penanganan Bencana (INSARAG) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Perpajakan (Fiskal) 2. Akuntansi 3. Manajemen Keuangan 4. Ilmu Ekonomi 5. Ilmu Hukum - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Teknis Penilaian Objek Pajak Daerah 2. Diklat Juru Sita Pajak Daerah & Penagihan Pajak 3. Bimtek Pengelolaan Retribusi Daerah & Pendapatan Lain-lain 4. Pelatihan Analisis Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 5. Diklat Pemeriksaan Pajak Daerah 6. Pelatihan Pelayanan Prima SAMSAT - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Sistem Informasi 2. Statistika 3. Ekonomi Pembangunan 4. Hukum Administrasi Negara 5. Penilai (<i>Appraisal</i>) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan <i>Data Analytics</i> untuk Optimalisasi PAD 2. Bimtek Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 3. Pelatihan Manajemen Risiko Pendapatan Daerah 4. Diklat Penyusunan Regulasi Pajak & Retribusi Daerah 5. Pelatihan Pengawasan & Pengendalian Penerimaan Daerah 6. Workshop Intensifikasi & Ekstensifikasi Pajak Daerah - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Aset/Properti 2. Teknik Informatika 3. Administrasi Publik 4. Kebijakan Publik 5. Sains Data - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan <i>Cybersecurity & Keamanan Data</i> Wajib Pajak 2. Bimtek Integrasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) & SAMSAT Online 3. Pelatihan Audit Forensik Pendapatan Daerah 4. Diklat Penilaian Bisnis & Properti untuk Pajak 5. Pelatihan Manajemen Piutang Pajak Daerah 6. Workshop Strategi Komunikasi & Penyuluhan Perpajakan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Strategis 2. Ekonomi Syariah 3. Hubungan Internasional (Kerjasama) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Negosiasi & Resolusi Sengketa Pajak 2. Workshop Inovasi Layanan Pendapatan Berbasis Digital (<i>Fintech</i>) 3. Pelatihan <i>Change Management</i> Organisasi Pendapatan 4. Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) Sektor Keuangan 5. Bimtek Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Daerah 6. Pelatihan Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) Wajib Pajak - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Studi Pembangunan 2. Ilmu Lingkungan (Pajak Lingkungan) 3. Manajemen SDM 4. Hukum Bisnis - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Benchmarking Sistem Administrasi Perpajakan Modern (<i>Best Practice</i>) 2. Pelatihan <i>Strategic Revenue Planning</i> 3. Workshop <i>Green Tax</i> & Insentif Fiskal Lingkungan 4. Pelatihan Audit Kinerja Organisasi Pendapatan 5. Pengembangan Big Data Pendapatan Daerah Terintegrasi 6. Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor Fiskal - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Akuntansi 2. Manajemen Keuangan 3. Ekonomi Pembangunan 4. Administrasi Pemerintahan 5. Ilmu Hukum - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Bimtek Implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) 2. Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah & Bendahara Tersertifikasi 3. Pelatihan Sensus dan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) 4. Bimtek Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) & ASB 5. Pelatihan Perpajakan Pemerintah Daerah 6. Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Aset 2. Akuntansi Sektor Publik 3. Ilmu Ekonomi 4. Hukum Bisnis/Perdata 5. Statistika - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Penilaian Aset Daerah 2. Bimtek Reviu dan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 3. Pelatihan Manajemen Kas Daerah & Optimalisasi <i>Idle Cash</i> 4. Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pemanfaatan & Pemindahtanganan) 5. Pelatihan Analisis Laporan Keuangan 6. Bimtek Penyusunan KUA-PPAS - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Sains Data (Data Science) 3. Manajemen Keuangan Daerah 4. Kebijakan Publik - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan <i>Big Data Analytics</i> Keuangan Daerah 2. Bimtek Keamanan Informasi Keuangan 3. Pelatihan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 4. Digitalisasi Arsip Keuangan dan Aset 5. Pelatihan Manajemen Risiko Keuangan Sektor Publik 6. Diklat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) & Pengadaan Barang Jasa - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Strategis 2. Manajemen Inovasi 3. Ekonomi Syariah 4. Psikologi Industri/SDM - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Manajemen Perubahan Keuangan 2. Workshop Inovasi Pembiayaan Daerah (<i>Creative Financing</i>) 3. Pelatihan Penyelesaian Sengketa Aset & Legal Audit 4. Pelatihan Pelayanan Prima (<i>Service Excellence</i>) Stakeholder Keuangan 5. Bimtek Strategi Peningkatan PAD - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Ekonomi Lingkungan (<i>Green Economy</i>) 2. Studi Pembangunan 3. Manajemen Sumber Daya Manusia 4. Hubungan Internasional - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Workshop Penganggaran Berwawasan Lingkungan 2. Pelatihan Manajemen Aset Berkelanjutan 3. Benchmarking Tata Kelola Keuangan Terbaik 4. Pelatihan <i>Strategic Financial Leadership</i> 5. Bimtek Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset 6. Pelatihan Penerapan Standar Akuntansi Internasional (IPSAS) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Teknologi Pendidikan (Kurikulum) 2. Manajemen SDM 3. Administrasi Negara 4. Hukum (Regulasi Diklat) 5. Psikologi Pendidikan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK/TNA) 2. Manajemen Akreditasi Lembaga Pelatihan 3. Metodologi Pembelajaran bagi Widyaiswara (ToT) 4. Pengelolaan Kinerja ASN & Angka Kredit Jabatan Fungsional 5. Sertifikasi Pengelola Lembaga Diklat - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Evaluasi Pendidikan 2. Manajemen Mutu Terpadu 3. Ilmu Pemerintahan 4. Perpustakaan / Kearsipan 5. Sosiologi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Penjaminan Mutu Lembaga Diklat 2. Penyusunan Kurikulum & Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi 3. Sertifikasi Asesor Kompetensi (Metodologi Asesmen) 4. Teknik Evaluasi Pasca Diklat (<i>Impact Analysis</i>) 5. Manajemen Perpustakaan Digital BPSDM - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Desain Komunikasi Visual (Multimedia) 3. Sains Data 4. Teknologi Instruksional 5. Manajemen Sistem Informasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pengelolaan <i>Learning Management System (LMS) & E-Learning</i> 2. Pengembangan Konten Pembelajaran Digital (Video/Multimedia) 3. Implementasi <i>Riau Corporate University</i> (Riau Corpu) 4. Analisis Data Kompetensi ASN Berbasis Digital 5. Desain Grafis untuk Bahan Ajar Interaktif - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Pengembangan SDM 2. Kebijakan Publik 3. Manajemen Inovasi 4. Psikologi Industri & Organisasi 5. Ilmu Komunikasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. <i>Coaching & Mentoring</i> Profesional (Sertifikasi Coach) 2. Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) 3. Public Speaking & Teknik Presentasi Efektif Widyaiswara 4. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 5. Inovasi Andragogi Pembelajaran Orang Dewasa - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Studi Pembangunan Berkelanjutan Internasional (Kerjasama Diklat) 3. Manajemen Strategis 4. Kajian Lingkungan 5. Manajemen Pendidikan Tinggi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Integrasi SDGs dalam Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan 2. Kerjasama & Jejaring Diklat Internasional (Global Partnership) 3. <i>Strategic Leadership</i> untuk Pengembangan Kompetensi 4. Pengelolaan <i>Green Training Center</i> 5. Standardisasi Kompetensi ASN Menuju Birokrasi Berkelas Dunia - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Ekonomi Pembangunan 2. Ilmu Pemerintahan 3. Manajemen 4. Akuntansi Sektor Publik 5. Teknik Sipil (Infrastruktur Dasar) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) 2. Implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Modul Perencanaan 3. Analisis Standar Belanja (ASB) & Standar Harga Satuan 4. Tata Cara Pengendalian & Evaluasi (Monev) Dasar 5. Pelayanan Administrasi Perkantoran Modern - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) 2. Kebijakan Publik 3. Statistika Terapan 4. Sosiologi (Pemberdayaan Masyarakat) 5. Hukum Tata Negara - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) & IKD 2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 3. Teknik Fasilitasi Musrenbang Partisipatif 4. Analisis Kelayakan Proyek Investasi Publik 5. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Sains Data (Data Science) 3. Geografi / Geomatika 4. Desain Komunikasi Visual (Visualisasi Data) 5. Manajemen Sistem Informasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Analisis Big Data untuk Kebijakan (Data Driven Policy) 2. Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk Tata Ruang 3. Dashboard Eksekutif & Visualisasi Data Perencanaan 4. Pengembangan E-Planning & E-Budgeting Terintegrasi 5. Audit Kualitas Data Statistik Sektoral - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Perencanaan Pembangunan 2. Psikologi Industri & Organisasi 3. Ilmu Komunikasi (Strategis) 4. Manajemen Inovasi 5. Ekonomi Regional - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator & Pengawas (PKA/PKP) 2. Design Thinking untuk Inovasi Kebijakan Publik 3. Teknik Negosiasi & Kolaborasi Lintas Sektor (Pusat-Daerah) 4. Manajemen Perubahan (Change Management) Birokrasi 5. Public Speaking & Advokasi Kebijakan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Studi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) 2. Ekonomi Lingkungan (Green Economy) 3. Hubungan Internasional 4. Manajemen Strategis 5. Kajian Kependudukan (Demografi) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (Riau Hijau) 2. Integrasi SDGs (Sustainable Development Goals) dalam Dokumen Daerah 3. Strategic Foresight (Perencanaan Skenario Masa Depan) 4. Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim 5. Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. S2/S3 Kebijakan Publik 2. S2/S3 Ilmu Pemerintahan 3. Statistika 4. Manajemen Riset 5. Administrasi Publik - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) 2. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) & Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 3. Dasar-Dasar Analisis Kebijakan Berbasis Bukti (<i>Evidence Based Policy</i>) 4. Teknis Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI/Paten) 5. Tata Kelola Kelitbangan & Etika Riset - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S2/S3 Ekonomi Pembangunan 2. S2/S3 Sosiologi (Rekayasa Sosial) 3. Teknik Industri (Manajemen Inovasi) 4. Hukum (Perancangan Regulasi) 5. Ilmu Komunikasi (Diseminasi) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Institusional & Terlisensi BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) 2. Manajemen Inkubator Bisnis & Teknologi 3. Audit Teknologi & Kesiapterapan Teknologi (TKT) 4. Teknik Advokasi Kebijakan Hasil Riset 5. Pengelolaan Jurnal Ilmiah Terakreditasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S3 Teknik Sipil (<i>Sustainable Construction Materials</i>) 2. S2/S3 Sains Data (<i>Data Science</i>) 3. Teknik Informatika 4. Sistem Informasi 5. Teknik Lingkungan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Analisis <i>Big Data</i> untuk Riset Kebijakan (<i>Data Driven Policy</i>) 2. Program Detasering / Pertukaran Peneliti ke BRIN 3. Manajemen Repositori Ilmiah Digital & <i>Knowledge Management</i> 4. Pemanfaatan AI (<i>Artificial Intelligence</i>) dalam Riset 5. Riset Material Konstruksi Berkelanjutan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S3 Manajemen Inovasi 2. S3 Studi Pembangunan 3. Psikologi Industri 4. Ekonomi Kreatif 5. Manajemen Strategis - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Manajemen Riset 2. Valuasi Ekonomi & Komersialisasi Produk Inovasi (Hilirisasi) 3. Strategi Kolaborasi Riset <i>Pentahelix</i> 4. Manajemen Perubahan Ekosistem Inovasi Daerah 5. Teknik Negosiasi Kerjasama Riset Industri - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S3 Ilmu Lingkungan (<i>Green Economy</i>) 2. Hubungan Internasional 3. Kajian Strategik Ketahanan Nasional 4. Antropologi 5. Kebijakan Sains & Teknologi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Riset & Kajian Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) dan Biru 2. Strategi Riset Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 3. Diplomasi Sains (<i>Science Diplomacy</i>) & Jejaring Global 4. Perencanaan Strategis Pembangunan Riau 2045 Berbasis Riset 5. Evaluasi Dampak Kebijakan Jangka Panjang - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Teknik Pertambangan 2. Teknik Geologi 3. Teknik Elektro (Arus Kuat) 4. Manajemen Energi 5. Administrasi Perkantoran - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Diklat Inspektur Tambang (Pengawasan Pertambangan) 2. Pelatihan Teknis Pengelolaan Air Tanah & Sumur Bor 3. Bimtek Audit Energi Dasar & Konservasi Energi 4. Pelatihan K3 Pertambangan & Keselamatan Ketenagalistrikan 5. Diklat Pengawasan Pemasangan Instalasi Listrik 6. Pelatihan Manajemen Administrasi Perkantoran ESDM - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Teknik Lingkungan 2. Hukum Energi & Pertambangan 3. Sistem Informasi 4. Manajemen Aset 5. Teknik Perminyakan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Pemetaan Geologi & GIS Tingkat Lanjut 2. Bimtek Manajemen Izin Usaha Pertambangan 3. Diklat Reklamasi Lahan Pasca Tambang & Lingkungan 4. Pelatihan Perhitungan Neraca Sumber Daya Mineral & Batubara 5. Pelatihan Manajemen Aset Infrastruktur Ketenagalistrikan 6. Bimtek Pengawasan Distribusi LPG & BBM - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Energi Terbarukan (<i>Renewable Energy</i>) 2. Sains Data (<i>Data Science</i>) 3. Kebijakan Publik 4. Geofisika 5. Ekonomi Pembangunan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan <i>Smart Grid System</i> & Teknologi Penyimpanan Energi 2. Bimtek Analisis Data Sektor ESDM 3. Digitalisasi Pelayanan Perizinan ESDM (<i>ESDM One Map</i>) 4. Pelatihan Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam 5. Diklat Mitigasi Bencana Geologi (Gerakan Tanah/Longsor) 6. Pelatihan Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Inovasi 2. Ekonomi Sumber Daya Alam 3. Sosiologi (Resolusi Konflik) 4. Psikologi Industri 5. Komunikasi Pembangunan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Manajemen Konflik Pertambangan & CSR 2. Workshop Inovasi Bioenergi & Pemanfaatan Biomassa 3. Pelatihan Change Management Sektor Energi 4. Diklat <i>Public Speaking</i> & Advokasi Kebijakan Energi 5. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang 6. Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) Sektor ESDM - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Studi Pembangunan Internasional (Diplomasi Energi) 3. Ilmu Lingkungan (Kajian Strategis) 4. Manajemen Strategis 5. Teknik Kimia (Hilirisasi) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. <i>Workshop Carbon Trading</i> & Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon 2. Pelatihan Formulasi Kebijakan <i>Green Energy</i> (Transisi Energi) 3. Benchmarking Transisi Energi Global & <i>Best Practice</i> 4. Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor ESDM 5. Bimtek Hilirisasi Mineral & Batubara (Smelter/Gasifikasi) 6. Evaluasi Dampak Kebijakan Ketenagalistrikan Daerah - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Sastra Daerah (Melayu) 2. Sejarah 3. Administrasi Perkantoran 4. Manajemen 5. Ilmu Pemerintahan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Pengelolaan Kinerja ASN & Tata Naskah Dinas 2. Bimtek Inventarisasi & Registrasi Cagar Budaya 3. Pelatihan Dasar Kearsipan & Dokumentasi Sejarah 4. Workshop Penulisan Sejarah Lokal & Tradisi Lisan 5. Pelatihan Manajemen Logistik & Perlengkapan Event Budaya 6. Diklat Teknis Pamong Budaya Tingkat Dasar - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Arkeologi 2. Museologi 3. Pendidikan Seni (Musik/Tari/Rupa) 4. Ilmu Budaya 5. Teknik Arsitektur (Pemugaran) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Sertifikasi Ahli Zonasi & Pemugaran Cagar Budaya 2. Bimtek Revitalisasi & Manajemen Koleksi Museum 3. Pelatihan Konservasi & Restorasi Naskah Kuno/Manuskrip 4. Workshop Penciptaan Seni Tari & Musik Tradisional 5. Pelatihan Manajemen Sanggar & Komunitas Seni 6. Diklat Kurator Museum & Pameran Budaya - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Ilmu Komunikasi 2. Desain Komunikasi Visual 3. Teknik Informatika/Sistem Informasi 4. Perencanaan Wilayah dan Kota 5. Kajian Media - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Digitalisasi Budaya & Smart Culture 2. Bimtek Komunikasi Digital & Content Creator Budaya 3. Pelatihan Public Speaking & Master of Ceremony (MC) Adat 4. Workshop Virtual Museum & Augmented Reality (AR) Warisan Budaya 5. Pelatihan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (Dapobud) 6. Diklat Fotografi & Videografi Dokumenter Budaya - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Kebijakan Publik 2. Manajemen Pariwisata 3. Kajian Budaya (Cultural Studies) 4. Antropologi 5. Manajemen Inovasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Budaya (Cultural Tourism) 2. Bimtek Analisis Kebijakan Pemajuan Kebudayaan 3. Pelatihan Manajemen Event Festival Budaya Berskala Nasional 4. Workshop Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal untuk Ekspresi Budaya Tradisional 5. Diklat Manajemen Konflik Sosial & Multikulturalisme 6. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Sektor Kebudayaan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Sosiologi 2. Hubungan Internasional 3. Filsafat 4. Manajemen Strategis 5. Studi Pembangunan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Benchmarking Pengelolaan Warisan Dunia UNESCO 2. Pelatihan Diplomas Budaya & Kerjasama Internasional 3. Workshop Strategi Pemajuan Kebudayaan Melayu di Kancah Global 4. Pelatihan Audit Kinerja Program Pelestarian Budaya 5. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Warisan Budaya 6. Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor Kebudayaan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Ilmu Perikanan (Budidaya/ Tangkap) 2. Manajemen Sumber Daya Perairan 3. Ilmu Kelautan 4. Administrasi Bisnis 5. Teknologi Hasil Perikanan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Teknis Budidaya Perikanan Berkelanjutan (CBIB) 2. Diklat Pengolahan Hasil Perikanan (Diversifikasi Produk) 3. Bimtek Manajemen Pelabuhan Perikanan & Syahbandar 4. Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut 5. Diklat Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan 6. Pelatihan Teknis Perencanaan & Evaluasi Program Perikanan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Oseanografi 2. Agribisnis Perikanan 3. Biologi Laut 4. Teknik Lingkungan 5. Hukum Laut - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Konservasi Kawasan Pesisir & Rehabilitasi Mangrove 2. Bimtek Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) & HACCP 3. Diklat Pengawas Perikanan & Penanganan Tindak Pidana (<i>Illegal Fishing</i>) 4. Pelatihan Sistem Rantai Dingin (<i>Cold Chain System</i>) 5. Pelatihan Pemetaan Wilayah Pesisir (GIS) Tingkat Dasar 6. Bimtek Pemberdayaan Nelayan & Kelembagaan Kelompok - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Pesisir Terpadu 2. Bioteknologi Perikanan 3. Ekonomi Sumber Daya Alam 4. Teknik Perkapalan 5. Sistem Informasi Geografis - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Perikanan 2. Bimtek Penerapan Ekonomi Biru (<i>Blue Economy</i>) 3. Pelatihan Teknis Bioflok & Teknologi Budidaya Modern 4. Diklat Manajemen Mutu & Ekspor Hasil Perikanan 5. Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan 6. Workshop Digitalisasi Pemasaran Produk Kelautan (<i>E-Fishery</i>) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Kebijakan Kelautan 2. Manajemen Inovasi 3. Sosiologi Perdesaan 4. Ilmu Komunikasi (Penyuluhan) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Manajemen Konflik Sumber Daya Kelautan 2. Workshop Mitigasi Bencana & Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan 3. Pelatihan Pengembangan Ekowisata Bahari 4. Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) Sektor Kelautan 5. Bimtek Hilirisasi Produk Perikanan Bernilai Tambah 6. Pelatihan Negosiasi & Diplomasi Maritim - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Ilmu Lingkungan (Kajian Strategis) 2. Manajemen Sumber Daya Manusia 3. Hubungan Internasional 4. Studi Pembangunan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Benchmarking Tata Kelola Perikanan Internasional (<i>Best Practice</i>) 2. Pelatihan <i>Strategic Marine Spatial Planning</i> (MSP) 3. Workshop <i>Blue Carbon</i> & Perdagangan Karbon Sektor Kelautan 4. Pelatihan Audit Kinerja Program Kelautan & Perikanan 5. Pengembangan Sistem Informasi Perikanan Terintegrasi (<i>Big Data</i>) 6. Pelatihan Kepemimpinan Strategis - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Manajemen (Keuangan/SDM) 2. Administrasi Negara 3. Pendidikan Kepelatihan Olahraga 4. Ilmu Pemerintahan 5. Akuntansi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknis Pengelolaan Dana Hibah Kepemudaan & Olahraga 2. Tata Kelola & Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga (<i>Venues</i>) 3. Manajemen Kinerja ASN & Penyusunan SKP Dispora 4. Dasar-Dasar Manajemen Organisasi Olahraga 5. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Dasar - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Ilmu Keolahragaan (<i>Sports Science</i>) 2. Sosiologi 3. Kesehatan Masyarakat (Gizi Atlet) 4. Ilmu Komunikasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Penyelenggaraan <i>Event</i> Olahraga (<i>Sport Event Management</i>) 2. Metode Pengembangan Kepemimpinan Pemuda 3. Standardisasi & Akreditasi Klub/Cabang Olahraga 4. Pelatihan Pemanduan Bakat (<i>Talent Scouting</i>) Atlet Muda 5. Teknik Fasilitasi Organisasi Kepemudaan (OKP) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi/ Teknik Informatika 2. Desain Komunikasi Visual (Multimedia) 3. Pemasaran Digital (<i>Digital Marketing</i>) 4. Sains Data (Statistik Olahraga) 5. Manajemen Bisnis Olahraga - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen <i>Database</i> Atlet & Pemuda Berbasis Digital (<i>Sport Intelligence</i>) 2. Pengembangan Ekosistem <i>E-Sports</i> Daerah 3. Pemasaran Digital & <i>Branding</i> Fasilitas Olahraga 4. Analisis <i>Big Data</i> Prestasi Olahraga (<i>Sports Analytics</i>) 5. Digitalisasi Layanan Kepemudaan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Manajemen Olahraga 2. Magister Kebijakan Publik 3. Manajemen Inovasi 4. Hukum Keolahragaan (<i>Sports Law</i>) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. Manajemen Industri Olahraga & <i>Sport Tourism</i> 3. Teknik Negosiasi <i>Sponsorship</i> & Kemitraan Swasta 4. Manajemen Psikologi & Mentalitas Juara Atlet 5. Advokasi Kebijakan Pembangunan Pemuda - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Hubungan Internasional 3. Manajemen Strategis 4. Ilmu Lingkungan 5. Kajian Budaya - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. <i>Green Stadium Management</i> (Pengelolaan Venue Ramah Lingkungan) 2. Diplomasi Pemuda & Olahraga Internasional 3. Perencanaan Jangka Panjang Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) 4. Pemberdayaan Pemuda dalam SDGs 5. Manajemen <i>Legacy</i> Pasca Event Olahraga Besar - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. S1 Kesehatan Masyarakat (SKM) 2. S1 Keperawatan / Ners 3. S1/D3 Farmasi 4. D3 Rekam Medis 5. Administrasi Kesehatan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan (Adminikes) 2. Bantuan Hidup Dasar (<i>Basic Life Support</i>) 3. Teknis Akreditasi Puskesmas & RS Paripurna 4. Tata Kelola Obat & Perbekalan Kesehatan 5. Manajemen Program Gizi & KIA (Stunting) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S2 Administrasi Rumah Sakit (MARS) 2. S2 Kesehatan Masyarakat (Epidemiologi) 3. Spesialis Kedokteran (Klinis) 4. Manajemen Pelayanan Kesehatan 5. Psikologi Klinis - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan & <i>Patient Safety</i> 2. Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular 3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 4. Tata Kelola BLUD Puskesmas/RSUD 5. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S1/S2 Sistem Informasi Kesehatan 2. Informatika Medis 3. Sains Data (<i>Health Informatics</i>) 4. Teknik Biomedis 5. Manajemen Informasi Kesehatan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) Terintegrasi (SATUSEHAT) 2. Telemedisin & Telekesehatan 3. Analisis <i>Big Data</i> Kesehatan Daerah 4. Keamanan Siber Data Pasien (<i>Health Data Security</i>) 5. Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) Digital - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S2/S3 Kebijakan Kesehatan (<i>Health Policy</i>) 2. Manajemen SDM Kesehatan 3. Hukum Kesehatan 4. Ilmu Komunikasi Kesehatan 5. Promosi Kesehatan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Sektor Kesehatan 2. Manajemen Krisis Kesehatan (<i>Health Crisis Management</i>) 3. Advokasi Kebijakan & Pembiayaan Kesehatan 4. Inovasi Layanan Kesehatan Masyarakat 5. Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S3 Kesehatan Masyarakat (Global Health) 2. Kesehatan Lingkungan (<i>Environmental Health</i>) 3. Manajemen Bencana Kesehatan 4. Kajian Strategik Kesehatan 5. Epidemiologi Lanjut - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen <i>Green Hospital</i> & Limbah B3 Medis 2. Ketahanan Kesehatan Global (<i>Global Health Security</i>) 3. Mitigasi Pandemi & Wabah Penyakit Baru 4. Diplomasi Kesehatan Internasional 5. Perencanaan SDM Kesehatan Jangka Panjang - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Manajemen / Administrasi Publik 2. Ilmu Komunikasi (Humas) 3. Teknik Komputer Jaringan 4. Akuntansi 5. Desain Grafis / Multimedia - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Dasar-Dasar Manajemen SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 2. Tata Kelola Website & Media Sosial Pemerintah 3. Jurnalistik dan Penulisan Berita (Rilis Pers) 4. Administrasi Perkantoran Modern & Kearsipan Digital 5. Teknis Jaringan Dasar (LAN/WAN) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Statistika Terapan 2. Sistem Informasi 3. Manajemen Informatika 4. Hukum (UU ITE & KIP) 5. Ilmu Perpustakaan & Informasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Metodologi Survei & Analisis Data Statistik Sektoral 2. Manajemen Layanan TI (IT Service Management / ITIL) 3. Audit TIK dan Keamanan Informasi Dasar 4. Videografi & Editing Konten Kreatif 5. Manajemen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknik Informatika / Computer Science 2. Sains Data (Data Science) 3. Keamanan Siber (Cyber Security) 4. Rekayasa Perangkat Lunak 5. Matematika Komputasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. <i>Certified Ethical Hacker (CEH) / Network Defense</i> 2. Analisis Big Data & Visualisasi Data (Dashboard Executive) 3. Arsitektur SPBE & Interoperabilitas Sistem 4. Pengembangan Aplikasi (Full Stack Programming) 5. Implementasi Smart Province & IoT (Internet of Things) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Inovasi & Teknologi 2. Kebijakan Publik (Digital Policy) 3. Psikologi Industri 4. Manajemen Telekomunikasi 5. Magister Administrasi Bisnis (MBA) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator & Pengawas (PKA/PKP) 2. Manajemen Proyek TIK (Project Management PMP/Prince2) 3. Manajemen Perubahan Transformasi Digital 4. Manajemen Krisis Komunikasi Publik 5. Public Speaking & Komunikasi Efektif untuk Jubir - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Studi Pembangunan (Digital Development) 2. Hubungan Internasional 3. Teknologi Lingkungan (Green IT) 4. Kajian Strategik Ketahanan Nasional 5. Hukum Siber (Cyber Law) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. <i>Green Data Center Management</i> (Pusat Data Hijau) 2. Tata Kelola Data (Data Governance) Berstandar Global 3. Perencanaan Strategis Riau Digital 2045 4. Kepemimpinan Digital (Digital Leadership) 5. Kerjasama Internasional bidang TIK - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Ilmu Lingkungan 2. Kehutanan 3. Teknik Lingkungan 4. Hukum (Lingkungan) 5. Geografi (GIS) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2. Diklat Penyuluh Kehutanan Tingkat Dasar & Lanjutan 3. Bimtek Pengelolaan Sampah & Limbah B3 4. Pelatihan Dasar Polisi Kehutanan (Polhut) 5. Diklat AMDAL (Penyusun dan Penilai) 6. Pelatihan Teknis Pemetaan Hutan dan GIS Dasar - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Hutan 2. Konservasi Sumber Daya Alam 3. Kimia Lingkungan 4. Administrasi Publik 5. Biologi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan 2. Bimtek Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan (PPLH) 3. Pelatihan Valuasi Ekonomi Lingkungan & Jasa Ekosistem 4. Diklat Pengendalian Dampak Lingkungan (Pedal) 5. Pelatihan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 6. Workshop Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Bencana 2. Klimatologi 3. Sosiologi Pedesaan 4. Ekonomi Sumber Daya Alam 5. Teknik Sipil (Bangunan Air/Limbah) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>) 2. Bimtek Audit Lingkungan Hidup 3. Pelatihan Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan 4. Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Pelatihan Teknologi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 6. Workshop Perdagangan Karbon & Nilai Ekonomi Karbon - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Kebijakan Lingkungan 2. Manajemen Inovasi 3. Hubungan Internasional 4. Hukum Adat - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Negosiasi & Resolusi Konflik Kehutanan 2. Workshop Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity</i>) 3. Pelatihan Manajemen Laboratorium Lingkungan 4. Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) Sektor LHK 5. Bimtek Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 6. Pelatihan Advokasi Kebijakan Lingkungan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Studi Pembangunan 2. Ilmu Politik (Politik Hijau) 3. Manajemen SDM 4. Agroteknologi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. <i>Benchmarking</i> Pengelolaan Taman Nasional & Hutan Kota Terbaik (<i>Best Practice</i>) 2. Pelatihan <i>Strategic Environmental Assessment</i> (KLHS) 3. Workshop <i>Green Economy & Circular Economy</i> 4. Pelatihan Audit Kinerja Program LHK 5. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup & Kehutanan Terintegrasi 6. Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor LHK - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. S1/D4 Pertanian (Agronomi/Agroteknologi) 2. S1 Agribisnis 3. S1 Penyuluhan Pertanian 4. S1 Manajemen/Akuntansi 5. S1 Administrasi Negara - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknis Budidaya Tanaman Pangan & Holtikultura (GAP) 2. Metodologi Penyuluhan Pertanian Dasar 3. Tata Kelola Administrasi & Keuangan Dinas 4. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Dasar 5. Sertifikasi Pengawas Benih Tanaman - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S1/S2 Ilmu Tanah 2. S1/S2 Proteksi Tanaman 3. S1 Teknologi Pangan 4. S1/S2 Ekonomi Pertanian 5. S1 Statistika - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Analisis Ketersediaan & Cadangan Pangan (FSVA) 2. Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian (Level Supervisor) 3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pangan 4. Penanganan Pasca Panen (<i>Good Handling Practices</i>) 5. Manajemen Distribusi & Harga Pangan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S1 Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. S1 Sains Data (<i>Agricultural Data</i>) 3. S1 Teknik Pertanian (Mekanisasi) 4. S1 Geografi (GIS/Pemetaan) 5. S1 Desain Komunikasi Visual (Pemasaran) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Implementasi <i>Smart Farming 4.0 & Precision Agriculture</i> 2. Sistem Informasi Geografis (GIS) Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) 3. Pemasaran Digital Produk Pertanian (<i>E-Commerce</i> Agribisnis) 4. <i>Cyber Extension</i> (Penyuluhan Berbasis Digital) 5. Analisis <i>Big Data</i> Produksi Pangan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S2/S3 Manajemen Agribisnis 2. S2 Kebijakan Publik 3. S2 Sosiologi Pedesaan 4. S2 Manajemen Inovasi 5. S2 Ilmu Komunikasi (Pembangunan) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. Manajemen Rantai Pasok Pangan (<i>Supply Chain Management</i>) 3. Advokasi & Negosiasi Perdagangan Komoditas Pangan 4. Inovasi Kelembagaan Petani (Korporasi Petani) 5. Manajemen Perubahan Sektor Pertanian - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S2/S3 Pertanian Berkelanjutan (<i>Sustainable Agriculture</i>) 2. S2/S3 Ilmu Lingkungan 3. S2 Hubungan Internasional 4. S2 Manajemen Strategis 5. S2 Ketahanan Nasional - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Strategi Pertanian Ramah Lingkungan & Rendah Karbon (<i>Green Agriculture</i>) 2. Adaptasi & Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pangan 3. Standar Global Keamanan Pangan (HACCP/ISO 22000) 4. Perencanaan Strategis Ketahanan Pangan Jangka Panjang (SDGs) 5. Diplomasi Pangan & Kerjasama Pertanian Global - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Manajemen Pariwisata / Perhotelan 2. Ilmu Komunikasi (Humas) 3. Administrasi Negara 4. Akuntansi 5. Sastra Inggris / Bahasa Asing - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Diklat Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata & Ekonomi Kreatif 2. Pelayanan Prima (<i>Hospitality & Service Excellence</i>) 3. Tata Kelola Destinasi Wisata Dasar 4. Manajemen Homestay dan Pondok Wisata 5. Sertifikasi Pemandu Wisata (<i>Tour Guide</i>) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Usaha Perjalanan Wisata 2. Manajemen Bisnis / Pemasaran 3. Sosiologi (Pemberdayaan Masyarakat) 4. Seni dan Budaya (Kearifan Lokal) 5. Manajemen Aset - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>) 2. Sertifikasi CHSE (<i>Cleanliness, Health, Safety, Environment</i>) 3. Pengembangan Desa Wisata (Dewi) & Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 4. Kurasi Produk Ekonomi Kreatif 5. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Ekraf - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Desain Komunikasi Visual (DKV) 2. Sistem Informasi / Teknik Informatika 3. Pemasaran Digital (Digital Marketing) 4. Sains Data 5. Videografi & Fotografi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Digital Marketing & Social Media Branding Pariwisata 2. Analisis Big Data Pergerakan Wisatawan 3. Pembuatan Konten Kreatif Promosi Wisata (Videografi) 4. Pengelolaan <i>E-Ticketing & Platform Smart Tourism</i> 5. Fotografi Jurnalistik Pariwisata - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Kajian Pariwisata 2. Manajemen Strategis Publik 3. Kebijakan Industri 4. Psikologi Industri 5. Manajemen Inovasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. Manajemen Krisis Kepariwisata (Crisis Management) 3. Strategi <i>City Branding & "Riau The Homeland of Melayu"</i> 4. Teknik Negosiasi & <i>Bidding Event</i> Nasional/Internasional 5. Analisis Resiliensi Pariwisata - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Ilmu Lingkungan (Ekowisata) 3. Hubungan Internasional 4. Antropologi Budaya 5. Manajemen Warisan Budaya (<i>Heritage</i>) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pariwisata Berkelanjutan (<i>Sustainable Tourism Development</i>) 2. Manajemen Ekowisata (<i>Mangrove & Gambut</i>) 3. <i>Green Hospitality &</i> Pariwisata Ramah Lingkungan 4. Kerjasama Pariwisata Global (IMT-GT) 5. Konservasi Cagar Budaya & Wisata Sejarah - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Teknik Sipil (Struktur/Konstruksi) 2. Arsitektur 3. Administrasi Negara/Publik 4. Hukum (Agraria/Pertanahan) 5. Akuntansi / Manajemen Keuangan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah 2. Pengawasan Konstruksi Jalan & Jembatan (Dasar) 3. Penyusunan RAB & HPS Konstruksi 4. K3 Konstruksi (Keselamatan & Kesehatan Kerja) 5. Tata Cara Pendaftaran Tanah & Administrasi Pertanahan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) 2. Teknik Lingkungan 3. Teknik Pengairan / Hidrologi 4. Manajemen Aset 5. Psikologi (SDM) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Penyusunan RDTR & Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 2. Manajemen Operasi Bendungan & Pengendalian Banjir 3. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung (SLF) 4. Uji Mutu Bahan (Beton/Aspal) & Laboratorium Konstruksi 5. Perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknik Geodesi / Geomatika 2. Sistem Informasi / Teknik Informatika 3. Sains Data (Data Science) 4. Manajemen Konstruksi Digital 5. Teknik Geologi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Building Information Modeling (BIM) Tingkat Lanjut 2. Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) Tata Ruang 3. Smart City & Smart Infrastructure Planning 4. SCADA untuk Manajemen Air Minum & Limbah 5. E-Procurement & Audit PBJ Konstruksi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Manajemen Proyek 2. Kebijakan Publik 3. Manajemen Sumber Daya Manusia 4. Hukum Kontrak Konstruksi 5. Ilmu Komunikasi (Humas Pemerintah) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. Manajemen Kontrak & Mitigasi Risiko Konstruksi 3. Teknik Mediasi & Penyelesaian Sengketa Lahan 4. Manajemen Perubahan & Reformasi Birokrasi PUPR 5. <i>Project Management Professional</i> (Standar PMBOK) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Rekayasa Infrastruktur Lingkungan 3. Manajemen Bencana 4. Perencanaan Perumahan & Permukiman 5. Kajian Strategik Pembangunan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Konsep Green Building & Infrastruktur Hijau 2. Teknologi Konstruksi di Lahan Gambut (Spesifik Riau) 3. Perencanaan Kota Tangguh Bencana (<i>Resilient City</i>) 4. Sanitasi Lingkungan & Pengelolaan Limbah Terpadu 5. Kepemimpinan Strategis Sektor Infrastruktur - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Ilmu Pemerintahan 2. Administrasi Negara/Publik 3. Hukum 4. Manajemen 5. Akuntansi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) 2. Dasar-Dasar Administrasi Kependudukan (Adminduk) 3. Tata Naskah Dinas & Kearsipan Digital 4. Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) 5. Pelayanan Prima - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Administrasi Perkantoran 2. Sosiologi / Pembangunan Sosial 3. Statistika 4. Ekonomi Pembangunan 5. Ilmu Komunikasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Kinerja ASN & SKP 2. Verifikasi & Validasi Data Kependudukan 3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa & Dukcapil 4. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 5. Pengadaan Barang/Jasa (Dasar) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Sains Data (Data Science) 3. Teknik Komputer 4. Manajemen Inovasi 5. Desain Komunikasi Visual - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Analisis Big Data Kependudukan (<i>Data Driven Policy</i>) 2. Pengembangan <i>Smart Village & E-Gov</i> Desa 3. Digital Marketing BUMDes 4. <i>Cyber Security</i> Data Adminduk 5. Analisis Kebijakan Berbasis Bukti - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Kebijakan Publik 2. Psikologi 3. Pengembangan Wilayah & Pedesaan 4. Ilmu Politik 5. Manajemen SDM Aparatur - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Kepemimpinan Administrator (PKA) 2. Teknik Mediasi & Resolusi Konflik Desa 3. Manajemen Perubahan (Change Management) 4. <i>Public Speaking</i> & Negosiasi 5. <i>Design Thinking</i> Inovasi Layanan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Ilmu Lingkungan 3. Hubungan Internasional 4. Manajemen Strategis 5. Kajian Kependudukan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) di Desa 2. Perencanaan Strategis SDGs Desa 3. Kemitraan Strategis & Fundraising 4. <i>Strategic Leadership</i> 5. Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Psikologi (Klinis /Perkembangan) 2. Sosiologi 3. Ilmu Kesejahteraan Sosial 4. Kesehatan Masyarakat 5. Hukum - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Teknis Konvensi Hak Anak & Kabupaten Layak Anak 2. Diklat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 3. Bimtek Manajemen Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 4. Pelatihan Konseling Keluarga dan Psikososial Dasar 5. Diklat Dasar Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) 6. Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga & SIGA (Sistem Informasi Keluarga) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Studi Pembangunan 2. Ilmu Komunikasi 3. Demografi/Kependudukan 4. Manajemen Kebijakan Publik 5. Statistika - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Analisis Dampak Kependudukan (ADK) 2. Bimtek Audit Kasus Stunting & Gizi Keluarga 3. Pelatihan Mediator Non-Hakim untuk Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 4. Diklat Pemberdayaan Ekonomi Perempuan & Kewirausahaan 5. Pelatihan Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 6. Bimtek Pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Kriminologi 2. Pekerjaan Sosial (<i>Social Work</i>) 3. Ilmu Pemerintahan 4. Antropologi 5. Teknologi Pendidikan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Teknik Investigasi Kasus Kekerasan Seksual & TPPO 2. Bimtek Analisis <i>Gender Pathway & Gender Budget Statement</i> (GBS) 3. Pelatihan Teknis Kontrasepsi Terkini (CTU) bagi Bidan/Penyuluh 4. Diklat Manajemen Rumah Aman (<i>Shelter</i>) & Layanan Terpadu 5. Pelatihan Digital Parenting & Literasi Digital Keluarga 6. Workshop Pencegahan Perkawinan Anak & Isu Gender - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Strategis 2. Ilmu Gizi 3. Psikologi Forensik 4. Hubungan Internasional - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Manajemen Konflik Keluarga & Mediasi 2. Workshop Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KIE) KB 3. Pelatihan Pemulihan Trauma Korban Bencana/Konflik 4. Bimtek Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam Pembangunan 5. Pelatihan Advokasi Kebijakan Kependudukan & Bonus Demografi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Studi Gender 2. Ilmu Lingkungan (Kependudukan) 3. Kebijakan Sosial 4. Manajemen SDM - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. <i>Benchmarking</i> Kebijakan Pengarusutamaan Gender & Anak 2. Pelatihan <i>Strategic Population Planning</i> 3. Workshop Pembangunan Keluarga Berkualitas & Ketahanan Keluarga 4. Pelatihan Audit Kinerja Program Bangga Kencana 5. Pengembangan Sistem Informasi Perlindungan Anak Terintegrasi 6. Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor Pemberdayaan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Manajemen Bisnis/Ekonomi 2. Hukum (Hukum Perizinan) 3. Administrasi Negara 4. Teknik Informatika 5. Ilmu Komunikasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Teknis Operasional OSS-RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>) 2. Diklat Pelayanan Prima <i>Front Office</i> 3. Bimtek Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) 4. Pelatihan Analisis Kelayakan Bisnis Dasar 5. Diklat Penata Perizinan Jenjang Pertama 6. Pelatihan Manajemen Kearsipan Perizinan Digital - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Ekonomi Pembangunan 2. Perencanaan Wilayah dan Kota 3. Hubungan Internasional 4. Statistika Bisnis 5. Psikologi Pelayanan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Intelijen Bisnis & Analisis Pasar (<i>Market Intelligence</i>) 2. Bimtek Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah (GIS) 3. Pelatihan Manajemen Risiko Perizinan Berusaha 4. Diklat Promosi Investasi Digital & Branding Daerah 5. Pelatihan Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat 6. Workshop Integrasi Data Perizinan Antar Sektor - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Strategis 2. Hukum Bisnis Internasional 3. Sains Data 4. Teknik Industri 5. Manajemen Aset - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) 2. Bimtek Analisis Dampak Investasi Terhadap Perekonomian Daerah 3. Pelatihan Negosiasi Bisnis & Fasilitasi Investor 4. Diklat Audit Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan 5. Pelatihan Keamanan Siber Sistem Perizinan (<i>Cybersecurity</i>) 6. Workshop <i>Public Private Partnership</i> (KPMU) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Kebijakan Publik 2. Studi Pembangunan 3. Manajemen Inovasi 4. Sosiologi Ekonomi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan <i>Aftercare Service & Retensi Investor</i> 2. Workshop <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB) & Deregulasi 3. Pelatihan Manajemen Konflik Investasi & Agraria 4. Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) Sektor Investasi 5. Bimtek Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital 6. Pelatihan <i>Public Speaking & Presentasi Bisnis Internasional</i> - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Ilmu Lingkungan (<i>Green Investment</i>) 2. Manajemen SDM 3. Ekonomi Syariah 4. Diplomat Ekonomi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Benchmarking Iklim Investasi & Pelayanan Publik Global (<i>Best Practice</i>) 2. Pelatihan <i>Strategic Investment Planning</i> 3. Workshop <i>Green Investment & Sustainable Finance</i> 4. Pelatihan Audit Kinerja Pelayanan Publik 5. Pengembangan Ekosistem Investasi Digital Terintegrasi 6. Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor Ekonomi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Manajemen Pendidikan 2. Administrasi Pendidikan 3. Pendidikan Guru (PGSD/Mapel) 4. Teknologi Pendidikan 5. Psikologi Pendidikan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka & Asesmen Nasional 2. Bimtek Pengelolaan Dana BOSP dan BOSDA (Keuangan Sekolah) 3. Diklat Calon Kepala Sekolah & Pengawas Sekolah 4. Pelatihan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) 5. Workshop Penyusunan Perangkat Ajar Digital 6. Pelatihan Manajemen Laboratorium & Perpustakaan Sekolah - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pendidikan Vokasi/Kejuruan 2. Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran 3. Pendidikan Inklusi/Khusus 4. Manajemen Sumber Daya Manusia 5. Statistika Pendidikan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Pengembangan <i>Teaching Factory</i> (TeFa) SMK 2. Bimtek Akreditasi Sekolah & Penjaminan Mutu Pendidikan 3. Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi Guru Sekolah Reguler 4. Diklat Teknis Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 5. Pelatihan Coding & STEAM untuk Guru (<i>Science, Tech, Engineering, Art, Math</i>) 6. Workshop Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Evaluasi Pendidikan 2. Bimbingan dan Konseling 3. Ilmu Komputer/Informatika 4. Bahasa Asing (Inggris/Mandarin) 5. Kebijakan Pendidikan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Analisis Data Pendidikan (Dapodik & Rapor Pendidikan) 2. Bimtek <i>Link and Match</i> Industri dengan SMK 3. Pelatihan Konseling dan Kesehatan Mental Siswa 4. Diklat Penulisan Karya Ilmiah & Publikasi bagi Guru 5. Pelatihan Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan 6. Workshop Pembelajaran Berdiferensiasi & Adaptif - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Inovasi Pendidikan 2. Sosiologi Pendidikan 3. Kepemimpinan Pendidikan 4. Pendidikan Non Formal - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan <i>Digital Leadership</i> bagi Kepala Sekolah 2. Workshop Pengembangan Kewirausahaan Sekolah 3. Pelatihan Manajemen Konflik & Penanganan Kekerasan di Sekolah 4. Bimtek Evaluasi Kinerja Guru (PKG) & Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 5. Pelatihan Public Speaking & Komunikasi Efektif untuk Guru - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Studi Pembangunan 2. Ilmu Lingkungan (Sekolah Adiwiyata) 3. Manajemen Strategis 4. Hubungan Internasional (Pertukaran Pelajar/Guru) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Benchmarking Sistem Pendidikan Berkualitas (Nasional/Internasional) 2. Pelatihan <i>Strategic Education Planning</i> 3. Workshop <i>Green School</i> & Pendidikan Lingkungan Hidup 4. Pelatihan Audit Kinerja Program Pendidikan 5. Pengembangan <i>Smart School</i> & Ekosistem Pendidikan Digital 6. Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor Pendidikan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Manajemen Transportasi (Darat/Laut) 2. Teknik Sipil (Rekayasa Transportasi) 3. Teknik Mesin (Otomotif) 4. Administrasi Negara 5. Hukum (Perhubungan) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor (KIR) 2. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas & Andalalin 3. Keselamatan Jalan & Inspeksi Kendaraan (Ramp Check) 4. Tata Kelola Terminal & Pelabuhan Penyeberangan 5. Pengawasan Angkutan Jalan & Over Dimension Over Loading (ODOL) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Logistik 2. Perencanaan Wilayah dan Kota (Transportasi) 3. Ketatalaksanaan Pelayaran 4. Statistika 5. Manajemen SDM - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Audit Keselamatan Jalan (<i>Road Safety Audit</i>) 2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Umum 3. Manajemen Rantai Pasok & Logistik Daerah 4. Kompetensi Syahbandar & Kepelabuhanan Dasar 5. Investigasi Kecelakaan Transportasi (Dasar) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Teknik Elektro (Sinyal & Sistem) 3. Sains Data (<i>Transport Analytics</i>) 4. Desain Komunikasi Visual (Rambu Digital) 5. Teknik Komputer - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Operasional <i>Area Traffic Control System</i> (ATCS) & ITS 2. Digitalisasi Retribusi Parkir & Pengujian Kendaraan (E-KIR) 3. Analisis <i>Big Data</i> Pergerakan Lalu Lintas 4. Sistem Pemantauan Kapal (VTS) & Navigasi Digital 5. Keamanan Siber Data Transportasi Daerah - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Manajemen Transportasi 2. Kebijakan Publik 3. Ilmu Komunikasi 4. Manajemen Inovasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. Manajemen Krisis Transportasi & Mitigasi Bencana 3. Inovasi Layanan Angkutan Massal Terintegrasi (Bus Rapid Transit) 4. Strategi Komunikasi & Edukasi Keselamatan Publik 5. Manajemen Perubahan Budaya Berlalu Lintas - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Studi Pembangunan Berkelanjutan (Transportasi) 2. Teknik Lingkungan (Emisi) 3. Energi Terbarukan 4. Manajemen Strategis 5. Perencanaan Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Transportasi Hijau (<i>Green Transport</i>) & Emisi Rendah 2. Ekosistem Kendaraan Listrik (EV) & Infrastruktur Pengisian 3. Perencanaan Transportasi Multimoda Berkelanjutan (SDGs) 4. Integrasi Transportasi Regional (Konektivitas Sumatera) 5. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Transportasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Manajemen (Industri/Bisnis) 2. Ekonomi Pembangunan 3. Teknik Industri 4. Hukum Bisnis 5. Administrasi Niaga - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Teknis Pengawasan Perdagangan & Perlindungan Konsumen 2. Diklat Metrologi Legal (Penera) Tingkat Dasar 3. Bimtek Manajemen Koperasi Modern & Digitalisasi Koperasi 4. Pelatihan Fasilitator Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) 5. Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan 6. Pelatihan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Akuntansi Sektor Publik 2. Agribisnis 3. Teknik Kimia 4. Sistem Informasi 5. Ilmu Komunikasi (Marketing) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Sertifikasi Halal & Keamanan Pangan bagi IKM 2. Bimtek Ekspor Impor & Perdagangan Internasional 3. Diklat Mediator Hubungan Industrial & Penyelesaian Sengketa Bisnis 4. Pelatihan E-Commerce & Pemasaran Digital untuk UKM 5. Pelatihan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) 6. Bimtek Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Inovasi 2. Ekonomi Syariah 3. Teknik Mesin 4. Desain Produk 5. Statistik Ekonomi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Analisis Potensi Pasar & Intelijen Bisnis 2. Bimtek Penerapan Industri Hijau & Produksi Bersih 3. Pelatihan Teknis Standardisasi Produk (SNI) & HKI 4. Diklat Pejabat Pengawas Kemetrolagian (PPK) 5. Pelatihan Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management) 6. Workshop Pengembangan Sentra IKM & Klaster Industri - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Kebijakan Publik 2. Hubungan Internasional 3. Sosiologi Ekonomi 4. Psikologi Industri - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Negosiasi Perdagangan Internasional 2. Workshop Hilirisasi Produk Unggulan Daerah 3. Pelatihan Manajemen Resiko Usaha & Koperasi 4. Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) Sektor Ekonomi 5. Bimtek Inkubator Bisnis & Kewirausahaan 6. Pelatihan Advokasi Kebijakan Industri & Perdagangan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Studi Pembangunan 2. Ilmu Lingkungan (Industri Hijau) 3. Manajemen Strategis 4. Teknik Logistik - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Benchmarking Kawasan Industri & KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) 2. Pelatihan Strategic Industrial Planning 3. Workshop Circular Economy & Sustainability Business 4. Pelatihan Audit Kinerja Program Indagkop 5. Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Terintegrasi 6. Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor Riil - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. S1 Pertanian (Agronomi/ Agroteknologi) 2. S1 Manajemen 3. S1 Ilmu Tanah 4. S1 Administrasi Negara 5. S1 Penyuluhan Pertanian - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknis Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) 2. Pendataan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Pekebun 3. Teknis Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 4. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan 5. Tata Kelola Administrasi Sarana Prasarana Perkebunan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S1/S2 Hama dan Penyakit Tumbuhan 2. S1/S2 Agribisnis 3. S1 Hukum (Agraria) 4. S1 Teknologi Hasil Pertanian 5. S1 Sosiologi Pedesaan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sertifikasi Auditor ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>) 2. Manajemen Konflik & Mediasi Sengketa Lahan Perkebunan 3. Pengolahan & Pemasaran Bokar (Bahan Olahan Karet) Bersih 4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Subsektor Perkebunan 5. Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Unggul - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S1 Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. S1 Geografi / Geodesi (GIS) 3. S1 Sains Data 4. S1 Desain Komunikasi Visual 5. S1 Teknik Lingkungan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pemetaan Kebun Rakyat Berbasis GIS & <i>Drone</i> 2. Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) 3. Digitalisasi Pelaporan Harga Tandan Buah Segar (TBS) 4. Analisis <i>Big Data</i> Produksi Perkebunan 5. Pemasaran Digital Produk Olahan Perkebunan (Hilirisasi) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S2/S3 Manajemen Agribisnis Publik 2. S2 Kebijakan Publik 3. S2 Manajemen Inovasi 4. S2 Ilmu Komunikasi 5. S2 Ekonomi Sumber Daya Alam - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. Strategi Hilirisasi Industri Kelapa Sawit, Karet & Kelapa 3. Advokasi Kebijakan Tata Niaga Perkebunan (Kemitraan) 4. Manajemen Kelembagaan Petani (Korporasi Petani) 5. Inovasi Diversifikasi Produk Turunan Sawit - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S2/S3 Ilmu Lingkungan (<i>Sustainable Development</i>) 2. S2/S3 Kehutanan 3. Hubungan Internasional 4. Manajemen Strategis 5. Kajian Lingkungan Hidup - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pemanfaatan Energi Terbarukan (Biomasa/Biogas) Limbah Sawit 2. Perhitungan Emisi & Perdagangan Karbon Sektor Perkebunan 3. Diplomasi Sawit Berkelanjutan di Pasar Global (EUDR) 4. Manajemen Perkebunan di Lahan Gambut Berkelanjutan 5. Perencanaan Jangka Panjang Perkebunan Riau Hijau - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. S1 Ilmu Perpustakaan 2. D3/S1 Kearsipan 3. Administrasi Negara 4. Sejarah / Sastra 5. Manajemen - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Fungsional Arsiparis (Pengelolaan Arsip Dinamis & Statis) 2. Teknis Katalogisasi & Klasifikasi Bahan Pustaka 3. Pelatihan Pelestarian Fisik & Konservasi Bahan Pustaka 4. Tata Kelola Layanan Sirkulasi & Referensi 5. Manajemen Naskah Kuno & Budaya Lokal - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Informasi 2. Teknologi Pendidikan 3. Sosiologi (Literasi Masyarakat) 4. Hukum (Aset & Arsip) 5. Bahasa Asing - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Audit Kearsipan Internal & Eksternal 2. Akreditasi Perpustakaan & Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 3. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) 4. Sertifikasi Kompetensi Pustakawan & Arsiparis 5. Restorasi & Fumigasi Arsip Vital - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknik Informatika / Sistem Informasi 2. Desain Komunikasi Visual (Multimedia) 3. Sains Data (<i>Library Science</i>) 4. Teknik Komputer 5. Manajemen Sistem Informasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Digitalisasi dan Otomasi Kearsipan (Aplikasi SRIKANDI) 2. Manajemen Perpustakaan Digital (<i>Integrated Library System</i>) 3. Preservasi Digital & Alih Media Dokumen Sejarah 4. Keamanan Informasi Aset Digital (<i>Cyber Security</i>) 5. Pengembangan Konten Kreatif Promosi Literasi Digital - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Manajemen 2. Magister Ilmu Perpustakaan 3. Kebijakan Publik 4. Ilmu Komunikasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. Manajemen Inovasi Layanan Publik Perpustakaan 3. <i>Storytelling & Public Speaking</i> untuk Kampanye Literasi 4. Advokasi Kebijakan Kearsipan & Perpustakaan 5. Manajemen Risiko Bencana bagi Aset Arsip & Pustaka - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Kajian Budaya (<i>Cultural Studies</i>) 2. Studi Pembangunan Berkelanjutan 3. Manajemen Strategis 4. Hubungan Internasional 5. Ilmu Lingkungan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. <i>Green Library Management</i> (Perpustakaan Ramah Lingkungan) 2. Preservasi Warisan Dokumenter Dunia (<i>Memory of The World</i>) 3. Strategi Literasi untuk Kesejahteraan (SDGs) 4. Kerjasama Jejaring Perpustakaan Internasional 5. Kepemimpinan Strategis Manajemen Pengetahuan (<i>Knowledge Management</i>) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. S1 Peternakan (Nutrisi/Produksi) 2. D3/S1 Kesehatan Hewan 3. S1 Manajemen 4. S1 Akuntansi 5. S1 Administrasi Negara - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknis Inseminasi Buatan (IB) & Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) 2. Juru Sembelih Halal (Juleha) & Kesejahteraan Hewan 3. Pelatihan Dasar Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 4. Manajemen Pakan Ternak & Hijauan 5. Tata Kelola Administrasi Dinas - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Profesi Dokter Hewan (Drh) 2. S1/S2 Agribisnis 3. S1 Teknologi Hasil Ternak 4. S1 Penyuluhan Peternakan 5. S1 Ekonomi Pertanian - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian/Peternakan 2. Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 3. Higiene Sanitasi & Keamanan Pangan Asal Hewan 4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peternakan 5. Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S1 Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. S1 Sains Data (<i>Animal Science Data</i>) 3. S1 Desain Komunikasi Visual (Pemasaran) 4. S1 Teknik Lingkungan (Limbah) 5. S1 Geografi (Pemetaan Penyakit) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) Terintegrasi 2. Analisis <i>Big Data</i> Pasar & Harga Komoditas Ternak 3. Pemasaran Digital Produk Peternakan (<i>E-Commerce</i>) 4. Pemetaan Penyakit Hewan Berbasis GIS 5. <i>Smart Farming</i> (Peternakan Presisi) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S2/S3 Ekonomi Pertanian/Peternakan 2. S2 Manajemen Agribisnis 3. S2 Kebijakan Publik 4. S2 Ilmu Peternakan 5. S2 Manajemen Inovasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. Hilirisasi & Diversifikasi Produk Olahan Hasil Ternak 3. Manajemen Rantai Pasok Dingin (<i>Cold Chain Management</i>) 4. Analisis Kebijakan Impor/Ekspor Ternak 5. Inovasi Teknologi Bibit Unggul Daerah - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S3 Ilmu Veteriner / Biomedis 2. S3 Ilmu Lingkungan 3. Hubungan Internasional 4. Manajemen Strategis 5. Studi Pembangunan Berkelanjutan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pendekatan <i>One Health</i> (Zoonosis & Resistensi Antimikroba) 2. Peternakan Ramah Lingkungan (<i>Low Carbon Livestock</i>) & Biogas 3. Strategi Ketahanan Pangan Hewani Berkelanjutan (SDGs) 4. Diplomasi Perdagangan Ternak Global 5. Mitigasi Bencana Sektor Peternakan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Ilmu Kesejahteraan Sosial 2. Sosiologi 3. Psikologi 4 Manajemen (Administrasi Publik) 5. Ilmu Komunikasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial (Peksos) & Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) 2. Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana (TAGANA) Dasar 3. Bimtek Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 4. Pelatihan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 5. Diklat Manajemen Panti Sosial & Rehabilitasi Dasar 6. Pelatihan Teknis Pengelolaan Logistik Bencana - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pekerjaan Sosial (Spesialis) 2. Antropologi Sosial 3. Kebijakan Publik 4. Bimbingan Konseling 5. Statistika Sosial - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Manajemen Kasus Rehabilitasi Sosial (Anak, Lansia, Disabilitas) 2. Bimtek Penanganan Korban Tindak Kekerasan & Perdagangan Orang (TPPO) 3. Pelatihan Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) 4. Diklat Penyuluh Sosial Masyarakat 5. Pelatihan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 6. Workshop Penanganan Fakir Miskin Pesisir & Terisolir - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pembangunan Sosial 2. Kriminologi 3. Pendidikan Luar Biasa 4. Manajemen Bencana 5. Ekonomi Pembangunan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan <i>Psychosocial Support</i> (Dukungan Psikososial) Pasca Bencana 2. Bimtek Audit Kinerja Program Bansos & Hibah 3. Pelatihan Manajemen Shelter & Rumah Singgah 4. Diklat Pekerja Sosial Klinis & Konselor Adiksi 5. Pelatihan Advokasi Kebijakan Sosial 6. Workshop Digitalisasi Layanan Sosial (E-Social) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Strategis 2. Psikologi Komunitas 3. Hubungan Internasional 4. Hukum (Advokasi Sosial) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Manajemen Konflik Sosial & Resolusi Konflik 2. Workshop Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 3. Pelatihan Asesor Rehabilitasi Sosial 4. Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) Sektor Sosial 5. Bimtek Kolaborasi Pentahelix dalam Penanganan Masalah Sosial 6. Pelatihan Public Speaking & Komunikasi Krisis - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Studi Pembangunan 2. Ilmu Lingkungan (Sosial) 3. Manajemen SDM 4. Kebijakan Sosial - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. <i>Benchmarking</i> Sistem Jaminan Sosial Negara Maju (<i>Best Practice</i>) 2. Pelatihan <i>Strategic Social Planning</i> 3. Workshop <i>Sustainable Livelihood</i> untuk Pemberdayaan Ekonomi 4. Pelatihan Audit Forensik Bantuan Sosial 5. Pengembangan Big Data Kesejahteraan Sosial Terintegrasi 6. Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor Kesejahteraan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Hukum 2. Manajemen (SDM/Umum) 3. Administrasi Negara 4. Ekonomi Pembangunan 5. Psikologi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Dasar Pengawas Ketenagakerjaan 2. Diklat Dasar Mediator Hubungan Industrial 3. Pelatihan Dasar Instruktur Pelatihan Kerja (Metodologi Pelatihan) 4. Bimtek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5. Pelatihan Teknis Perencanaan Tenaga Kerja Mikro 6. Diklat Pengantar Kerja Tingkat Dasar - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Teknik (Mesin/Sipil/Elektro) 2. Kesehatan Masyarakat (K3) 3. Sosiologi 4. Ilmu Pemerintahan 5. Akuntansi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Audit Sistem Manajemen K3 2. Bimtek Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 3. Pelatihan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 4. Diklat Asesor Kompetensi Tenaga Kerja 5. Pelatihan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 6. Workshop Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Teknik Informatika/Sistem Informasi 2. Statistika 3. Hukum Bisnis 4. Perencanaan Wilayah dan Kota 5. Pendidikan Vokasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Analisis Data Pasar Kerja (<i>Labor Market Information System</i>) 2. Bimtek Sistem Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online 3. Pelatihan Digital Marketing untuk Wirausaha Binaan 4. Diklat Investigasi Kecelakaan Kerja 5. Pelatihan Teknis Pengelolaan Database Transmigrasi 6. Workshop Digitalisasi Layanan Penempatan Tenaga Kerja (SIAP Kerja) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Kebijakan Publik 2. Manajemen Inovasi 3. Ilmu Komunikasi 4. Hubungan Internasional 5. Manajemen Konflik 6. dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Teknik Negosiasi dan Resolusi Konflik Industrial 2. Pelatihan Teknik Negosiasi dan Resolusi Konflik Industrial 3. Pelatihan Advokasi Kebijakan Ketenagakerjaan 4. Bimtek Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 5. Pelatihan Public Speaking & Komunikasi Efektif bagi Mediator - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Studi Pembangunan 2. Ilmu Lingkungan 3. Manajemen Strategis 4. Ekonomi Sumber Daya Manusia - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Benchmarking Standar Kompetensi Kerja Internasional 2. Pelatihan <i>Strategic Workforce Planning</i> 3. Workshop <i>Green Jobs</i> dan Transisi Energi di Sektor Ketenagakerjaan 4. Pelatihan Audit Kinerja Program Pelatihan Vokasi 5. Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Inklusif 6. Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor Tenaga Kerja - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Kedokteran Umum/Spesialis Dasar 2. Keperawatan (Ners) 3. Kesehatan Masyarakat 4. Administrasi Rumah Sakit 5. Farmasi Klinis - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) & Lanjutan (ACLS/ATLS) 2. Diklat Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Dasar 3. Bimtek Manajemen Rekam Medis Elektronik (RME) 4. Pelatihan Pelayanan Prima Rumah Sakit 5. Diklat Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>) 6. Pelatihan Teknis Perawatan Luka Modern (<i>Wound Care</i>) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Kedokteran Spesialis (Jantung/Kanker) 2. Keperawatan Spesialis 3. Manajemen Pelayanan Kesehatan 4. Teknik Elektromedik 5. Gizi Klinis - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) K3RS 2. Bimtek Akreditasi Rumah Sakit Standar Nasional (STARKES) 3. Pelatihan Teknis Hemodialisa & ICU Dasar 4. Diklat Koding Penyakit (ICD-10/ICD-9 CM) untuk Casemix 5. Pelatihan Manajemen Logistik Farmasi & Alat Kesehatan 6. Workshop Etiko-Legal Pelayanan Kesehatan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Kedokteran Subspesialis 2. Manajemen Rumah Sakit (MARS) 3. Fisika Medis 4. Psikologi Klinis 5. Informatika Medis - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan <i>Advanced Trauma Life Support</i> (ATLS) untuk Dokter 2. Bimtek Manajemen Risiko Klinis & Non Klinis RS 3. Pelatihan Teknis Pelayanan Jantung Terpadu & Kanker 4. Diklat Auditor Internal Mutu Rumah Sakit 5. Pelatihan Keperawatan Kritis (ICU/ICCU/PICU/NICU) Lanjut 6. Workshop <i>Telemedicine</i> & Kesehatan Digital - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Inovasi Kesehatan 2. Epidemiologi Klinik 3. Hukum Kesehatan 4. Manajemen Keuangan RS - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Kepemimpinan Klinis (Clinical Leadership) 2. <i>Workshop Lean Management</i> di Rumah Sakit (Efisiensi) 3. Pelatihan Pengembangan Layanan Unggulan (<i>Center of Excellence</i>) 4. Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) Sektor Kesehatan 5. Bimtek Penyusunan <i>Clinical Pathway</i> & Panduan Praktik Klinis 6. Pelatihan Komunikasi Efektif Dokter-Pasien (SBAR) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Biomedik 2. Kedokteran Molekuler 3. Manajemen Strategik RS 4. Hubungan Internasional (Medical Tourism) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Benchmarking Layanan Rumah Sakit Berstandar Internasional (JCI) 2. Pelatihan <i>Strategic Hospital Planning & Business Development</i> 3. Workshop <i>Green Hospital</i> & Pengelolaan Limbah Medis Terpadu 4. Pelatihan Penelitian Klinis & Publikasi Ilmiah Kedokteran 5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS Terintegrasi 6. Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor Perumahsakitan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Profesi Ners (Keperawatan) 2. S1 Psikologi 3. D3/S1 Farmasi 4. D3 Perekam Medis & Informasi Kesehatan 5. S1 Administrasi Rumah Sakit - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Asuhan Keperawatan Jiwa Dasar & Komunikasi Terapeutik 2. Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatri & <i>De-eskalasi</i> 3. <i>Basic Trauma & Cardiac Life Support</i> (BTCLS) 4. Manajemen Bangsal Keperawatan Jiwa 5. Tata Kelola Obat & Farmasi Klinis Dasar - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Spesialis Kedokteran Jiwa (Sp.KJ) 2. S2 Psikologi Klinis 3. Spesialis Keperawatan Jiwa (Sp.Kep.J) 4. S2 Administrasi Rumah Sakit (MARS) 5. Fisioterapi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Standar Akreditasi RS (STARKES) Fokus Keselamatan Pasien Jiwa 2. <i>Community Mental Health Nursing</i> (CMHN) / Keswa Masyarakat 3. Terapi Modalitas & Rehabilitasi Psikososial 4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Jiwa 5. Pencegahan & Pengendalian Infeksi (PPI) di RSJ - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S1 Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Manajemen Informasi Kesehatan (Digital) 3. Teknik Elektromedik 4. Sains Data Kesehatan 5. Desain Komunikasi Visual (Promkes) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) Terintegrasi (SATUSEHAT) 2. Layanan Telepsikiatri & Telekonseling 3. Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) Berbasis Digital 4. Keamanan Data Pasien (<i>Cyber Security</i>) 5. Digitalisasi Logistik & Aset RS - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S2 Manajemen 2. S2 Kesehatan Masyarakat 3. S3 Kedokteran / Psikologi 4. Hukum Kesehatan 5. Manajemen SDM - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. <i>Service Excellence</i> & Penanganan Komplain di RSJ 3. Manajemen Stres Kerja & <i>Burnout</i> bagi Nakes 4. Kepemimpinan Klinis (<i>Clinical Leadership</i>) 5. Inovasi Layanan Publik Kesehatan Jiwa - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S3 Manajemen Rumah Sakit 2. Kesehatan Lingkungan 3. Kajian Kesehatan Global 4. Manajemen Strategis 5. Pekerja Sosial Medis - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Konsep <i>Green Hospital</i> (RS Ramah Lingkungan) & Limbah B3 2. Layanan Kesehatan Jiwa Berbasis Pemulihan (<i>Recovery Oriented</i>) 3. Kerjasama & Jejaring Kesehatan Jiwa Internasional 4. Mitigasi Bencana di Rumah Sakit (<i>Hospital Disaster Plan</i>) 5. Perencanaan Strategis Pengembangan Layanan Unggulan RSJ - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. S1/D3 Keperawatan (Ners) 2. S1/D3 Farmasi 3. D3/D4 Kebidanan 4. S1 Gizi 5. Administrasi Rumah Sakit - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Bantuan Hidup Dasar (BHD/BLS) & <i>Patient Safety</i> 2. Pelayanan Prima (<i>Service Excellence</i>) Rumah Sakit 3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Dasar 4. Asuhan Keperawatan & Kebidanan Terkini 5. Manajemen Logistik Farmasi & Perbekalan Kesehatan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Dokter Spesialis (Penyakit Dalam/Bedah/Akutan/Obstetri/Ginekologi) 2. Magister Farmasi (Klinis/Manajemen) 3. Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS) 4. Fisioterapi 5. Kesehatan Masyarakat - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES) Paripurna 2. Manajemen Mutu & Keselamatan Pasien (PMKP) 3. K3 Rumah Sakit (K3RS) 4. Perawatan Luka Modern (<i>Wound Care</i>) 5. Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S1 Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. D4/S1 Manajemen Informasi Kesehatan (Rekam Medis) 3. Teknik Elektromedik 4. Sains Data Kesehatan 5. Pemasaran Rumah Sakit - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) & Integrasi SATUSEHAT 2. Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) Terintegrasi 3. Keamanan Data Pasien (<i>Health Cyber Security</i>) 4. <i>Digital Marketing & Branding</i> Layanan RSUD 5. Telemedisin & Telekonsultasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Manajemen 2. Magister Kesehatan Masyarakat (Epidemiologi) 3. Hukum Kesehatan 4. Psikologi Klinis 5. Manajemen SDM - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. Kepemimpinan Klinis (<i>Clinical Leadership</i>) 3. Manajemen Komplain & Komunikasi Efektif Dokter-Pasien 4. Manajemen Konflik & Stres Kerja Tenaga Medis 5. Inovasi Pengembangan Layanan Unggulan RS - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S3 Ilmu Kesehatan / Biomedis 2. S3 Farmasi / Kefarmasian 3. Kesehatan Lingkungan 4. Manajemen Bencana 5. Studi Pembangunan Berkelanjutan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Implementasi <i>Green Hospital</i> & Pengelolaan Limbah B3 Berkelanjutan 2. Kesiapsiagaan Bencana Rumah Sakit (<i>Hospital Disaster Plan</i>) 3. Manajemen Energi & Efisiensi Sumber Daya RS 4. Pelayanan Kesehatan Ramah Lingkungan 5. Strategi Kemitraan & Jejaring Rujukan Global - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Manajemen 2. Administrasi Negara 3. Ekonomi Pembangunan 4. Teknik Sipil (Manajemen Konstruksi) 5. Akuntansi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknis Pengendalian dan Evaluasi (Monev) Pembangunan 2. Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan (LKPJ/LPPD) 3. Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) 4. Analisis Standar Belanja (ASB) & Standar Harga 5. Administrasi Pelaporan Realisasi Fisik & Keuangan (RFK) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Studi Pembangunan 2. Manajemen Proyek 3. Statistika Terapan 4. Ilmu Pemerintahan 5. Arsitektur - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah 2. Audit Kualitas Konstruksi (Pengawasan) 3. Teknik Fasilitasi Rapat Koordinasi Pimpinan (Rapim) 4. Analisis Hambatan Pembangunan (<i>Debottlenecking</i>) 5. Standar Pelaporan Pembangunan Terintegrasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi 2. Sains Data (<i>Data Science</i>) 3. Teknik Informatika 4. Desain Komunikasi Visual (Infografis) 5. Manajemen Sistem Informasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Penggunaan Aplikasi E-Monev & Dashboard Pimpinan 2. Visualisasi Data Pembangunan (<i>Executive Dashboard</i>) 3. Sistem Informasi Geografis (GIS) Sebaran Pembangunan 4. Analisis <i>Big Data</i> Capaian Pembangunan Daerah 5. Digitalisasi Dokumen Administrasi Pembangunan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Manajemen (Konsentrasi Pembangunan) 2. Magister Teknik Sipil Publik 3. Kebijakan Publik 4. Perencanaan Wilayah 5. Ilmu Komunikasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. Manajemen Strategis Pengendalian Pembangunan 3. Teknik Negosiasi & Koordinasi Lintas Sektor 4. <i>Problem Solving</i> & Pengambilan Keputusan Strategis 5. Komunikasi Efektif Pelaporan Pimpinan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Ilmu Lingkungan 3. Manajemen Aset & Infrastruktur 4. Ekonomi Lingkungan 5. Kajian Strategik - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Monitoring & Evaluasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2. Penerapan <i>Green Construction</i> dalam Proyek Pemerintah 3. Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) 4. Evaluasi Dampak Pembangunan Jangka Panjang 5. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Manajemen (S1/S2) 2. Ilmu Pemerintahan (S.Tr.IP/S1) 3. Administrasi Negara 4. Ilmu Komunikasi (Humas) 5. Sastra Inggris / Bahasa Asing - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Dasar Keprotokolan & Tata Upacara Sipil 2. Teknik <i>Master of Ceremony</i> (MC) Kenegaraan 3. Tata Naskah Dinas Pimpinan & Korespondensi 4. Pelatihan Teknis Pengelolaan Kinerja ASN (Internal) 5. Fotografi & Videografi Jurnalistik Dasar - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Hubungan Masyarakat (Public Relations) 2. Jurnalistik / Broadcasting 3. Manajemen Aset / Logistik 4. Administrasi Perkantoran - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Agenda & Penjadwalan Pimpinan 2. Pelayanan Prima (<i>Service Excellence</i>) Tamu VVIP 3. Teknik Penulisan Pidato (<i>Speech Writing</i>) & Rilis Pers 4. Manajemen Logistik & Jamuan Resmi (<i>Table Manner</i>) 5. <i>Liaison Officer</i> (LO) Event Daerah - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Desain Komunikasi Visual (DKV) 2. Sistem Informasi / Teknik Informatika Kreatif 3. Multimedia 4. Pemasaran Digital 5. Sains Data (<i>Media Analytics</i>) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Media Sosial Pimpinan (<i>Personal Branding</i>) 2. Analisis Sentimen Media & <i>Digital Monitoring</i> 3. <i>Video Editing & Motion Graphic</i> untuk Dokumentasi Pimpinan 4. Keamanan Informasi Data Jadwal & Komunikasi Pimpinan 5. Digitalisasi Arsip Dokumentasi Pimpinan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Ilmu Komunikasi 2. Magister Manajemen Publik 3. Kebijakan Publik 4. Ilmu Politik - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. Manajemen Krisis Komunikasi & <i>Public Relations</i> 3. <i>Public Speaking & Teknik Wawancara Media</i> 4. Strategi Komunikasi Kebijakan Pimpinan 5. Manajemen Konflik & Diplomasi Internal - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Hubungan Internasional 2. Studi Pembangunan Berkelanjutan 3. Manajemen Strategis 4. Kajian Budaya (<i>Cross-Cultural Understanding</i>) 5. Ilmu Lingkungan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Protokol Internasional & Diplomasi Luar Negeri 2. <i>Green Event Management</i> (Penyelenggaraan Acara Ramah Lingkungan) 3. Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 4. Etika Pergaulan Internasional & Lintas Budaya 5. <i>Strategic Leadership</i> Pendampingan Pimpinan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Ilmu Hukum (Tata Negara/Administrasi Negara) 2. Hukum Pidana/Perdata 3. Ilmu Pemerintahan 4. Administrasi Publik 5. Manajemen Kearsipan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. <i>Legal Drafting</i> (Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) Tingkat Dasar 2. Tata Cara Harmonisasi Produk Hukum Daerah 3. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dasar 4. Teknik Penyuluhan Hukum & HAM 5. Tata Naskah Dinas & Administrasi Biro Hukum - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Hukum (M.H) 2. Magister Kenotariatan 3. Hukum Bisnis 4. Sosiologi Hukum 5. Ilmu Perpustakaan (Dokumentasi Hukum) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sertifikasi Perancang Peraturan Perundang-undangan (Legislative Drafter) 2. Teknik Mediasi & Advokasi Bantuan Hukum Non-Litigasi 3. Audit Hukum (<i>Legal Audit</i>) Pemerintah Daerah 4. Analisis & Evaluasi Produk Hukum Daerah 5. Manajemen Risiko Hukum (<i>Legal Risk Management</i>) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Hukum Siber (<i>Cyber Law</i>) 3. Manajemen Sistem Informasi 4. Sains Data (<i>Legal Analytics</i>) 5. Desain Komunikasi Visual (Sosialisasi Hukum) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen JDIH Terintegrasi & Digitalisasi Dokumen Hukum 2. Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dalam Analisis Hukum 3. Keamanan Informasi Data Produk Hukum (<i>Cyber Security</i>) 4. <i>E-Litigation</i> & Pendampingan Hukum Berbasis Elektronik 5. Sosialisasi Produk Hukum Melalui Media Digital - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Kebijakan Publik 2. Manajemen SDM 3. Ilmu Politik 4. Hukum Ekonomi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA) / Analisis Dampak Regulasi 3. Teknik Negosiasi Tingkat Lanjut & Penyelesaian Sengketa 4. <i>Legal Reasoning</i> & Argumentasi Hukum Strategis 5. Kepemimpinan Hukum (<i>Legal Leadership</i>) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Hukum Internasional 2. Hukum Lingkungan (<i>Environmental Law</i>) 3. Studi Pembangunan Berkelanjutan 4. Doktor Ilmu Hukum (S3) 5. Manajemen Strategis - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Perancangan Regulasi Ekonomi Hijau (<i>Green Economy Regulation</i>) 2. Hukum Kontrak Internasional & Investasi Asing 3. Advokasi Hukum Lingkungan & SDGs 4. Harmonisasi Hukum Global-Lokal (ASEAN/International) 5. Strategi Litigasi Pemerintah di Tingkat Nasional /Internasional - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Manajemen (Keuangan/SDM) 2. Ilmu Administrasi Negara 3. Ilmu Pemerintahan 4. Akuntansi 5. Studi Agama/Teologi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Teknis Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial 2. Diklat Analisis Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3. Bimtek Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan 4. Pelatihan Manajemen Kegiatan Keagamaan dan Pembinaan Mental 5. Diklat Bendahara Pengeluaran & Pertanggungjawaban Keuangan 6. Pelatihan Tata Naskah Dinas & Kearsipan Elektronik - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Ilmu Kesejahteraan Sosial 2. Sosiologi Agama 3. Kebijakan Publik 4. Ekonomi Pembangunan 5. Psikologi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 2. Bimtek Audit Kinerja Program Kesejahteraan Rakyat 3. Pelatihan Fasilitator Kerukunan Umat Beragama 4. Diklat Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bidang Kesra 5. Pelatihan Teknis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Modul Bansos 6. Workshop Evaluasi Dampak Program Bantuan Sosial - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Dakwah/Bimbingan Penyuluhan 2. Hukum Tata Negara 3. Statistika Sosial 4. Komunikasi Penyiaran Islam 5. Antropologi Sosial - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Advokasi Kebijakan Sosial & Keagamaan 2. Bimtek Manajemen Risiko Penyaluran Bantuan Pemerintah 3. Pelatihan Digitalisasi Layanan Kesejahteraan Rakyat 4. Diklat Mediator Konflik Sosial & Keagamaan 5. Pelatihan Analisis Data Kemiskinan (Data Science Dasar) 6. Workshop Pemberdayaan Ekonomi Umat & Lembaga Keagamaan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Studi Pembangunan 2. Manajemen Strategis 3. Perbandingan Agama 4. Ilmu Gizi (Kesehatan Masyarakat) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Manajemen Krisis & Bencana Sosial 2. Workshop Sinergitas Program Kesra dengan CSR Perusahaan 3. Pelatihan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kesra 4. Diklat Kepemimpinan Pengawas (PKP) Sektor Sosial 5. Bimtek Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Produktif 6. Pelatihan Public Speaking & Protokoler Kegiatan Keagamaan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Ilmu Lingkungan (Sosial) 2. Hubungan Internasional (Diplomasi Agama) 3. Manajemen SDM 4. Filsafat - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Benchmarking Tata Kelola Dana Abadi Umat & Sosial 2. Pelatihan <i>Strategic Social Planning</i> 3. Workshop Moderasi Beragama & Wawasan Kebangsaan 4. Pelatihan Audit Forensik Bantuan Sosial 5. Pengembangan Sistem Database Kesejahteraan Rakyat Terintegrasi 6. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Sektor Kesra - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Ilmu Pemerintahan 2. Administrasi Negara/Publik 3. Hukum (Tata Negara) 4. Manajemen Sumber Daya Manusia 5. Psikologi Organisasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknis Analisis Jabatan (Anjab) & Analisis Beban Kerja (ABK) 2. Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 4. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Dasar 5. Fasilitasi Standar Pelayanan Publik (SPP) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Kebijakan Publik 2. Manajemen Kinerja 3. Akuntansi Sektor Publik 4. Sosiologi Organisasi 5. Statistik Pemerintahan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 2. Manajemen Reformasi Birokrasi (RB) General & Tematik 3. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 4. Internalisasi Budaya Kerja ASN (BerAKHLAK) 5. Teknik Fasilitasi & Evaluasi Ketatalaksanaan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Sains Data (Data Analytics) 3. Manajemen Sistem Informasi 4. Teknik Industri (Manajemen Proses) 5. Desain Organisasi Digital - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 2. Digitalisasi Proses Bisnis & Tata Naskah Dinas Elektronik 3. Analisis Kinerja Organisasi Berbasis Big Data 4. Perancangan Struktur Organisasi Agile (Lincah) 5. Audit Kinerja & Tata Kelola Organisasi Digital - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Administrasi Publik 2. Magister Manajemen 3. Ilmu Komunikasi (Strategis) 4. Pengembangan Organisasi (Organization Development) 5. Manajemen Inovasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. Manajemen Perubahan (Change Management) Birokrasi 3. Design Thinking untuk Inovasi Kebijakan Kelembagaan 4. Teknik Negosiasi & Advokasi Penataan Organisasi 5. Kepemimpinan Transformasional dalam Reformasi Birokrasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Manajemen Strategis 3. Hubungan Internasional (Comparative Government) 4. Kajian Kebijakan Publik Lanjut 5. Administrasi Pembangunan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) 2. Strategi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia (World Class Bureaucracy) 3. Perencanaan Strategis Organisasi Pemerintah Adaptif 4. Kolaborasi Lintas Sektor (Whole of Government) 5. Evaluasi Dampak Kebijakan Reformasi Birokrasi Jangka Panjang - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Ilmu Pemerintahan 2. Administrasi Negara/Publik 3. Hukum (Tata Negara/Agraria) 4. Manajemen 5. Geografi/Geodesi (Dasar) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Biro 3. Tata Cara Penegasan & Penetapan Batas Daerah/Desa 4. Administrasi Pertanahan & Inventarisasi Tanah Pemerintah 5. Teknis Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Ilmu Pemerintahan 2. Magister Administrasi Publik 3. Perencanaan Wilayah dan Kota 4. Hubungan Internasional (Kerjasama) 5. Kebijakan Publik - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Kerjasama Daerah (Dalam & Luar Negeri) 2. Teknik Mediasi & Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah 3. Penataan Wilayah Administrasi Kecamatan & Desa/Kelurahan 4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5. Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) & PAW - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi 2. Teknik Geomatika / Geodesi (Pemetaan) 3. Sains Data (Governance Data) 4. Hukum Siber 5. Manajemen Sistem Informasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Modul Pemerintahan 2. Pemetaan Batas Wilayah Berbasis GIS (<i>Geographic Information System</i>) 3. Digitalisasi Database Kerjasama Daerah (E-Kerjasama) 4. Analisis <i>Big Data</i> Laporan Kinerja Pemerintah 5. Tata Kelola <i>Smart Governance</i> Otonomi Daerah - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Doktor Ilmu Pemerintahan 2. Hukum Agraria Lanjut 3. Ilmu Politik - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. Teknik Negosiasi Tingkat Lanjut (G to G) 3. Manajemen Konflik Pertanahan & Agraria 4. Strategi Kebijakan Otonomi Daerah & Desentralisasi 5. <i>Public Speaking</i> & Diplomasi Protokoler - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Kajian Strategik Ketahanan Nasional 3. Manajemen Strategis 4. Hukum Internasional 5. Sosiologi Pedesaan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (<i>Collaborative Governance</i>) 2. Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara/Daerah 3. Diplomasi Kerjasama Luar Negeri (<i>Sister Province</i>) 4. Perencanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa) 5. Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah Jangka Panjang - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Manajemen Rantai Pasok (<i>Supply Chain Management</i>) 2. Hukum (Hukum Kontrak/Bisnis) 3. Teknik Sipil/Arsitektur 4. Ilmu Ekonomi 5. Teknologi Informasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 & Dasar 2. Bimtek Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terupdate 3. Pelatihan Teknis Penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) 4. Diklat Manajemen Kontrak Pengadaan Dasar 5. Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 6. Bimtek E-Katalog Lokal dan Toko Daring - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Akuntansi Forensik 2. Manajemen Proyek 3. Administrasi Publik 4. Teknik Informatika 5. Ilmu Komunikasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) Jenjang Muda 2. Bimtek Audit & Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa 3. Pelatihan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa 4. Diklat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Kontrak 5. Pelatihan Teknis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (Design & Build) 6. Workshop Konsolidasi Pengadaan untuk Efisiensi Anggaran - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Manajemen Strategis 2. Hukum Administrasi Negara 3. Sains Data (<i>Data Science</i>) 4. Ekonomi Pembangunan 5. Teknik Lingkungan (<i>Green Procurement</i>) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan Kompetensi PBJP Level Lanjut (Strategis) 2. Bimtek Analisis Pasar dan Strategi Pengadaan (<i>Market Analysis</i>) 3. Pelatihan Audit Forensik Pengadaan & Investigasi Kecurangan (<i>Fraud</i>) 4. Diklat Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ Menuju Level Kematangan Proaktif 5. Pelatihan <i>Green Public Procurement</i> (Pengadaan Berkelanjutan) 6. Workshop Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi Pengadaan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Kebijakan Publik 2. Hubungan Internasional 3. Manajemen Aset - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Pelatihan <i>Contract Drafting & Contract Management Specialist</i> 2. Workshop <i>International Procurement</i> (Pengadaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri) 3. Pelatihan Mediasi dan Arbitrase Sengketa Pengadaan 4. Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) Sektor Pengadaan 5. Bimtek Clearing House Pengadaan 6. Pelatihan Public Speaking & Komunikasi Persuasif bagi Pokja Pemilihan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Studi Pembangunan 2. Ilmu Lingkungan 3. Manajemen Logistik 4. Hukum Bisnis Internasional 5. dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	1. Benchmarking Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Terbaik (Best Practice) 2. Pelatihan <i>Strategic Supply Chain Management</i> 3. Workshop <i>Sustainable Procurement & Circular Economy</i> 4. Pelatihan Audit Kinerja UKPBJ 5. Pengembangan Sistem Big Data Analitik Pengadaan Daerah 6. Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor Pengadaan - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi

BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Ilmu Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan 2. Manajemen (Keuangan/ Bisnis) 3. Akuntansi 4. Administrasi Negara 5. Hukum Bisnis - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknis Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dasar 2. Analisis Laporan Keuangan BUMD & BLUD 3. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) BUMD 4. Pelatihan Dasar Analis Kebijakan Ekonomi 5. Teknis Monitoring & Evaluasi Penyaluran BBM/LPG Subsidi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Manajemen 2. Magister Ekonomi 3. Hubungan Internasional (Perdagangan) 4. Kebijakan Publik 5. Statistika Ekonomi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Analisis Perdagangan Luar Negeri & Ekspor Daerah 2. Manajemen Risiko Bisnis BUMD 3. Strategi Pengembangan & Penyehatan BUMD 4. Analisis Kebijakan Ketenagakerjaan & Pengupahan 5. Fasilitasi Akses Keuangan Daerah (TPAKD) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Sains Data (<i>Economic Data Analytics</i>) 3. Ekonomi Digital 4. Bisnis Digital 5. Manajemen Sistem Informasi - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Analisis <i>Big Data</i> Ekonomi & Harga Pasar (<i>Market Intelligence</i>) 2. Digitalisasi Pelaporan BUMD & Sistem Informasi SDA 3. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Daerah 4. <i>Dashboard</i> Pemantauan Inflasi <i>Real-time</i> 5. Audit Sistem Informasi Keuangan BUMD - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. S3 Ilmu Ekonomi / Manajemen 2. S3 Kebijakan Publik 3. Manajemen Strategis 4. Ilmu Komunikasi (Negosiasi) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) & Pengawas (PKP) 2. Teknik Negosiasi Investasi & Kerjasama Ekonomi 3. Manajemen Perubahan Transformasi BUMD 4. Strategi <i>Holding Company</i> BUMD 5. Advokasi Kebijakan Ekonomi Makro Daerah - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Ekonomi Lingkungan (<i>Environmental Economics</i>) 3. Kajian Ketahanan Energi 4. Manajemen Sumber Daya Alam 5. Hubungan Internasional - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Implementasi Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) & Perdagangan Karbon 2. Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan (PI 10%) 3. Strategi Ketahanan Pangan & Energi Jangka Panjang 4. Diplomasi Ekonomi Global & Regional (IMT-GT) 5. Perencanaan Ekonomi Sirkular (<i>Circular Economy</i>)

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Administrasi Negara/Publik 2. Manajemen 3. Ilmu Pemerintahan 4. Akuntansi 5. Teknik Sipil (Pemeliharaan Gedung) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) & Kearsipan 2. Standar Pelayanan Tamu & Keprotokolan Dasar 3. Teknis Pemeliharaan Sarana & Prasarana Gedung 4. Administrasi Layanan Operasional & Perkantoran 5. Penatausahaan Keuangan Pimpinan (BOP) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Aset / Logistik 2. Perhotelan / Pariwisata (Hospitality) 3. Administrasi Perkantoran 4. K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) 5. Hukum Perdata (Kontrak) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Inventaris & Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) 2. Pelayanan Prima (<i>Service Excellence</i>) <i>Front Office</i> & <i>VIP</i> 3. Manajemen Rumah Tangga Pimpinan Daerah 4. K3 Perkantoran & Mitigasi Kebakaran Gedung 5. Manajemen Bengkel & Kendaraan Dinas - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Sistem Informasi 2. Teknik Komputer 3. Desain Interior 4. Manajemen Bisnis 5. Teknik Elektro - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Aplikasi Manajemen Aset Daerah Digital (E-Asset) 2. Sistem Keamanan Gedung (<i>Security System</i> & CCTV) 3. Digitalisasi Arsip Vital & Terjaga 4. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (<i>E-Purchasing</i>) 5. <i>Smart Building Management System</i> - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Manajemen SDM 2. Ilmu Komunikasi 3. Kebijakan Publik 4. Manajemen Properti - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator & Pengawas (PKA/ PKP) 2. Komunikasi Efektif & <i>Public Speaking</i> Staf Pimpinan 3. Manajemen Konflik & Keluhan Pelayanan (<i>Complaint Handling</i>) 4. Manajemen Acara (<i>Event Management</i>) Kenegaraan 5. Teknik Negosiasi Pengadaan & Kerjasama - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Lingkungan 2. Studi Pembangunan Berkelanjutan 3. Teknik Lingkungan 4. Manajemen Strategis 5. Kajian Budaya (Adat Melayu) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Konsep Kantor Ramah Lingkungan (<i>Eco-Office / Green Building</i>) 2. Efisiensi Energi & Audit Energi Gedung Pemerintah 3. Pengelolaan Limbah Domestik Perkantoran 4. Strategi Pelayanan Publik Inklusif (Ramah Disabilitas) 5. Kepemimpinan Strategis Pelayanan Umum - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU									
Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2027		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2028		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2029		Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2030	
Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis	Bidang Studi Pendidikan Formal	Jenis Pelatihan Teknis
1. Manajemen / Administrasi Perkantoran 2. Perhotelan / Pariwisata 3. Akuntansi 4. Ilmu Pemerintahan 5. Ekonomi Manajemen - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Tata Kelola Aset & Barang Milik Daerah (Pengelolaan Mess/Anjungan) 2. Pelatihan Dasar Keprotokolan & MC 3. Pelayanan Prima (<i>Service Excellence</i>) & <i>Hospitality</i> 4. Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Surat Administrasi 5. Tata Naskah Dinas Elektronik - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Ilmu Komunikasi (Hubungan Masyarakat) 2. Manajemen Aset 3. Administrasi Negara 4. Sastra/Budaya (Promosi Budaya) 5. Hukum - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen Keprotokolan Pimpinan & VVIP 2. Teknik Lobi, Negosiasi & Diplomasi Antar Lembaga 3. <i>Event Organizer</i> (EO) untuk Promosi Daerah 4. Bendahara & Pengelolaan Keuangan BLUD (jika Mess menjadi BLUD) 5. Standar Pelayanan Tamu & Jamuan Resmi (<i>Table Manner</i>) - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Teknik Informatika / Sistem Informasi 2. Desain Komunikasi Visual 3. Pemasaran Digital (Digital Marketing) 4. Manajemen Bisnis 5. Sains Data - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Aplikasi Reservasi & <i>Booking System Mess Digital</i> 2. Promosi Wisata & Budaya Riau Berbasis Digital 3. Pembuatan Konten Kreatif Media Sosial (<i>Branding Daerah</i>) 4. Manajemen Database Fasilitasi Pimpinan 5. Keamanan Informasi Data Tamu VVIP - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Magister Manajemen 2. Kebijakan Publik 3. Kajian Pariwisata & Budaya 4. Manajemen SDM - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator & Pengawas (PKA/PKP) 2. Manajemen Krisis & <i>Public Relations</i> 3. <i>Public Speaking</i> & Komunikasi Efektif 4. Strategi Branding & Citra Daerah 5. Manajemen Perubahan Budaya Kerja - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Hubungan Internasional 2. Studi Pembangunan 3. Manajemen Lingkungan (Green Building) 4. Manajemen Strategis 5. Ilmu Politik - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.	1. Manajemen <i>Green Hospitality</i> (Mess Ramah Lingkungan) 2. Strategi Kerjasama & Kemitraan Pusat-Daerah 3. Promosi Investasi & Potensi Daerah Global 4. Kepemimpinan Strategis 5. Manajemen Jaringan (Networking) Nasional - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi.

3.2 Rencana Pengembangan Kompetensi Strategis

Kebutuhan Rencana Pengembangan Kompetensi Strategis telah disusun secara komprehensif guna mencapai tujuan yang lebih berdampak. Rencana tersebut dituangkan dalam Rencana Desain Pembelajaran yang dituangkan pada Lampiran 3.2 dokumen ini, dengan berdasarkan Kebutuhan Pembelajaran setiap perangkat daerah mulai tahun 2026-2030

3.3 Rencana Monitoring dan Evaluasi

Dokumen HCDP ini merupakan **dokumen hidup (*living document*)** yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan strategis instansi.

Rencana Monitoring dan Evaluasi HCDP Provinsi Riau akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

- a. **Monitoring (Pemantauan):** Memastikan bahwa Rencana Pengembangan Kompetensi Strategis (RPKS) dilaksanakan sesuai target peserta, dan alokasi anggaran (*on-track*).
- b. **Evaluasi (Penilaian):** Mengukur efektivitas dan dampak dari program pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kompetensi individu (Level 1 & 2 Kirkpatrick) dan dampaknya terhadap kinerja unit kerja serta pencapaian sasaran RPJMD (Level 3 & 4 Kirkpatrick).

2. Metodologi dan Frekuensi

a. Monitoring (Pemantauan Pelaksanaan)

- Penanggung Jawab: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) c.q. Unit Pengelola Corpu.
- Frekuensi: Dilaksanakan secara berkala setiap **Triwulan**.
- Mekanisme:
 1. **Pelaporan Unit:** Setiap Perangkat Daerah melaporkan realisasi pelaksanaan pengembangan kompetensi (Klasikal, Non-Klasikal, Pendidikan Formal) kepada BKD Provinsi Riau.
 2. **Dialog Kinerja:** Atasan langsung memantau kemajuan *Individual Development Plan (IDP)* bawahan selama Dialog Kinerja Triwulanan (terintegrasi dalam SKP).
 3. **Rapat Koordinasi:** BKD Provinsi Riau menyelenggarakan Rapat Koordinasi Corpu Triwulanan dengan Unit Kepegawaian Perangkat Daerah untuk membahas kendala dan progres pelaksanaan HCDP.

b. Evaluasi (Penilaian Dampak dan Penyesuaian)

- Penanggung Jawab: BAPPEDA Provinsi Riau (Evaluasi Dampak terhadap Sasaran RPJMD) dan BKD Provinsi Riau (Evaluasi Dampak terhadap Kompetensi ASN).
- Frekuensi: Dilaksanakan setiap Tahun (Tahunan).
- Mekanisme:
 1. Evaluasi Level 1 & 2 (Reaksi & Pembelajaran): Dilakukan oleh BPSDM (sebagai *Learning Provider*) segera setelah pelatihan selesai (pre/post-test, kuesioner kepuasan).
 2. Evaluasi Level 3 (Perilaku): Dilakukan oleh BKD bekerja sama dengan atasan langsung setelah 3-6 bulan ASN kembali bekerja, untuk menilai perubahan perilaku dan penerapan kompetensi baru.
 3. Evaluasi Level 4 (Dampak Organisasi): Dilakukan oleh BappedaLitbang dan BKD pada akhir tahun, dengan menganalisis korelasi antara investasi HCDP (ASN yang dilatih) dengan peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan pencapaian Sasaran RPJMD.
 4. Rapat Pimpinan (Dewan Pengarah): Hasil evaluasi tahunan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah (selaku Dewan Pengarah Corpu) untuk menjadi dasar penyesuaian/kalibrasi Arah Pembelajaran dan RPKS pada tahun berikutnya (T+1).

3. Penyesuaian Dokumen HCDP

HCDP akan disesuaikan (diperbarui) jika terjadi:

- a. Perubahan Kebijakan Strategis: Adanya perubahan RPJMD atau Renstra Perangkat Daerah.
- b. Kebutuhan Mendesak: Timbulnya isu strategis baru (misal: krisis, bencana, arahan nasional baru) yang membutuhkan kompetensi baru secara cepat.
- c. Hasil Evaluasi Tahunan: Ditemukannya ketidakselarasan antara RPKS yang dijalankan dengan kebutuhan riil di lapangan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan.

Bab IV

Rencana Penempatan Kembali

Penempatan kembali adalah proses penempatan ASN yang telah selesai mengikuti program pengembangan kompetensi, baik melalui jalur Pendidikan (Tugas Belajar meninggalkan tugas atau tidak meninggalkan tugas) maupun Pelatihan (Klasikal/Non-Klasikal) ke dalam jabatan atau penugasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Secara tradisional, pengembangan kompetensi seringkali berhenti pada tahap "mengirim pegawai" dan "menerima sertifikat". Akibatnya, banyak ASN yang kembali dari tugas belajar atau pelatihan ditempatkan kembali pada jabatan semula tanpa pemanfaatan kompetensi baru yang telah diperoleh. Hal ini menjadikan investasi HCDP tidak efektif tidak berdampak pada kinerja organisasi, dan menimbulkan demotivasi bagi ASN karena tidak adanya kepastian karier pasca-pengembangan.

Menjawab tantangan tersebut, dan sejalan dengan amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (KEPLAN) Nomor 604/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Tingkat Instansi, HCDP Pemerintah Provinsi Riau menganut prinsip "**Pengembangan Terintegrasi**". KEPLAN 604/2025 secara tegas mengamanatkan bahwa HCDP Instansi harus **terintegrasi dengan manajemen talenta** dan menjadi jembatan antara sistem pembelajaran dengan pengembangan karier. Oleh karena itu, rencana penempatan kembali ini merupakan strategi instansi untuk memastikan bahwa setiap kompetensi baru yang diperoleh ASN (sebagaimana dirinci dalam BAB III) dapat segera dimanfaatkan untuk mengisi kesenjangan kompetensi, mendukung *core business* Perangkat Daerah, dan mengakselerasi pencapaian 7 Misi RPJMD.

Strategi penempatan kembali ini dirancang untuk memberikan kepastian karier dan menjadi *output* nyata dari sistem ASN *Corporate University* (Corpu), yang menjembatani investasi HCDP dengan Manajemen Karier dan Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Strategi penempatan kembali ASN Pemprov Riau dibedakan berdasarkan jalur pengembangan yang telah ditempuh, dengan fokus utama pada pemanfaatan ASN untuk mengisi Jabatan Kritis (*Critical Occupational List*) yang telah dipetakan.

1. Strategi Penempatan Pasca-Pendidikan Formal (Tugas Belajar)

ASN yang telah menyelesaikan Tugas Belajar (S1, S2, S3) yang dibiayai oleh instansi (APBD/APBN/Sumber lain) diposisikan sebagai **Talenta Strategis** (*Talent Pool*) Pemprov Riau.

- **Integrasi dengan Manajemen Talenta:** Sebelum memulai pendidikan, ASN yang bersangkutan, atasan langsung, dan BKD menyusun **Kontrak Pembelajaran dan Penugasan (Learning & Assignment Contract)**.
- **Identifikasi Jabatan Target (COL):** Kontrak ini mengidentifikasi secara jelas **Jabatan Target** (yang termasuk *Critical Occupational List*) yang akan diisi oleh ASN tersebut sekembalinya dari tugas belajar. Jabatan target ini harus selaras dengan kebutuhan Misi RPJMD (misalnya, lulusan S2 Teknik Lingkungan dipetakan untuk mengisi jabatan fungsional ahli di DLHK atau Bappedalitbang untuk mendukung Misi 2 terkait Riau Hijau).
- **Proses Penempatan:** Setelah ASN melapor selesai studi, BKD dan Perangkat Daerah terkait wajib memproses penempatan ASN tersebut ke dalam Jabatan Target yang telah disepakati, baik melalui rotasi, mutasi, maupun promosi (jika memenuhi syarat), paling lambat dalam 6 (enam) bulan setelah pelaporan.
- **Kepastian Karier:** Strategi ini memberikan kepastian karier bagi ASN dan memastikan investasi pendidikan formal langsung berdampak pada pengisian Jabatan Kritis.

2. Strategi Penempatan Pasca-Pelatihan (Klasikal & Non-Klasikal)

ASN yang telah menyelesaikan pelatihan (Klasikal seperti Pelatihan Kepemimpinan, Bimtek, Workshop; atau Non-Klasikal seperti *Coaching*, *Mentoring*, *Magang*) wajib menerapkan kompetensi barunya di lingkungan kerja.

- **Integrasi dengan Manajemen Kinerja (SKP):** Penempatan kembali pasca-pelatihan terintegrasi langsung dengan **Dialog Kinerja** antara atasan dan bawahan.
- **Penugasan Baru (New Assignment):** Atasan Langsung wajib memberikan penugasan, proyek, atau tanggung jawab baru yang relevan dengan kompetensi yang baru diperoleh ASN.
 - *Contoh:* Seorang ASN Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau yang baru selesai mengikuti Bimtek "Digital Marketing" (sesuai HCDP Misi 2), wajib diberi penugasan baru oleh atasannya untuk menjadi mentor atau fasilitator digitalisasi bagi 10 Industri Kecil dan Menengah di wilayah binaannya. Hasilnya akan diukur dalam SKP Triwulan berikutnya.

- **Transfer Pengetahuan (*Knowledge Transfer*):** ASN yang telah mengikuti pelatihan (khususnya *Benchmarking* atau Magang) wajib melaksanakan sesi *Knowledge Sharing* (melalui *Community of Practice/CoP*) di unit kerjanya, yang difasilitasi oleh BPSDM dan unit kerja terkait.

3. Strategi Pemanfaatan untuk Rotasi dan Mobilitas Internal

Kompetensi yang diperoleh dari HCDP menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan rotasi dan mutasi internal untuk mengisi kesenjangan kompetensi di Perangkat Daerah lain.

- **Bank Data Kompetensi:** BKD Provinsi Riau mengelola "Bank Data Kompetensi" ASN yang telah mengikuti pengembangan strategis (sesuai HCDP BAB III).
- **Dasar Rotasi:** Jika Perangkat Daerah (misal: DPMPTSP Provinsi Riau) membutuhkan JF Analis Kebijakan dengan keahlian spesifik "Analisis Regulasi Investasi Hijau", BKD Provinsi Riau akan memprioritaskan ASN dari Perangkat Daerah lain (misal: DLHK Provinsi Riau) yang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan formal di bidang tersebut untuk dipindahkan/rotasi, guna mempercepat pencapaian Misi 2 RPJMD.

4. Alur Proses Penempatan Kembali

Alur proses penempatan kembali ASN pasca-pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. HCDP & IDP Disusun: Pelaksanaan Pengembangan: ASN mengikuti program (Tugas Belajar, Pelatihan, Magang, dll).
- b. ASN Melapor Selesai: ASN yang telah menyelesaikan program wajib melapor secara administratif (ijazah/sertifikat) dan substantif (laporan hasil pembelajaran) kepada Atasan Langsung, BKD, dan BPSDM.

1. Proses Penempatan (oleh BKD & Atasan Langsung):

- Analisis Pemanfaatan: Atasan Langsung dan BKD (Unit Manajemen Talenta) melakukan analisis cepat: "Bagaimana kompetensi baru ini akan dimanfaatkan untuk mendukung Sasaran Kinerja (SKP) dan Misi RPJMD?"
- Eksekusi Penempatan (Paling Lambat 6 Bulan untuk Tubel / 1 Bulan untuk Pelatihan):
 - **Jalur 1 (Pendidikan Formal):** Eksekusi *Learning & Assignment Contract*. BKD memproses SK Penempatan ke Jabatan Target (COL) yang telah disepakati.
 - **Jalur 2 (Pelatihan/Non-Klasikal):** Eksekusi melalui *Dialog Kinerja*. Atasan Langsung memberikan penugasan/proyek baru yang relevan dan menuangkannya dalam ekspektasi SKP berikutnya.

2. Monitoring & Evaluasi Kinerja Pasca-Penempatan:

- Kinerja ASN di posisi/penugasan baru dipantau oleh Atasan Langsung (melalui SKP Triwulanan) dan dievaluasi oleh BKD/BAPPEDA Provinsi Riau (melalui Monitoring dan Evaluasi Tahunan HCDP, sebagaimana diatur dalam BAB III.C) untuk mengukur ROI pengembangan kompetensi.

Bab V

Penutup

Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Tingkat Instansi (*Human Capital Development Plan/HCDP*) Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026-2030 ini disusun sebagai peta jalan strategis (*strategic roadmap*) untuk memastikan pengembangan kompetensi ASN selaras, terintegrasi, dan berdampak langsung terhadap pencapaian Visi "Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Bedelau)" serta 7 (tujuh) Misi Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan perencanaan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. HCDP sebagai Penjabaran Visi & Misi: Penyusunan HCDP ini merupakan amanat dari KEPLAN Nomor 604/K.1/HKM.02.2/2025 dan menjadi instrumen strategis utama untuk menjembatani antara Visi/Misi pada RPJMD dengan kesiapan SDM Aparatur. Dokumen ini mentransformasi target-target pembangunan daerah (makro) menjadi kebutuhan pembelajaran (mikro) yang terstruktur.
2. Arah Pembelajaran yang Selaras: Arah pembelajaran instansi (Bab II) telah ditetapkan selaras dengan 7 Misi RPJMD dan dijabarkan secara bertahap (Tahap I-V) sesuai fokus pembangunan tahunan, memastikan bahwa pengembangan kompetensi ASN bersifat proaktif dan relevan dengan agenda prioritas daerah.
3. Rencana Pengembangan Kompetensi Strategis (RPKS) sebagai Rencana Aksi: RPKS yang dirinci dalam Bab III telah memetakan kebutuhan kompetensi kritis (Manajerial, Sosiokultural, dan Teknis) untuk setiap klaster Misi. Rencana ini juga telah merinci desain pembelajaran (Formal, Sosial dan Berbasis Pengalaman) serta jalur pendidikan formal yang dibutuhkan untuk mengisi *Critical Occupational List (COL)*.
4. Integrasi Sistem: Sesuai amanat KEPLAN 604/K.1/HKM.02.2/2025, dokumen ini telah meletakkan fondasi untuk integrasi antara sistem pembelajaran (HCDP/IDP) dengan sistem manajemen ASN lainnya, khususnya Manajemen Kinerja (melalui SKP), Manajemen Karier, dan Manajemen Talenta (melalui Rencana Penempatan Kembali di Bab IV).

5.2 Tindak Lanjut dan Rekomendasi

Keberhasilan HCDP ini tidak terletak pada kesempurnaan dokumen, melainkan pada komitmen untuk mengimplementasikannya. Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Komitmen Kepemimpinan:** Diperlukan komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan, terutama Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) selaku pimpinan Perangkat Daerah dan Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Pengarah Pembelajaran (*Learning Council*), untuk mengawal dan mengalokasikan sumber daya (anggaran, waktu, dan pakar) demi suksesnya implementasi HCDP ini.
2. **HCDP sebagai *Living Document*:** Sesuai rencana monitoring dan evaluasi, HCDP ini harus diposisikan sebagai "dokumen hidup" (*living document*). Evaluasi tahunan wajib dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau untuk menilai dampak HCDP terhadap kinerja dan sasaran RPJMD, sehingga HCDP dapat dikalibrasi setiap tahunnya agar tetap relevan.
3. **Penurunan (*Cascade*) ke Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN (*Individual Development Plan/IDP*):** Perangkat Daerah (BKD dan BPSDM) harus segera mensosialisasikan HCDP ini ke seluruh unit kerja. Setiap atasan langsung wajib menggunakan HCDP ini sebagai rujukan utama dalam menyusun IDP bagi setiap ASN (sesuai KEPLAN 605/K.1/HKM.02.2/2025) yang terintegrasi dalam Dialog Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan.
4. **Penguatan ASN *Corporate University*:** HCDP ini harus menjadi fondasi bagi penguatan peran BPSDM dan BKD sebagai *Learning Enabler* dan *Strategic Partner* dalam kerangka *ASN Corporate University* Provinsi Riau, yang bertugas memfasilitasi, mengelola pengetahuan (*knowledge management*), dan memastikan pembelajaran berdampak pada kinerja.

Dengan implementasi yang konsisten dan terukur, Rencana Pengembangan Kompetensi Tingkat Instansi (HCDP) Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ini diyakini mampu menjadi mesin penggerak untuk mewujudkan ASN Pemerintah Provinsi Riau yang profesional, kompeten, dan berintegritas, demi tercapainya Visi Riau Bedelau 2029.

Lampiran

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Gubernur Riau	
Wakil Gubernur Riau	
Sekretaris Daerah	Staf Ahli Pemerintahan, Hukum, Politik, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Staf Ahli Bidang Pembangunan Infrastruktur Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat: Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Hukum Asisten Perekonomian dan Pembangunan: Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Asisten Administrasi Umum: Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kepala Bagian Kerja Sama dan Perbatasan Kepala Subbagian Tata Usaha KJF
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Kepala Subbagian Tata Usaha KJF
Kepala Biro Hukum	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kepala Bagian Bantuan Hukum: Kepala Subbagian Tata Usaha KJF
Kepala Biro Perekonomian	Kepala Subbagian Tata Usaha KJF
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Kepala Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang Jasa KJF
Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Kepala Subbagian Tata Usaha KJF
Kepala Biro Organisasi	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Kepala Bagian Tatalaksana: Kepala Subbagian Tata Usaha
Kepala Biro Umum	Kepala Bagian Rumah Tangga Kepala Bagian Administrasi Umum Kepala Bagian Tata Usaha: Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli KJF

Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Kepala Bagian Protokol Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah: Kepala Subbagian Tata Usaha KJF
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kepala Bagian Umum: Kepala Subbagian Umum dan Protokol Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan KJF
Kepala Inspektorat Daerah	Sekretariat: Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Kepala Inspektur Pembantu I Kepala Inspektur Pembantu II Kepala Inspektur Pembantu III Kepala Inspektur Pembantu IV KJF
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaann Barang Milik Daerah Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan KJF
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian Umum Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat: Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: Kepala Seksi Surveilansi dan Imunisasi, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan: Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian: Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana KJF
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepala Bidang Sumber Daya Air: Kepala Seksi Sungai, Danau dan Pantai, Kepala Seksi Irigasi dan Rawa Kepala Bidang Binamarga: Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Kepala Bidang Cipta Karya: Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Penyehatan Lingkungan

	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang : Kepala Seksi Pertanahan, Kepala Seksi Penataan Ruang Kepala Bidang Bina Jasa Kontruksi : Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengawasann Jasa Kontruksi KJF
Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin KJF
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian Umum Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja: Kepala Seksi Pelatihan, Permagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja: Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan: Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak, Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Kepala Bidang Ketramigrasian KJF
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi KJF
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kepala Bidang Tanaman Pangan Kepala Bidang Hortikultura Kepala Bidang Prasarana dan Saran Pertanian KJF

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum , Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepala Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas Kepala Bidang Pengendaliann Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial KJF
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat: Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukann dan Pemanfaatan Data KJF
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Subbagian Perencanaan Program Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan: Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepala Bidang Angkutan Jalan: Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek Kepala Bidang Pelayaran: Kepala Seksi Kepelabuhan, Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangana Kepala Bidang Pengembangan Transportasi: Kepala Seksi Pengembangan Sistem Transportasi, Kepala Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi KJF
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kepala Bidang Insfrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Kepala Bidang Statistik Kepala Bidang Persandisan KJF

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Umum KJF
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga KJF
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Kepala Bidang Bahasa dan Seni Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Niai Budaya Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya KJF
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip KJF
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan ,Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepala Bidang Perikanan Budidaya Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (P2HKP) Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan KJF
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kepala Bidang Kreatif KJF
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Kepala Bidang Produksi Perkebunan Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan KJF

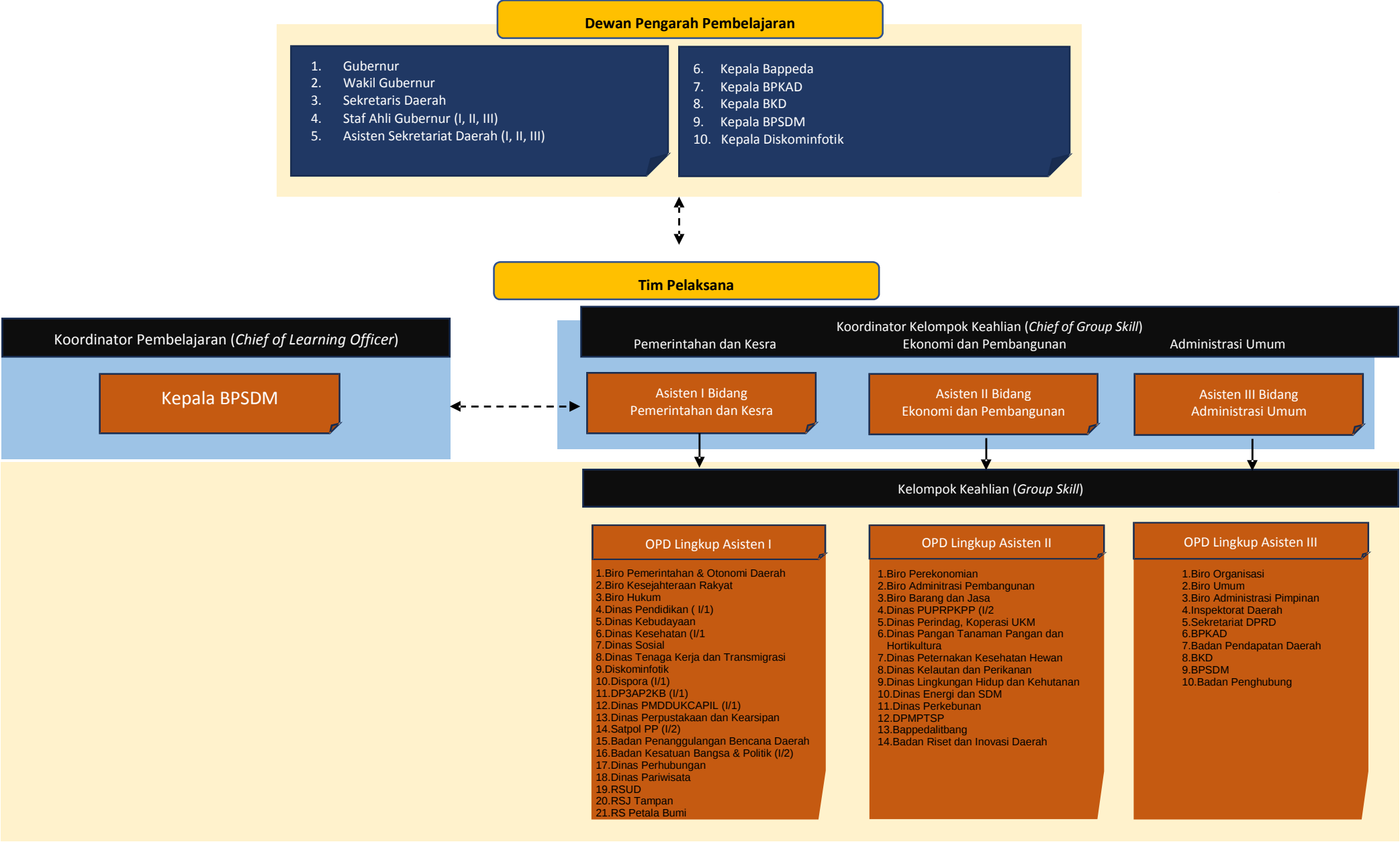
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawain dan Umum Kepala Bidang Produksi Peternakan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Kepala Bidang Agribisnis Peternakan KJF
Kepala Dinas energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Kepala Bidang Ketenagallstrikan Kepala Bidang Mineral dan Batubara Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah KJF
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan,Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama,dan Promosi Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemerdayaan Industri Kepala Bidang Perdagangan Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KJF
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Paraja Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur: Kepala Seksi Bina Masyarakat, Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Kepala Bidang Operasi: Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Seksi Pengamanan Aset Kepala Bidang Penegakan Perturan Daerah: Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga, Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat: Kepala Seksi Data dan Informasi, Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian KJF
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan KJF

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Kepala Bidang Anggaran Daerah: Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran, Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah: Kepala Subbidang Penerimaan Daerah, Kepala Subbidang Belanja Daerah Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan: Kepala Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi, Kepala Subbidang Data dan Pelaporan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah: Kepala Subbidang Penata Usahaan Barang Milik Daerah, Kepala Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah KJF
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Kepala Bidang Pajak Daerah: Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil: Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pengembangan Pendapatan, Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan, Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi Kepala Bidang: Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan, Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Kepala Subbidang Pengawasan Penerimaan Daerah KJF
Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaann Barang Milik Daerah Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Kepala Bidang Mutasi Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan KJF
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusi	Sekreteriat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaann Barang Milik Daerah Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu Kepala Bidang Pengembangan Potensi Manajerial Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dan Sosiokultural Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional KJF

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau	Unsur Pengarah Unit Pelaksana Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Kepala Bidang Pemadam Kebakaran KJF
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik KJF
Kepala Badan Riset dan Inovasi Riau	Sekretariat: Kepala Subbagian Kepegawaian Umum KJF
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau	Kepala Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan: Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Medik Kepala Wakil Direktur Umum, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian: Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Kepala Pendidikan dan Penelitian Kepala Wakil Direktur Keuangan: Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Pembendaharaan dan Mobilisasi Dana, Kepala Bagian Akuntansi KJF
Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan	Kepala Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan: Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (Diklat) Kepala Wakil Direktur Umum dan Keuangan : Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan KJF
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bidang Pelayanan Medik Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan KJF
Kepala Badan Penghubung	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga Kepala Subbidang Humas dan Protokol Kepala Subbidang Pengelola Anjungan Riau KJF

Lampiran 2.2

STRUKTUR *CORPORATE UNIVERSITY* PEMERINTAH PROVINSI RIAU



**Lampiran 3.2 Rencana Desain Pembelajaran
Tahun 2026-2030**



DESAIN PEMBELAJARAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2026

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 5	Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Tingkat Ahli/Terampil	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning	BPKP/KPK/BPK	5	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
2		Teknis Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning	BPKP/KPK/BPK	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
3		Audit Ketaatan (Compliance Audit)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning	BPKP/KPK/BPK	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
4		Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Digital	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning	BPKP/ BPK	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
5		Tata Cara Audit Operasional Dasar	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning	BPKP/ BPK	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
6		Iventarisi Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Kompetensi Inventaris Barang Milik Daerah	Pelaksana BMD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning	BPSDM Provinsi Riau	4	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
7		Akuntansi (Sektor Publik), Hukum, Manajemen, Ilmu Pemerintahan	Terpenuhinya kompetensi dalam bidang ilmu: Akuntansi (Sektor Publik), Hukum, Manajemen, Ilmu Pemerintahan	ASN Inspektorat	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyelenggara Pendidikan	4	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 5	Pengelolaan Manajemen Talenta ASN (Talent Pool)	Terpenuhinya Kompetensi Teknis Pengelolaan Manajemen Talenta	Seluruh ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Penyusunan HCDP (Human Capital Development Plan)	Terpenuhinya Kompetensi Penyusunan HCDP (Human Capital Development Plan)	Seluruh ASN Bidang Pengembangan Aparatur	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Peningkatan Kompetensi Asesor SDM Aparatur (Assessment Center)	Terpenuhinya Kompetensi Asesor SDM Aparatur (Assessment Center)	Asesor SDM Aparatur BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) & ABK	Terpenuhinya Kompetensi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	ASN Subbagian Kepegawaian dan Umum BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIASN)	Terpenuhinya Kompetensi Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIASN)	Seluruh ASN Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (SIASN)	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Legal Drafting (Penyusunan Peraturan)	Terpenuhinya Kompetensi Legal Drafting (Penyusunan Peraturan)	Seluruh ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Seleksi (CAT System)	Terpenuhinya Kompetensi Teknis Manajemen Seleksi (CAT System)	Seluruh ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Manajemen, Ilmu Pemerintahan, Teknologi Informasi, dan Psikologi	Terpenuhinya Kompetensi di bidang Manajemen, Ilmu Pemerintahan, Teknologi Informasi, dan Psikologi	Seluruh ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Tugas Belajar	Universitas Dalam dan Luar Negeri	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 7	Teknis Pengawasan & Audit Bantuan Keuangan Partai Politik	Terpenuhinya Kompetensi Teknis Pengawasan & Audit Bantuan Keuangan Partai Politik	ASN Bidang Politik Dalam Negeri	Experiential, Social, Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri	3	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
2		Tata Kelola Administrasi Hibah & Bansos Ormas	Terpenuhinya Kompetensi Tata Kelola Administrasi Hibah & Bansos Ormas	ASN Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Sosial dan Organisasi Masyarakat	Experiential, Social, Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri	2	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
3		Manajemen Arsip Vital Dokumen Politik	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Arsip Vital Dokumen Politik	ASN Bidang Politik Dalam Negeri	Experiential, Social, Formal Learning	Blended Learning	ANRI	2	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
4		Dasar-Dasar Wawasan Kebangsaan bagi ASN	Terpenuhinya Kompetensi Dasar-Dasar Wawasan Kebangsaan bagi ASN	ASN Bidang Idiologi dan Karakter Bangsa	Experiential, Social, Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri	4	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 5	Bimtek Implementasi SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	Terpenuhinya kompetensi Implementasi SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansdsi dan Pelaporan, Bidang PMBD	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	PUSDATIN Kemendagri	30	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
2		Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah & Bendahara Tersertifikasi	Terpenuhinya kompetensi Penatausahaan Keuangan Daerah & Bendahara Tersertifikasi	Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansdsi dan Pelaporan, Bidang PMBD	Formal/ Social Learning	Blended Learning	Kementrian Keuangan dan Keuangan Daerah	30	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
3		Pelatihan Sensus dan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Sensus dan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)	Bidang PBMD dan Pengurus Barang	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	BKAD Kemendagri	30	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
4		Bimtek Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) & ASB	Terpenuhinya kompetensi Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) & ASB	Bidang Anggaran	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementrian Keuangan dan Keuangan Daerah	30	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
5		Akuntansi, Manajemen Keuangan, Ekonomi Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Ilmu Hukum	Terpenuhinya kompetensi Bidang Ilmu: Akuntansi, Manajemen Keuangan, Ekonomi Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Ilmu Hukum	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar		10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 5	Kompetensi Kepemimpinan Berbasis MoT (<i>Mentoring on the Job</i>)	Meningkatkan kapasitas kepemimpinan strategis Kepala Badan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan kinerja organisasi, dan pencapaian target pembangunan daerah.	Kepala Badan	Experiential Learning	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
2		Pelatihan Fungsional Widyaiswara	Meningkatkan kompetensi widyaiswara dalam melaksanakan tugas pembelajaran sesuai standar jabatan fungsional	Widyaiswara	TOT PKN 2	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
3		Pelatihan Sosial kultural Pengelolaan Kinerja ASN	Meningkatkan pemahaman widyaiswara terhadap aspek sosial dan budaya dalam pengelolaan kinerja ASN.	Widyaiswara	Experiential Learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
4		Pelatihan Pembelajaran Digital Berbasis AI	Meningkatkan kemampuan widyaiswara dalam memanfaatkan teknologi digital dan AI untuk pembelajaran ASN.	Widyaiswara	Patok banding, E learning, Belajar mandiri, Komunitas belajar, Pembelajaran alam terbuka	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	26	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
5		Kursus TOEFL ITP. English For Presentation, Public Speaking Preparation Course	Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan komunikasi publik widyaiswara dalam mendukung tugas profesional.	Widyaiswara	Patok banding, E learning, Belajar mandiri, Komunitas belajar, Pembelajaran alam terbuka	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
6		Pelatihan Manajemen Kinerja	Meningkatkan pemahaman widyaiswara dalam penerapan manajemen kinerja ASN secara efektif.	Widyaiswara	Patok banding (benchmarking)	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
7		Pelatihan tingkat Nasional	Meningkatkan wawasan dan pemahaman widyaiswara terhadap tugas dan fungsi DPR dalam sistem pemerintahan.	Widyaiswara	Experiential Learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
8		Pelatihan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Kepala Bidang	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
9		Hospitality / Pelatihan Pelayanan Prima	Terpenuhinya kemampuan ASN yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas interaksi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.	Kepala Bidang	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
10		Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan menyusun peta & roadmap pengembangan kompetensi 1-5 thn	Kepala Bidang	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
11		Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Kepala Bidang	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
12		Pelatihan Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Kepala Bidang	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
13		Pelatihan Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kemampuan sekretaris dalam melakukan advokasi kebijakan otonomi daerah dan pengembangan SDM aparatur secara efektif.	Sekretaris	Patok banding (benchmarking)	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
14		Pelatihan Sosial kultural	Meningkatkan pemahaman sekretaris terhadap aspek sosial dan budaya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.	Sekretaris	ESQ	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
15		Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kemampuan sekretaris dalam memahami dan mendukung manajemen perencanaan pembangunan daerah.	Sekretaris	Patok banding (benchmarking)	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
16		Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan pemahaman sekretaris dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sekretaris	Formal Learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
17		Pengelolaan Administrasi Umum dan Pemerintahan	Meningkatkan kemampuan sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum dan tata kelola pemerintahan.	Sekretaris	Formal Learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
18		Pelatihan Pengendalian Evaluasi dan Anggaran	Meningkatkan kemampuan sekretaris dalam pengendalian, evaluasi, dan pengelolaan anggaran secara akuntabel.	Sekretaris	Patok banding, Coaching, Mentoring	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
19		Pelatihan Manajerial	Meningkatkan kompetensi manajerial ASN dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Coaching	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD , Non- APBD
20		Pelatihan Teknis Pengelolaan Kinerja ASN	Meningkatkan kemampuan ASN dalam pengelolaan kinerja berbasis indikator dan evaluasi.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Magang/praktik kerja, Coaching, E learning	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD , Non- APBD

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
21		Pelatihan Artificial Intelegensia (AI)	ASN mampu memanfaatkan teknologi AI untuk mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan akurat	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	Formal learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
22		Pelatihan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
23		Hospitality/ Pelatihan Pelayanan Prima	Terpenuhinya kemampuan ASN yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas interaksi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
24		Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan menyusun peta & roadmap pengembangan kompetensi 1-5 thn	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
25		Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
26		Pelatihan Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
27		Diklat TOC (Training Officer Coaches)	Memahami konsep dasar coaching, termasuk definisi, prinsip, peran coach, dan perbedaan coaching dengan mentoring, teaching, dan counseling.	Analisis pengembangan kompetensi ASN ahli pertama	Formal learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
28		Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Pelatihan	Peserta mampu menjelaskan fungsi, manfaat, alur kerja, serta komponen utama SIP dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan di instansi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
29		Pelatihan Penjaminan Mutu	Peserta mampu menjelaskan pengertian, prinsip, siklus, dan ruang lingkup penjaminan mutu dalam organisasi/instansi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
30		Pelatihan Pengelolaan Sertifikasi	Peserta mampu menjelaskan pengertian sertifikasi, standar kompetensi, skema sertifikasi, serta peran lembaga sertifikasi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
31		Pelatihan Teknis kecerdasan Articisial	Peserta mampu menjelaskan definisi AI, jenis-jenis AI (Narrow AI, Machine Learning, Deep Learning), serta ruang lingkup penerapannya	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
32		Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Peserta memahami dasar hukum, standar kompetensi jabatan, serta ketentuan perencanaan pengembangan kompetensi di instansi pemerintah	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
33		Bimtek Penyusunan Naskah Kebijakan	Meningkatkan kemampuan ASN dalam menyusun naskah kebijakan secara sistematis dan sesuai kaidah.	Penelaah Teknis Kebijakan	Bimtek/ Workshop	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
34		Pelatihan Analisis Data dan Visualisasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menganalisis data pelatihan dan menyajikannya dalam bentuk visualisasi (dashboard, infografis) untuk pengambilan keputusan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
35		Etika Profesi dalam Perumusan Kebijakan	Terpenuhinya kemampuan dalam Menerapkan nilai etika, transparansi, dan akuntabilitas	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
36		Literasi Digital untuk Riset Kebijakan (AI tools, e-library, data terbuka)	Terpenuhinya kemampuan memanfaatkan teknologi dalam riset kebijakan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Komdigi	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
37		Pelatihan Penyusunan Peta Kompetensi dan Roadmap Pengembangan SDM Aparatur	Terpenuhinya kemampuan melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi aparatur secara sistematis menggunakan pendekatan TNA untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi yang akurat dan relevan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
38		Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
39		Pelatihan Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
40		Penerapan & Pemanfaatan model serta media pembelajaran yang dikembangkan	Peserta dapat mengimplementasikan model pembelajaran (misalnya Blended Learning, Problem-Based Learning, Project-Based Learning, Microlearning, dll.) sesuai tujuan, karakteristik peserta didik, dan materi ajar	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 2	Dasar-Dasar Manajemen Bencana & Operasi SAR	Terpenuhinya Kompetensi Dasar-Dasar Manajemen Bencana & Operasi SAR	ASN di bidang terkait	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BNPB	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
2		Teknik Pemadaman Kebakaran Hutan & Lahan	Terpenuhinya Kompetensi Teknik Pemadaman Kebakaran Hutan & Lahan	ASN di bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	BASARNAS	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
3		Pelatihan Reaksi Cepat (Rapid Response) & PPGD	Terpenuhinya Kompetensi . Pelatihan Reaksi Cepat (Rapid Response) & PPGD	ASN di bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	BNPB	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
4		Penggunaan Aplikasi Pelaporan Bencana Dasar	Terpenuhinya Kompetensi Penggunaan Aplikasi Pelaporan Bencana Dasar	ASN di bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	BNPB	5	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
5		Pelatihan Bendahara & Keuangan Daerah	Terpenuhinya Pelatihan Bendahara & Keuangan Daerah	ASN di bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	BPKAD	1	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
6		Manajemen Bencana, Teknik Sipil (Rekonstruksi), Manajemen Logistik	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu manajemen bencana, teknik sipil dan manajemen logistik	ASN di bidang terkait	Tugas Belajar	Pendidikan Formal	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 5	Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja)	Terpenuhinya Kompetensi dasar pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan	ASN yang bekerja di Bidang Perencanaan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blanded Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
2		Implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Modul Perencanaan	Terpenuhinya Kompetensi dasar pelatihan Implementasi SIPD Modul Perencanaan	ASN yang bekerja di Bidang Perencanaan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blanded Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
3		Analisis Standar Belanja (ASB) & Standar Harga Satuan	Terpenuhinya Kompetensi dalam Analisis Standar Belanja & Standar Harga Satuan	ASN yang bekerja di Bidang Perencanaan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blanded Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
4		Tata Cara Pengendalian & Evaluasi (Monev) Dasar	Terpenuhinya Kompetensi dalam Tata Cara Pengendalian & Evaluasi Dasar	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blanded Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
5		Ekonomi Pembangunan, Ilmu Pemerintahan, Manajemen, Akuntansi Sektor Publik, Teknik Sipil	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 2 dan Misi 4	Pelatihan Teknis Penilaian Objek Pajak Daerah	Terpenuhinya Kompetensi penilaian objek pajak daerah	Fungsional AKPD dan ASN di bidang pajak	Formal learning	Blended Learning	Kemenkeu/ lembaga pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
2		Diklat Juru Sita Pajak Daerah & Penagihan Pajak	Terpenuhinya Kompetensi Juru Sita dan Penagihan Pajak	ASN di bidang pajak dan UPT	Formal learning	Blended Learning	Kemenkeu/ lembaga pengembangan kompetensi	20	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
3		Bimtek Pengelolaan Retribusi Daerah & Pendapatan Lain-lain	Terpenuhinya Kompetensi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya	Fungsional AKPD dan ASN Bidang Retribusi	Formal learning	Blended Learning	Kemenkeu/ lembaga pengembangan kompetensi	20	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
4		Pelatihan Analisis Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Terpenuhinya Kompetensi Analisis Potensi Pajak Kendaraan Bermotor	Fungsional AKPD dan ASN di bidang pajak	Formal learning	Blended Learning	Kemenkeu/ lembaga pengembangan kompetensi	20	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
5		Pemeriksaan Pajak Daerah	Terpenuhinya Kompetensi Pemeriksa Pajak Daerah	Fungsional AKPD dan ASN di bidang pajak	Formal learning	Blended Learning	lembaga pengembangan kompetensi	20	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
6		Pelayanan Prima (Service Excellence) SAMSAT	Terpenuhinya Kompetensi ASN dalam memberikan Pelayanan Prima	ASN di UPT	Formal learning	Blended Learning	Lembaga pengembangan kompetensi	20	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
7		Perpajakan (Fiskal)	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Perpajakan	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
8		Akuntansi	Terpenuhinya Kompetensi di bidang ilmu Akuntansi	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
9		Manajemen Keuangan	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Manajemen Keuangan	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
10		Ilmu Ekonomi	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Ekonomi	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
11		Ilmu Hukum	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu hukum	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 6	Pelatihan Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	Meningkatkan kompetensi Peneliti dan Perekayasa dalam melaksanakan Penelitian & Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan.	JFT Peneliti, JFT Analis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning, Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
2		Pelatihan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) & Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi profesional Peneliti dan Perekayasa dalam mengukur Indeks Inovasi Daerah (IID) & Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)sesuai standar kompetensi jabatan.	JFT Peneliti, JFT Analis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning, Experiential Learning	Blended Learning (daring + luring)	BRIN	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
3		Pelatihan Dasar-Dasar Analisis Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)	Meningkatkan kemampuan Analisis Kebijakan dakam menganalisis berbagai Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy) secara efektif, efisien, profesional, dan berorientasi pada ketentuan yang berlaku.	JFT Peneliti, JFT Analis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning, Experiential Learning	Blended Learning (daring + luring)	BRIN	5	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
4		Pelatihan Teknis Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI/Paten)	Meningkatkan kemampuan JFT Peneliti dan Perekayasa dan JFU dakam Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI/Paten) secara efektif, efisien, profesional, dan berorientasi pada ketentuan yang berlaku.	JFT Peneliti, JFT Analis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning, Experiential Learning	Blended Learning (daring + luring)	BRIN	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
5		Pelatihan Tata Kelola Kelitbangan & Etika Riset	Meningkatkan kemampuan Pegawai dalam mengelola Kelitbangan & Etika Riset secara profesional	Seluruh Pegawai BRIDA	Formal Learning, Experiential Learning	Blended Learning (daring + luring)	BRIN	5	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
6		Kebijakan Publik, Ilmu Pemerintahan, Statistika, Manajemen Riset, Administrasi Publik	Terpenuhinya kompetensi dibidang ilmu: Kebijakan Publik, Ilmu Pemerintahan, Statistika, Manajemen Riset, Administrasi Publik	Seluruh Pegawai BRIDA	Formal Learning, Experiential Learning	Blended Learning (daring + luring)	BRIN	5	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 2, Misi 4	Peningkatan keahlian Inspektur Tambang (Pengawasan Pertambangan)	Terpenuhinya Kompetensi Peningkatan keahlian Inspektur Tambang (Pengawasan Pertambangan)	ASN yang bekerja di Dinas ESDM	Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	20	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Pengelolaan Air Tanah & Sumur Bor	Terpenuhinya Kompetensi Pelatihan Teknis Pengelolaan Air Tanah & Sumur Bor	ASN yang bekerja di Dinas ESDM	Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	20	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Audit Energi Dasar & Konservasi Energi	Terpenuhinya Kompetensi Bimtek Audit Energi Dasar & Konservasi Energi	ASN yang bekerja di Dinas ESDM	Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	20	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan K3 Pertambangan & Keselamatan Ketenagalistrikan	Terpenuhinya Kompetensi Pelatihan K3 Pertambangan dan Keselamatan Ketenagalistrikan	ASN yang bekerja di Dinas ESDM	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	20	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Diklat Pengawasan Pemasangan Instalasi Listrik	Terpenuhinya Kompetensi Diklat Pengawasan Pemasangan Instalasi Listrik	ASN yang bekerja di Dinas ESDM	Experiential Learning	Blended Learning	PPSDM KEBTKE/Petrotek no	20	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Teknik Pertambangan	Terpenuhinya Kompetensi Teknik Pertambangan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	20	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
7		Teknik Geologi	Terpenuhinya Kompetensi Teknik Geologi	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	20	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
8		Teknik Elektro (Arus Kuat)	Terpenuhinya Kompetensi Teknik Elektro (Arus Kuat)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	20	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
9		Manajemen Energi	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Energi	ASN yang bekerja di Dinas ESDM	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	20	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 7	Bimtek Inventarisasi & Registrasi Cagar Budaya	Terpenuhinya Bimtek Inventarisasi & Registrasi Cagar Budaya	Fungsional Cagar Budaya, Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Cagar Sejarah dan Permuseuman	Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM, KemenBud	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Pelatihan Dasar Kearsipan & Dokumentasi Sejarah	Terpenuhinya Pelatihan Dasar Kearsipan & Dokumentasi Sejarah	Pejabat Struktural, Fungsional, Pelaksana	Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Workshop Penulisan Sejarah Lokal & Tradisi Lisan	Terpenuhinya Workshop Penulisan Sejarah Lokal & Tradisi Lisan	Pejabat Struktural, Fungsional, Pelaksana	Experiential Learning	Blended Learning	KemenBud, Balai Pusat Bahasa	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Manajemen Logistik & Perlengkapan Event Budaya	Terpenuhinya Pelatihan Manajemen Logistik & Perlengkapan Event Budaya	Pejabat Struktural, Fungsional, Pelaksana	Experiential Learning	Blended Learning		2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Diklat Teknis Pamong Budaya Tingkat Dasar, - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi		Pejabat Struktural, Fungsional, Pelaksana	Experiential Learning	Blended Learning		3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 7	Pengelolaan Dana Hibah Kepemudaan & Olahraga	Terpenuhinya kebutuhan kompetensi Pengelolaan Dana Hibah Kepemudaan & Olahraga	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Tata Kelola & Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga	Terpenuhinya kebutuhan kompetensi Tata Kelola & Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga (Venues)	Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal dan Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Dasar-Dasar Manajemen Organisasi Olahraga	Terpenuhinya kebutuhan kompetensi Dasar-Dasar Manajemen Organisasi Olahraga	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Pemuda dan Olahraga	6	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Dasar	Terpenuhinya kebutuhan kompetensi Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Dasar	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pelaksana	Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Pemuda dan Olahraga, BPSDM Provinsi Riau	6	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Ilmu Pemerintahan, Akuntansi	Terpenuhinya Kompetensi di bidang ilmu: Manajemen, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Ilmu Pemerintahan, Akuntansi	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 2	Teknis Budidaya Perikanan Berkelanjutan (CBIB)/(CPIB)	Terpenuhinya kompetensi Teknis Budidaya Perikanan Berkelanjutan (CBIB)	JFT dan Pelaksana Bidang Perikanan Budidaya	Formal, Social, Experiential Learning	Blended Learning	KKP, Direktorat Perikanan Budidaya	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Dasar Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut	Terpenuhinya kompetensi Dasar JF Pengelola Ekosistem Laut	JF Pengelola Ekosistem Laut	Formal, Social, Experiential Learning	Blended Learning	KKP, Dirjen Kelautan dan Pengawasan	1	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Pengawas Perikanan & Penanganan Tindak Pidana (Illegal Fishing)	Terpenuhinya kompetensi Dasar Pengawas Perikanan & Penanganan Tindak Pidana	JF/Pelaksana pada Bidang/UPT Pengawasan	Formal, Social, Experiential Learning	Blended Learning	KKP, Dirjen Pengawasan	1	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) & HACCP	Terpenuhinya kompetensi Dasar Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) & HACCP	JFT/Pelaksana di Bidang P2HKP	Formal, Social, Experiential Learning	Blended Learning	KKP	1	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Pelabuhan Perikanan & Syahbandar	Terpenuhinya Kompetensi Dasar Manajemen Pelabuhan Perikanan & Syahbandar	ASN Pada UPT Pelabuhan	Formal, Social, Experiential Learning	Blended Learning	Penyelenggara terkait	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Ilmu Perikanan Budidaya	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Perikanan Budidaya	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Sumber Daya Perairan	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Manajemen sumber daya perairan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
8		Ilmu Kelautan	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Kelautan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
9		Teknologi Hasil Perikanan	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Teknologi Hasil Perikanan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
10		Hukum Laut	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Hukum Laut	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
11		Manajemen	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu manajemen	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 1	Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan (Adminkes)	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Kesehatan Masyarakat (SKM)	Administrator Kesehatan	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	7	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support)	Terpenuhinya kompetensi Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support) di bidang Keperawatan/ Ners	Perawat	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Teknis Akreditasi Puskesmas & RS Paripurna	Terpenuhinya kompetensi Teknis Akreditasi Puskesmas & RS Paripurna di bidang farmasi	JFT. Administrator Kesehatan	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	15	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Tata Kelola Obat & Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya kompetensi Tata Kelola Obat & Perbekalan Kesehatan di bidang Rekam Medis	Asisten Apoteker/Apoteker	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	8	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Program Gizi & KIA (Stunting)	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Program Gizi & KIA (Stunting) di bidang Adminkes	Nutrisionis dan Pengelola Program Gizi dan KIA	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 5	Pelatihan Dasar-Dasar Manajemen SPBE	Terpenuhinya Kompetensi Dasar-Dasar Manajemen SPBE	ASN Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi serta Bidang Statistik	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	Menpan RB, BPSDM, LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting	29 + 2 + 5 + 23	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Tata Kelola Website dan Media Sosial Pemerintah	Terpenuhinya Kompetensi Tata Kelola Website dan Media Sosial Pemerintah	ASN Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi serta Bidang Statistik	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	Komdigi, BPSDM, LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting	25 + 5 +1 + 23	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Jurnalistik dan Penulisan Berita	Terpenuhinya Kompetensi Jurnalistik dan Penulisan Berita	ASN Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Bidang Statistik	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	5 + 10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Administrasi Perkantoran Modern dan Kearsipan Digital	Terpenuhinya Kompetensi Administrasi Perkantoran Modern dan Kearsipan Digital	ASN Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Persandian, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi serta Bidang Statistik	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting dan atau Penyelenggara lainnya	6 + 2 + 5 + 2 + 5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pembuatan dan Pengelolaan Web GIS	Terpenuhinya Kompetensi Pembuatan dan Pengelolaan Web GIS	ASN Bidang Statistik	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Pelatihan dalam Pembuatan Promt dan Pemahaman Algoritma AI	Terpenuhinya Kompetensi Pembuatan Promt dan Pemahaman Algoritma AI	ASN Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Etika Keamanan dalam AI	Terpenuhinya Kompetensi Etika Keamanan dalam AI	ASN Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Teknis Jaringan Dasar (LAN/WAN)	Terpenuhinya Kompetensi Teknis Jaringan Dasar	ASN Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Manajemen, Teknik Komputer Jaringan, Ilmu Komunikasi	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen, Teknik Komputer Jaringan dan Ilmu Komunikasi	ASN Bidang Statistik, Bidang Persandian. Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi	Formal Learning/	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 2	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terpenuhinya kompetensi dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan	ASN yang bertugas di bidang Perubahan Iklim; Polisi Kehutanan, UPT Seksi	Formal learning, Experiential learning	Blanded learning	Widyaiswara, Pusklat, Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Penyuluh Kehutanan Tingkat Dasar & Lanjutan	Terpenuhinya kompetensi dasar pendidikan dan pelatihan Penyuluh Kehutanan Tingkat Dasar & Lanjutan	Fungsional Penyuluh Kehutanan, ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning, Experiential learning	Blanded learning	Widyaiswara, Pusklat, Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Pengelolaan Sampah & Limbah B3	Terpenuhinya kompetensi dasar Pengelolaan Sampah & Limbah B3	ASN yang berada di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Formal learning	Blanded learning	Widyaiswara, Pusklat, Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Dasar Polisi Kehutanan (Polhut)	Terpenuhinya kompetensi dasar pelatihan Dasar Polisi Kehutanan (Polhut)	Fungsional polisi kehutanan, ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning, Experiential learning	Blanded learning	Widyaiswara, Pusklat, Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Diklat AMDAL (Penyusun dan Penilai)	Terpenuhinya kompetensi dasar pendidikan dan pelatihan AMDAL (Penyusun dan Penilai)	Fungsional pengendali dampak lingkungan hidup, ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning, Experiential learning	Blanded learning	Widyaiswara, Pusklat, Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Pemetaan Hutan dan GIS Dasar	Terpenuhinya kompetensi dasar Pemetaan Hutan dan GIS Dasar	Fungsional pengendali ekosistem hutan, ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning, Experiential learning	Blanded learning	Widyaiswara, Pusklat, Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
7		Ilmu Lingkungan	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu lingkungan	ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning	Tugas belajar	Lembaga pendidikan	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
8		Kehutanan	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu kehutanan	ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning	Tugas belajar	Lembaga pendidikan	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
9		Teknik Lingkungan	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu teknik lingkungan	ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning	Tugas belajar	Lembaga pendidikan	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
10		Hukum (Lingkungan)	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu hukum lingkungan	ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning	Tugas belajar	Lembaga pendidikan	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
11		Geografi (GIS)	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu geografi (GIS)	ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning	Tugas belajar	Lembaga pendidikan	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 2	Teknis Budidaya Tanaman Pangan & Hortikultura (GAP)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran	Analisis Teknis Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD,APBN,Pembiayaan lain yang sah
2		Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Dasar	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Penyuluhan Pertanian Dasar	JF POPT dan Pengawas Benih Tanaman	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD,APBN,Pembiayaan lain yang sah
3		Sertifikasi Pengawas Benih Tanaman	Terpenuhinya kompetensi dalam melakukan Pengawasan Benih Tanaman	JF Pengawas Benih Tanaman Pangan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD,APBN,Pembiayaan lain yang sah
4		Pertanian (Agronomi/Agroteknologi), Agribisnis, Penyuluhan Pertanian, Manajemen/ Akuntansi	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu: Pertanian (Agronomi/Agroteknologi), Agribisnis, Penyuluhan Pertanian, Manajemen/ Akuntansi	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	6	APBD

DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 2	Diklat Fungsional Adyatama Kepariwisataaan & Ekonomi Kreatif	Terpenuhinya Kompetensi Adyatama Kepariwisataaan & Ekonomi Kreatif	Adyatama Kepariwisataaan & Ekonomi Kreatif	Formal Learning, Uji Kompetensi	Blended Learning	BPSDM, Kementerian Pariwisata	24	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Tata Kelola Destinasi Wisata Dasar	Terpenuhinya Kompetensi Tata Kelola Wisata Dasar	Pengelola data dan informasi	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Homestay dan Pondok Wisata	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Homestay dan Pondok Wisata	Pengawas Pariwisata	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Sertifikasi Pemandu Wisata	Terpenuhinya Kompetensi Sertifikasi Pemandu Wisata	Pengelola Pariwisata, Pemandu Pariwisata	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	8	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Pariwisata/ Perhotelan, Ilmu Komunikasi, Akuntansi, Sastra Inggris/ Bahasa Asing	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu: Manajemen Pariwisata/Perhotelan, Ilmu Komunikasi, Akuntansi, Sastra Inggris/Bahasa Asing	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 3	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah	Terpenuhinya Kompetensi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Seluruh ASN di Dinas	Formal/ experiential/ social learning	Blended learning	BPSDM Provinsi Riau	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Pengawasan Konstruksi Jalan & Jembatan (Dasar)	Terpenuhinya Kompetensi Pengawasan Konstruksi Jalan & Jembatan (Dasar)	ASN yang membidangi konstruksi jalan dan jembatan	Experiential Learning	Blended learning	BPSDM Provinsi Riau	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Penyusunan RAB & HPS Konstruksi	Terpenuhinya Kompetensi Penyusunan RAB & HPS Konstruksi	ASN yang membidangi	Social Learning	Blended learning	BPSDM Kementrian PU	25	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		K3 Konstruksi (Keselamatan & Kesehatan Kerja)	Terpenuhinya Kompetensi Konstruksi (Keselamatan & Kesehatan Kerja)	ASN yang membidangi	Social Learning	Blended learning	BPSDM Provinsi Riau	25	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Tata Cara Pendaftaran Tanah & Administrasi Pertanahan	Terpenuhinya Kompetensi Tata Cara Pendaftaran Tanah & Administrasi Pertanahan	ASN yang membidangi	Formal Learning	Blended learning	BPSDM Provinsi Riau	20	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Teknik Sipil, Arsitektur, Administrasi Negara, Hukum (Agraria/Pertanahan), Akuntansi/ Manajemen Keuangan	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu: Teknik Sipil, Arsitektur, Administrasi Negara, Hukum (Agraria/Pertanahan), Akuntansi/ Manajemen Keuangan	ASN yang membidangi	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 1, Misi 7	Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Terpenuhinya kompetensi dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ PSM	Formal/ experiential/ social learning	Blended Learning	LAN/KEMENDES PDTT	1	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Dasar-Dasar Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Administrasi Kependudukan	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan/ Fasilitator Pemerintahan	Formal/ experiential/ social learning	Blended Learning	LAN/KEMENDES PDTT	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Pengelolaan Aset Desa	Terpenuhinya kompetensi Pengelolaan Aset Desa	Analisis Kebijakan Ahli Pertama/Muda, PSM	Formal/ experiential/ social learning	Blended Learning	LAN/KEMENDES PDTT	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Ilmu Pemerintahan, Hukum, Manajemen, Akuntansi, Teknik Informatika	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu: Ilmu Pemerintahan, Hukum, Manajemen, Akuntansi, Teknik Informatika	ASN	Formal Learning	TUGAS BELAJAR	PENYELENGGARA PENDIDIKAN	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 1	Pelatihan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA) & Kabupaten Layak Anak (KLA)	Terpenuhinya Kompetensi Teknis Konvensi Hak Anak (KHA) & Kabupaten Layak Anak (KLA)	Analisis Kebijakan, Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Kelola PPA	Experiential/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA, BPSDM Provinsi Riau	8	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Diklat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Terpenuhinya Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Analisis Kebijakan, Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Kelola PPA	Experiential/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA, BPSDM Provinsi Riau	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Bimtek Manajemen Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Terpenuhinya Kompetensi Teknis Manajemen Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Analisis Kebijakan, Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Kelola PPA	Experiential/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA, BPSDM Provinsi Riau	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Konseling Keluarga dan Psikososial Dasar	Terpenuhinya Kompetensi Teknis Konseling Keluarga dan Psikososial Dasar	Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Kelola PPA	Experiential/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA, BPSDM Provinsi Riau	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Diklat Dasar Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)	Terpenuhinya Kompetensi Teknis Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)	Penata KKB	Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BKKBN	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga & SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	Terpenuhinya Kompetensi Teknis Pendataan Keluarga & SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	Analisis Kebijakan, Penata Kelola PPA	Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BKKBN	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
7		Psikologi (Klinis/Perkembangan), Sosiologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Masyarakat, Hukum	Terpenuhinya Kompetensi di bidang ilmu: Psikologi (Klinis/Perkembangan), Sosiologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Masyarakat, Hukum	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 2, Misi 3	Pelatihan Teknis Operasional OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)	Terpenuhnya Kompetensi Dasar Operasional OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan, Front Office dan Help Desk Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian PANRB, Kementerian dalam Negeri	70	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Diklat Pelayanan Prima (Service Excellence) Front Office	Terpenuhnya Kompetensi Dasar Pelayanan Prima (Service Excellence) Front Office	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan, Front Office dan Help Desk Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau	Formal, Experiential dan Social Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian PANRB, Kementerian dalam Negeri	70	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Bimtek Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM)	Terpenuhnya Kompetensi Dasar Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM)	Penyelenggara pada Penanaman Modal	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian PANRB, Kementerian dalam Negeri	35	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Analisis Kelayakan Bisnis Dasar	Terpenuhnya Kompetensi Dasar Analisis Kelayakan Bisnis Dasar	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan	Formal, Experiential dan Social Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian PANRB, Kementerian dalam Negeri	70	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Diklat Penata Perizinan Jenjang Pertama	Terpenuhnya Kompetensi Dasar Penata Perizinan Jenjang Pertama	Penyelenggara pada Perizinan	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian PANRB, Kementerian dalam Negeri	35	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Pelatihan Manajemen Kearsipan Perizinan Digital	Terpenuhnya Kompetensi Dasar Manajemen Kearsipan Perizinan Digital	Penyelenggara pada Kearsipan	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Arsip Nasional RI	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Bisnis/Ekonomi, Hukum (Hukum Perizinan), Administrasi Negara, Teknik Informatika, Ilmu Komunikasi	Terpenuhnya Kompetensi di bidang ilmu; Manajemen Bisnis/Ekonomi, Hukum (Hukum Perizinan), Administrasi Negara, Teknik Informatika, Ilmu Komunikasi	Aparatur Sipil Negara	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 1	Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka & Asesmen Nasional	Terpenuhinya kompetensi Implementasi Kurikulum Merdeka & Asesmen Nasional	Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	BGMP	100	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Pengelolaan Dana BOSP dan BOSDA (Keuangan Sekolah)	Terpenuhinya kompetensi Pengelolaan Dana BOSP dan BOSDA (Keuangan Sekolah)	Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	100	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Diklat Calon Kepala Sekolah & Pengawas Sekolah (CKS/CPS)	Terpenuhinya kompetensi Calon Kepala Sekolah & Pengawas Sekolah (CKS/CPS)	Fungsional Guru yang memenuhi Syarat untuk mengikuti BCKS	Formal Learning	Blended Learning	BGTK	50	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)	Terpenuhinya kompetensi Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)	Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	BGTK	100	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Workshop Penyusunan Perangkat Ajar Digital	Terpenuhinya kompetensi Penyusunan Perangkat Ajar Digital	Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	100	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Pelatihan Teknis Manajemen Laboratorium & Perpustakaan Sekolah - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Laboratorium & Perpustakaan Sekolah - dan lainnya yang relevan dengan Tugas dan Kebutuhan Organisasi	Tenaga Teknis yang membidangi Labor dan Pustaka	Experiential Learning	Blended Learning	BPMP	100	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Pendidikan	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Manajemen Pendidikan	Kepala Sekolah	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
8		Pendidikan Guru (PGSD/Mapel)	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Guru Mapel	Fungsional Guru	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
9		Teknologi Pendidikan	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Teknologi Pendidikan	Fungsional Guru	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
10		Psikologi Pendidikan	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Psikologi Pendidikan	Fungsional Guru	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 3	Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor (KIR)	Terpenuhinya kompetensi Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor (KIR)	ASN Bidang Angkutan Jalan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM, Kementerian Perhubungan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Rekayasa Lalu Lintas & Andalalin	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas & Andalalin	ASN Bidang Lalu Lintas Jalan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM, Kementerian Perhubungan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Keselamatan Jalan & Inspeksi Kendaraan (Ramp Check)	Terpenuhinya kompetensi Keselamatan Jalan & Inspeksi Kendaraan (Ramp Check)	ASN Bidang Angkutan Jalan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM, Kementerian Perhubungan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Tata Kelola Terminal & Pelabuhan Penyeberangan	Terpenuhinya kompetensi Tata Kelola Terminal & Pelabuhan Penyeberangan	ASN Bidang Pelayaran dan UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I dan Wilayah II	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM, Kementerian Perhubungan	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Pengawasan Angkutan Jalan & Over Dimension Over Loading (ODOL)	Terpenuhinya kompetensi Pengawasan Angkutan Jalan & Over Dimension Over Loading (ODOL)	ASN Bidang Lalu Lintas Jalan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM, Kementerian Perhubungan	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Manajemen Transportasi (Darat/Laut), Teknik Mesin (Otomotif)	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu	ASN di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
7		Teknik Sipil (Rekayasa Transportasi)	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu Teknik Sipil (Rekayasa Transportasi)	ASN di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
8		Teknik Mesin (Otomotif)	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu Teknik Mesin (Otomotif)	ASN di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
9		Administrasi Negara	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu Administrasi Negara	ASN di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
10		Hukum	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu Hukum	ASN di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 2, Misi 4	Pengawasan Perdagangan & Perlindungan Konsumen	Terpenuhinya kompetensi Pengawasan Perdagangan & Perlindungan Konsumen	ASN bidang pengawasan dan perdagangan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Metrologi Legal (Penera) Tingkat Dasar	Terpenuhinya kompetensi Metrologi Legal (Penera) Tingkat Dasar	ASN bidang sertifikasi penguji mutu barang dan perdagangan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Koperasi Modern & Digitalisasi Koperasi	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Koperasi Modern & Digitalisasi Koperasi	ASN bidang koperasi	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)	Terpenuhinya kompetensi Fasilitator Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)	ASN bidang industri	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan	Terpenuhinya kompetensi Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan	ASN bidang pengawas dan perdagangan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPIK)	Terpenuhinya kompetensi Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPIK)	ASN bidang industri	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Manajemen (Industri/Bisnis), Ekonomi Pembangunan, Teknik Industri, Hukum Bisnis, Administrasi Niaga	Terpenuhinya kompetensi dibidang ilmu Manajemen (Industri/Bisnis), Ekonomi Pembangunan, Teknik Industri, Hukum Bisnis, Administrasi Niaga	ASN	Formal Learning	Tugas belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 2	Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	Terpenuhinya kompetensi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	Penelaah Teknis Kebijakan, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	LAN	12	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Pendataan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Pekebun	Terpenuhinya kompetensi Pendataan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Pekebun	Penelaah Teknis Kebijakan, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	LAN	12	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)	Terpenuhinya kompetensi Teknis Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)	Penelaah Teknis Kebijakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	LAN	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan	Terpenuhinya kompetensi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	LAN	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Tata Kelola Administrasi Sarana Prasarana Perkebunan	Terpenuhinya kompetensi Tata Kelola Administrasi Sarana Prasarana Perkebunan	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengolah Data dan Informasi	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	LAN	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Pertanian (Agronomi/Agroteknologi), Manajemen, Ilmu Tanah, Administrasi Negara, Penyuluhan Pertanian	Terpenuhinya kompetensi di Bidang Ilmu: Pertanian (Agronomi/Agroteknologi), Manajemen, Ilmu Tanah, Administrasi Negara, Penyuluhan Pertanian	Penyuluh Pertanian Ahli Muda, Perencana Ahli Madya, Perencana Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Arsiparis Ahli Muda, Pengadministrasi Perkantoran, Analisis Pasar Pertanian Ahli Muda, Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026

NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 1	Pengelolaan Arsip Dinamis & Statis	Meningkatkan kompetensi arsiparis dalam melaksanakan pengelolaan arsip sehingga mampu menjamin ketersediaan arsip autentik, utuh, terpercaya, aman, dan mudah diakses	Arsiparis dan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Arsip Nasional	12	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Pelatihan Teknis Kepustakawanan	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi profesional, sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanan perpustakaan secara efektif, efisien, profesional, dan berorientasi pada mutu layanan informasi	Pustakawan dan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Perpustakaan Nasional	20	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
3		Teknis Katalogisasi & Klasifikasi Bahan Pustaka	Peserta pelatihan mampu memahami, menerapkan, dan mengelola proses katalogisasi serta klasifikasi bahan pustaka secara profesional sesuai standar nasional maupun internasional guna mendukung pengelolaan informasi, temu kembali informasi, dan pelayanan perpustakaan yang efektif dan efisien	Pustakawan dan Pranata Komputer	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Perpustakaan Nasional	5	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
4		Pelestarian Fisik & Konservasi Bahan Pustaka	Peserta mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan teknik pelestarian fisik serta konservasi bahan pustaka guna menjaga keberlanjutan informasi, nilai historis, dan keutuhan koleksi perpustakaan/arsip sesuai kaidah standar pelestarian	Pustakawan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Perpustakaan Nasional	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
5		Tata Kelola Layanan Sirkulasi & Referensi	Mampu memahami, mengelola, dan melaksanakan layanan sirkulasi serta layanan referensi secara profesional sesuai standar perpustakaan, guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada pemustaka.	Pustakawan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Perpustakaan Nasional	6	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
6		Pelatihan Manajemen Naskah Kuno & Budaya Lokal	Mampu memahami, mengelola, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno serta budaya lokal sebagai sumber ilmu pengetahuan, identitas sejarah, dan materi pelestarian warisan budaya sesuai prinsip kearsipan dan kebudayaan	Pustakawan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Perpustakaan Nasional	2	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
7		Pelatihan Pengelolaan Arsip Elektronik	Mampu memahami, mengelola, mengamankan, serta memberikan layanan arsip elektronik secara efektif sesuai standar kearsipan nasional dan prinsip tata kelola arsip digital	Arsiparis	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Arsip Nasional	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
8		Pelatihan Tata Naskah Dinas	Mampu memahami, menerapkan, dan menyusun Tata Naskah Dinas, sehingga proses komunikasi kedinasan menjadi tertib, efektif, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik	ASN	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	LAN	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
9		Ilmu Perpustakaan, Kearsipan, Sejarah/ Sastra, Manajemen	Terpenuhinya kompetensi dalam Ilmu Perpustakaan, Kearsipan, Sejarah / Sastra, Manajemen	ASN	Formal/Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara an Pendidikan	5	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 2	Teknis Inseminasi Buatan (IB) & Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisa kebuntingan pada hewan	ASN	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lemabaga Penyedia Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Juru Sembelih Halal (Juleha) & Kesejahteraan Hewan	Terpenuhinya kopetensi dalam Sembelih Halal (Juleha) & Kesejahteraan Hewan	ASN	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lemabaga Penyedia Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Dasar Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Dasar Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	ASN	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lemabaga Penyedia Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Pakan Ternak & Hijauan	Terpenuhinya komptensi dalam Manajemen Pakan Ternak & Hijauan	ASN	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lemabaga Penyedia Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Tata Kelola Administrasi Dinas	Terpenuhinya kompetensi dalam Tata Kelola Administrasi	ASN	Social Learning	Blended Learning	LAN	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Jabatan Admmistrasi, dan Pengawas	Terpenuhinya kompetensi dalam jabatan administrator dan Pengawas	Administrator dan pengawas	Formal Learning	Blended Learning	LAN	13	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
7		Peternakan, Kesehatan Hewan, Manajemen, Akuntansi	Terpenuhinya kompetensi di bidang Ilmu-ilmu Peternakan, Kesehatan Hewan, Manajemen, Akuntansi,	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikann	7	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 1, Misi 4, Misi 7	Pelatihan Dasar Pekerja Sosial (Peksos) & Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)	Terpenuhinya Kompetensi Dasar Pekerja Sosial (Peksos) & Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)	Fungsional Peksos, Pensos dan ASN yang membidangi	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Penanggulangan Bencana (TAGANA) Dasar	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Penanggulangan Bencana (TAGANA) Dasar	ASN pada bidang perlindungan dan jaminan sosial dan ASN pada bidang lainnya	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial dan BPBD	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Terpenuhinya Kompetensi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	ASN pada Bidang Penanganan Fakir Miskin dan ASN Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta ASN pada bidang lainnya	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial BPS	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Terpenuhinya Kompetensi Pendamping Program Keluarga Keluarga Harapan (PKH)	ASN pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan ASN pada bidang lainnya	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Panti Sosial & Rehabilitasi Dasar	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Panti Sosial & Rehabilitasi Dasar	ASN pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan ASN UPT Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Pengelolaan Logistik Bencana	Terpenuhinya Kompetensi Pengelolaan Logistik Bencana	ASN pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial dan BPBD	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen (SDM/Keuangan), Ilmu Pemerintahan, Hukum, Teknologi Informasi dan Psikologi	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu: Manajemen (SDM/Keuangan), Ilmu Pemerintahan, Hukum, Teknologi Informasi dan Psikologi	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 4	Pelatihan Dasar Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker)	Terpenuhinya Kompetensi Dasar Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker)	Pengawas Ketenagakerjaan, Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Diklat Dasar Mediator Hubungan Industrial	Terpenuhinya Kompetensi Mediator Hubungan Industrial	Penelaah Teknis Kebijakan, Mediator Hubungan Industrial,	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Dasar Instruktur Pelatihan Kerja (Metodologi Pelatihan)	Terpenuhinya Kompetensi Instruktur Pelatihan Kerja (Metodologi Pelatihan)	Penelaah Teknis Kebijakan, Instruktur	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum	Terpenuhinya Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum	Pengawas Ketenagakerjaan	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	4	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	Terpenuhinya Kompetensi Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	Penelaah Teknis Kebijakan, Pengolah Data dan Informasi, Penata Layanan Operasional, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Pengantar Kerja Tingkat Dasar	Terpenuhinya Kompetensi Pengantar Kerja Tingkat Dasar	Penelaah Teknis Kebijakan, Pengantar Kerja, Penata Layanan Operasional, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	6	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
7		Hukum (Hukum Ketenagakerjaan), Manajemen (SDM/Umum), Ekonomi Pembangunan, Psikologi	Terpenuhinmya Kompetensi di bidang ilmu Hukum (Hukum Ketenagakerjaan), Manajemen (SDM/Umum), Ekonomi Pembangunan, Psikologi, Ilmu Komunikasi	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 7	Diklat Dasar Polisi Pamong Praja	Terpenuhinya kompetensi dasar Pol PP	ASN Satpol PP	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	30	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
2		Teknis Pengendalian Massa (Dalmas) & Huru Hara (PHH)	Terpenuhinya kompetensi Pengendalian Massa (Dalmas) & Huru Hara (PHH)	ASN di bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	30	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
3		Pelatihan Baris Berbaris (PBB) & Tata Upacara	Terpenuhinya kompetensi Baris Berbaris (PBB) & Tata Upacara	ASN Satpol PP	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Polri	30	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
4		Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Perda	Terpenuhinya kompetensi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Perda	ASN di bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	5	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
5		Kesamaptaan & Bela Diri Praktis	Terpenuhinya kompetensi Kesamaptaan & Bela Diri Praktis	ASN di bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Polri	30	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
6		Ilmu Hukum (Pidana/Tata Negara), Ilmu Pemerintahan, Manajemen, Administrasi Negara, Pendidikan Jasmani/Kepelatihan	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu: Ilmu Hukum (Pidana/Tata Negara), Ilmu Pemerintahan, Manajemen, Administrasi Negara, Pendidikan Jasmani/Kepelatihan	ASN di bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

UPT BERSIFAT KHUSUS RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 1	Bantuan Hidup Dasar (BHD) & Lanjutan (ACLS/ATLS)	Terpenuhinya Kompetensi Bantuan Hidup Dasar & Lanjutan	JF Kesehatan, ASN di bidang Terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	15	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dasar	Terpenuhinya Kompetensi di bidang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dasar	JF Kesehatan, ASN di bidang Terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	50	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Rekam Medis Elektronik (RME)	Terpenuhinya Kompetensi di bidang Manajemen Rekam Medis Elektronik	JF Kesehatan, ASN di bidang Terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Pelayanan Prima Rumah Sakit	Terpenuhinya Kompetensi di bidang Pelayanan Prima Rumah Sakit	JF Kesehatan, ASN di bidang Terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Keselamatan Pasien (Patient Safety)	Terpenuhinya Kompetensi di bidang DiklatKeselamatan Pasien	JF Kesehatan, ASN di bidang Terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	100	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Pelatihan Teknis Perawatan Luka Modern (Wound Care)	Terpenuhinya Kompetensi di bidang Pelatihan Teknis Perawatan Luka Modern (Wound Care)	JF Kesehatan, ASN di bidang Terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	15	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
7		Kedokteran Umum/Spesialis Dasar	Terpenuhinya Pendidikan di bidang Kedokteran Umum/Spesialis Dasar	JF Kedokteran	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Pembelajaran	12	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
8		Keperawatan (Ners)	Terpenuhinya Pendidikan di bidang Keperawatan (Ners)	JF Keperawatan	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Pembelajaran	30	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
9		Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Pendidikan di bidang Kesehatan Masyarakat	JF Kesehatan Masyarakat, ASN Bidang Terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Pembelajaran	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
10		Administrasi Rumah Sakit	Terpenuhinya Pendidikan di bidang Administrasi Rumah Sakit	ASN bidang Terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Pembelajaran	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
11		Farmasi Klinis	Terpenuhinya Pendidikan di bidang Farmasi Klinis	JF Farmasi	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Pembelajaran	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 1	Asuhan Keperawatan Jiwa Dasar & Komunikasi Terapeutik	Terpenuhi nya kompetensi dasar Asuhan Keperawatan Jiwa Dasar & Komunikasi Terapeutik	Perawat	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended learning	Widyaswara, Organisasi PPNI	10 – 20	ABPD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatri & De-eskalasi	Terpenuhinya kompetensi dasar Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatri & De-eskalasi	Perawat	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended learning	Perawat Spesialis Kesehatan Jiwa, Psikater, Tenaga Pelatih kesehatan, Time Code Blue	10 – 20	ABPD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Basic Trauma & Cardiac Life Support (BTCLS)	Terpenuhinya kompetensi dasar Basic Trauma & Cardiac Life Support (BTCLS)	Perawat	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended learning	Organisasi PPNI, PERKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Karidiovaskular Indonesia)	10 – 20	ABPD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Bangsal Keperawatan Jiwa	Terpenuhinya kompetensi dasar Manajemen Bangsal Keperawatan Jiwa	Perawat	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended learning	Perawat Spesialis Kesehatan Jiwa, Kepala ruangan Senior di RSJ	10 – 20	ABPD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Tata Kelola Obat & Farmasi Klinis Dasar	Terpenuhinya kompetensi dasar Tata Kelola Obat & Farmasi Klinis Dasar	Farmasi	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended learning	Apoteker Klinis, Kepala Instalasi Farmasi Rsj, Komite Farmasi dan Terapi (KFT)	10 – 20	ABPD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT PETALA BUMI PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 1	Bantuan Hidup Dasar & Patient Safety	Terpenuhinya kompetensi Bantuan Hidup Dasar & Patient Safety	Seluruh Pegawai Rumah Sakit	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	400	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Pelayanan Prima Rumah Sakit	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Pelayanan Prima Rumah Sakit	Seluruh Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat	Experiential Learning dan Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	50	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dasar	Terpenuhinya kompetensi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dasar	Tenaga Kesehatan	Experiential Learning dan Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	50	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Asuhan Keperawatan & Kebidanan Terkini	Terpenuhinya kompetensi Asuhan Keperawatan & Kebidanan Terkini	Perawat dan Bidan	Experiential Learning dan Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	50	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Logistik Farmasi & Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Logistik Farmasi & Perbekalan Kesehatan	Asisten Apoteker dan Apoteker	Experiential Learning dan Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	50	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		S1 dan Profesi Keperawatan (Ners)	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu S1 dan Profesi Keperawatan (Ners)	ASN Perawat	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
7		S1 dan Profesi Farmasi	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu S1 dan Profesi Apoteker	ASN Apoteker	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
8		D4 Kebidanan	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu D4 dan Profesi Bidan	ASN Bidan	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
9		S1 Gizi	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu Gizi	ASN Nutrisionis	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
10		Manajemen Rumah Sakit	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu Manajemen Rumah Sakit	ASN Manajemen	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1		Peningkatan Kompetensi Perisalah Legislatif	Terpenuhinya kompetensi dalam merilis, membuat transkrip rapat	Perisalah legislatif dan asisten perisalah	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	DPR RI	20	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Basic English	Terpenuhinya kompetensi dalam berbahasa inggris	Pengadministrasi Perkantoran, Penelaan teknis kebijakan, pranata komputer, penata keprotokolan, pengelola keprotokolan, JF perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM	3	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah
3		Kehumasan dan Komunikasi Publik	Terpenuhinya kompetensi dalam kemampuan komunikasi verbal dan tulisan (pers rilis, media sosial)	Pranata Kehumasan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM	5	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah
4		Fotografi Jurnalistik Kehumasan	Terpenuhinya kompetensi dalam kemampuan komunikasi verbal dan tulisan (pers rilis, media sosial)	Pranata Kehumasan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM	10	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1		Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik	Memahami konsep dasar kebijakan publik Menganalisis masalah publik dan menentukan prioritas advokasi	Fungsional Analisis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN, Universitas Negeri, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	13	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Tata Kelola Pelaporan Kegiatan dan Program Pembangunan Daerah	Meningkatkan pemahaman aparatur terkait standar dan regulasi pelaporan. Memperkuat kemampuan teknis dalam penyusunan laporan fisik, dan laporan kinerja	Fungsional Analisis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN, Universitas Negeri, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	13	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 5	Manajemen (S1/S2)	Terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai standar kompetensi jabatan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Ilmu Pemerintahan	Terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai standar kompetensi jabatan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah
3		Administrasi Negara	Terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai standar kompetensi jabatan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah
4		Ilmu Komunikasi (Humas)	Terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai standar kompetensi jabatan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah
5		Sastra Inggris / Bahasa Asing	Terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai standar kompetensi jabatan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah
6		Pelatihan Dasar Keprotokolan & Tata Upacara Sipil	Terpenuhinya Kompetensi pada bidang kerja sesuai kebutuhan jabatan dan bidang kerja	JF Analis, Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	10	APBD APBN,Pembiayaan lain yang sah
7		Teknik Master of Ceremony (MC) Kenegaraan	Terpenuhinya Kompetensi pada bidang kerja sesuai kebutuhan jabatan dan bidang kerja	JF Analis, Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	10	APBD APBN,Pembiayaan lain yang sah
8		Tata Naskah Dinas Pimpinan& Korespondensi	Terpenuhinya Kompetensi pada bidang kerja sesuai kebutuhan jabatan dan bidang kerja	JF Analis, Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	15	APBD APBN,Pembiayaan lain yang sah
9		fotografi & Videografi Jurnalistik Dasar	Terpenuhinya Kompetensi pada bidang kerja sesuai kebutuhan jabatan dan bidang kerja	JF Analis, Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	5	APBD APBN,Pembiayaan lain yang sah

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 5	Legal Drafting	Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan perundang-undangan	Perancang peraturan perundang-undangan, Analis hukum, penyusun materi hukum & perundang-undangan dan analis kebijakan	Formal learning	Blended, Learning	BPHN, Kemenkum dan Lembaga Diklat Swasta	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH)	Terpenuhinya kompetensi pengelolaan jaringan dokumentasi informasi	Analis hukum, pengelola data dan informasi	Sosial learning	Blended, Learning	Kemenkum	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Teknik penyuluhan hukum dan HAM	Terpenuhinya kompetensi penyuluhan hukum dan HAM	Analis hukum, penelaah teknis kebijakan dan analis perkara peradilan	Formal learning	Blended, Learning	Kemenkum dan Kemendagri	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Penyusunan MOU dan PKS	Terpenuhinya kompetensi aparatur dalam penyusunan MOU & PKS	Penyusun materi hukum perundang-undangan, penelaah teknis kebijakan	Experiential learning	Blended, Learning	Kemendagri	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Pendidikan khusus advokasi hukum	Terpenuhinya kompetensi dalam penyelesaian masalah hukum di dalam peradilan	Fungsional tetap ahli hukum, analis perkara peradilan dan penyusun materi hukum dan perundang-undangan	Formal learning	Blended, Learning	BPHN, Kemenkum dan Organisasi advokasi	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Pendidikan dan pelatihan mediator	Terpenuhinya kompetensi dalam penyelesaian masalah hukum di luar peradilan	Fungsional tetap ahli hukum	Formal learning	Blended, Learning	MA dan lembaga diklat swasta	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 1, Misi 4, Misi 7	Pelatihan Teknis Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	Terpenuhinya Kompetensi dalam pengelolaan dana hibah dan Bansos	ASN yang membidangi kegiatan hibah dan bansos	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Analisis Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terpenuhinya Kompetensi dalam menganalisis kebijakan kesejahteraan rakyat	JF Analis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Bimtek Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan	Terpenuhinya Kompetensi dalam memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan	ASN yang membidangi Bansos	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Manajemen Kegiatan Keagamaan dan Pembinaan Mental	Terpenuhinya Kompetensi dalam kegiatan keagamaan dan pembinaan mental	ASN yang membidangi keagamaan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Diklat Bendahara Pengeluaran & Pertanggungjawaban Keuangan	Terpenuhinya Kompetensi dalam bidang pertanggungjawaban keuangan	Bendahara dan ASN yang membidangi keuangan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM	2	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Manajemen (Keuangan/SDM), Ilmu Pemerintahan, Akuntansi, Studi Agama/Teologi	Terpenuhinya Kompetensi di bidang ilmu: Manajemen (Keuangan/SDM), Ilmu Pemerintahan, Akuntansi, Studi Agama/Teologi		Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara pendidikan	8	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 5	Teknis Analisis Jabatan (Anjab) & Analisis Beban Kerja (ABK)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Anjab & ABK	Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	JF Analis Kebijakan , Jabatan Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Dasar	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Dasar	Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Fasilitasi Standar Pelayanan Publik (SPP)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Fasilitasi Standar Pelayanan Publik	Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Ilmu Pemerintahan	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Ilmu Pemerintahan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
7		Hukum (Tata Negara)	Terpenuhinya kompetensi dalam bidang ilmu Hukum (Tata Negara)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
8		Manajemen Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya kompetensi dalam bidang ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 5, Misi 6	Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Terpenuhinya Kompetensi Diklat Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal, Experiential, Social Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Biro	Terpenuhinya Kompetensi Diklat Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal, Experiential, Social Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Tata Cara Penegasan & Penetapan Batas Daerah/Desa	Terpenuhinya Kompetensi Tata Cara Penegasan & Penetapan Batas Daerah/Desa	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal, Experiential, Social Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Administrasi Pertanahan & Inventarisasi Tanah Pemerintah	Terpenuhunya Kompetensi Administrasi Pertanahan & Inventarisasi Tanah Pemerintah	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal, Experiential, Social Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Teknis Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan	Terpenuhinya Kompetensi Teknis Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal, Experiential, Social Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Ilmu Pemerintahan, Hukum (Tata Negara/Agraria), Manajemen, Geografi/ Geodesi	Terpenuhinya Kompetensi pada Bidang Ilmu: Ilmu Pemerintahan, Hukum (Tata Negara/Agraria), Manajemen, Geografi/ Geodesi	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 5	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 & Dasar	Terpenuhinya kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 & Dasar	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal Learning	Blended Learning	LKPP RI	3	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terupdate	Meningkatkan kompetensi Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Terupdate	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Teknis Penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS	Meningkatkan kompetensi Teknis Penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Manajemen Kontrak Pengadaan Dasar	Meningkatkan kompetensi Manajemen Kontrak Pengadaan Dasar	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatkan kompetensi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Bimtek E-Katalog Lokal dan Toko Daring	Meningkatkan kompetensi Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) & TKDN	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
7		Hukum, Teknik Sipil/Arsitektur, Ilmu Ekonomi, Teknologi Informasi	Terpenuhinya kompetensi dalam bidang ilmu: Hukum, Teknik Sipil/Arsitektur, Ilmu Ekonomi, Teknologi Informasi	ASN Biro PBJ	Formal Learning	Tugas belajar	Penyelenggara pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 2, Misi 5	Teknis Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dasar	Terpenuhinya kompetensi Teknis Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dasar	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experietial, formal learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Analisis Laporan Keuangan BUMD & BLUD	Terpenuhinya kompetensi Laporan Keuangan BUMD & BLUD	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experietial, formal learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terpenuhinya kompetensi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experietial, formal learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Dasar Analis Kebijakan Ekonomi	Terpenuhinya kompetensi Dasar Analis Kebijakan Ekonomi	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experietial, formal learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Teknis Monitoring & Evaluasi Penyaluran BBM/LPG Subsidi	Terpenuhinya kompetensi Monitoring & Evaluasi Penyaluran BBM/LPG Subsidi	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experietial, formal learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Ilmu Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi, Hukum	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu: Ilmu Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi, Hukum	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	7	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 5	Standar Pelayanan Tamu & Keprotokolan Dasar	Terpenuhinya kompetensi Standar Pelayanan Tamu & Keprotokolan Dasar	Jabatan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Teknis Pemeliharaan Sarana & Prasarana Gedung	Terpenuhinya kompetensi Teknis Pemeliharaan Sarana & Prasarana Gedung	Jabatan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Penatausahaan Keuangan Pimpinan	Terpenuhinya kompetensi Teknis Pemeliharaan Sarana & Prasarana Gedung	Jabatan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	4	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen, Ilmu Pemerintahan, Akuntansi	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu: Manajemen, Ilmu Pemerintahan, Akuntansi	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggaraan Pendidikan	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU TAHUN 2026									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 5	Tata Kelola Aset & Barang Milik Daerah (Pengelolaan Mess/Anjungan)	Terpenuhinya Kompetensi Tata Kelola Aset & Barang Milik Daerah (Pengelolaan Mess/Anjungan)	ASN Badan Penghubung	Experiential, Social, Formal Learning	Blended Learning	BPKAD Provinsi Riau, Lembaga Penyelenggara	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Pelayanan Prima & Hospitality	Terpenuhinya Kompetensi Pelayanan Prima & Hospitality	ASN Badan Penghubung	Experiential, Social, Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen, Perhotelan/ Pariwisata, Akuntansi, Ilmu Pemerintahan	Terpenuhinya Kompetensi dalam bidang Ilmu: Manajemen, Perhotelan/ Pariwisata, Akuntansi, Ilmu Pemerintahan	ASN Badan Penghubung	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyelenggara	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah



DESAIN PEMBELAJARAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2027

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Audit Barang Milik Daerah (BMD) & Aset	Untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola aset daerah secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel	Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning	BPSDM Provinsi Riau	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD	Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning (daring + luring)	BPSDM Provinsi Riau/BPKP /KPK/BPK	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD	Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning (daring + luring)	BPKP/KPK /BPK	7	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD	Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning (daring + luring)	BPKP	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Tata Cara Audit Operasional Dasar Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Dasar	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD	Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning (daring + luring)	BPKP/ BPK/BPSDM/Provinsi Riau	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Ekonomi Pembangunan, Statistika, Manajemen Keuangan Daerah, Teknik Sipil (untuk Audit Fisik)	Terpenuhinya kompetensi pada bidang ilmu Ekonomi Pembangunan, Statistika, Manajemen Keuangan Daerah, dan Teknik Sipil (untuk Audit Fisik)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan Dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1.	Misi 5	Manajemen Talenta ASN	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Talenta ASN	ASN Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2.		Penyusunan HCDP (Human Capital Development Plan)	Terpenuhinya Kompetensi Penyusunan HCDP (Human Capital Development Plan)	Seluruh ASN Bidang Pengembangan Aparatur	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3.		Diklat Asesor SDM Aparatur (Assessment Center)	Terpenuhinya Kompetensi Asesor SDM Aparatur (Assessment Center)	Asesor SDM Aparatur	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4.		Analisis Jabatan (Anjab) & ABK	Terpenuhinya Kompetensi Analisis Jabatan (Anjab) & ABK	ASN Subbagian Kepegawaian dan Umum	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5.		Sistem Informasi Kepegawaian (SIASN)	Terpenuhinya Kompetensi Sistem Informasi Kepegawaian (SIASN)	ASN Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (SIASN)	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6.		Legal Drafting (Penyusunan Peraturan)	Terpenuhinya Kompetensi Legal Drafting (Penyusunan Peraturan)	ASN	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7.		Diklat Teknis Manajemen Seleksi (CAT System)	Terpenuhinya Kompetensi Teknis Manajemen Seleksi (CAT System)	ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Formal/ Experiential/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8.		Ilmu Administrasi Publik, Teknik Informatika, Psikologi (Profesi),Statistika / Data Science, Ilmu Komunikasi	Terpenuhinya Kompetensi di bidang Ilmu Administrasi Publik, Teknik Informatika, Psikologi (Profesi),Statistika / Data Science, Ilmu Komunikasi	ASN	Formal/ Experiential/ Social Learning	Tugas Belajar	Universitas Dalam dan Luar Negeri	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 6	Pelatihan Institusional & Terlisensi BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)	Meningkatkan kompetensi Peneliti dan Perekayasa dalam melaksanakan Penelitian & Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan.	JFT Peneliti, JFT Analisis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Pelatihan Manajemen Inkubator Bisnis & Teknologi	Meningkatkan kompetensi Peneliti dan Perekayasa dalam melaksanakan Manajemen Inkubator Bisnis & Teknologi	JFT Peneliti, JFT Analisis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Audit Teknologi & Kesiapterapan Teknologi (TKT)	Meningkatkan kompetensi Peneliti dan Perekayasa dalam melaksanakan Audit Teknologi & Kesiapterapan Teknologi (TKT)	JFT Peneliti, JFT Analisis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Teknik Advokasi Kebijakan Hasil Riset	Meningkatkan kompetensi Peneliti dan Perekayasa dalam melaksanakan Teknik Advokasi Kebijakan Hasil Riset	JFT Peneliti, JFT Analisis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pengelolaan Jurnal Ilmiah Terakreditasi	Meningkatkan kompetensi Peneliti dan Perekayasa dalam melaksanakan Pengelolaan Jurnal Ilmiah Terakreditasi	JFT Peneliti, JFT Analisis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Ekonomi Pembangunan 2. Sosiologi (Rekayasa Sosial) 3. Teknik Industri (Manajemen Inovasi) 4. Hukum (Perancangan Regulasi) 5. Ilmu Komunikasi (Diseminasi)	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu: 1. Ekonomi Pembangunan 2. Sosiologi (Rekayasa Sosial) 3. Teknik Industri (Manajemen Inovasi) 4. Hukum (Perancangan Regulasi) 5. Ilmu Komunikasi (Diseminasi)	Seluruh Pegawai BRIDA	Formal Learning Experiential Learning	Tugas Belajar	BRIN	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) & IKD	Terpenuhinya kompetensi dalam Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) & IKD	ASN yang bekerja di Bidang Perencanaan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	Terpenuhinya kompetensi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Teknik Fasilitasi Musrenbang Partisipatif.	Terpenuhinya kompetensi dalam Teknik Fasilitasi Musrenbang Partisipatif.	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Analisis Kelayakan Proyek Investasi Publik	Terpenuhinya kompetensi dalam Analisis Kelayakan Proyek Investasi Publik	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Risiko Pembangunan Daerah	Terpenuhinya kompetensi dalam pelatihan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1.Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) 2.Kebijakan Publik 3.Statistika Terapan 4 Sosiologi (Pemberdayaan Masyarakat) 5.Hukum Tata Negara	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu 1.Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) 2.Kebijakan Publik 3.Statistika Terapan 4 Sosiologi (Pemberdayaan Masyarakat) 5.Hukum Tata Negara	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Penyusunan Rencana Kontinjensi (<i>Renkon</i>) Bencana	Terpenuhinya kompetensi dalam Penyusunan Rencana Kontinjensi (<i>Renkon</i>) Bencana	ASN yang bekerja dibidang tersebut	Formal Learning/Experiential Learning	Blended Learning	BNPB	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Terpenuhinya kompetensi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	ASN yang bekerja dibidang tersebut	Formal Learning/Experiential Learning	Blended Learning	BNPB	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (ICS)	Terpenuhinya kompetensi teknis dibidang ilmu Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (ICS)	ASN yang bekerja dibidang tersebut	Formal Learning/Experiential Learning	Blended Learning	BNPB	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pencegahan & Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat (CBDRM)	Terpenuhinya kompetensi teknis dibidang ilmu Pencegahan & Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat (CBDRM)	ASN yang bekerja dibidang tersebut	Formal Learning/Experiential Learning	Blended Learning	BNPB	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum	ASN BPBPDK	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Geografi / Geologi 2. Teknik Lingkungan 3. Perencanaan Wilayah (Mitigasi) 4. Ilmu Komunikasi	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu: 1. Geografi / Geologi 2. Teknik Lingkungan 3. Perencanaan Wilayah (Mitigasi) 4. Ilmu Komunikasi	ASN yang bekerja dibidang tersebut	Tugas Belajar	Pendidikan Formal	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Penilaian Aset Daerah (Appraisal)	Terpenuhinya kompetensi Penilaian Aset Daerah (Appraisal)	Bidang PBMD, JFT Penilai Pemerintah	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BKAD Kemendari dan Kementerian Keuangan	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Reviu dan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Terpenuhinya kompetensi Reviu dan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Bidang Aklap	Formal Learning/ Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning	BPKP, Itjen Kemendagri	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Kas Daerah & Optimalisasi Idle Cash	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Kas Daerah & Optimalisasi Idle Cash	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, JFT AKPD dan Bagian Keuangan.	Formal Learning/ Experiential	Blended Learning	Kementerian Keuangan	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pemanfaatan & Pemindahtanganan)	Terpenuhinya kompetensi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pemanfaatan & Pemindahtanganan)	Bidang PBMD dan JFT Penilai Pemerintah dan Pengurus Barang	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BKAD Kemendari dan Kementerian Keuangan	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Analisis Laporan Keuangan	Terpenuhinya kompetensi Analisis Laporan Keuangan	Bidang AKLAP dan JFT AKPD	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Keuangan	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Penyusunan KUA-PPAS	Terpenuhinya kompetensi Penyusunan KUA-PPAS	Bidang Anggaran	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kemendagri, Kementerian Keuangan dan BPSDM	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Aset, Akuntansi Sektor Publik, Ilmu Ekonomi, Hukum Bisnis/Perdata, Statistika	Terpenuhinya kompetensi Bidang Ilmu Manajemen Aset, Akuntansi Sektor Publik, Ilmu Ekonomi, Hukum Bisnis/Perdata, Statistika	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar		10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 7	Sertifikasi Narasumber Pendidikan Politik Masyarakat	Terpenuhinya kompetensi Sertifikasi Narasumber Pendidikan Politik Masyarakat	ASN Politik Dalam Negri	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	3	APBD APBN Pembiayaan Lain yang Sah
2		Teknik Deteksi Dini & Cegah Dini Konflik Sosial (Intelijen Dasar)	Terpenuhinya kompetensi . Sertifikasi Narasumber Pendidikan Politik Masyarakat	ASN Bidang Kewaspanaan Nasional dan penanganan Konflik	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	5	APBD APBN Pembiayaan Lain yang Sah
3		Verifikasi & Validasi Organisasi Kemasyarakatan	Terpenuhinya kompetensi . Verifikasi & Validasi Organisasi Kemasyarakatan	ASN Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	5	APBD APBN Pembiayaan Lain yang Sah
4		Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Terpenuhinya kompetensi . Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	ASN Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	5	APBD APBN Pembiayaan Lain yang Sah
5		Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan & Bela Negara	Terpenuhinya kompetensi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan & Bela Negara	ASN Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	5	APBD APBN Pembiayaan Lain yang Sah
6		Hukum (Tata Negara/Pidana), Sosiologi (Konflik Sosial), Psikologi Massa, Ilmu Politik, Ekonomi Pembangunan (Ketahanan Ekonomi)	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Hukum (Tata Negara/Pidana), Sosiologi (Konflik Sosial), Psikologi Massa, Ilmu Politik, Ekonomi Pembangunan (Ketahanan Ekonomi)	ASN Badan Kesbangpol Provinsi Riau	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara Pendidikan	5	APBD APBN Pembiayaan Lain yang Sah

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran 2027					Rencana Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Kepemimpinan Berbasis MoT (Mentoring on the Job)	Meningkatkan kapasitas kepemimpinan strategis Kepala Badan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan kinerja organisasi, dan pencapaian target pembangunan daerah	Kepala Badan	Experiential Learning	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
2		Pelatihan Fungsional Widyaiswara	Meningkatkan kompetensi widyaiswara dalam melaksanakan tugas pembelajaran sesuai standar jabatan fungsional	Widyaiswara	TOT PKN 2	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
3		Pelatihan Sosialkultural Pengelolaan Kinerja ASN	Meningkatkan pemahaman widyaiswara terhadap aspek sosial dan budaya dalam pengelolaan kinerja ASN.	Widyaiswara	Experiential Learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
4		Pelatihan Pembelajaran Digital Berbasis AI	Meningkatkan kemampuan widyaiswara dalam memanfaatkan teknologi digital dan AI untuk pembelajaran ASN.	Widyaiswara	Patok banding, E-learning, Belajar mandiri, Komunitas belajar, Pembelajaran alam terbuka	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
5		Kursus TOEFL ITP. English For Presentation, Public Speaking Preparation Course	Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan komunikasi publik widyaiswara dalam mendukung tugas profesional.	Widyaiswara	Patok banding, E-learning, Belajar mandiri, Komunitas belajar, Pembelajaran alam terbuka	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
6		Pelatihan Manajemen Kinerja	Meningkatkan pemahaman widyaiswara dalam penerapan manajemen kinerja ASN secara efektif.	Widyaiswara	Patok banding (benchmarking)	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
7		Pelatihan tingkat Nasional	Meningkatkan wawasan dan pemahaman widyaiswara terhadap tugas dan fungsi DPR dalam sistem pemerintahan.	Widyaiswara	Experiential Learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
8		Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Kepala Bidang	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
9		Hospitality / Pelatihan Pelayanan Prima	Terpenuhinya kemampuan ASN yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas interaksi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.	Kepala Bidang	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
10		Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur (Training Needs Analysis/TNA)	Terpenuhinya kemampuan menyusun peta & roadmap pengembangan kompetensi 1-5 thn	Kepala Bidang	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
11		Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Kepala Bidang	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah

12		Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Kepala Bidang	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
13		Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kemampuan sekretaris dalam melakukan advokasi kebijakan otonomi daerah dan pengembangan SDM aparatur secara efektif.	Sekretaris (Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur)	Patok banding (benchmarking)	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
14		Pelatihan Sosialkultural	Meningkatkan pemahaman sekretaris terhadap aspek sosial dan budaya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.	Sekretaris (Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur)	ESQ	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
15		Pelatihan Pengendalian Evaluasi dan Anggaran	Meningkatkan kemampuan sekretaris dalam pengendalian, evaluasi, dan pengelolaan anggaran secara akuntabel.	Sekretaris (Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur)	Patok banding (benchmarking), Coaching, Mentoring	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
16		Pelatihan Teknis Pengelolaan Kinerja ASN	Meningkatkan kemampuan ASN dalam mengelola kinerja secara terukur dan berkelanjutan.	Kasubbag Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Coaching Perencanaan Kepegawaian	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, Non- APBD
17		Pelatihan Manajerial	Meningkatkan kompetensi manajerial ASN dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Coaching	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD , Non- APBD
18		Pelatihan Manajemen ASN	Meningkatkan pemahaman ASN terhadap sistem manajemen ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Coaching	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD , Non- APBD
19		Pelatihan Teknis Pengelolaan Kinerja ASN	Meningkatkan kemampuan ASN dalam pengelolaan kinerja berbasis indikator dan evaluasi.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Magang/praktik kerja, Coaching, E learning	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD , Non- APBD
20		Pelatihan Artificial Intelegensia (AI)	ASN mampu memanfaatkan teknologi AI untuk mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan akurat	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
21		Pelatihan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
22		Hospitality / Pelatihan Pelayanan Prima	Terpenuhinya kemampuan ASN yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas interaksi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah

23		Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan di bidang pengembangan kompetensi ASN	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
24		Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur (Training Needs Analysis/TNA)	Terpenuhinya kemampuan menyusun peta & roadmap pengembangan kompetensi 1-5 thn	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
25		Penyusunan Peta Kompetensi dan Roadmap Pengembangan SDM Aparatur	Terpenuhinya kemampuan melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi aparatur secara sistematis menggunakan pendekatan TNA untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi yang akurat dan relevan	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
26		Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
27		Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
28		Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	2	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
29		Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan Lembaga Administrasi Negara di bidang pengembangan kompetensi ASN	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Formal learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	2	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
30		Diklat TOC (Training Officer Coaches)	Memahami konsep dasar coaching, termasuk definisi, prinsip, peran coach, dan perbedaan coaching dengan mentoring, teaching, dan counseling.	Analisis pengembangan kompetensi ASN ahli pertama	Formal learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
31		Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan menyusun peta & roadmap pengembangan kompetensi 1-5 thn	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
32		Pelatihan Penyusunan Peta Kompetensi dan Roadmap Pengembangan SDM Aparatur	Terpenuhinya kemampuan melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi aparatur secara sistematis menggunakan pendekatan TNA untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi yang akurat dan relevan	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
33		Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
34		Pelatihan Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
35		Pengelolaan Sistem Informasi Pelatihan	Peserta mampu menjelaskan fungsi, manfaat, alur kerja, serta komponen utama SIP dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan di instansi.	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

36		Pelatihan Penjaminan Mutu	Peserta mampu menjelaskan pengertian, prinsip, siklus, dan ruang lingkup penjaminan mutu dalam organisasi/instansi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
37		Pelatihan Pengelolaaan Sertifikasi	Peserta mampu menjelaskan pengertian sertifikasi, standar kompetensi, skema sertifikasi, serta peran lembaga sertifikasi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
38		Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Peserta memahami dasar hukum, standar kompetensi jabatan, serta ketentuan perencanaan pengembangan kompetensi di instansi pemerintah	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
39		Analisis Data dan Visualisasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menganalisis data pelatihan dan menyajikannya dalam bentuk visualisasi (dashboard, infografis) untuk pengambilan Keputusan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
40		Etika Profesi dalam Perumusan Kebijakan	Terpenuhinya kemampuan dalam Menerapkan nilai etika, transparansi, dan akuntabilitas	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
41		Literasi Digital untuk Riset Kebijakan (AI tools, e-library, data terbuka)	Terpenuhinya kemampuan memanfaatkan teknologi dalam riset kebijakan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Komdigi	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
42		Penyusunan Peta Kompetensi dan Roadmap Pengembangan SDM Aparatur	Terpenuhinya kemampuan melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi aparatur secara sistematis menggunakan pendekatan TNA untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi yang akurat dan relevan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 5	Data Analytics untuk Optimalisasi PAD	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Data untuk optimalisasi PAD	Prakom, ASN Bidang Terkait	Formal, Experiential Learning	Blended Learning	Kemenkeu/ lembaga pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sektor Pendapatan	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Lembaga Pelatihan	Prakom, ASN Bidang terkait	Formal, Experiential Learning	Blended Learning	Kemenkeu/ lembaga pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Risiko Pendapatan Daerah	Terpenuhinya kompetensi terkait Manajemen Resiko Pendapatan Daerah	Analisis Kebijakan dan ASN bidang terkait	Formal, Experiential Learning	Blended Learning	Kemenkeu/ lembaga pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Penyusunan Regulasi Pajak & Retribusi Daerah	Terpenuhinya kompetensi Penyusunan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah	AKPD dan ASN bidang terkait	Formal, Experiential Learning	Blended Learning	Kemenkeu/ lembaga pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pengawasan & Pengendalian Penerimaan Daerah	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran	Analisis Kebijakan dan ASN bidang terkait	Formal, Experiential Learning	Blended Learning	Kemenkeu/ lembaga pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Intensifikasi & Ekstensifikasi Pajak Daerah	Terpenuhinya kompetensi pembelajaran terkait Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	AKPD dan ASN bidang terkait	Formal, Experiential Learning	Blended Learning	Kemenkeu/ lembaga pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Sistem Informasi	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Sistem Informasi	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Statistika	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Statistika	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Ekonomi Pembangunan	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Ekonomi Pembangunan	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Hukum Administrasi Negara	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Hukum Administrasi Negara	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
11		Penilai (Appraisal)	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Penilai	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 6	Pemetaan Geologi & GIS Tingkat Lanjut	Terpenuhinya Kompetensi Pelatihan Pemetaan Geologi & GIS Tingkat Lanjut	ASN yang bekerja di Dinas ESDM	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Badan Geologi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Izin Usaha Pertambangan (SIPB/IUP)	Terpenuhinya Kompetensi Bimtek Manajemen Izin Usaha Pertambangan (SIPB/IUP)	ASN yang bekerja di Dinas ESDM	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Reklamasi Lahan Pasca Tambang & Lingkungan	Terpenuhinya Kompetensi Diklat Reklamasi Lahan Pasca Tambang & Lingkungan	ASN yang bekerja di Dinas ESDM	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Perhitungan Neraca Sumber Daya Mineral & Batubara	Terpenuhinya Kompetensi Pelatihan Perhitungan Neraca Sumber Daya Mineral & Batubara	ASN yang bekerja di Dinas ESDM	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Aset Infrastruktur Ketenagalistrikan	Terpenuhinya Kompetensi Pelatihan Perhitungan Neraca Sumber Daya Mineral & Batubara	ASN yang bekerja di Dinas ESDM	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Pengawasan Distribusi LPG & BBM	Bimtek Pengawasan Distribusi LPG & BBM	ASN yang bekerja di Dinas ESDM	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Teknik Lingkungan, Hukum, Sistem Infoormasi, Manajemen, dan Teknik Perminyakan	Terpenuhinya Kompetensi bidang ilmu: Teknik Lingkungan, Hukum, Sistem Informasi, Manajemen dan Teknik Perminyakan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 7	Sertifikasi Ahli Zonasi & Pemugaran Cagar Budaya	Terpenuhinya Sertifikasi Ahli Zonasi & Pemugaran Cagar Budaya	Pejabat Struktural, Fungsional Cagar Budaya	Experience	Nonklasikal	KemenBud	3	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah.
2		Revitalisasi & Manajemen Koleksi Museum	Terpenuhinya Kompetensi Revitalisasi & Manajemen Koleksi Museum	Pejabat Struktural, Fungsional Permuseuman	Experience	Nonklasikal	KemenBud	3	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah.
3		Konservasi & Restorasi Naskah Kuno/Manuskrip	Terpenuhinya Kompetensi Konservasi & Restorasi Naskah Kuno/Manuskrip	Pejabat Struktural, Fungsional Permuseuman, Pelaksana	Experience	Nonklasikal	KemenBud	2	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah.
4		Penciptaan Seni Tari & Musik Tradisional	Terpenuhinya Kompetensi Penciptaan Seni Tari & Musik tradisional	Pejabat Struktural, Fungsional Permuseuman	Experience	Nonklasikal	KemenBud	2	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah.
5		Manajemen Sanggar & Komunitas Seni	Terpenuhinya Manajemen Sanggar & Komunitas Seni	Pejabat Struktural, Pelaksana	Experience	Nonklasikal	KemenBud	2	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah.
6		Diklat Kurator Museum & Pameran Budaya	Terpenuhinya Kurator Museum & Pameran Budaya	Pelaksana	Experience	Nonklasikal	KemenBud	2	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Konservasi Kawasan Pesisir & Rehabilitasi Mangrove	Terpenuhinya kompetensi Dasar Konservasi Kawasan Pesisir & Rehabilitasi Mangrove	JF/Pelaksana pada Bidang Kelautan dan Pengawasan	Pelatihan	Blended Learning	KKP	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) & HACCP	Terpenuhinya kompetensi Dasar Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) & HACCP	ASN di Bidang P2HKP	Bimtek	Blended Learning	LAN/Penyelenggara terkait lainnya	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pengawas Perikanan & Penanganan Tindak Pidana (Illegal Fishing)	Terpenuhinya kompetensi dasar Pengawas Perikanan & Penanganan Tindak Pidana (Illegal Fishing)	ASN di Bidang / UPT Pengawasan Perikanan	Diklat	Blended Learning	LAN/Penyelenggara terkait lainnya	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Sistem Rantai Dingin (Cold Chain System)	Terpenuhinya kompetensi dasar Sistem Rantai Dingin (Cold Chain System)	ASN	Pelatihan	Blended Learning	LAN/Penyelenggara terkait lainnya	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pemberdayaan Nelayan & Kelembagaan Kelompok	Terpenuhinya kompetensi dasar Pemberdayaan Nelayan & Kelembagaan Kelompok	ASN	Bimtek	Blended Learning	LAN/Penyelenggara terkait lainnya	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Pemetaan Wilayah Pesisir (GIS) Tingkat Dasar	Terpenuhinya kompetensi dasar Pemetaan Wilayah Pesisir (GIS) Tingkat Dasar	ASN	Pelatihan	Blended Learning	LAN/Penyelenggara terkait lainnya	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Oseanografi, Agribisnis, Perikanan, Biologi, Teknik Lingkungan	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Oseanografi, Agribisnis, Perikanan, Biologi, Teknik Lingkungan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 7	Manajemen Penyelenggaraan <i>Event Olahraga (Sport Event Management)</i>	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Penyelenggaraan <i>Event Olahraga (Sport Event Management)</i>	Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Metode Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Terpenuhinya kompetensi Metode Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Standardisasi & Akreditasi Klub/Cabang Olahraga	Terpenuhinya kompetensi Standardisasi & Akreditasi Klub/Cabang Olahraga	Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Pemanduan Bakat (<i>Talent Scouting</i>) Atlet Muda	Terpenuhinya kompetensi . Pelatihan Pemanduan Bakat (<i>Talent Scouting</i>) Atlet Muda	Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Teknik Fasilitasi Organisasi Kepemudaan (OKP)	Terpenuhinya kompetensi Teknik Fasilitasi Organisasi Kepemudaan (OKP)	Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Ilmu Keolahragaan, Sosiologi, Ilmu Komunikasi	Terpenuhinya Kompetensi di bidang ilmu: Ilmu Keolahragaan, Sosiologi, Ilmu Komunikasi	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan & <i>Patient Safety</i>	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan & <i>Patient Safety</i> di bidang Administrasi Rumah Sakit (MARS)	Administrator kesehatan dan pengolah program Rumah Sakit	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular	Terpenuhinya kompetensi Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dibidang Kesehatan Masyarakat (Epidemiologi	Epidemiolog Kesehatan	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	12	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Terpenuhinya kompetensi Spesialis dibidang Kedokteran (Klinis)	Penelaah Teknis Kebijakan	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Tata Kelola BLUD Puskesmas /RSUD	Terpenuhinya kompetensi Tata Kelola BLUD Puskesmas/RSUD dibidang Manajemen Pelayanan Kesehatan	Administrator Kesehatan/ pengelola program RS dan Puskesmas	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	Terpenuhinya kompetensi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dibidang Psikologi Klinis	Psikolog Klinis	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

UPT BERSIFAT KHUSUS RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU Tahun 2027									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) K3RS	Terpenuhinya kompetensi dalam PelatihanManajemenFasilitas dan Keselamatan (MFK) K3RS	JF Kesehatan, ASN di bidang terkait	Experiential Learning	NonKlasikal	Lembaga Pengembangan Kompetensi	100	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Akreditasi Rumah Sakit Standar Nasional (STARKES)	Terpenuhinya kompetensi dalam BimtekAkreditasi Rumah Sakit Standar Nasional (STARKES)	JF Kesehatan, ASN dibidang terkait	Experiential Learning	NonKlasikal	Lembaga Pengembangan Kompetensi	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Teknis Hemodialisa& ICU Dasar	Terpenuhinya kompetensi dalam Pelatihan Teknis Hemodialisa& ICU Dasar	JF Dokter, JF Perawat	Experiential Learning	NonKlasikal	Lembaga Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Koding Penyakit (ICD-10/ICD-9 CM) untuk Casemix	Terpenuhinya kompetensi dalam DiklatKodingPenyakit (ICD-10/ICD-9 CM) untukCasemix	JF Rekam Medis, ASN di bidang terkait	Experiential Learning	NonKlasikal	Lembaga Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Logistik Farmasi & Alat Kesehatan	PelatihanManajemen Logistik Farmasi & Alat Kesehatan	Jf Apoteker, JF Tenaga Teknis Kefarmasian, ASN bidang terkait	Experiential Learning	NonKlasikal	Lembaga Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Etika-Legal Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya kompetensi dalam Workshop Etika-Legal Pelayanan Kesehatan	ASN di bidang terkait	Experiential Learning	NonKlasikal	Lembaga Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Kedokteran Spesialis (Jantung/Kanker)	Terpenuhinya kompetensi dalam Kedokteran Spesialis (Jantung/Kanker)	JF Kedokteran	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Keperawatan Spesialis	Terpenuhinya kompetensi dalam Keperawatan Spesialis	JF Keperawatan	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Manajemen Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya kompetensi dalam Manajemen Pelayanan Kesehatan	JF Kesehatan Masyarakat, ASN dibidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
11		Teknik Elektromedik	Terpenuhinya kompetensi dalam Teknik Elektromedik	JF Teknisi Elektromedis	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
12		Gizi Klinis	Terpenuhinya kompetensi dalam Gizi Klinis	JF Gizi	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

UPT BERSIFAT KHUSUS RSUD PETALA BUMI PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES) Paripurna	Terpenuhinya kompetensi tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES) Paripurna	Pokja Tim Akreditasi	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Mutu & Keselamatan Pasien (PMKP)	Terpenuhinya kompetensi tentang Manajemen Mutu & Keselamatan Pasien (PMKP)	POKJA PMKP	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		K3 Rumah Sakit (K3RS)	Terpenuhinya kompetensi tentang K3 Rumah Sakit (K3RS)	Tenaga K3RS	Experiential Learning dan Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Perawatan Luka Modern (<i>Wound Care</i>)	Terpenuhinya kompetensi tentang Perawatan Luka Modern (<i>Wound Care</i>)	Perawat	Experiential Learning dan Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Terpenuhinya kompetensi tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Bendahara, Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan, Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Dokter Spesialis (Penyakit Dalam/Bedah/Anak/Obstetrik)	Terpenuhinya kompetensi di bidang Penyakit Dalam/Bedah/Anak/Obstetrik	ASN Dokter	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Magister Farmasi	Terpenuhinya kompetensi dibidang Klinis/Manajemen)	ASN Farmasi	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Magister Administrasi Rumah Sakit	Terpenuhinya Kompetensi Magister Administrasi Rumah Sakit	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Fisioterapi	Terpenuhinya Kompetensi Fisioterapi	ASN Fisioterapi	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Kompetensi Kesehatan Masyarakat	ASN Kesehatan Masyarakat	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Pelatihan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian/Peternakan	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Analis Pasar Hasil Pertanian/Peternakan	JF Analis Pasar	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lemabaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Terpenuhinya kompetensi dalam Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	JF Medik, Paramedik,	Formal Learning /Experiential Learning	Blended Learning	Lemabaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Higiene Sanitasi & Keamanan Pangan Asal Hewan	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Higiene Sanitasi & Keamanan Pangan Asal Hewan	JF Medik, Paramedik	Formal Learning /Experiential Learning	Blended Learning	Lemabaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peternakan	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peternakan	ASN	Formal Learning /Experiential Learning	Blended Learning	Lemabaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	ASN	Formal Learning /Experiential Learning	Blended Learning	Lemabaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Profesi Dokter Hewan (Drh), Agribisnis, Teknologi Hasil Ternak, Penyuluhan Peternakan, Ekonomi Pertanian	Terpenuhinya kompetensi dibidang Ilmu-ilmu: Profesi Dokter Hewan (Drh), Agribisnis, Teknologi Hasil Ternak, Penyuluhan Peternakan, Ekonomi Pertanian	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikann	7	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1 Misi 7 Misi 4	Pelatihan Manajemen Kasus Rehabilitasi Sosial (Anak, Lansia, Disabilitas)	Terpenuhinya Pelatihan Manajemen Kasus Rehabilitasi Sosial (Anak, Lansia, Disabilitas)	ASN Bidang Rehabilitasi Sosial dan UPT Dinas Sosial Provinsi Riau serta dan ASN pada bidang lainnya	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial dan KPAI	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Penanganan Korban Tindak Kekerasan & Perdagangan Orang	Terpenuhinya Penanganan Korban Tindak Kekerasan & Perdagangan Orang (TPPO)	ASN Bidang Rehabilitasi Sosial dan ASN pada bidang lainnya	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial dan PPA Poda	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship)	Terpenuhinya Pelatihan Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship)	ASN Bidang Pemberdayaan Sosial dan ASN pada bidang lainnya	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Penyuluh Sosial Masyarakat	Terpenuhinya Penyuluh Sosial Masyarakat	Fungsional Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial dan ASN pada bidang lainnya	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Terpenuhinya Pelatihan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	ASN Bidang Pemberdayaan Sosial dan ASN pada bidang lainnya	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Workshop Penanganan Fakir Miskin Pesisir & Terisolir	Terpenuhinya Penanganan Fakir Miskin Pesisir & Terisolir	ASN Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan ASN pada bidang lainnya	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Pekerjaan Sosial (Spesialis)	Terpenuhinya pendidikan Pekerjaan Sosial (Spesialis)	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Kebijakan Publik	Terpenuhinya pendidikan Kebijakan Publik	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Bimbingan Konseling	Terpenuhinya pendidikan Bimbingan Konseling	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Statistika Sosial	Terpenuhinya pendidikan Statistika Sosial	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan Dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1.	Misi 5	Manajemen Layanan TI (<i>IT Service Management/ITIL</i>)	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Layanan TI (<i>IT Service Management/ITIL</i>)	ASN Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Komdigi, BPSDM, LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait	25 + 1 + 14	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2.			Terpenuhinya Kompetensi Audit TIK dan Keamanan Informasi Dasar	ASN Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait	29 + 2 + 2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3.		Videografi dan <i>Editing</i> Konten Kreatif	Terpenuhinya Kompetensi Videografi dan <i>Editing</i> Konten Kreatif	ASN Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Bidang Statistik	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait	5 + 23	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4.		Metodologi Survei dan Analisis Data Statistik Sektoral	Terpenuhinya Kompetensi Metodologi Survei dan Analisis Data Statistik Sektoral	ASN Bidang Statistik	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, BPS dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait	23	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5.		Sistem Informasi Geografis Berbasis Web	Terpenuhinya Kompetensi Sistem Informasi Geografis Berbasis Web	ASN Bidang Statistik	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPS dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6.		Manajemen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	ASN Sekretariat	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Penyelenggara lainnya yang terkait	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7.		Tugas Belajar S2 Hukum (UU TTE dan KIP)	Terpenuhinya Kompetensi Hukum (UU TTE dan KIP)	ASN Bidang Statistik	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8.		Hukum (UU ITE & KIP), Manajemen Informatika	Terpenuhinya Kompetensi di bidang: Hukum (UU ITE & KIP), Manajemen Informatika	Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi					

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 4	Pelatihan Audit Sistem Manajemen K3 (SMK3)	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Audit Sistem Manajemen K3 (SMK3)	Pengawas Ketenagakerjaan, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengolah Data dan Informasi	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	Terpenuhinya kompetensi Bimtek Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	Mediator, Penellah Teknis Kebijakan, Pengolah Data dan Informasi	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi (SPP/Satuan Pemukiman)	Terpenuhinya kompetensi Pengembangan Kawasan Transmigrasi (SPP/Satuan Pemukiman)	Analisis Kebijakan, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengolah Data dan Informasi, Pengadministrasi Perkantoran	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian Ketransmigrasian, BPSDM Provinsi Riau	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Asesor Kompetensi Tenaga Kerja	Terpenuhinya kompetensi Asesor Kompetensi Tenaga Kerja	Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator, Analisis Kebijakan, Instruktur, Pengantar Kerja	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Terpenuhinya kompetensi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Mediator, Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Workshop Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Terpenuhinya kompetensi Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)		Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Teknik (Mesin/Sipil/Elektro), Kesehatan Masyarakat (K3), Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Akuntansi	Terpenuhinmya Kompetensi di bidang ilmu: Teknik (Mesin/Sipil/Elektro), Kesehatan Masyarakat (K3), Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Akuntansi		Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Pelatihan Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan	Terpenuhinya kompetensi dasar pelatihan Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan	- Fungsional pengendali ekosistem hutan - ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended Learning	Widyaiswara, Puskdiklat, Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan (PPLH)	Terpenuhinya kompetensi dasar bimbingan teknis Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan (PPLH)	- Fungsional pengawasan lingkungan hidup - ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended Learning	Widyaiswara, Puskdiklat, Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Valuasi Ekonomi Lingkungan & Jasa Ekosistem	Terpenuhinya kompetensi dasar pelatihan Valuasi Ekonomi Lingkungan & Jasa Ekosistem	- ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended Learning	Widyaiswara, Puskdiklat, Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal)	Terpenuhinya kompetensi dasar pendidikan dan pelatihan Pengendali dampak lingkungan (pedal)	- Fungsional pengendali dampak lingkungan - ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended Learning	Widyaiswara, Puskdiklat, Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	Terpenuhinya kompetensi dasar pelatihan teknis rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)	- ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended Learning	Widyaiswara, Puskdiklat, Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Workshop Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Terpenuhinya kompetensi dasar pelatihan workshop inventarisasi gas rumah kaca (GRK)	- ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended Learning	Widyaiswara, Puskdiklat, Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
7		Konservasi Sumber Daya Alam, Kimia Lingkungan, Biologi	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu: Konservasi Sumber Daya Alam, Kimia Lingkungan, Biologi	- ASN yang berada di bidang terkait - ASN yang berada di bidang terkait	Formal learning	Tugas belajar	Lembaga pendidikan	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Analisis Ketersediaan & Cadangan Pangan (FSVA)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan Ketersediaan & Cadangan Pangan	JF Analisis Ketahanan Pangan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pangan	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Bidang Pangan	JF PMHP	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Penanganan Pasca Panen (<i>Good Handling Practices</i>)	Terpenuhinya kompetensi dalam penanganan Pasca Panen	JF PMHP, JF Alsintan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	15	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Distribusi & Harga Pangan	Terpenuhinya kompetensi dalam hal Manajemen Distribusi & Harga Pangan	Analisis Statistik, PPC	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Pertanian	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		1. Ilmu Tanah 2. Proteksi Tanaman 3. Teknologi Pangan 4. Ekonomi Pertanian 5. Statistika	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu: 1. Ilmu Tanah 2. Proteksi Tanaman 3. Teknologi Pangan 4. Ekonomi Pertanian 5. Statistika	ASN		Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Manajemen MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Terpenuhinya Kopetensi pembelajaran dasar	Pengelola Data dan Informasi	Formal Learning, Uji Kompetensi	Blended Learning	Kementerian Pariwisata	24	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Sertifikasi CHSE (<i>Cleanliness, Health, Safety, Environment</i>)	Terpenuhinya Kopetensi pembelajaran dasar	Fungsional Adyatama Kepariwisataan & Ekonomi Kreatif,	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian Pariwisata	85	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Pengembangan Desa Wisata (Dewi) & Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Terpenuhinya Kopetensi pemelajaran dasar	Pengelola Pariwisata	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi (BSN)	6	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Kurasi Produk Ekonomi Kreatif	Terpenuhinya Kopetensi pembelajaran dasar	Pengelola Ekonomi Kr Pariwisataaeatif	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi (BSN)	6	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terpenuhinya Kopetensi pembelajaran dasar	Pengawas Pariwisata	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi (BSN)	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		1. Usaha Perjalanan Wisata 2. Manajemen Bisnis / Pemasaran 3. Sosiologi (Pemberdayaan Masyarakat) 4. Seni dan Budaya (Kearifan Lokal) 5. Manajemen Aset	Terpenuhi Kopetensi	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Pelatihan Analisis Dampak Kependudukan (ADK)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis dampak Kependudukan	Penelaah Teknis Kebijakan Penata Kelola PPA Pengolah Data dan Informasi	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BKKBN	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Audit Kasus Stunting & Gizi Keluarga	Terpenuhinya kompetensi dalam mengaudit kasus stunting dan gizi keluarga	Penelaah Teknis Kebijakan Penata Kelola PPA Pengolah Data dan Informasi	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BKKBN Kementerian Kesehatan	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Mediator Non-Hakim untuk Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Terpenuhinya kompetensi dalam madiasi non hakim untuk kasus ABH	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Pemberdayaan Ekonomi Perempuan & Kewirausahaan	Terpenuhinya kompetensi dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan & Kewirausahaan	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Terpenuhinya kompetensi Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
7		Bimtek Pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Terpenuhinya Kompetensi Pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
8		Studi Pembangunan, Ilmu Komunikasi, Demografi/ Kependudukan, Manajemen Kebijakan Publik, Statistik	Terpenuhinya kompetensi dalam bidang ilmu: Studi Pembangunan, Ilmu Komunikasi, Demografi/ Kependudukan, Manajemen Kebijakan Publik, Statistik	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Pengembangan Teaching Factory (TeFa) SMK	Terpenuhinya kompetensi Pengembangan Factory (TeFa) SMK	Fungsional Guru SMK	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	100	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Akreditasi Sekolah & Penjaminan Mutu Pendidikan	Terpenuhinya kompetensi Akreditasi Sekolah & Penjaminan Mutu Pendidikan	Kepala Sekolah, Pelaksana, Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	BAN	95	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi Guru Sekolah Reguler	Terpenuhinya kompetensi Pendidikan Inklusif bagi Guru Sekolah Reguler	Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	100	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Kepala Sekolah, Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	100	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Coding & STEAM untuk Guru (Science, Tech, Engineering, Art, Math)	Terpenuhinya kompetensi Coding & STEAM untuk Guru (Science, Tech, Engineering, Art, Math)	Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	80	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila	Terpenuhinya kompetensi Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila	Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	80	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
7		Pendidikan Vokasi/Kejuruan	Terpenuhinya kompetensi di Bidang Pendidikan Vokasi/Kejuruan	Fungsional Guru SMK	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
8		Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran	Terpenuhinya kompetensi di Bidang Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran	Kepala Sekolah dan Fungsional Guru	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
9		Pendidikan Inklusi/Khusus	Terpenuhinya kompetensi di Bidang Pendidikan Inklusi/Khusus	Fungsional Guru Pendidikan Khusus	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
10		Manajemen Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya kompetensi di Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia	Fungsional ASDMA, Pelaksana, Tenaga Teknis	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
11		Statistika Pendidikan	Terpenuhinya kompetensi di Bidang Statistika Pendidikan	Fungsional Perencana dan Pranata Komputer	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 3	Audit Keselamatan Jalan (Road Safety Audit)	Terpenuhinya kompetensi Audit Keselamatan Jalan (Road Safety Audit)	ASN yang bekerja di Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Umum	Terpenuhinya kompetensi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Umum	ASN yang bekerja di Bidang Angkutan Jalan dan Pelayaran	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Rantai Pasok & Logistik Daerah	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Rantai Pasok & Logistik Daerah	ASN yang bekerja di Bidang Pengembangan Transportasi	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Kompetensi Syahbandar & Kepelabuhanan Dasar	Terpenuhinya kompetensi Kompetensi Syahbandar & Kepelabuhanan Dasar	ASN yang bekerja di Bidang Pelayaran dan UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I dan Wilayah II	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Investigasi Kecelakaan Transportasi (Dasar)	Terpenuhinya kompetensi Investigasi Kecelakaan Transportasi (Dasar)	ASN yang bekerja di Bidang Terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Manajemen Logistik	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu Manajemen Logistik	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
7		Perencanaan Wilayah dan Kota	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
8		Ketatalaksanaan Pelayaran	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu Ketatalaksanaan Pelayaran	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
9		Statistika	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu Statistika	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
10		Manajemen SDM	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu Manajemen SDM	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027						
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran	Jumlah Peserta	Anggaran
1	Misi 2 Misi 3	Sertifikasi Auditor ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Terpenuhinya kompetensi Sertifikasi Auditor ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Penelaah Teknis Kebijakan, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	12	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Konflik & Mediasi Sengketa Lahan Perkebunan	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Konflik & Mediasi Sengketa Lahan Perkebunan	Penelaah Teknis Kebijakan, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	12	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Pengolahan & Pemasaran Bokar (Bahan Olahan Karet) Bersih	Terpenuhinya kompetensi Pengolahan & Pemasaran Bokar (Bahan Olahan Karet) Bersih	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Standar Pelayanan Minimal (SPM) Subsektor Perkebunan	Terpenuhinya kompetensi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Subsektor Perkebunan	Penyuluh Pertanian Ahli Muda, Perencana Ahli Madya, Perencana Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Arsiparis Ahli Muda, Pengadministrasi Perkantoran, Analisis Pasar Pertanian Ahli Muda, Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
		Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Unggul	Terpenuhinya kompetensi Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Unggul	Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya, Pengolah Data dan Informasi, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengawas Benih Ahli Pertama	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	12	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
		Hama dan Penyakit Tumbuhan, Agribisnis, Hukum (Agraria), Teknologi Hasil Pertanian	Terpenuhinya kompetensi di Bidang Ilmu : Hama dan Penyakit Tumbuhan, Agribisnis, Hukum (Agraria), Teknologi Hasil Pertanian	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Kebijakan Ahli Muda, Pengawas Benih Ahli Pertama, Analisis Pasar Pertanian Ahli Muda	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1 Misi 5	Audit Kearsipan Internal & Eksternal	Mampu melaksanakan audit kearsipan internal maupun eksternal secara sistematis, objektif, sesuai standar ANRI, serta mampu memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan arsip di unit kerja	JFT Arsiparis	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Arsip Nasional	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Akreditasi Perpustakaan & Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum, manfaat, serta mekanisme akreditasi perpustakaan sesuai regulasi terbaru.	JFT Pustakawan	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Perpustakaan Nasional	25	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Mampu memahami dan menerapkan konsep Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga ruang pembelajaran, peningkatan literasi, kreativitas, dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.	JFT Pustakawan	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Perpustakaan Nasional	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Pustakawan & Arsiparis	Menjamin mutu profesionalisme pustakawan melalui pengakuan kompetensi sesuai standar nasional dan internasional dan Menjamin kualifikasi dan profesionalitas arsiparis dalam penyelenggaraan kearsipan negara	JFT Pustakawan dan JFT Arsiparis	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Perpustakaan Nasional	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Restorasi & Fumigasi Arsip Vital	Memberikan kompetensi teknis kepada peserta dalam melakukan tindakan penyelamatan, restorasi fisik, serta fumigasi terhadap arsip vital yang mengalami kerusakan fisik maupun biologis (jamur, serangga, dan hama perusak arsip), sehingga arsip dapat dipulihkan, dilestarikan, serta terjamin keberlangsungan informasinya sebagai bahan bukti autentik serta aset organisasi.	JFT Arsiparis	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Arsip Nasional	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Pelatihan Tata Naskah Dinas	Mampu memahami, menerapkan, dan menyusun Tata Naskah Dinas sesuai ketentuan administrasi pemerintahan serta peraturan perundang-undangan, sehingga proses komunikasi kedinasan menjadi tertib, efektif, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik.	ASN	Fromal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Informasi, Teknologi Pendidikan, Sosiologi (Literasi Masyarakat), Hukum (Aset & Arsip), Bahasa Asing	Terpenuhinya kompetensi dalam bidang ilmu: Manajemen Informasi, Teknologi Pendidikan, Sosiologi (Literasi Masyarakat), Hukum (Aset & Arsip), Bahasa Asing	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggaraan Pendidikan	3	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1 Misi 7	Manajemen Kinerja ASN & SKP	Terpenuhinya kompetensi dalam Manajemen ASN	JF Analisis SDM Aparatur / Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/	Blended Learning	LAN/ KEMENDES PDTT	2	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Verifikasi & Validasi Data Kependudukan	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Administrasi Kependudukan	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Penelaah Teknis Kebijakan/Fasilitator Pemerintahan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI	2	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa & Dukcapil	Terpenuhinya kompetensi tentang Standar Pelayanan Kependudukan	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Penelaah Teknis Kebijakan/Fasilitator Pemerintahan	Formal Learning/ Experiential Learning/	Blended Learning	DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI	2	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Terpenuhinya kompetensi untuk menjadi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda dan .JF PSM	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM KEMENDES PDTT	2	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Pengadaan Barang/Jasa (Dasar)	Terpenuhinya kompetensi dalam mengelola Pengadaan Barang dan Jasa	JF Perencana, JF Analisis Kebijakan, Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPJ/LKPP	3	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Sosiologi, Statistika, Ekonomi Pembangunan, Ilmu Komunikasi	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu: Sosiologi, Statistika, Ekonomi Pembangunan, Ilmu Komunikasi	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	PENYELENGGARA PENDIDIKAN	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 3	Penyusunan RDTR & Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Terpenuhinya Kompetensi Penyusunan RDTR & Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	ASN yang membidangi	Social	Blended learning	BPSDM Provinsi Riau	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
2		Manajemen Operasi Bendungan & Pengendalian Banjir	Terpenuhinya Kompetensi Penyusunan RDTR & Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	ASN yang membidangi	Experiential	Blended learning	BPSDM Kementrian PU	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
3		Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung (SLF)	Terpenuhinya Kompetensi Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung (SLF)	ASN yang membidangi	Experiential	Blended learning	BPSDM Kementrian PU	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
4		Uji Mutu Bahan (Beton/Aspal) & Laboratorium Konstruksi	Terpenuhinya Kompetensi Uji Mutu Bahan (Beton/Aspal) & Laboratorium Konstruksi	ASN yang membidangi	Experiential	Blended learning	BPSDM Kementrian PU	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
5		Perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	Terpenuhinya Kompetensi Perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	ASN yang membidangi	Formal	Blended learning	BPSDM Kementrian PU	20	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
6		Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi), Teknik Lingkungan, Teknik Pengairan / Hidrologi, Manajemen Aset	Terpenuhinya Kompetensi bidang ilmu: Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi), Teknik Lingkungan, Teknik Pengairan / Hidrologi, Manajemen Aset	ASN yang membidangi	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	7	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 4	PelatihanSertifikasi Halal & Keamanan Pangan bagi IKM	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Sertifikasi Halal & Keamanan Pangan bagi IKM	ASN yang membidangi industri	Fromal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
2		Bimtek Ekspor Impor & Perdagangan Internasional	Terpenuhinya kompetensi Bimtek Ekspor Impor & Perdagangan Internasional	ASN yang membidangi perdagangan	Fromal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
3		Diklat Mediator Hubungan Industrial & Penyelesaian Sengketa Bisnis	Terpenuhinya kompetensi Diklat Mediator Hubungan Industrial & Penyelesaian Sengketa Bisnis	ASN yang membidangi industri	Fromal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
4		Pelatihan E-Commerce & Pemasaran Digital untuk UKM	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan E-Commerce & Pemasaran Digital untuk UKM	ASN yang membidangi industri dan perdagangan	Fromal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
5		Pelatihan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)	Pengelola, penyelenggara	Fromal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	20	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
6		Bimtek Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Terpenuhinya kompetensi Bimtek Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	ASN yang membidangi koperasi	Fromal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	20	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
7		Akuntansi Sektor Publik, Agribisnis, Teknik Kimia, Sistem Informasi, Ilmu Komunikasi (Marketing)	Terpenuhinya kompetensi dibidang ilmu	ASN	Fromal Learning	Tugas belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 3	Pelatihan Intelijen Bisnis & Analisis Pasar (Market Intelligence)	Terpenuhnya Kompetensi Dasar Intelijen Bisnis & Analisis Pasar	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan,	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM, KemenPANRB, Kemendagri	35	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
2		Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah (GIS)	Terpenuhnya kompetensi Dasar Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah (GIS)	Penyelenggara pada Penata Kelola Penanaman Modal	Formal Learning, Experiential Learning dan Social Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM	35	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
3		Manajemen Risiko Perizinan Berusaha	Terpenuhnya kompetensi Dasar Manajemen Risiko Perizinan Berusaha	Penyelenggara Penata Perizinan	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM, KemenPANRB, Kemendagri	35	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
4		Promosi Investasi Digital & Branding Daerah	Terpenuhnya kompetensi Dasar Promosi Investasi Digital & Branding Daerah	Penyelenggara pada Penata Kelola Penanaman Modal	Formal Learning, Experiential Learning dan Social Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM	35	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
5		Pelatihan Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terpenuhnya kompetensi Dasar Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penyelenggara Penata Perizinan	Formal Learning, Experiential Learning dan Social Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian PANRB	35	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
6		Integrasi Data Perizinan Antar Sektor	Terpenuhnya kompetensi Dasar Integrasi Data Perizinan Antar Sektor	Penyelenggara Penata Perizinan	Formal Learning, Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian PANRB	35	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah
7		Ekonomi Pembangunan, Perencanaan Wilayah dan Kota, Hubungan Internasional, Statistika Bisnis	Terpenuhnya Kompetensi di bidang ilmu: Ekonomi Pembangunan, Perencanaan Wilayah dan Kota, Hubungan Internasional, Statistika Bisnis	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, Pembiayaan Lain Yang Sah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1.	Misi 7	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terpenuhinya kompetensi PPNS	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusdiklat Polri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2.		Intelijen Dasar (Deteksi Dini Gangguan Tibum)	Terpenuhinya kompetensi dasar Intelijen Dasar (Deteksi Dini Gangguan Tibum)	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusdiklat Polri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3.		Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibum	Terpenuhinya kompetensi dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibum	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4.		Teknis Pemberkasan & BAP Pelanggaran Perda	Terpenuhinya kompetensi Teknis Pemberkasan & BAP Pelanggaran Perda	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Polri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5.		Penanganan Unjuk Rasa Humanis	Terpenuhinya kompetensi Penanganan Unjuk Rasa Humanis	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Polri	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6.		Sosiologi, Kriminologi, Hukum, Komunikasi Penyiaran	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu: Sosiologi, Kriminologi, Hukum, Komunikasi Penyiaran	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan Dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1.	Misi 2, Misi 5	Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik	Memahami konsep dasar kebijakan publik, menganalisis masalah publik dan menentukan prioritas advokasi	Seluruh ASN Fungsional Analisis Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN, Universitas Negeri, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan	13	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2.		Bimbingan Teknis Tata Kelola Pelaporan Kegiatan dan Program Pembangunan Daerah	Meningkatkan kemampuan teknis dalam penyusunan laporan fisik, dan laporan kinerja.	Seluruh ASN Fungsional Analisis Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN, Universitas Negeri, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan	13	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Hubungan Masyarakat (Public Relations)	Terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai standar kompetensi jabatan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
2		Jurnalistik / Broadcasting	Terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai standar kompetensi jabatan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
3		Pelayanan Prima (Service Excellence) Tamu VVIP	Terpenuhinya Kompetensi pada bidang kerja sesuai kebutuhan jabatan dan bidang kerja	JF Analisis, Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	5	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
4		Teknik Penulisan Pidato (Speech Writing) & Rilis Pers	Terpenuhinya Kompetensi pada bidang kerja sesuai kebutuhan jabatan dan bidang kerja	JF Analisis, Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	6	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Logistik & Jamuan Resmi (Table Manner)	Terpenuhinya Kompetensi pada bidang kerja sesuai kebutuhan jabatan dan bidang kerja	JF Analisis, Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	8	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
6		Liaison Officer (LO) Event Daerah	Terpenuhinya Kompetensi pada bidang kerja sesuai kebutuhan jabatan dan bidang kerja	JF Analisis, Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	4	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Legal Drafting	Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan perundang-undangan	Fungsional perancang peraturan perundang-undangan, fungsional analis hukum, penyusun materi hukum & perundang-undangan dan analis kebijakan	Formal learning	Blended Learning	BPHN, Kemenkum dan Lembaga Diklat Swasta	2	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
2		Tata cara harmonisasi produk hukum	Terpenuhinya kompetensi aparatur dalam tahapan penyusunan perundang-undangan	Fungsional tetap ahli hukum, perancang dan analis penyusun materi perundang-undangan	Experiential learning	Blended Learning	MA dan Lembaga Diklat Swasta	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
3		Pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH)	Terpenuhinya kompetensi pengelolaan jaringan dokumentasi informasi	Analisis hukum, pengelola data dan informasi	Sosial learning	Blended Learning	Kemenkum	2	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
4		Teknik penyuluhan hukum dan HAM	Terpenuhinya kompetensi penyuluhan hukum dan HAM	Analisis hukum, penelaah teknis kebijakan dan analisis perkara peradilan	Formal learning	Blended Learning	Kemenkum dan Kemendagri	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
5		Tata naskah dinas & administrasi biro hukum	Terpenuhinya kompetensi penyusunan tata naskah dinas	Pengelola data & informasi, arsiparis, pustakawan dan administrasi perkantoran	Experiential learning	Blended Learning	Kemendagri	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
6		Pelatihan Penyusunan MOU dan PKS	Terpenuhinya kompetensi aparatur dalam penyusunan MOU & PKS	Penyusun materi hukum perundang-undangan, penelaah teknis kebijakan	Experiential learning	Blended Learning	Kemendagri	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
7		Pendidikan khusus advokasi hukum	Terpenuhinya kompetensi dalam penyelesaian masalah hukum di dalam peradilan	Fungsional tetap ahli hukum, analisis perkara peradilan dan penyusun materi hukum dan perundang-undangan	Formal learning	Blended Learning	BPHN, Kemenkum dan Organisasi advokasi	5	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
8		Pendidikan dan pelatihan mediator	Terpenuhinya kompetensi dalam penyelesaian masalah hukum di luar peradilan	Fungsional tetap ahli hukum	Formal learning	Blended Learning	MA dan lembaga diklat swasta	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1 Misi 4 Misi 7	Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Terpenuhinya Kompetensi dalam manajemen penanganan kemiskinan terpadu	ASN di bidang sosial	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	2	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
2		Audit Kinerja Program Kesejahteraan Rakyat	Terpenuhinya Kompetensi dalam bimtek audit kinerja Program Kesejahteraan Rakyat	ASN di bidang program kesejahteraan rakyat	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning	BPSDM	2	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
3		Fasilitator Kerukunan Umat Beragama	Terpenuhinya Kompetensi Fasilitator Kerukunan Umat Beragama	ASN di bidang Bina Mental Spiritual	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	4	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bidang Kesra	Terpenuhinya Kompetensi dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bidang Kesra	ASN di bagian perencanaan	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	2	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
5		Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Modul Bansos	Terpenuhinya Kompetensi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Modul Bansos	ASN yang membidangi kegiatan Bansos	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
6		Evaluasi Dampak Program Bantuan Sosial	Terpenuhinya Kompetensi dalam Evaluasi Dampak Program Bantuan Sosial	ASN di bidang sosial	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
7		- Ilmu Kesejahteraan Sosial - Kebijakan Publik - Ekonomi Pembangunan	Terpenuhinya Kompetensi di bidang ilmu: Kesejahteraan Sosial, Kebijakan Publik, Ekonomi Pembangunan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Implementasi SAKIP	Jabatan Fungsional Jabatan Pelaksana	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Reformasi Birokrasi (RB) General & Tematik	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Manajemen Reformasi Birokrasi (RB) General & Tematik	Jabatan Fungsional Jabatan Pelaksana	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
3		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jabatan Fungsional Jabatan Pelaksana	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
4		Internalisasi Budaya Kerja ASN (BerAKHLAK)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Internalisasi Budaya Kerja ASN (BerAKHLAK)	Jabatan Fungsional Jabatan Pelaksana	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
5		Teknik Fasilitasi & Evaluasi Ketatalaksanaan	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Teknik Fasilitasi & Evaluasi Ketatalaksanaan	Jabatan Fungsional Jabatan Pelaksana	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
6		Kebijakan Publik	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Kebijakan Publik	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
7		Akuntansi Sektor Publik	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Akuntansi Sektor Publik	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5 Misi 6	Analisis Manajemen Kerjasama Daerah (Dalam & Luar Negeri)	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Kerjasama Daerah (Dalam & Luar Negeri)	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Darah	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
2		Teknik Mediasi & Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah	Terpenuhinya kompetensi Teknik Mediasi & Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Darah	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
3		Penataan Wilayah Administrasi Kecamatan & Desa/Kelurahan	Terpenuhinya Kompetensi Penataan Wilayah Administrasi Kecamatan & Desa/Kelurahan	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Darah	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
4		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Terpenuhinya Kompetensi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Darah	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
5		Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) & PAW	Terpenuhinya Kompetensi Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) & PAW	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Darah	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
6		Magister Ilmu Pemerintahan, Magister Administrasi Publik, Perencanaan Wilayah dan Kota, Hubungan Internasional (Kerjasama), Kebijakan Publik	Terpenuhinya Kompetensi pada Bidang Ilmu : Magister Ilmu Pemerintahan, Magister Administrasi Publik, Perencanaan Wilayah dan Kota, Hubungan Internasional (Kerjasama), Kebijakan Publik	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Darah	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) Jenjang Muda	Terpenuhinya kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) Jenjang Muda	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Audit & Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa	Terpenuhinya kompetensi Bimtek Audit & Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Kontrak	Terpenuhinya kompetensi Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Kontrak	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (Design & Build)	Terpenuhinya kompetensi Teknis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (Design & Build)	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		Konsolidasi Pengadaan untuk Efisiensi Anggaran	Terpenuhinya kompetensi Konsolidasi Pengadaan untuk Efisiensi Anggaran	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal/ Experiential Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Strategis, Hukum Administrasi Negara, Sains Data (Data Science), Ekonomi Pembangunan, Teknik Lingkungan (Green Procurement)	Terpenuhinya kompetensi dalam bidang Manajemen Strategis, Hukum Administrasi Negara, Sains Data (Data Science), Ekonomi Pembangunan, Teknik Lingkungan (Green Procurement)	ASN Biro PBJ	Fomal Learning	Tugas belajar	Penyelenggara pendidikan	Semua ASN PBJ	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 6	Analisis Perdagangan Luar Negeri & Ekspor Daerah	Terpenuhinya kompetensi Analisis Perdagangan Luar Negeri & Ekspor Daerah	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experience, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Risiko Bisnis BUMD	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Risiko Bisnis BUMD	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experience, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
3		Strategi Pengembangan & Penyehatan BUMD	Terpenuhinya kompetensi Strategi Pengembangan & Penyehatan BUMD	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experience, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
4		Analisis Kebijakan Ketenagakerjaan & Pengupahan	Terpenuhinya kompetensi Analisis Kebijakan Ketenagakerjaan & Pengupahan	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experience, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
5		Fasilitasi Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Terpenuhinya kompetensi Fasilitasi Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experience, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah
6		Magister Manajemen, Magister Ekonomi, Hubungan Internasional (Perdagangan), Kebijakan Publik, Statistika Ekonomi	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu: Magister Manajemen, Magister Ekonomi, Hubungan Internasional (Perdagangan), Kebijakan Publik, Statistika Ekonomi	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	7	APBD, APBN Pembiayaan lain yang sah

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Manajemen Inventaris & Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Inventaris & Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)	JF Analis, Jabatan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
2		Pelayanan Prima (<i>Service Excellence</i>) Front Office & VIP	Terpenuhinya kompetensi Pelayanan Prima (<i>Service Excellence</i>) Front Office & VIP	Jabatan Pelaksana	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Rumah Tangga Pimpinan Daerah	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Rumah Tangga Pimpinan Daerah	Jabatan Pelaksana	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
4		K3 Perkantoran & Mitigasi Kebakaran Gedung	Terpenuhinya kompetensi K3 Perkantoran & Mitigasi Kebakaran Gedung	Jabatan Pelaksana	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Bengkel & Kendaraan Dinas	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Bengkel & Kendaraan Dinas	Jabatan Pelaksana	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	5	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah
6		1. Manajemen Aset / Logistik 2. Perhotelan / Pariwisata (Hospitality) 3. Administrasi Perkantoran 4. K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) 5. Hukum Perdata (Kontrak)	Terpenuhinya kompetensi dibidang 1. Manajemen Aset / Logistik 2. Perhotelan / Pariwisata (Hospitality) 3. Administrasi Perkantoran 4. K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) 5. Hukum Perdata (Kontrak)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN, Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2027					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Manajemen Keprotokolan Pimpinan & VVIP	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Keprotokolan Pimpinan & VVIP	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning, Social Learning, Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Teknik Lobi, Negosiasi & Diplomasi Antar Lembaga	Terpenuhinya kompetensi Teknik Lobi, Negosiasi & Diplomasi Antar Lembaga Pelatihan	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning, Social Learning, Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		<i>Event Organizer</i> (EO) untuk Promosi Daerah	Terpenuhinya Kompetensi <i>Event Organizer</i> (EO) untuk Promosi Daerah	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning, Social Learning, Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Bendahara & Pengelolaan Keuangan BLUD (jika Mess menjadi BLUD)	Terpenuhinya Kompetensi Bendahara & Pengelolaan Keuangan BLUD (jika Mess menjadi BLUD)	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning, Social Learning, Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Standar Pelayanan Tamu & Jamuan Resmi (<i>Table Manner</i>)	Terpenuhinya Kompetensi Standar Pelayanan Tamu & Jamuan Resmi (<i>Table Manner</i>)	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Ilmu Komunikasi, Manajemen, Sastra/Budaya (Promosi Budaya), Hukum	Terpenuhinya Kompetensi bidang ilmu: Ilmu Komunikasi, Manajemen, Sastra/Budaya (Promosi Budaya), Hukum	ASN Badan Penghubung	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah



DESAIN PEMBELAJARAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN 2028

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Audit Sistem Informasi & SPBE (Information System Audit)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning	BPSDM Provinsi Riau/Diskominfo	100	APBD, APBN dan Pembiayaan Lain yang Sah
2		Analisis Big Data Pengawasan (Continuous Audit)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning (daring + luring)	BPSDM Provinsi Riau/BPKP/KPK/BPK	10	APBD, APBN dan Pembiayaan Lain yang Sah
3		Forensik Digital (Digital Forensics) untuk Auditor	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional AUDITOR	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning (daring + luring)	BPKP/KPK/BPK	7	APBD, APBN dan Pembiayaan Lain yang Sah
4		Audit Keamanan Informasi (Cyber Security Audit)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional AUDITOR	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning (daring + luring)	BPKP /BPK	10	APBD, APBN dan Pembiayaan Lain yang Sah
5		Penggunaan Aplikasi Pengawasan (E-Audit)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning (daring + luring)	BPKP/ BPK/BPSDM Provinsi Riau	10	APBD, APBN dan Pembiayaan Lain yang Sah
6		Sistem Informasi / Teknik Informatika, Komputer Akuntansi, Sains Data (Data Science), Hukum Siber (Cyber Law)	Terpenuhinya Kompetensi dalam bidang ilmu: Sistem Informasi / Teknik Informatika, Komputer Akuntansi, Sains Data (Data Science), Hukum Siber (Cyber Law)	Formal Learning	Tugas Belajar		Penyelenggara Pendidikan	8	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan Dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Pelatihan Cybersecurity & Keamanan Data SPBE	Terpenuhinya Kompetensi Cybersecurity & Keamanan Data SPBE	Seluruh ASN di Substansi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Pelatihan People Analytics & Big Data HR	Terpenuhinya Kompetensi People Analytics & Big Data HR	Seluruh ASN di Substansi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Advokasi Kebijakan Kepegawaian	Terpenuhinya Kompetensi Advokasi Kebijakan Kepegawaian	Seluruh ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Bimtek Audit Manajemen ASN & Investigatif	Terpenuhinya Kompetensi Audit Manajemen ASN & Investigatif	Seluruh ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Bangkom	Terpenuhinya Kompetensi Penyusunan Kurikulum Bangkom	Seluruh ASN Bidang Pengembangan Aparatur dan Subbagian Kepegawaian dan Umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Diklat Public Speaking & Kehumasan	Terpenuhinya Kompetensi Public Speaking & Kehumasan	Seluruh ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	9	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Pelatihan Manajemen Resiko Sektor Publik	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Resiko Sektor Publik	Seluruh ASN Substansi Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Publik Hukum Psikologi Industri & Organisasi Sistem Informasi	Terpenuhinya Kompetensi di bidang Ilmu: Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Publik, Hukum, Psikologi Industri & Organisasi, Sistem Informasi	Seluruh ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Tugas BelajarBlended Learning	Universitas Dalam dan Luar Negeri	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 6	Analisis <i>Big Data</i> untuk Riset Kebijakan (<i>Data Driven Policy</i>)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Analisis <i>Big Data</i> untuk Riset Kebijakan (<i>Data Driven Policy</i>)	JFT Peneliti, JFT Analisis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Akreditasi Lembaga Pelatihan	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Akreditasi Lembaga Pelatihan	JFT Peneliti, JFT Analisis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Program Detasering / Pertukaran Peneliti ke BRIN	Terpenuhinya kompetensi Program Detasering / Pertukaran Peneliti ke BRIN	JFT Peneliti, JFT Analisis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Repositori Ilmiah Digital & <i>Knowledge Management</i>	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Repositori Ilmiah Digital & <i>Knowledge Management</i>	JFT Peneliti, JFT Analisis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Riset Material Konstruksi Berkelanjutan	Terpenuhinya kompetensi Riset Material Konstruksi Berkelanjutan	JFT Peneliti, JFT Analisis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Teknik Sipil (<i>Sustainable Construction Materials</i>) 2. Sains Data (<i>Data Science</i>) 3. Teknik Informatika 4. Sistem Informasi 5. Teknik Lingkungan	Terpenuhinya kompetensi dibidang ilmu: 1. Teknik Sipil (<i>Sustainable Construction Materials</i>) 2. Sains Data (<i>Data Science</i>) 3. Teknik Informatika 4. Sistem Informasi 5. Teknik Lingkungan	Seluruh Pegawai BRIDA	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning (daring + luring)	BRIN	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	RPJMD	Analisis <i>Big Data</i> untuk Kebijakan (<i>Data Driven Policy</i>)	Terpenuhinya kompetensi dalam Analisis <i>Big Data</i> untuk Kebijakan (<i>Data Driven Policy</i>)	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk Tata Ruang	Terpenuhinya kompetensi dalam Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk Tata Ruang	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		<i>Dashboard</i> Eksekutif & Visualisasi Data Perencanaan	Terpenuhinya kompetensi dalam <i>Dashboard</i> Eksekutif & Visualisasi Data Perencanaan	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pengembangan E-Planning & E-Budgeting Terintegrasi	Terpenuhinya kompetensi dalam Pengembangan E-Planning & E-Budgeting Terintegrasi	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Audit Kualitas Data Statistik Sektoral	Terpenuhinya kompetensi dalam Audit Kualitas Data Statistik Sektoral	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Sains Data (<i>Data Science</i>) 3. Geografi / Geomatika 4. Desain Komunikasi Visual (Visualisasi Data) 5. Manajemen Sistem Informasi	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu: 1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Sains Data (<i>Data Science</i>) 3. Geografi / Geomatika 4. Desain Komunikasi Visual (Visualisasi Data) 5. Manajemen Sistem Informasi	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	1. Sistem Informasi Geografis (GIS) Pemetaan Rawan Bencana	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran . Sistem Informasi Geografis (GIS) Pemetaan Rawan Bencana	ASN yang bekerja di bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	BPSDM	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		2. Operasional <i>Early Warning System</i> (EWS) Digital	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Lembaga Pelatihan Operasional <i>Early Warning System</i> (EWS) Digital	ASN yang bekerja di bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	BMKG	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		3. Pemanfaatan <i>Drone</i> untuk Pemantauan Hotspot & Bencana	Terpenuhinya kompetensi teknis dibidang ilmu . Pemanfaatan <i>Drone</i> untuk Pemantauan Hotspot & Bencana	ASN yang bekerja di bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	BNPB	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		4.Pencegahan & Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat (CBDRM)	Terpenuhinya kompetensi teknis dibidang ilmu Pencegahan & Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat (CBDRM)	ASN yang bekerja di bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	BNPB	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		5. Manajemen Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Cerdas	Terpenuhinya kompetensi teknis dibidang ilmu Manajemen Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Cerdas	ASN yang bekerja di bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	BNPB	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Meteorologi & Klimatologi 3. Sains Data 4. Teknik Geodesi (Pemetaan) 5. Teknologi Pendidikan (Edukas)	Terpenuhinya kompetensi teknis dibidang ilmu Pendidikan Formal 1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Meteorologi & Klimatologi 3. Sains Data 4. Teknik Geodesi (Pemetaan) 5. Teknologi Pendidikan (Edukas)	ASN yang bekerja di bidang terkait	Tugas belajar	Pendidikan Formal	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Big Data Analytics untuk Keuangan Daerah	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Big Data Analytics untuk Keuangan Daerah	Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansdsi dan Pelaporan, Bidang PMBD	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusdatin dan Kementrian Keuangan	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Keamanan Informasi Keuangan (Cybersecurity Awareness)	Terpenuhinya kompetensi Keamanan Informasi Keuangan (Cybersecurity Awareness)	Sekretariat, Bidang nggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansdsi dan Pelaporan, Bidang PMBD	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusdatin dan Komdigi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD))	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kemendagri dan BI	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Digitalisasi Arsip Keuangan dan Aset	Terpenuhinya kompetensi Digitalisasi Arsip Keuangan dan Aset	Sekretariat, Bidang nggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansdsi dan Pelaporan, Bidang PMBD	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	LAN dan Kemendagri	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		- Sistem Informasi / Teknik Informatika - Sains Data (Data Science) - Manajemen Keuangan Daerah - Kebijakan Publik	Terpenuhinya kompetensi Bidang Ilmu - Sistem Informasi / Teknik Informatika - Sains Data (Data Science) - Manajemen Keuangan Daerah - Kebijakan Publik	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 7	Analisis Konten Media Sosial (Hoax & Ujaran Kebencian)	Terpenuhinya kompetensi Analisis Konten Media Sosial (Hoax & Ujaran Kebencian)	ASN Badan Kesbangpol	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Sistem Informasi Ormas & Partai Politik Terintegrasi	Terpenuhinya kompetensi Sistem Informasi Ormas & Partai Politik Terintegrasi	ASN Badan Kesbangpol	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Keamanan Siber Data Politik & Intelijen Daerah	Terpenuhinya kompetensi Keamanan Siber Data Politik & Intelijen Daerah	ASN Badan Kesbangpol	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Analisis <i>Big Data</i> Isu Strategis Daerah	Terpenuhinya kompetensi Analisis <i>Big Data</i> Isu Strategis Daerah Kematangan Proaktif	ASN Badan Kesbangpol	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Kampanye Digital Wawasan Kebangsaan	Terpenuhinya kompetensi Kampanye Digital Wawasan Kebangsaan	ASN Bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Teknik Informatika / Sistem Informasi, Ilmu Komunikasi (Digital), Sains Data (<i>Data Science</i>), Keamanan Siber (<i>Cyber Security</i>), Statistik Politik	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu	ASN Badan Kesbangpol	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 5	Pelatihan Cybersecurity & Keamanan Data Wajib Pajak	Terpenuhinya kompetensi dalam Menjaga Keamanan Data Wajib Pajak	JF Prakom/ASN Bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	lembaga penyedia pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Integrasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) & SAMSAT Online	Terpenuhinya kompetensi pembelajaran terkait integrasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah dan SAMSAT Online	JF Prakom/ASN Bidang terkait dan ASN UPT	Pelatihan	Blended Learning	lembaga penyedia pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Audit Forensik Pendapatan Daerah	Terpenuhinya kompetensi Pembelajaran Teknis Audit Forensik Pendapatan Daerah	JF AKPD/ASN Bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	lembaga penyedia pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Penilaian Bisnis & Properti untuk Pajak	Terpenuhinya kompetensi Tatacara Penilaian Bisnis dan Properti untuk Pajak	ASN Bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	lembaga penyedia pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Manajemen Piutang Pajak Daerah	Terpenuhinya kompetensi Pembelajaran Manajemen Piutang Pajak Daerah	ASN Bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	lembaga penyedia pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Workshop Strategi Komunikasi & Penyuluhan Perpajakan	Terpenuhinya kompetensi terkait Strategi Komunikasi dan Penyuluhan Perpajakan	ASN Bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	lembaga penyedia pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Aset/Properti	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Manajemen Aset	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Teknik Informatika	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Teknik Informatika	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Administrasi Publik	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Administrasi Publik	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Kebijakan Publik	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Kebijakan Publik	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
11		Sains Data	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Sains Data	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Kepemimpinan Berbasis MoT (Mentoring on the Job)	Meningkatkan kapasitas kepemimpinan strategis Kepala Badan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan kinerja organisasi, dan pencapaian target pembangunan daerah	Kepala Badan	Experiential Learning	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
2		Pelatihan Fungsional Widyaiswara	Meningkatkan kompetensi widyaiswara dalam melaksanakan tugas pembelajaran sesuai standar jabatan fungsional	Widyaiswara	TOT PKN 2	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
3		Pelatihan Sosialkultural Pengelolaan Kinerja ASN	Meningkatkan pemahaman widyaiswara terhadap aspek sosial dan budaya dalam pengelolaan kinerja ASN.	Widyaiswara	Experiential Learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
4		Pelatihan Pembelajaran Digital Berbasi AI	Meningkatkan kemampuan widyaiswara dalam memanfaatkan teknologi digital dan AI untuk pembelajaran ASN.	Widyaiswara	Patok banding, E-learning, Belajar mandiri, Komunitas belajar, Pembelajaran alam terbuka	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
5		Kursus TOEFL ITP. English For Presentation, Public Speaking Preparation Course	Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan komunikasi publik widyaiswara dalam mendukung tugas profesional.	Widyaiswara	Patok banding, E-learning, Belajar mandiri, Komunitas belajar, Pembelajaran alam terbuka	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
6		Pelatihan Manajemen Kinerja	Meningkatkan pemahaman widyaiswara dalam penerapan manajemen kinerja ASN secara efektif.	Widyaiswara	Patok banding (benchmarking)	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
7		Pelatihan tingkat Nasional	Meningkatkan wawasan dan pemahaman widyaiswara terhadap tugas dan fungsi DPR dalam sistem pemerintahan.	Widyaiswara	Experiential Learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
8		Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Kepala Bidang	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
9		Hospitality / Pelatihan Pelayanan Prima	Terpenuhinya kemampuan ASN yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas interaksi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.	Kepala Bidang	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah

10		Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur (Training Needs Analysis/TNA)	Terpenuhinya kemampuan menyusun peta & roadmap pengembangan kompetensi 1–5 thn	Kepala Bidang	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
11		Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Kepala Bidang	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
12		Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Kepala Bidang	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
13		Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kemampuan sekretaris dalam melakukan advokasi kebijakan otonomi daerah dan pengembangan SDM aparatur secara efektif.	Sekretaris (Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur)	Patok banding (benchmarking)	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
14		Pelatihan Sosialkultural	Meningkatkan pemahaman sekretaris terhadap aspek sosial dan budaya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.	Sekretaris (Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur)	ESQ	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
15		Pelatihan Pengendalian Evaluasi dan Anggaran	Meningkatkan kemampuan sekretaris dalam pengendalian, evaluasi, dan pengelolaan anggaran secara akuntabel.	Sekretaris (Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur)	Patok banding (benchmarking), Coaching, Mentoring	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
16		Pelatihan Teknis Pengelolaan Kinerja ASN	Meningkatkan kemampuan ASN dalam mengelola kinerja secara terukur dan berkelanjutan.	Kasubbag Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Coaching Perencanaan Kepegawaian	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, Non- APBD
17		Pelatihan Manajerial	Meningkatkan kompetensi manajerial ASN dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Coaching	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD , Non- APBD
18		Pelatihan Manajemen ASN	Meningkatkan pemahaman ASN terhadap sistem manajemen ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Coaching	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD , Non- APBD
19		Pelatihan Teknis Pengelolaan Kinerja ASN	Meningkatkan kemampuan ASN dalam pengelolaan kinerja berbasis indikator dan evaluasi.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Magang/praktik kerja, Coaching, E learning	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD , Non- APBD

20		Pelatihan Artificial Intelegensia (AI)	ASN mampu memanfaatkan teknologi AI untuk mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan akurat	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
21		Pelatihan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
22		Hospitality / Pelatihan Pelayanan Prima	Terpenuhinya kemampuan ASN yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas interaksi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
23		Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan di bidang pengembangan kompetensi ASN	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
24		Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur (Training Needs Analysis/TNA)	Terpenuhinya kemampuan menyusun peta & roadmap pengembangan kompetensi 1-5 thn	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
25		Penyusunan Peta Kompetensi dan Roadmap Pengembangan SDM Aparatur	Terpenuhinya kemampuan melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi aparatur secara sistematis menggunakan pendekatan TNA untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi yang akurat dan relevan	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
26		Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
27		Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
28		Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	2	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
29		Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatkan dan mengembangkan keterampilanLembaga Administrasi Negara dibidang pengembangan kompetensi ASN	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Formal learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	2	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
30		Diklat TOC (Training Officer Coaches)	Memahami konsep dasar coaching, termasuk definisi, prinsip, peran coach, dan perbedaan coaching dengan mentoring, teaching, dan counseling.	Analisis pengembangan kompetensi ASN ahli pertama	Formal learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
31		Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan menyusun peta & roadmap pengembangan kompetensi 1-5 thn	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah

32	Penyusunan Peta Kompetensi dan Roadmap Pengembangan SDM Aparatur	Terpenuhinya kemampuan melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi aparatur secara sistematis menggunakan pendekatan TNA untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi yang akurat dan relevan	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
33	Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
34	Pelatihan Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
35	Pengelolaan Sistem Informasi Pelatihan	Peserta mampu menjelaskan fungsi, manfaat, alur kerja, serta komponen utama SIP dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan di instansi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
36	Pelatihan Penjaminan Mutu	Peserta mampu menjelaskan pengertian, prinsip, siklus, dan ruang lingkup penjaminan mutu dalam organisasi/instansi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
37	Pelatihan Pengelolaan Sertifikasi	Peserta mampu menjelaskan pengertian sertifikasi, standar kompetensi, skema sertifikasi, serta peran lembaga sertifikasi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
38	Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Peserta memahami dasar hukum, standar kompetensi jabatan, serta ketentuan perencanaan pengembangan kompetensi di instansi pemerintah	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
39	Analisis Data dan Visualisasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menganalisis data pelatihan dan menyajikannya dalam bentuk visualisasi (dashboard, infografis) untuk pengambilan keputusan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
40	Etika Profesi dalam Perumusan Kebijakan	Terpenuhinya kemampuan dalam Menerapkan nilai etika, transparansi, dan akuntabilitas	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
41	Literasi Digital untuk Riset Kebijakan (AI tools, e-library, data terbuka)	Terpenuhinya kemampuan memanfaatkan teknologi dalam riset kebijakan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Komdigi	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
42	Penyusunan Peta Kompetensi dan Roadmap Pengembangan SDM Aparatur	Terpenuhinya kemampuan melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi aparatur secara sistematis menggunakan pendekatan TNA untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi yang akurat dan relevan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 dan 6	Pelatihan Smart Grid System & Teknologi Penyimpanan Energi	Terpenuhinya Kompetensi Pelatihan Smart Grid System & Teknologi Penyimpanan Energi	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Analisis Data Sektor ESDM (Big Data Analytics)	Terpenuhinya Kompetensi Bimtek Analisis Data Sektor ESDM (Big Data Analytics)	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Digitalisasi Pelayanan Perizinan ESDM (ESDM One Map)	Terpenuhinya Kompetensi Digitalisasi Pelayanan Perizinan ESDM (ESDM One Map)	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam	Terpenuhinya Kompetensi Pelatihan Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Diklat Mitigasi Bencana Geologi (Gerakan Tanah/Longsor)	Terpenuhinya Kompetensi Diklat Mitigasi Bencana Geologi (Gerakan Tanah/Longsor)	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE/Badan Geologi	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Pelatihan Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap	Terpenuhinya Kompetensi Pelatihan Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian ESDM/ PPSDM KEBTKE	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Energi Terbarukan (Renewable Energy)	Terpenuhinya Kompetensi Energi Terbarukan (Renewable Energy)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Kebijakan Publik	Terpenuhinya Kompetensi Kebijakan Publik	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Geofisika	Terpenuhinya Kompetensi Geofisika	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Ekonomi Pembangunan	Terpenuhinya Kompetensi Ekonomi Pembangunan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
11		Pelatihan Kepemimpinan	Terpenuhinya Kompetensi Pelatihan Kepemimpinan	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Provinsi Riau/BPSDM Pusat	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
12		Pelatihan Arsiparis	Terpenuhinya kompetensi Arsiparis	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Social Learning	Blended Learning	ANRI/Dipersip Provinsi Riau	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 7	Pelatihan Digitalisasi Budaya & Smart Culture (Smart City)	Terpenuhinya Digitalisasi Budaya & Smart Culture (Smart City)	Pejabat Struktural, Fungsional bidang diplomasi dan promosi budaya dan Pelaksana	Experiential Learning	Blended Learning	Kementrian Kebudayaan, BPSDM	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah.
2		Bimtek Komunikasi Digital & Content Creator Budaya	Terpenuhinya Komunikasi Digital & Content Creator Budaya	Pejabat Struktural, Fungsional bidang diplomasi dan promosi budaya dan Pelaksana	Experiential Learning	Blended Learning	Kementrian Kebudayaan, BPSDM	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Public Speaking & Master of Ceremony (MC) Adat	Terpenuhinya Pelatihan Public Speaking & Master of Ceremony (MC) Adat	Pelaksana	Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Workshop Virtual Museum & Augmented Reality (AR)	Terpenuhinya Workshop Virtual Museum & Augmented Reality (AR)	Pejabat Struktural dan Fungsional Permuseuman	Experiential Learning	Blended Learning	Kementrian Kebudayaan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	Terpenuhinya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	Pejabat Struktural dan Pelaksana	Experiential Learning	Blended Learning	Kementrian Kebudayaan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Diklat Fotografi & Videografi Dokumenter Budaya	Terpenuhinya Diklat Fotografi & Videografi Dokumenter Budaya	Pelaksana	Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Perikanan	Terpenuhinya kompetensi dasar Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Perikanan	ASN	Pelatihan	Blended Learning	LAN/ Penyelenggara terkait lainnya	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Penerapan Ekonomi Biru (Blue Economy)	Terpenuhinya kompetensi dasar Penerapan Ekonomi Biru (Blue Economy)	ASN	Bimtek	Blended Learning	LAN/ Penyelenggara terkait lainnya	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Teknis Bioflok & Teknologi Budidaya Modern	Terpenuhinya kompetensi dasar Teknis Bioflok & Teknologi Budidaya Modern	ASN	Bimtek	Blended Learning	LAN/ Penyelenggara terkait lainnya	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Mutu & Ekspor Hasil Perikanan	Terpenuhinya kompetensi dasar Manajemen Mutu & Ekspor Hasil Perikanan	ASN	Diklat	Blended Learning	LAN/ Penyelenggara terkait lainnya	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan	Terpenuhinya kompetensi dasar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan	ASN	Pelatihan	Blended Learning	LAN/ Penyelenggara terkait lainnya	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Digitalisasi Pemasaran Produk Kelautan (E-Fishery)	Terpenuhinya kompetensi dasar Digitalisasi Pemasaran Produk Kelautan (E-Fishery)	ASN	Workshop	Blended Learning	LAN/ Penyelenggara terkait lainnya	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Pesisir Terpadu	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Manajemen Pesisir Terpadu	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Bioteknologi Perikanan	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Bioteknologi Perikanan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Ekonomi Sumber Daya Alam	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Ekonomi Sumber Daya Alam	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Teknik Perkapalan	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Teknik Perkapalan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
11		Sistem Informasi Geografis	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Sistem Informasi Geografis	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 7	Manajemen <i>Database</i> Atlet & Pemuda Berbasis Digital (<i>Sport Intelligence</i>)	Terpenuhinya kompetensi dalam Manajemen <i>Database</i> Atlet & Pemuda Berbasis Digital (<i>Sport Intelligence</i>)	JF Analis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Pengembangan Ekosistem <i>E-Sports</i> Daerah	Terpenuhinya kompetensi dalam Pengembangan Ekosistem <i>E-Sports</i> Daerah	JF Analis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pemasaran Digital & <i>Branding</i> Fasilitas Olahraga	Terpenuhinya kompetensi dalam Pemasaran Digital & <i>Branding</i> Fasilitas Olahraga	JF Analis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning		BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Analisis <i>Big Data</i> Prestasi Olahraga (<i>Sports Analytics</i>)	Terpenuhinya kompetensi dalam Analisis <i>Big Data</i> Prestasi Olahraga (<i>Sports Analytics</i>)	JF Analis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning		BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Digitalisasi Layanan Kepemudaan	Terpenuhinya kompetensi dalam Digitalisasi Layanan Kepemudaan	JF Analis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning		BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Desain Komunikasi Visual (Multimedia) 3. Pemasaran Digital 4. Sains Data (Statistik Olahraga) 5. Manajemen Bisnis Olahraga	Terpenuhinya Kompetensi di bidang ilmu-ilmu: 1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Desain Komunikasi Visual (Multimedia) 3. Pemasaran Digital 4. Sains Data (Statistik Olahraga) 5. Manajemen Bisnis Olahraga	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) Terintegrasi (SATUSEHAT)	Terpenuhinya kompetensi Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) Terintegrasi (SATUSEHAT) dibidang Sistem Informasi Kesehatan	JFT. Administrator Kesehatan/pengelola program RS dan Puskesmas	Fromal Learning/Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Telemedisin & Telekesehatan	Terpenuhinya kompetensi Telemedisin & Telekesehatandibidang . Informatika Medis	Widyaiswara/Pengelola Program RS	Daring	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Analisis <i>Big Data</i> Kesehatan Daerah	Terpenuhinya kompetensi Analisis <i>Big Data</i> Kesehatan Daerah dibidang Sains Data (<i>Health Informatics</i>)	Pengolah Data dan Informasi	Fromal Learning/Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Keamanan Siber Data Pasien (<i>Health Data Security</i>)	Terpenuhinya kompetensi Keamanan Siber Data Pasien (<i>Health Data Security</i>) dibidang Teknik Biomedis	Pengolah Data dan Informasi	Fromal Learning/Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	35	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) Digital	Terpenuhinya kompetensi Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) Digital dibidang Manajemen Informasi Kesehatan	JFT. Administrator Kesehatan/ Pengelolah Program RS	Fromal Learning/Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

UPT BERSIFAT KHUSUS RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Pelatihan Advanced Trauma Life Support untuk Dokter	Terpenuhinya kompetensi dalam Pelatihan Advanced Trauma Life Support	JF Dokter	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Manajemen Risiko Klinis & Non Klinis RS	Terpenuhinya kompetensi dalam Bimtek Manajemen Risiko Klinis & Non Klinis RS	JF Kesehatan Asn Bidang terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Teknis Pelayanan Jantung Terpadu & Kanker	Terpenuhinya kompetensi dalam Pelatihan Teknis Pelayanan Jantung Terpadu & Kanker	JF Dokter JF Perawat	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Auditor Internal Mutu Rumah Sakit	Terpenuhinya kompetensi dalam Diklat Auditor Internal Mutu Rumah Sakit	ASN Bidang Terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Keperawatan Kritis Lanjut	Terpenuhinya kompetensi dalam Pelatihan Keperawatan Kritis Lanjut	JF Dokter JF Perawat	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Workshop Telemedicine & Kesehatan Digital	Terpenuhinya kompetensi dalam Workshop Telemedicine & Kesehatan Digital	JF Kesehatan ASN dibidang terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Kedokteran Spesialis	Terpenuhinya Pendidikan dibidang Kedokteran Spesialis	JF Kedokteran	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Manajemen Rumah Sakit (MARS)	Terpenuhinya Pendidikan dibidang Manajemen Rumah Sakit (MARS)	JF Kesehatan ASN dibinag terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Fisika Medis	Terpenuhinya Pendidikan dibidang Fisika Medis	JF Fisikawan Medis	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
11		Psikologi Klinis	Terpenuhinya Pendidikan dibidang Psikologi Klinis	JF Psikolog Klinis	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
12		Informatika Medis	Terpenuhinya Pendidikan dibidang Informatika Medis	JF Perekam Medis ASN dibinag terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

UPT BERSIFAT KHUSUS RSUD PETALA BUMI PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) & Integrasi SATUSEHAT	Terpenuhinya kompetensi di bidang Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) & Integrasi SATUSEHAT	Perekam Medis	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) Terintegrasi	Terpenuhinya kompetensi di bidang Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) Terintegrasi	Tenaga EDP dan Admin Pelayanan	Experiential Learning dan Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Keamanan Data Pasien (<i>Health Cyber Security</i>)	Terpenuhinya kompetensi di bidang Keamanan Data Pasien (<i>Health Cyber Security</i>)	Tenaga EDP dan Perekam Medis	Experiential Learning dan Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		<i>Digital Marketing & Branding</i> Layanan RSUD	Terpenuhinya kompetensi di bidang <i>Digital Marketing & Branding</i> Layanan RSUD	Tenaga Promotor Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Formal Learning dan Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Telemedisin & Telekonsultasi	Terpenuhinya kompetensi di bidang Telemedisin & Telekonsultasi	Tenaga Kesehatan	Experiential Learning dan Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		S1 Sistem Informasi / Teknik Informatika	Terpenuhinya Kompetensi S1 Sistem Informasi/ Teknik Informatika	ASN EDP	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		D4/S1 Manajemen Informasi Kesehatan (Rekam Medis)	Terpenuhinya Kompetensi D4/S1 Manajemen Informasi Kesehatan (Rekam Medis)	ASN Perekam Medis	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Teknik Elektromedik	Terpenuhinya Kompetensi Teknik Elektromedik	ASN Teknik Elektromedis	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Sains Data Kesehatan	Terpenuhinya Kompetensi Sains Data Kesehatan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Pemasaran Rumah Sakit	Terpenuhinya Kompetensi Pemasaran Rumah Sakit	ASN PKRS	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) Terintegrasi (SATUSEHAT) S1 Sistem Informasi / Teknik Informatika	Terpenuhinya kompetensi dasar Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) Terintegrasi (SATUSEHAT)	Tim IT RSJ Tim Rekam Medis Manajemen RS	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blend learning	Platform Satu Sehat LSM Kesehatan Webiner atau sosialisasi	20-30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Layanan Telepsikiatri & Telekonseling Sarjana Kesehatan keperawatan Psikologi Spesialis Psikiatri	Terpenuhi nya kompetensi dasar Layanan Telepsikiatri & Telekonseling Sarjana Kesehatan keperawatan Psikologi Spesialis Psikiatri	Psikiarti Psikologi klinis Perawat Spesialis Jiwa Konselor	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blend learning	Organisasi (PPNI, PDSKJI, HIMPSI)	20-30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) Berbasis Digital Manajemen Informasi Kesehatan (Digital)	Terpenuhi nya kompetensi dasar Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) Berbasis Digital	Tim IT RSJ Tim Rekam Medis	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blend learning	Pembejaraan Klasikal Role-Based Tranning	20-30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Keamanan Data Pasien (<i>Cyber Security</i>) Manajemen Informasi Kesehatan (Digital) S1 Sistem Informasi / Teknik Informatika	Terpenuhi nya kompetensi dasar Keamanan Data Pasien (<i>Cyber Security</i>)	Tim IT RSJ Tim Rekam Medis Petugas Penghubung SATUSEHAT	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blend learning	Simulasi dan latihan Praktis Pembelajaran Klasikal	20-30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Digitalisasi Logistik & Aset RS Manajemen Informasi Kesehatan (Digital) S1 Sistem Informasi / Teknik Informatika	Terpenuhi nya kompetensi dasar Digitalisasi Logistik & Aset RS	Pelaksana Gudang Farmasi, Pelaksana urusan logistik, aset dan keuangan/akuntansi	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blend learning	Role-Based Tranning Pembelajaran Klasikal	20-30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) Terintegrasi	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) Terintegrasi	ASN	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lemabaga Penyedia Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Analisis <i>Big Data</i> Pasar & Harga Komoditas Ternak	Terpenuhinya kompetensi Analisis <i>Big Data</i> Pasar & Harga Komoditas Ternak	ASN	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lemabaga Penyedia Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pemasaran Digital Produk Peternakan (<i>E-Commerce</i>)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Pemasaran Digital Produk Peternakan (<i>E-Commerce</i>)	ASN	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lemabaga Penyedia Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pemetaan Penyakit Hewan Berbasis GIS	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Pemetaan Penyakit Hewan Berbasis GIS	ASN	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lemabaga Penyedia Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		<i>Smart Farming</i> (Peternakan Presisi)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis <i>Smart Farming</i> (Peternakan Presisi)	ASN	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lemabaga Penyedia Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Sains Data (<i>Animal Science Data</i>) 3. Desain Komunikasi Visual (Pemasaran) 4. Teknik Lingkungan (Limbah) 5. Geografi (Pemetaan Penyakit)	Terpenuhinya kompetensi dibidang Ilmu-ilmu: 1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Sains Data (<i>Animal Science Data</i>) 3. Desain Komunikasi Visual (Pemasaran) 4. Teknik Lingkungan (Limbah) 5. Geografi (Pemetaan Penyakit)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikann	7	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1 Misi 4 Misi 7	Pelatihan Psychosocial Support (Dukungan Psikososial) Pasca Bencana	Terpenuhinya Pelatihan Psychosocial Support (Dukungan Psikososial) Pasca Bencana	ASN Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan ASN pada bidang lainnya	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial dan BPBD	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Audit Kinerja Program Bansos & Hibah	Terpenuhinya Audit Kinerja Program Bansos & Hibah	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Manajemen Shelter & Rumah Singgah	Terpenuhinya Pelatihan Manajemen Shelter & Rumah Singgah	ASN Bidang Rehabilitasi Sosial dan ASN pada bidang lainnya	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Pekerja Sosial Klinis & Konselor Adiksi	Terpenuhinya Pekerja Sosial Klinis & Konselor Adiksi	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Advokasi Kebijakan Sosial	Terpenuhinya Pelatihan Advokasi Kebijakan Sosial	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Workshop Digitalisasi Layanan Sosial (E-Social)	Terpenuhinya Digitalisasi Layanan Sosial (E-Social)	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya Pendidikan Manajemen Sumber Daya Manusia	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Kebijakan Publik	Terpenuhinya Pendidikan Kebijakan Publik	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Hukum	Terpenuhinya Pendidikan Hukum	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Sistem Informasi	Terpenuhinya Pendidikan Sistem Informasi	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STASTIK PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan Dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Analisis <i>Big Data</i> & Visualisasi Data (<i>Dashboard Executive</i>)	Terpenuhinya Kompetensi Analisis <i>Big Data</i> & Visualisasi Data (<i>Dashboard Executive</i>)	ASN Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi serta Bidang Statistik	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	25 + 1 + 23	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Arsitektur SPBE & Interoperabilitas Sistem	Terpenuhinya Kompetensi Arsitektur SPBE & Interoperabilitas Sistem	ASN Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi serta Bidang Statistik	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Menpan RB, BPSDM, LAN RI, dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	29 + 2 + 23	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pengembangan Aplikasi (<i>Full Stack Programming</i>)	Terpenuhinya Kompetensi Pengembangan Aplikasi (<i>Full Stack Programming</i>)	ASN Bidang Aplikasi dan Informatika	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	25	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Implementasi <i>Smart Province</i> & IoT (<i>Internet of Things</i>)	Terpenuhinya Kompetensi Pengembangan Aplikasi (<i>Full Stack Programming</i>)	ASN Bidang Aplikasi dan Informatika dan Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Menpan RB, BPSDM dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	29 + 4 +	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Keamanan Siber (<i>Cyber Security</i>)	Terpenuhinya Kompetensi Keamanan Siber (<i>Cyber Security</i>)	ASN Bidang Persandian dan Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Menpan RB, BPSDM, LAN RI dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	4 + 1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		<i>Certified Ethical Hacker</i> (CEH) / <i>Network Defence</i>	Terpenuhinya Kompetensi <i>Certified Ethical Hacker</i> (CEH) / <i>Network Defence</i>	ASN Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning		1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Pelatihan Desktop GIS Opensource	Terpenuhinya Kompetensi Pelatihan Desktop GIS Opensource	ASN Bidang Statistik	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Tugas Belajar S2 Teknik Telekomunikasi/Teknik Informatika, Sains Data	Terpenuhinya Kompetensi Teknik Telekomunikasi/Teknik Informatika dan Sains Data	ASN Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 4	Pelatihan Analisis Data Pasar Kerja (Labor Market Information System)	Terpenuhinya kompetensi dalam Analisis Data Pasar Kerja (Labor Market Information System)	Pengantar Kerja, Penelaah Teknis Kebijakan,Pengolah Data dan Informasi	Pelatihan	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	Terpenuhinya kompetensi Sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	Pengawas Ketenagakerjaan, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengolah Data dan Informasi, Pengadministrasi Perkantoran	Bimtek	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Digital Marketing untuk Wirausaha Binaan	Terpenuhinya kompetensi Digital Marketing untuk Wirausaha Binaan	Pengantar Kerja, Penelaah Teknis Kebijakan,Pengolah Data dan Informasi	Pelatihan	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Investigasi Kecelakaan Kerja	Terpenuhinya kompetensi Investigasi Kecelakaan Kerja	Pengawas Ketenagakerjaan	Diklat	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Teknis Pengelolaan Database Transmigrasi	Terpenuhinya kompetensi Pengelolaan Database Transmigrasi	Analisis Kebijakan, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengolah Data dan Informasi, Pengadministrasi Perkantoran	Pelatihan	Blended Learning	Kementerian Ketransmigrasian, BPSDM Provinsi Riau	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Workshop Digitalisasi Layanan Penempatan Tenaga Kerja (SIAP Kerja)	Terpenuhinya kompetensi Digitalisasi Layanan Penempatan Tenaga Kerja (SIAP Kerja)	Pengantar Kerja, Penelaah Teknis Kebijakan,Pengolah Data dan Informasi, Pengadministrasi Perkantoran	Workshop	Blended Learning	Kementerian Ketransmigrasian, BPSDM Provinsi Riau	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Teknik Informatika/Sistem Informasi, Statistika, Hukum Bisnis, Perencanaan Wilayah dan Kota	Terpenuhinmya Kompetensi di bidang ilmu Teknik Informatika/ Sistem Informasi, Statistika, Hukum Bisnis, Perencanaan Wilayah dan Kota						

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Pelatihan Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim	Terpenuhinya kompetensi dasar pelatihan Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim	ASN yang berada di bidang terkait	<i>Formal learning, Experience learning</i>	<i>Blanded learning</i>	Widyaiswara, Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Audit Lingkungan Hidup	Terpenuhinya kompetensi dasar bimbingan teknis Audit Lingkungan Hidup	ASN yang berada di bidang terkait	<i>Formal learning, Experience learning</i>	<i>Blanded learning</i>	Widyaiswara, Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan	Terpenuhinya kompetensi dasar pelatihan Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan	ASN yang berada di bidang terkait	<i>Formal learning, Experience learning</i>	<i>Blanded learning</i>	Widyaiswara, Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	Terpenuhinya kompetensi dasar pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	Fungsional pengawas lingkungan hidup, ASN yang berada di bidang terkait	<i>Formal learning, Experience learning</i>	<i>Blanded learning</i>	Widyaiswara, Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Teknologi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Terpenuhinya kompetensi dasar pelatihan Teknologi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	ASN yang berada di bidang terkait	<i>Formal learning, Experience learning</i>	<i>Blanded learning</i>	Widyaiswara, Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Workshop Perdagangan Karbon (Carbon Trading) & Nilai Ekonomi Karbon	Terpenuhinya kompetensi dasar pelatihan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) & Nilai Ekonomi Karbon	ASN yang berada di bidang terkait	<i>Formal learning, Experience learning</i>	<i>Blanded learning</i>	Widyaiswara, Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Bencana, Klimatologi, Sosiologi Pedesaan, Ekonomi SDA, Teknik Sipil	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu Manajemen Bencana, Klimatologi, Sosiologi Pedesaan, Ekonomi SDA, dan Teknik Sipil	ASN yang berada di bidang terkait	<i>Formal learning</i>	<i>Tugas belajar</i>	Lembaga pendidikan	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIULTURA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Implementasi <i>Smart Farming 4.0 & Precision Agriculture</i>	Terpenuhinya kompetensi dalam Implementasi Smart Farming & Agriculture	JF Pengawas Benih Tanaman	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara Kompetensi	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Sistem Informasi Geografis (GIS) Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)	Terpenuhinya kompetensi Sistem GIS LP2B	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara Kompetensi	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Pemasaran Digital Produk Pertanian (<i>E-Commerce</i> Agribisnis)	Terpenuhinya Kompetensi pemasaran Digital Produk Pertanian	JF PMHP	Pelatihan	Blender Learning	Lembaga Penyelenggara Kompetensi	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Analisis <i>Big Data</i> Produksi Pangan	Terpenuhinya Manajemen Analisis Data Produksi Pangan	Analisis Statistik	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara Kompetensi	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2 Sains Data (<i>Agricultural Data</i>) 3. Teknik Pertanian (Mekanisasi) 4. Geografi (GIS/Pemetaan) 5. Desain Komunikasi Visual (Pemasaran)	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu – ilmu: 1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Sains Data (<i>Agricultural Data</i>) 3. Teknik Pertanian (Mekanisasi) 4. Geografi (GIS/Pemetaan) 5. Desain Komunikasi Visual (Pemasaran)	ASN		Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Digital Marketing & Social Media Branding Pariwisata	Terpenuhinya Kopetensi pembelajaran dasar	Pengelola Data Informasi	Formal Learning/Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian Pariwisata	24	APBD
2		Analisis Big Data Pergerakan Wisatawan	Terpenuhinya Kopetensi pembelajaran dasar	Analisis Statistik Pariwisata	Formal Learning/Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian Pariwisata	8	APBN
3		Pembuatan Konten Kreatif Promosi Wisata (Videografi)	Terpenuhinya Kopetensi pembelajaran dasar	Pengelola Media Desain dan Iftek	Formal Learning/Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi (BSN)	6	Pembiayaan lain yang sah
4		Pengelolaan E-Ticketing & Platform Smart Tourism	Terpenuhinya Kopetensi pembelajaran dasar	Analisis Statistik Pariwisata	Sosial Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi (BSN)	6	APBD
5		Fotografi Jurnalistik Pariwisata	Terpenuhinya Kopetensi pembelajaran dasar	Pengelola Media Desain dan Iftek	Sosial Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi (BSN)	8	APBN
6		1. Desain Komunikasi Visual (DKV) 2. Sistem Informasi / Teknik Informatika 3. Pemasaran Digital (Digital Marketing) 4. Sains Data 5. Videografi & Fotografi	Terpenuhi Kompetensi ilmu 1. Desain Komunikasi Visual (DKV) 2. Sistem Informasi / Teknik Informatika 3. Pemasaran Digital (Digital Marketing) 4. Sains Data 5. Videografi & Fotografi	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 4 dan Misi 5	Pelatihan Teknik Investigasi Kasus Kekerasan Seksual & TPPO	Terpenuhinya kompetensi dalam menginvestigasi Kasus Kekerasan Seksual & TPPO	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Analisis Gender Pathway & Gender Budget Statement (GBS)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Analisis Gender Pathway & Gender Budget Statement (GBS)	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA BPSDM Provinsi Riau	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Teknis Kontrasepsi Terkini (CTU) bagi Bidan/Penyuluh	Terpenuhinya kompetensi bidan/penyuluh mengenai kontrasepsi terkini (CTU)	Penata KKB	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BKKBN	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Manajemen Rumah Aman (Shelter) & Layanan Terpadu	Terpenuhinya kompetensi manajemen Rumah Aman (Shelter) & Layanan Terpadu	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Digital Parenting & Literasi Digital Keluarga	Terpenuhinya kompetensi dalam Digital Parenting & Literasi Digital Keluarga	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Workshop Pencegahan Perkawinan Anak & Isu Gender	Terpenuhinya kompetensi dalam pencegahan perkawinan anak dan isu gender	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA BKKBN	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
7		- Kriminologi - Pekerjaan Sosial (Social Work) - Ilmu Pemerintahan - Antropologi - Teknologi Pendidikan	Terpenuhinya kompetensi dalam - Kriminologi - Pekerjaan Sosial (Social Work) - Ilmu Pemerintahan - Antropologi - Teknologi Pendidikan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Pelatihan Analisis Data Pendidikan (Dapodik & Rapor Pendidikan)	Terpenuhinya kompetensi Analisis Data Pendidikan (Dapodik & Rapor Pendidikan)	Pranata Komputer, Tenaga Teknis Sekolah	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	80	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Link and Match Industri dengan SMK	Terpenuhinya kompetensi Link and Match Industri dengan SMK	Fungsional Guru SMK	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	100	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Konseling dan Kesehatan Mental Siswa	Terpenuhinya kompetensi Konseling dan Kesehatan Mental Siswa	Fungsional Guru BK	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	80	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Penulisan Karya Ilmiah & Publikasi bagi Guru	Terpenuhinya kompetensi Penulisan Karya Ilmiah & Publikasi bagi Guru	Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	100	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan	Kepala Sekolah, Waka Sarana dan Prasarana Sekolah	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	100	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Workshop Pembelajaran Berdiferensiasi & Adaptif	Terpenuhinya kompetensi Pembelajaran Berdiferensiasi & Adaptif	Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	100	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
7		Bimbingan dan Konseling, Ilmu Komputer/Informatika, Bahasa Asing (Inggris/Mandarin), Kebijakan Pendidikan	Terpenuhinya kompetensi dibidang Bimbingan dan Konseling, Ilmu Komputer/Informatika dan Bahasa Asing (Inggris/Mandarin)	Kepala Sekolah, Fungsional Guru	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 3	Operasional Area Traffic Control System (ATCS) & ITS	Terpenuhinya kompetensi Operasional Area Traffic Control System (ATCS) & ITS	ASN yang bekerja di Bidang Lalu Lintas Jalan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Digitalisasi Retribusi Parkir & Pengujian Kendaraan (EKIR)	Terpenuhinya kompetensi Digitalisasi Retribusi Parkir & Pengujian Kendaraan (EKIR)	ASN yang bekerja di Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Analisis Big Data Pergerakan Lalu Lintas	Terpenuhinya kompetensi Analisis Big Data Pergerakan Lalu Lintas	ASN yang bekerja di Bidang Lalu Lintas Jalan dan Bidang Pengembangan Transportasi	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Sistem Pemantauan Kapal (VTS) & Navigasi Digital	Terpenuhinya kompetensi Sistem Pemantauan Kapal (VTS) & Navigasi Digital	ASN yang bekerja di Bidang Pelayaran dan UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I dan Wilayah II	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Keamanan Siber Data Transportasi Daerah	Terpenuhinya kompetensi Keamanan Siber Data Transportasi Daerah	ASN yang bekerja di Bidang Pengembangan Transportasi	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Sistem Informasi/ Teknik Informatika	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu Sistem Informasi/ Teknik Informatika	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
7		Teknik Elektro (Sinyal & Sistem)	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu Teknik Elektro (Sinyal & Sistem)	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
8		Sains Data (Transport Analytics)	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu Sains Data (Transport Analytics)	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
9		Desain Komunikasi Visual	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu Desain Komunikasi Visual	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
10		Teknik Komputer	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu Teknis Komputer	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 3	Pemetaan Kebun Rakyat Berbasis GIS & <i>Drone</i>	Terpenuhinya kompetensi Pemetaan Kebun Rakyat Berbasis GIS & <i>Drone</i>	Penelaah Teknis Kebijakan, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	12	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN)	Terpenuhinya kompetensi Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN)	Penelaah Teknis Kebijakan, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	12	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Digitalisasi Pelaporan Harga Tandan Buah Segar (TBS)	Terpenuhinya kompetensi Digitalisasi Pelaporan Harga Tandan Buah Segar (TBS)	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	15	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Analisis <i>Big Data</i> Produksi Komoditas Perkebunan	Terpenuhinya kompetensi Analisis <i>Big Data</i> Produksi Komoditas Perkebunan	Penelaah Teknis Kebijakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Pemasaran Digital Produk Olahan Perkebunan (Hilirisasi)	Terpenuhinya kompetensi Pemasaran Digital Produk Olahan Perkebunan (Hilirisasi)	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
		1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Geografi / Geodesi (GIS) 3. Sains Data 4. Desain Komunikasi Visual 5. Teknik Lingkungan	Terpenuhinya kompetensi di Bidang Ilmu : 1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Geografi / Geodesi (GIS) 3. Sains Data 4. Desain Komunikasi Visual 5. Teknik Lingkungan	Penyuluh Pertanian Ahli Muda, Perencana Ahli Madya, Perencana Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Arsiparis Ahli Muda, Pengadministrasi Perkantoran, Analisis Pasar Pertanian Ahli Muda, Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1 dan Misi 7	Manajemen Perpustakaan Digital (<i>Integrated Library System</i>)	Meningkatkan kompetensi pengelolaan layanan perpustakaan berbasis digital melalui penerapan Integrated Library System (ILS) sehingga mampu mengoptimalkan pengelolaan koleksi, sirkulasi, keanggotaan, dan layanan informasi secara modern, efektif, dan terintegrasi.	JFT Pustakawan, JFT Pranata Komputer dan ASN	Pelatihan	Blended Learning	Perpustakaan Nasional	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Preservasi Digital & Alih Media Dokumen Sejarah	Meningkatkan kompetensi peserta dalam melaksanakan pelestarian arsip sejarah melalui proses preservasi digital dan alih media agar informasi dokumen dapat terjamin keautentikan, keamanan, keterbacaan, serta keberlanjutannya dalam jangka panjang.	JFT Arsiparis dan JFT Pranata Komputer	Pelatihan	Blended Learning	Arsip Nasional	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Keamanan Informasi Aset Digital (<i>Cyber Security</i>)	Mampu memahami, menerapkan, dan menjaga keamanan informasi serta aset digital organisasi melalui penerapan prinsip, kebijakan, prosedur, dan teknologi keamanan siber.	JFT Pranata Komputer dan ASN	Pelatihan	Blended Learning	Diskominfo	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Pengembangan Konten Kreatif Promosi Literasi Digital	Mampu merancang, membuat, dan mempublikasikan konten kreatif yang efektif untuk meningkatkan literasi digital serta mendukung promosi perpustakaan, layanan informasi, dan budaya membaca di lingkungan kerja maupun masyarakat.	ASN	Pelatihan	Blended Learning	Diskominfo	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		1. Teknik Informatika / Sistem Informasi 2. Desain Komunikasi Visual (Multimedia) 3. Sains Data (<i>Library Science</i>) 4. Teknik Komputer 5. Manajemen Sistem Informasi	Terpenuhinya kompetensi dalam bidang ilmu 1. Teknik Informatika / Sistem Informasi 2. Desain Komunikasi Visual (Multimedia) 3. Sains Data (<i>Library Science</i>) 4. Teknik Komputer 5. Manajemen Sistem Informasi	ASN	Formal/Learning	Tugas Belajar	Penyelenggaraan Pendidikan	2	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Analisis Big Data Kependudukan (Data Driven Policy)	Terpenuhinya kompetensi dalam Proses Analisis Data dan Data Driven Policy	JF Analis SDM Aparatur / Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI	1	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Pengembangan Smart Village & E-Gov Desa	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Pemerintahan Desa	JF Analis Kebijakan Ahli Muda dan Penelaah Teknis Kebijakan/Fasilitator Pemerintahan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	KEMENDES/ KEMENDAGRI	1	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Digital Marketing BUMDes	Terpenuhinya kompetensi dalam Dunia Digital Marketing	JF Analis Kebijakan/ Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	KEMENDES/ KEMENDAGRI	2	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Cyber Security Data Adminduk	Terpenuhinya kompetensi Dasar Cyber Security	JF Analis Kebijakan Ahli Muda dan Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI/ KOMDIGI	2	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Analisis Kebijakan Berbasis Bukti	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Pemerintahan	JF Analis Kebijakan Ahli Muda dan Penelaah Teknis Kebijakan/Fasilitator Pemerintahan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI	2	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Sistem Informasi / Teknik Informatika,, Sains Data (<i>Data Science</i>), Teknik Komputer, Manajemen Inovasi, Desain Komunikasi Visual		ASN	Formal Learning	TUGAS BELAJAR	PENYELENGGARA PENDIDIKAN	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 3	<i>Building Information Modeling (BIM) Tingkat Lanju</i>	Terpenuhinya Kompetensi <i>Building Information Modeling (BIM) Tingkat Lanjut</i>	ASN yang membidangi	Experiential	Blended learning	BPSDM Kementrian PU	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) Tata Ruang	Terpenuhinya Kompetensi Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) Tata Ruang	ASN yang membidangi	Experiential	Blended learning	BPSDM Kementrian ATR	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		<i>Smart City & Smart Infrastructure Planning</i>	Terpenuhinya Kompetensi <i>Smart City & Smart Infrastructure Planning</i>	ASN yang membidangi	Formal	Blended learning	BPSDM Provinsi Riau	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		SCADA untuk Manajemen Air Minum & Limbah	Terpenuhinya Kompetensi SCADA untuk Manajemen Air Minum & Limbah	ASN yang membidangi	Formal	Blended learning	BPSDM Kementrian PU	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		E-Procurement & Audit PBJ Konstruksi	Terpenuhinya Kompetensi E-Procurement & Audit PBJ Konstruksi	ASN yang membidangi	Formal	Blended learning	BPSDM Kementrian PU	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		1. Teknik Geodesi / Geomatika 2. Sistem Informasi / Teknik Informatika 3. Sains Data (<i>Data Science</i>) 4. Manajemen Konstruksi Digital 5. Teknik Geologi	Terpenuhinya Kompetensi 1. Teknik Geodesi / Geomatika 2. Sistem Informasi / Teknik Informatika 3. Sains Data (<i>Data Science</i>) 4. Manajemen Konstruksi Digital 5. Teknik Geologi	ASN yang membidangi	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	6	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 4	Pelatihan Analisis Potensi Pasar & Intelijen Bisnis	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Analisis Potensi Pasar & Intelijen Bisnis	ASN yang membidangi perdagangan	Fromal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Penerapan Industri Hijau & Produksi Bersih	Terpenuhinya kompetensi Bimtek Penerapan Industri Hijau & Produksi Bersih	ASN yang membidangi industri	Fromal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Teknis Standardisasi Produk (SNI) & HKI	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Teknis Standardisasi Produk (SNI) & HKI	ASN yang membidangi industri	Fromal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Pejabat Pengawas Kemetrolagian (PPK)	Terpenuhinya kompetensi Diklat Pejabat Pengawas Kemetrolagian (PPK)	ASN yang membidangi perdagangan, pengawasan dan sertifikasi penguji mutu barang	Fromal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management)	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management)	ASN yang membidangi perdagangan	Fromal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Workshop Pengembangan Sentra IKM & Klaster Industri	Workshop Pengembangan Sentra IKM & Klaster Industri	ASN yang membidangi industri	Fromal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
7		- Manajemen Inovasi - Ekonomi Syariah - Teknik Mesin - Desain Produk	Terpenuhinya kompetensi dibidang ilmu Manajemen Inovasi, Eknomi Syariah, Teknik Mesin dan Desain Produk	ASN	Fromal Learning	Tugas belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 & 3	Pelatihan Investment Project Ready to Offer (IPRO)	Terpenuhinya kompetensi dalam Investment Project Ready to Offer (IPRO)	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan	Pelatihan, Formal Learning, Experiential Learning dan Social Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM Kementerian PANRB Kementerian dalam Negeri	35	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Analisis Dampak Investasi Terhadap Perekonomian Daerah	Terpenuhinya kompetensi Dampak Investasi Terhadap Perekonomian Daerah	Penyelenggara pada Penata Kelola Penanaman Modal	Pelatihan, Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM Kementerian PANRB Kementerian dalam Negeri	35	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Negosiasi Bisnis & Fasilitasi Investor	Terpenuhinya kompetensi Negosiasi Bisnis & Fasilitasi Investor	Penyelenggara pada Penata Kelola Penanaman Modal	Pelatihan, Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM Kementerian PANRB Kementerian dalam Negeri	35	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Audit Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan	Terpenuhinya kompetensi Audit Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan	Penyelenggara pada Penata Perizinan	Pelatihan, Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM Kementerian PANRB Kementerian dalam Negeri	35	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Keamanan Siber Sistem Perizinan (Cybersecurity)	Terpenuhinya kompetensi Keamanan Siber Sistem Perizinan (Cybersecurity)	Penyelenggara pada Penata Perizinan	Pelatihan, Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM Kementerian PANRB Kementerian dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Digital	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Workshop Public Private Partnership (KPBU)	Terpenuhinya kompetensi Public Private Partnership (KPBU)	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan	Pelatihan, Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM Kementerian PANRB Kementerian dalam Negeri	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Strategis Hukum Bisnis Internasional Sains Data Teknik Industri	Terpenuhinya Kompetensi di bidang ilmu; Manajemen Strategis, Hukum Bisnis Internasional, Sains Data dan Teknik Industri	Aparatur Sipil Negara	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1.	Menegakan Perda/Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	Operasional <i>Command Center</i> & Pemantauan CCTV	Terpenuhinya kompetensi Operasional <i>Command Center</i> & Pemantauan CCTV	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Komunikasi dan Digital	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2.		Analisis Data Gangguan Ketentraman (Peta Rawan Digital)	Terpenuhinya kompetensi Analisis Data Gangguan Ketentraman (Peta Rawan Digital)	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3.		Patroli Siber (<i>Cyber Patrol</i>) Pengawasan Hoax Trantibum	Terpenuhinya kompetensi Patroli Siber (<i>Cyber Patrol</i>) Pengawasan Hoax Trantibum	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Komunikasi dan Digital / Polri	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4.		Digitalisasi Pelaporan Pelanggaran Masyarakat	Terpenuhinya kompetensi Digitalisasi Pelaporan Pelanggaran Masyarakat	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5.		Penggunaan Teknologi Drone untuk Pengawasan Aset	Terpenuhinya kompetensi Penggunaan Teknologi Drone untuk Pengawasan Aset	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Komunikasi dan Digital	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6.		1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Sains Data (<i>Crime Analysis</i>) 3. Keamanan Siber (<i>Cyber Law</i>) 4. Keamanan Siber (<i>Cyber Law</i>) 5. Desain Komunikasi Visual	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PERISALAH LEGISLATIF	Terpenuhinya kompetensi dalam merilis, membuat transkrip rapat	JF Perisalah legislatif dan asisten perisalah	PELATIHAN	Blended Learning	DPR RI	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		PELATIHAN KEHUMASAN FOTOGRAFI DASAR	Terpenuhinya kompetensi dalam teknik mengambil foto yang layak publikasi untuk membangun citra positif, fokus pada pemahaman kamera,komposisi, pencahayaan,angle, dan storytelling visual.	JF Pranata Kehumasan	PELATIHAN	Blended Learning	KEMENKOMINFO	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		PELATIHAN KEBAHASAAN INTERMEDIATE ENGLISH	Terpenuhinya kompetensi dalam berbahsa inggris	Pengadministrasi Perkantoran, Penelaan teknis kebijakan, pranata komputer, penata keprotkolan, pengelola keprotokolan, JF perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif	PELATIHAN	Blended Learning	BPSDM	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		PELATIHAN MC DAN PUBLIC SPEAKING DIDALAM ACARA FORMAL DAN NON FORMAL DAN OPTIMALISASI MANAJEMEN KEHUMASAN	Terpenuhinya kompetensi dalam membawa acara, dan protokol	Pengelola Keprotokolan dan penata keprotokolan	PELATIHAN	Blended Learning	BPSDM	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan Dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik	Memahami konsep dasar kebijakan publik, menganalisis masalah publik dan menentukan prioritas advokasi	Seluruh ASN Fungsional Analisis Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN, Universitas Negeri, Pusdiklat	13	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Bimbingan Teknis Tata Kelola Pelaporan Kegiatan dan Program Pembangunan Daerah	Terpenuhinya dan Meningkatkan pemahaman aparatur terkait standar dan regulasi pelaporan. Memperkuat kemampuan teknis dalam penyusunan laporan fisik, dan laporan kinerja.	Seluruh ASN Fungsional Analisis Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN, Universitas Negeri, Pusdiklat	13	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Komunikasi Visual (DKV)	Terpenuhinya Terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai standar kompetensi jabatan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Sistem Informasi / Teknik Informatika	Terpenuhinya Terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai standar kompetensi jabatan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Multimedia Kreatif	Terpenuhinya Terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai standar kompetensi jabatan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pemasaran Digital	Terpenuhinya Terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai standar kompetensi jabatan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Sains Data (<i>Media Analytics</i>)	Terpenuhinya Terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai standar kompetensi jabatan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Manajemen Media Sosial Pimpinan (<i>Personal Branding</i>)	Terpenuhinya Kompetensi pada bidang kerja sesuai kebutuhan jabatan dan bidang kerja	JF Analisis, Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

7		Analisis Sentimen Media & <i>Digital Monitoring</i>	Terpenuhinya Kompetensi pada bidang kerja sesuai kebutuhan jabatan dan bidang kerja	JF Analis , Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		<i>Video Editing & Motion Graphic</i> untuk Dokumentasi Pimpinan	Terpenuhinya Kompetensi pada bidang kerja sesuai kebutuhan jabatan dan bidang kerja	JF Analis , Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Keamanan Informasi Data Jadwal & Komunikasi Pimpinan	Terpenuhinya Kompetensi pada bidang kerja sesuai kebutuhan jabatan dan bidang kerja	JF Analis , Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Digitalisasi Arsip Dokumentasi Pimpinan	Terpenuhinya Kompetensi pada bidang kerja sesuai kebutuhan jabatan dan bidang kerja	JF Analis , Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Legal Drafting	Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan perundang-undangan	Fungsional perancang peraturan perundang-undangan, fungsional analis hukum, penyusun materi hukum & perundang-undangan dan analis kebijakan	Formal learning	Blended Learning	BPHN, Kemenkum dan Lembaga Diklat Swasta	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Tata cara harmonisasi produk hukum	Terpenuhinya kompetensi aparatur dalam tahapan penyusunan perundang-undangan	Fungsional tetap ahli hukum, perancang dan analis penyusun materi perundang-undangan	Experiential learning	Blended Learning	MA dan Lembaga Diklat Swasta	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH)	Terpenuhinya kompetensi pengelolaan jaringan dokumentasi informasi	Analisis hukum, pengelola data dan informasi	Social learning	Blended Learning	Kemenkum	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Teknik penyuluhan hukum dan HAM	Terpenuhinya kompetensi penyuluhan hukum dan HAM	Analisis hukum, penelaah teknis kebijakan dan 5analis perkara peradilan	Formal learning	Blended Learning	Kemenkum dan Kemendagri	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Penyusunan MOU dan PKS	Terpenuhinya kompetensi aparatur dalam penyusunan MOU & PKS	Penyusun materi hukum perundang-undangan, penelaah teknis kebijakan	Experiential learning	Blended Learning	Kemendagri	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Pendidikan khusus advokasi hukum	Terpenuhinya kompetensi dalam penyelesaian masalah hukum di dalam peradilan	Fungsional tetap ahli hukum, analis perkara peradilan dan penyusun materi hukum dan perundang-undangan	Formal learning	Blended Learning	BPHN, Kemenkum dan Organisasi advokasi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Pendidikan dan pelatihan mediator	Terpenuhinya kompetensi dalam penyelesaian masalah hukum di luar peradilan	Fungsional tetap ahli hukum	Formal learning	Blended Learning	MA dan lembaga diklat swasta	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1 Misi 4 Misi 7	Pelatihan Advokasi Kebijakan Sosial & Keagamaan	Terpenuhinya Kompetensi dalam Pelatihan Advokasi Kebijakan Sosial & Keagamaan	ASN yang membidangi sosial dan keagamaan	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning		2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Manajemen Risiko Penyaluran Bantuan Pemerintah	Terpenuhinya Kompetensi dalam Bimtek Manajemen Risiko Penyaluran Bantuan Pemerintah	ASN yang membidangi bantuan pemerintah	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning		3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Digitalisasi Layanan Kesejahteraan Rakyat	Terpenuhinya Kompetensi dalam Pelatihan Digitalisasi Layanan Kesejahteraan Rakyat	ASN yang membidangi bagian digitalisasi	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning		2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Mediator Konflik Sosial & Keagamaan	Terpenuhinya Kompetensi dalam Diklat Mediator Konflik Sosial & Keagamaan	ASN yang membidangi sosial dan keagamaan	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning		3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Analisis Data Kemiskinan (Data Science Dasar)	Terpenuhinya Kompetensi dalam Pelatihan Analisis Data Kemiskinan (Data Science Dasar)	ASN yang membidangi bidang sosial	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning		2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Workshop Pemberdayaan Ekonomi Umat & Lembaga Keagamaan	Terpenuhinya Kompetensi dalam Workshop Pemberdayaan Ekonomi Umat & Lembaga Keagamaan	ASN yang membidangi keagamaan	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning		2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Dakwah/Bimbingan Penyuluhan, Hukum Tata Negara, Statistika Sosial, Komunikasi Penyiaran Islam, Antropologi Sosial	Terpenuhinya Kompetensi di bidang ilmu: Manajemen Dakwah/Bimbingan Penyuluhan, Hukum Tata Negara, Statistika Sosial, Komunikasi Penyiaran Islam, Antropologi Sosial	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan		8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Arsitektur SPBE	ASN	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Digitalisasi Proses Bisnis & Tata Naskah Dinas Elektronik	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Digitalisasi Proses Bisnis & Tata Naskah Dinas Elektronik	ASN	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Analisis Kinerja Organisasi Berbasis <i>Big Data</i>	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Analisis Kinerja Organisasi Berbasis <i>Big Data</i>	ASN	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Perancangan Struktur Organisasi <i>Agile</i> Digital	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Perancangan Struktur Organisasi <i>Agile</i> Digital	ASN	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Audit Kinerja & Tata Kelola Organisasi	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Audit Kinerja & Tata Kelola Organisasi	ASN	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Sistem Informasi / Teknik Informatika	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan Sistem Informasi / Teknik Informatika	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Sains Data (<i>Data Analytics</i>)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Sains Data (<i>Data Analytics</i>)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Manajemen Sistem Informasi	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Manajemen Sistem Informasi	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Teknik Industri (Manajemen Proses)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Teknik Industri (Manajemen Proses)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Desain Organisasi Digital	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Desain Organisasi Digital	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5 dan Misi 6	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Modul Pemerintahan	Terpenuhinya kompetensi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Modul Pemerintahan pembelajaran	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning, Experiential Learning, Social Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Pemetaan Batas Wilayah Berbasis GIS (<i>Geographic Information System</i>)	Terpenuhinya kompetensi Pemetaan Batas Wilayah Berbasis GIS (<i>Geographic Information System</i>)	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning, Experiential Learning, Social Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Digitalisasi Database Kerjasama Daerah (E-Kerjasama)	Terpenuhinya kompetensi Digitalisasi Database Kerjasama Daerah (E-Kerjasama)	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning, Experiential Learning, Social Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Analisis <i>Big Data</i> Laporan Kinerja Analisis <i>Big Data</i> Laporan Kinerja Pemerintah	Terpenuhinya kompetensi Analisis <i>Big Data</i> Laporan Kinerja Analisis <i>Big Data</i> Laporan Kinerja Pemerintah	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning, Experiential Learning, Social Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Tata Kelola <i>Smart Governance</i> Otonomi Daerah	Terpenuhinya kompetensi Tata Kelola <i>Smart Governance</i> Otonomi Daerah	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning, Experiential Learning, Social Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Sistem Informasi 2. Teknik Geomatika / Geodesi (Pemetaan) 3. Sains Data (<i>Governance Data</i>) 4. Hukum Siber 5. Manajemen Sistem Informasi	Terpenuhinya Kompetensi pada Bidang Ilmu : 1. Sistem Informasi 2. Teknik Geomatika / Geodesi (Pemetaan) 3. Sains Data (<i>Governance Data</i>) 4. Hukum Siber 5. Manajemen Sistem Informasi	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Pelatihan Kompetensi PBJP Level Lanjut (Strategis)	Terpenuhinya kompetensi PBJP Level Lanjut (Strategis)	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Bimtek Analisis Pasar dan Strategi Pengadaan (Market Analysis)	Terpenuhinya kompetensi Analisis Pasar dan Strategi Pengadaan (Market Analysis)	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Audit Forensik Pengadaan & Investigasi Kecurangan (Fraud)	Terpenuhinya kompetensi Audit Forensik Pengadaan & Investigasi Kecurangan (Fraud)	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Diklat Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ Menuju Level Kematangan Proaktif	Terpenuhinya kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ Menuju Level Kematangan Proaktif	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Green Public Procurement (Pengadaan Berkelanjutan)	Terpenuhinya kompetensi Green Public Procurement (Pengadaan Berkelanjutan)	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Workshop Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Monev)	Terpenuhinya kompetensi Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Monev)	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Formal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40 SC	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Kebijakan Publik - Hubungan Internasional - Psikologi Organisasi - Manajemen Aset	Terpenuhinya kompetensi Kebijakan Publik - Hubungan Internasional - Psikologi Organisasi - Manajemen Aset	ASN Biro PBJ	Formal Learning	Tugas belajar	Penyelenggara pendidikan	Semua ASN PBJ	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 6	Analisis <i>Big Data</i> Ekonomi & Harga Pasar (<i>Market Intelligence</i>)	Terpenuhinya kompetensi Analisis <i>Big Data</i> Ekonomi & Harga Pasar (<i>Market Intelligence</i>)	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experiential, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Digitalisasi Pelaporan BUMD & Sistem Informasi SDA	Terpenuhinya kompetensi Digitalisasi Pelaporan BUMD & Sistem Informasi SDA	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experiential, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Daerah	Terpenuhinya kompetensi Ekosistem Ekonomi Digital Daerah	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experiential, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		<i>Dashboard</i> Pemantauan Inflasi <i>Real-time</i>	Terpenuhinya kompetensi <i>Dashboar</i> d Pemantauan Inflasi <i>Real-time</i>	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experiential, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Audit Sistem Informasi Keuangan BUMD	Terpenuhinya kompetensi Audit Sistem Informasi Keuangan BUMD	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experiential, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Sains Data (<i>Economic Data Analytics</i>) 3. Ekonomi Digital 4. Bisnis Digital 5. Manajemen Sistem Informasi	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu 1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Sains Data (<i>Economic Data Analytics</i>) 3. Ekonomi Digital 4. Bisnis Digital 5. Manajemen Sistem Informasi	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	7	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Aplikasi Manajemen Aset Daerah Digital (<i>E-Asset</i>)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran	Jabatan Pelaksana	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Sistem Keamanan Gedung (<i>Security System</i> & CCTV)	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Lembaga Pelatihan	Jabatan Pelaksana	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Digitalisasi Arsip Vital & Terjaga	Terpenuhinya kompetensi Digitalisasi Arsip Vital & Terjaga	JF Analis	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (E-Purchasing)	Terpenuhinya kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (E-Purchasing)	Jabatan Pelaksana	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		<i>Smart Building Management System</i>	Terpenuhinya kompetensi <i>Smart Building Management System</i>	Jabatan Pelaksana	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Magister Manajemen SDM 2. Psikologi 3. Ilmu Komunikasi 4. Kebijakan Publik 5. Manajemen Properti	Terpenuhinya kompetensi dibidang Magister Manajemen SDM 2. Psikologi 3. Ilmu Komunikasi 4. Kebijakan Publik 5. Manajemen Properti	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2028					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Aplikasi Reservasi & <i>Booking System</i> Mess Digital	Terpenuhinya Kompetensi Aplikasi Reservasi & <i>Booking System</i> Mess Digital	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Promosi Wisata & Budaya Riau Berbasis Digital	Terpenuhinya Kompetensi Promosi Wisata & Budaya Riau Berbasis Digital	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri, Lembaga Penyelenggara	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pembuatan Konten Kreatif Media Sosial (Branding Daerah)	Terpenuhinya Kompetensi Pembuatan Konten Kreatif Media Sosial (Branding Daerah)	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Database Fasilitas Pimpinan	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Database Fasilitas Pimpinan	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Keamanan Informasi Data Tamu VVIP	Terpenuhinya Kompetensi Keamanan Informasi Data Tamu VVIP	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Teknik Informatika / Sistem Informasi 2. Desain Komunikasi Visual 3. Pemasaran Digital (<i>Digital Marketing</i>) 4. Manajemen Bisnis 5. Sains Data	1. Teknik Informatika / Sistem Informasi 2. Desain Komunikasi Visual 3. Pemasaran Digital (<i>Digital Marketing</i>) 4. Manajemen Bisnis 5. Sains Data	ASN Badan Penghubung	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyelenggara	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah



DESAIN PEMBELAJARAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2029

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Audit Investigasi & Penghitungan Kerugian Negara (PKN)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning	BPSDM Provinsi Riau/BPKP/KPK/BPK	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning (daring + luring)	BPKP/ BPK	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Peran Auditor sebagai Consulting Partner (Konsultansi)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional AUDITOR	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning (daring + luring)	BPKP/KPK/BPK	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning	BPKP	6	APBD
5		Penggunaan Aplikasi Pengawasan (E-Audit) Ilmu Komunikasi (Negosiasi)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning (daring + luring)	BPKP/ BPK/BPSDM/Provinsi Riau	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan Dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Pelatihan Coaching & Mentoring untuk Pimpinan	Terpenuhinya Kompetensi Coaching & Mentoring untuk Pimpinan	Seluruh ASN Jabatan Struktural BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Pelatihan Manajemen Konflik & Disiplin Pegawai	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Konflik & Disiplin Pegawai	Seluruh ASN Subbagian Kepegawaian dan Umum dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	9	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Bimtek Penyelesaian Sengketa Kepegawaian	Terpenuhinya Kompetensi Penyelesaian Sengketa Kepegawaian	Seluruh ASN Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Budaya Kerja BerAKHLAK & Budaya Melayu	Terpenuhinya Kompetensi Budaya Kerja BerAKHLAK & Budaya Melayu	Seluruh ASN BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Diklat Manajemen Perubahan (Change Management)	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Perubahan (Change Management)	Seluruh ASN BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Workshop Kesehatan Mental di Lingkungan Kerja	Terpenuhinya Kompetensi Kesehatan Mental di Lingkungan Kerja	Seluruh ASN BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, BKN, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Ilmu Administrasi, Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Inovasi, Sosiologi (Resolusi Konflik), Psikologi	Terpenuhinya Kompetensi di bidang Ilmu Administrasi Kebijakan Publik Ilmu Administrasi Publik Manajemen Inovasi Sosiologi (Resolusi Konflik) Psikologi	Seluruh ASN BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Tugas Belajar	Universitas Dalam dan Luar Negeri	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 6	Valuasi Ekonomi & Komersialisasi Produk Inovasi (Hilirisasi)	Terpenuhinya kompetensi dalam memvaluasi Ekonomi & Komersialisasi Produk Inovasi (Hilirisasi)	JFT Peneliti, JFT Analis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Strategi Kolaborasi Riset <i>Pentahelix</i>	Terpenuhinya kompetensi dalam membuat Strategi Kolaborasi Riset <i>Pentahelix</i>	JFT Peneliti, JFT Analis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Perubahan Ekosistem Inovasi Daerah	Terpenuhinya kompetensi dalam manajemen Perubahan Ekosistem Inovasi Daerah	JFT Peneliti, JFT Analis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Teknik Negosiasi Kerjasama Riset Industri	Terpenuhinya kompetensi dalam Teknik Negosiasi Kerjasama Riset Industri	JFT Peneliti, JFT Analis Kebijakan dan Perekayasa dan JFU	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		1. Manajemen Inovasi 2. Studi Pembangunan 3. Psikologi Industri 4. Ekonomi Kreatif 5. Manajemen Strategis	Terpenuhinya kompetensi dibidang ilmu: 1. Manajemen Inovasi 2. Studi Pembangunan 3. Psikologi Industri 4. Ekonomi Kreatif 5. Manajemen Strategis	Seluruh Pegawai BRIDA	Formal Learning Experiential Learning	Blended Learning (daring + luring)	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	RPJMD	<i>Design Thinking</i> untuk Inovasi Kebijakan Publik	Terpenuhinya kompetensi dalam <i>Design Thinking</i> untuk Inovasi Kebijakan Publik	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Teknik Negosiasi & Kolaborasi Lintas Sektor (Pusat-Daerah)	Terpenuhinya kompetensi dalam Teknik Negosiasi & Kolaborasi Lintas Sektor (Pusat-Daerah)	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Perubahan (<i>Change Management</i>) Birokrasi	Terpenuhinya kompetensi dalam Manajemen Perubahan (<i>Change Management</i>) Birokrasi	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		<i>Public Speaking</i> & Advokasi Kebijakan	Terpenuhinya kompetensi dalam <i>Public Speaking</i> & Advokasi Kebijakan	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklat, Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		1. Magister Perencanaan Pembangunan 2. Ilmu Komunikasi (Strategis) 3. Manajemen Inovasi 4. Ekonomi Regional	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Komunikasi Krisis & Hubungan Media saat Bencana	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Lembaga Pelatihan Komunikasi Krisis & Hubungan Media saat Bencana	ASN yang bekerja dibidang tersebut	Pelatihan	Blended Learning	BNPB /BPBD	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Trauma Healing & Dukungan Psikososial	Terpenuhinya kompetensi teknis dibidang ilmu Trauma Healing & Dukungan Psikososial	ASN yang bekerja dibidang tersebut	Pelatihan	Blended Learning	BPBD	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Koordinasi Lintas Sektor (Pentahelix)	Terpenuhinya kompetensi teknis dibidang ilmu Manajemen Koordinasi Lintas Sektor (Pentahelix)	ASN yang bekerja dibidang tersebut	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga yang bersangkutan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Advokasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana	Terpenuhinya kompetensi teknis dibidang ilmu Advokasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana	ASN yang bekerja dibidang tersebut	Pelatihan	Blended Learning	BNPB	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		1. Manajemen Bencana 2. Kebijakan Publik 3. Hukum Tata Negara	Terpenuhinya kompetensi teknis dibidang ilmu Pendidikan Formal	ASN yang bekerja dibidang tersebut	Tugas belajar	Pendidikan Formal	Penyelenggara Pendidikan	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Pelatihan Change Management (Manajemen Perubahan) Keuangan	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Change Management (Manajemen Perubahan) Keuangan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Anggaran, Bagian Keuangan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kemendagri dan Kementerian keuangan	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Workshop Inovasi Pembiayaan Daerah (Creative Financing)	Terpenuhinya kompetensi Inovasi Pembiayaan Daerah (Creative Financing)	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Formal Learning/ Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning	Kemendagri dan Kementerian Keuangan	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Penyelesaian Sengketa Aset & Legal Audit	Terpenuhinya kompetensi Penyelesaian Sengketa Aset & Legal Audit	Bidang PBMD, JFT Penilai Pemerintah	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning	Lembaga hukum swasta	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Pelayanan Prima (Service Excellence) Stakeholder Keuangan	Terpenuhinya kompetensi Pelayanan Prima (Service Excellence) Stakeholder Keuangan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	OJK, kementerian terkait, bank	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Bimtek Strategi Peningkatan PAD	Terpenuhinya kompetensi Strategi Peningkatan PAD	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kemendagri dan Kementerian Keuangan	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		- Manajemen Strategis - Manajemen Inovasi - Ekonomi Syariah - Kebijakan Publik	Terpenuhinya kompetensi bidang Ilmu: - Manajemen Strategis - Manajemen Inovasi - Ekonomi Syariah - Kebijakan Publik	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar		10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 7	Sertifikasi Analis Kebijakan Publik (Jafung AK)	Terpenuhinya kompetensi Sertifikasi Analis Kebijakan Publik (Jafung AK)	ASN Badan Kesbangpol	Fomal Learning	Blended Learning	BPSDM Provinsi Riau	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Teknik Negosiasi & Mediasi Konflik Sosial	Terpenuhinya kompetensi Teknik Negosiasi & Mediasi Konflik Sosial	ASN Badan Kesbangpol	Fomal Learning	Blended Learning	BPSDM Provinsi Riau	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Risiko Politik & Keamanan	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Risiko Politik & Keamanan	ASN Badan Kesbangpol	Fomal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Magister Kebijakan Publik, Magister Ilmu Pemerintahan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Hukum Administrasi Negara, Manajemen Konflik	Terpenuhinya kompetensi Magister Kebijakan Publik, Magister Ilmu Pemerintahan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Hukum Administrasi Negara, Manajemen Konflik	ASN Badan Kesbangpol	Fomal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 5	Pelatihan Negosiasi & Resolusi Sengketa Pajak	Terpenuhinya kompetensi Pemahaman dan keterampilan profesional dalam mengelola, menyelesaikan dan jika memungkinkan mencegah sengketa pajak	JF AKPD dan ASN Bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	lembaga penyedia pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Workshop Inovasi Layanan Pendapatan Berbasis Digital (Fintech)	Terpenuhinya kompetensi untuk memahami tren dan teknologi digital serta mengidentifikasi peluang inovasi	JF Prakom dan ASN Bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	lembaga penyedia pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Change Management Organisasi Pendapatan	Terpenuhinya kompetensi dalam memahami prinsip dan konsep manajemen perubahan	JF AKPD dan ASN Bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	lembaga penyedia pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Bimtek Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Daerah	Terpenuhinya Kompetensi ASN untuk menganalisis serta mengevaluasi kebijakan Fiskal yang efektif dan berkelanjutan	JF AKPD dan ASN Bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	lembaga penyedia pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Pelatihan Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) Wajib Pajak	Terpenuhinya Kompetensi untuk membekali ASN terkait Administrasi Perpajakan dengan kemampuan untuk meningkatkan Kepatuhan Pajak	JF AKPD dan ASN Bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	lembaga penyedia pengembangan kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen Strategis	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Manajemen Strategis	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Ekonomi Syariah	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Ekonomi Syariah	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Hubungan Internasional (Kerjasama)	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Hubungan Internasional	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Kepemimpinan Berbasis MoT (Mentoring on the Job)	Meningkatkan kapasitas kepemimpinan strategis Kepala Badan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan kinerja organisasi, dan pencapaian target pembangunan daerah	Kepala Badan	Experiential Learning	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
2		Pelatihan Fungsional Widyaiswara	Meningkatkan kompetensi widyaiswara dalam melaksanakan tugas pembelajaran sesuai standar jabatan fungsional	Widyaiswara	TOT PKN 2	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
3		Pelatihan Sosialkultural Pengelolaan Kinerja ASN	Meningkatkan pemahaman widyaiswara terhadap aspek sosial dan budaya dalam pengelolaan kinerja ASN.	Widyaiswara	Experiential Learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
4		Pelatihan Pembelajaran Digital Berbasis AI	Meningkatkan kemampuan widyaiswara dalam memanfaatkan teknologi digital dan AI untuk pembelajaran ASN.	Widyaiswara	Patok banding, E-learning, Belajar mandiri, Komunitas belajar, Pembelajaran alam terbuka	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
5		Kursus TOEFL ITP. English For Presentation, Public Speaking Preparation Course	Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan komunikasi publik widyaiswara dalam mendukung tugas profesional.	Widyaiswara	Patok banding, E-learning, Belajar mandiri, Komunitas belajar, Pembelajaran alam terbuka	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
6		Pelatihan Manajemen Kinerja	Meningkatkan pemahaman widyaiswara dalam penerapan manajemen kinerja ASN secara efektif.	Widyaiswara	Patok banding (benchmarking)	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
7		Pelatihan tingkat Nasional	Meningkatkan wawasan dan pemahaman widyaiswara terhadap tugas dan fungsi DPR dalam sistem pemerintahan.	Widyaiswara	Experiential Learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
8		Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Kepala Bidang	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
9		Hospitality / Pelatihan Pelayanan Prima	Terpenuhinya kemampuan ASN yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas interaksi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.	Kepala Bidang	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
10		Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur (Training Needs Analysis/TNA)	Terpenuhinya kemampuan menyusun peta & roadmap pengembangan kompetensi 1-5 thn	Kepala Bidang	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah

11	Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Kepala Bidang	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
12	Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Kepala Bidang	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
13	Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kemampuan sekretaris dalam melakukan advokasi kebijakan otonomi daerah dan pengembangan SDM aparatur secara efektif.	Sekretaris (Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur)	Patok banding (benchmarking)	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
14	Pelatihan Sosialkultural	Meningkatkan pemahaman sekretaris terhadap aspek sosial dan budaya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.	Sekretaris (Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur)	ESQ	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
15	Pelatihan Pengendalian Evaluasi dan Anggaran	Meningkatkan kemampuan sekretaris dalam pengendalian, evaluasi, dan pengelolaan anggaran secara akuntabel.	Sekretaris (Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur)	Patok banding (benchmarking), Coaching, Mentoring	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
16	Pelatihan Teknis Pengelolaan Kinerja ASN	Meningkatkan kemampuan ASN dalam mengelola kinerja secara terukur dan berkelanjutan.	Kasubbag Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Coaching Perencanaan Kepegawaian	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, Non- APBD
17	Pelatihan Manajerial	Meningkatkan kompetensi manajerial ASN dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Coaching	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD , Non- APBD
18	Pelatihan Manajemen ASN	Meningkatkan pemahaman ASN terhadap sistem manajemen ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Coaching	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD , Non- APBD
19	Pelatihan Teknis Pengelolaan Kinerja ASN	Meningkatkan kemampuan ASN dalam pengelolaan kinerja berbasis indikator dan evaluasi.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Magang/praktik kerja, Coaching, E learning	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD , Non- APBD
20	Pelatihan Artificial Intelegensia (AI)	ASN mampu memanfaatkan teknologi AI untuk mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan akurat	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah

21		Pelatihan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
22		Hospitality / Pelatihan Pelayanan Prima	Terpenuhinya kemampuan ASN yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas interaksi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
23		Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan di bidang pengembangan kompetensi ASN	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
24		Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur (Training Needs Analysis/TNA)	Terpenuhinya kemampuan menyusun peta & roadmap pengembangan kompetensi 1-5 thn	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
25		Penyusunan Peta Kompetensi dan Roadmap Pengembangan SDM Aparatur	Terpenuhinya kemampuan melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi aparatur secara sistematis menggunakan pendekatan TNA untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi yang akurat dan relevan	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
26		Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
27		Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
28		Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	2	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
29		Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan Lembaga Administrasi Negara di bidang pengembangan kompetensi ASN	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Formal learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	2	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
30		Diklat TOC (Training Officer Coaches)	Memahami konsep dasar coaching, termasuk definisi, prinsip, peran coach, dan perbedaan coaching dengan mentoring, teaching, dan counseling.	Analisis pengembangan kompetensi ASN ahli pertama	Formal learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
31		Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan menyusun peta & roadmap pengembangan kompetensi 1-5 thn	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
32		Penyusunan Peta Kompetensi dan Roadmap Pengembangan SDM Aparatur	Terpenuhinya kemampuan melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi aparatur secara sistematis menggunakan pendekatan TNA untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi yang akurat dan relevan	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

33		Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
34		Pelatihan Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
35		Pengelolaan Sistem Informasi Pelatihan	Peserta mampu menjelaskan fungsi, manfaat, alur kerja, serta komponen utama SIP dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan di instansi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
36		Pelatihan Penjaminan Mutu	Peserta mampu menjelaskan pengertian, prinsip, siklus, dan ruang lingkup penjaminan mutu dalam organisasi/instansi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
37		Pelatihan Pengelolaan Sertifikasi	Peserta mampu menjelaskan pengertian sertifikasi, standar kompetensi, skema sertifikasi, serta peran lembaga sertifikasi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
38		Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Peserta memahami dasar hukum, standar kompetensi jabatan, serta ketentuan perencanaan pengembangan kompetensi di instansi pemerintah	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
39		Analisis Data dan Visualisasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menganalisis data pelatihan dan menyajikannya dalam bentuk visualisasi (dashboard, infografis) untuk pengambilan keputusan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
40		Etika Profesi dalam Perumusan Kebijakan	Terpenuhinya kemampuan dalam Menerapkan nilai etika, transparansi, dan akuntabilitas	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
41		Literasi Digital untuk Riset Kebijakan (AI tools, e-library, data terbuka)	Terpenuhinya kemampuan memanfaatkan teknologi dalam riset kebijakan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Komdigi	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
42		Penyusunan Peta Kompetensi dan Roadmap Pengembangan SDM Aparatur	Terpenuhinya kemampuan melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi aparatur secara sistematis menggunakan pendekatan TNA untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi yang akurat dan relevan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 dan Misi 6	Manajemen Konflik Pertambangan & CSR	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Konflik Pertambangan & CSR	ASN Dinas ESDM	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM Pusat/Luar Negeri	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Inovasi Bioenergi & Pemanfaatan Biomassa	Terpenuhinya Kompetensi Inovasi Bioenergi & Pemanfaatan Biomassa	ASN Dinas ESDM	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM Pusat/ BPSDM Prov. Riau	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Change Management Sektor Energi	Terpenuhinya Kompetensi Change Management Sektor Energi	ASN Dinas ESDM	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM Pusat/ BPSDM Prov. Riau	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang	Terpenuhinya Kompetensi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang	ASN Dinas ESDM	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM Pusat/ BPSDM Prov. Riau	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Inovasi	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Inovasi	ASN Dinas ESDM	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Ekonomi Sumber Daya Alam	Terpenuhinya Kompetensi Ekonomi Sumber Daya Alam	ASN Dinas ESDM	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Sosiologi (Resolusi Konflik)	Terpenuhinya Kompetensi Sosiologi (Resolusi Konflik)	ASN Dinas ESDM	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 7	Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Budaya (<i>Cultural Tourism</i>)	Terpenuhinya Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Budaya (<i>Cultural Tourism</i>)	Pejabat Struktural dan Pelaksana	Experience	Blended Learning	Kementerian Kebudayaan, BPSDM	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Analisis Kebijakan Pemajuan Kebudayaan	Terpenuhinya Analisis Kebijakan Pemajuan Kebudayaan	Pejabat Struktural dan Pelaksana	Experience	Blended Learning	Kementerian Kebudayaan, BPSDM	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Event Festival Budaya Berskala Nasional	Terpenuhinya Manajemen Event Festival Budaya Berskala Nasional	Fungsional Permuseuman dan Pelaksana	Experience	Blended Learning	Kementerian Kebudayaan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal untuk Ekspresi Budaya Tradisional	Terpenuhinya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal untuk Ekspresi Budaya Tradisional	Pejabat Struktural dan Pelaksana	Experience	Blended Learning	Kementerian Kebudayaan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Konflik Sosial & Multikulturalisme	Terpenuhinya Manajemen Konflik Sosial & Multikulturalisme	Pejabat Struktural dan Pelaksana	Experience	Blended Learning	Kementerian Kebudayaan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Change Management (Manajemen Perubahan) Keuangan	Terpenuhinya kompetensi dasar Change Management (Manajemen Perubahan) Keuangan	ASN	Pelatihan	Blended Learning	Penyelenggara Pengembangan Kompetensi terkait	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Inovasi Pembiayaan Daerah (Creative Financing)	Terpenuhinya kompetensi dasar Inovasi Pembiayaan Daerah (Creative Financing)	ASN	Workshop	Blended Learning	Penyelenggara Pengembangan Kompetensi terkait	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Penyelesaian Sengketa Aset & Legal Audit	Terpenuhinya kompetensi dasar Penyelesaian Sengketa Aset & Legal Audit	ASN	Pelatihan	Blended Learning	Penyelenggara Pengembangan Kompetensi terkait	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Penyelesaian Sengketa Aset & Legal Audit	Terpenuhinya kompetensi dasar Penyelesaian Sengketa Aset & Legal Audit	ASN	Pelatihan	Blended Learning	Penyelenggara Pengembangan Kompetensi terkait	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Strategis dan Inovasi	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Manajemen Strategis dan Inovasi	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Ekonomi Syariah	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Ekonomi Syariah	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 7	Manajemen Industri Olahraga & <i>Sport Tourism</i>	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Manajemen Industri Olahraga & <i>Sport Tourism</i>	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Teknik Negosiasi <i>Sponsorship</i> & Kemitraan Swasta	Terpenuhinya kompetensi Teknik Negosiasi <i>Sponsorship</i> & Kemitraan Swasta	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Psikologi & Mentalitas Juara Atlet	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Psikologi & Mentalitas Juara Atlet	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Advokasi Kebijakan Pembangunan Pemuda	Terpenuhinya kompetensi Advokasi Kebijakan Pembangunan Pemuda	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		1. Sistem Informasi/ Teknik Informatika 2. Desain Komunikasi Visual (Multimedia) 3. Pemasaran Digital (<i>Digital Marketing</i>) 4. Sains Data (Statistik Olahraga) 5. Manajemen Bisnis Olahraga	Terpenuhinya Kompetensi di bidang ilmu-ilmu: 1. Sistem Informasi/ Teknik Informatika 2. Desain Komunikasi Visual (Multimedia) 3. Pemasaran Digital (<i>Digital Marketing</i>) 4. Sains Data (Statistik Olahraga) 5. Manajemen Bisnis Olahraga	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Manajemen Krisis Kesehatan (<i>Health Crisis Management</i>)	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Krisis Kesehatan (<i>Health Crisis Management</i>) dibidang Manajemen SDM Kesehatan	JFT. Epidemiolog Kesehatan/JFT. Adminkes	Formal Learning/Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Advokasi Kebijakan & Pembiayaan Kesehatan	Terpenuhinya kompetensi Advokasi Kebijakan & Pembiayaan Kesehatan dibidang Hukum Kesehatan	JFT. Administrator Kesehatan	Formal Learning/Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Advokasi Kebijakan & Pembiayaan Kesehatan Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Inovasi Layanan Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya kompetensi Inovasi Layanan Kesehatan Masyarakat dibidang . Ilmu Komunikasi Kesehatan	JFT. Administrator Kesehatan	Formal Learning/Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP)	Terpenuhinya kompetensi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) di bidang Promosi Kesehatan	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	Formal Learning/Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

UPT BERSIFAT KHUSUS RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Lean Management di Rumah Sakit (Efisiensi)	Terpenuhinya kompetensi dalam Lean Management di Rumah Sakit (Efisiensi)	ASN di bidang Terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Pengembangan Layanan Unggulan (Center of Excellence)	Terpenuhinya Kompetensi dibidang Pelatihan Pengembangan Layanan Unggulan (Center of Excellence)	ASN di bidang Terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Penyusunan Clinical Pathway & Panduan Praktik Klinis	Terrpenihinya Kompetensi dibidang Bimtek Penyusunan Clinical Pathway & Panduan Praktik Klinis	JF Kesehatan ASN di bidang Terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Komunikasi Efektif Dokter-Pasien (SBAR)	Terrpenihinya Kompetensi dibidang Pelatihan Komunikasi Efektif Dokter-Pasien (SBAR)	JF Dokter	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Inovasi Kesehatan	Terpenuhinya Pendidikan dibidang Manajemen Inovasi Kesehatan	JF Kesehatan ASN Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Pembelajaran	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Epidemiologi Klinik	Terpenuhinya Pendidikan di bidang Epidemiologi Klinik	JF Kesehatan ASN Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Pembelajaran	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Hukum Kesehatan	Terpenuhinya Pendidikan di bidang Hukum Kesehatan	JF Kesehatan ASN Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Pembelajaran	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Manajemen Keuangan RS	Terpenuhinya Pendidikan di bidang Manajemen Keuangan RS	JF Kesehatan ASN Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Pembelajaran	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	<i>Service Excellence</i> & Penanganan Komplain di RSJ	Terpenuhi nya kompetensi dasar <i>Service Excellence</i> & Penanganan Komplain di RSJ	Tenaga kesehatan klinis Tim manajemen	Formal/ Experiential / Social Learning	Blended learning	KARS, Kementrian Kesehatan, Konten internal RSJ, Konsultan Manajemen	20-30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Stres Kerja & <i>Burnout</i> bagi Nakes Ners,Psikologi klinis,Psikiatri	Terpenuhi nya kompetensi dasar Manajemen Stres Kerja & <i>Burnout</i> bagi Nakes	Tenaga kesehatan klinis Tim manajemen	Formal/ Experiential / Social Learning	Blended learning	Organisasi (PPNI, IDI, PDSKJI)	20-30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

RSUD PETALA BUMI PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Manajemen Komplain & Komunikasi Efektif Dokter-Pasien	Terpenuhinya kompetensi di bidang Manajemen Komplain & Komunikasi Efektif Dokter-Pasien	Dokter	Formal Learning dan Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Konflik & Stres Kerja Tenaga Medis	Terpenuhinya kompetensi di bidang Manajemen Konflik & Stres Kerja Tenaga Medis	Tenaga Medis	Formal Learning dan Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Inovasi Pengembangan Layanan Unggulan RS	Terpenuhinya kompetensi di bidang Inovasi Pengembangan Layanan Unggulan RS	Tenaga Promotor Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Magister Manajemen	Terpenuhinya Kompetensi Magister Manajemen	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Magister Kesehatan Masyarakat (Epidemiologi)	Terpenuhinya Kompetensi Magister Kesehatan Masyarakat (Epidemiologi)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Psikologi Klinis	Terpenuhinya Kompetensi Psikologi Klinis	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Hilirisasi & Diversifikasi Produk Olahan Hasil Ternak	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Hilirisasi & diverivisikasi produk olahan hasil ternak	ASN	Formal Learning / Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Rantai Pasok Dingin (<i>Cold Chain Management</i>)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Manajemen Rantai Pasok Dingin (<i>Cold Chain Management</i>)	ASN	Formal Learning / Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Analisis Kebijakan Impor/Ekspor Ternak	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Analisis Kebijakan Impor/Ekspor Ternak	ASN	Formal Learning / Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Inovasi Teknologi Bibit Unggul Daerah	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Inovasi Teknologi Bibit Unggul Daerah	ASN	Formal Learning / Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Ekonomi Pertanian/Peternakan Manajemen Agribisnis Kebijakan Publik Ilmu Peternakan Manajemen Inovasi	Terpenuhinya kompetensi dibidang Ilmu-ilmu: Ekonomi Pertanian/Peternakan, Manajemen Agribisnis, Kebijakan Publik, Ilmu Peternakan dan Manajemen Inovasi	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikann	7	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1 Misi 4 Misi 7	Coaching & Mentoring untuk Pimpinan	Terpenuhinya Coaching & Mentoring untuk Pimpinan	Pejabat Struktural dan Fungsional	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Sosial dan BPSDM	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Konflik & Disiplin Pegawai	Terpenuhinya Manajemen Konflik & Disiplin Pegawai	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Penyelesaian Sengketa Kepegawaian	Terpenuhinya Penyelesaian Sengketa Kepegawaian	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Budaya Kerja BerAKHLAK & Budaya Melayu	Terpenuhinya Budaya Kerja BerAKHLAK & Budaya Melayu	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Perubahan (Change Management)	Terpenuhinya Manajemen Perubahan (Change Management)	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Kesehatan Mental di Lingkungan Kerja	Terpenuhinya Kesehatan Mental di Lingkungan Kerja	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Kebijakan Publik	Terpenuhinya pendidikan Kebijakan Publik	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Manajemen Inovasi	Terpenuhinya pendidikan Manajemen Inovasi	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
11		Sosiologi (Resolusi Konflik)	Terpenuhinya pendidikan Sosiologi (Resolusi Konflik)	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
12		Pengembangan Masyarakat	Terpenuhinya pendidikan Pengembangan Masyarakat	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
13		Psikologi	Terpenuhinya pendidikan Psikologi	PNS	Formal Learning	Tugas belajar	penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan Dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Manajemen Proyek TIK (<i>Project Management PMP/Prince2</i>)	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Proyek TIK (<i>Project Management PMP/Prince2</i>)	ASN Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting dan Penyelenggara lainnya yang terkait	5 + 5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Perubahan Transformasi Digital	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Perubahan Transformasi Digital	ASN Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi serta Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting dan Penyelenggara lainnya yang terkait	5 + 3 + 5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Krisis Komunikasi Publik	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Krisis Komunikasi Publik	ASN Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi serta Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting dan Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	5 + 5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Public Speaking & Komunikasi Efektif untuk Jubir	Terpenuhinya Kompetensi Public Speaking & Komunikasi Efektif untuk Jubir	ASN Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Bidang Statistik	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting dan Penyelenggara lainnya yang terkait	3 + 5 + 10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Inovasi dan Teknologi	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Inovasi dan Teknologi	ASN Bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting, Penyelenggara lainnya yang terkait	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Sistem Informasi Geospasial Lanjut	Terpenuhinya Kompetensi Sistem Informasi Geospasial Lanjut	ASN Bidang Statistik	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 4	Teknik Negosiasi dan Resolusi Konflik Industrial	Terpenuhinya kompetensi dalam Negosiasi dan Resolusi Konflik Industrial	Pengawas Ketengakerjaan, Mediator, Penelaah Teknis Kebijakan	Pelatihan	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Advokasi Kebijakan Ketenagakerjaan	Terpenuhinya kompetensi Advokasi Kebijakan Ketenagakerjaan	Pengawas Ketengakerjaan, Mediator, Penelaah Teknis Kebijakan	Pelatihan	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terpenuhinya kompetensi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pengantar Kerja, Penelaah Teknis Kebijakan	Bimtek	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Public Speaking & Komunikasi Efektif	Terpenuhinya kompetensi Public Speaking & Komunikasi Efektif bagi Mediator	Pengawas Ketengakerjaan, Mediator, Pengantar Kerja, Instruktur, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengolah Data dan Informasi, Pengadministrasi Perkantoran	Pelatihan	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Kebijakan Publik - Manajemen Inovasi - Ilmu Komunikasi - Hubungan Internasional - Manajemen Konflik	Terpenuhinmya Kompetensi di bidang ilmu Kebijakan Publik - Manajemen Inovasi - Ilmu Komunikasi - Hubungan Internasional - Manajemen Konflik						APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 7	Manajemen Konflik, Negosiasi & Mediasi Massa	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Konflik, Negosiasi & Mediasi Massa	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BNPT	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Penegakan HAM dalam Penertiban Umum	Terpenuhinya kompetensi Penegakan HAM dalam Penertiban Umum	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Hak Asasi Manusia	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		<i>Public Speaking</i> & Komunikasi Persuasif	Terpenuhinya kompetensi <i>Public Speaking</i> & Komunikasi Persuasif	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Strategis Satpol PP	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Strategis Satpol PP	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		1. Magister Hukum 2. Magister Ilmu Pemerintahan 3. Manajemen SDM 4. Kebijakan Publik	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu: 1. Magister Hukum 2. Magister Ilmu Pemerintahan 3. Manajemen SDM 4. Kebijakan Publik	ASN yang bekerja di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5 Misi 7	Peningkatan Kompetensi Perisalah Legislatif	Terpenuhinya kompetensi dalam merilis, membuat transkrip rapat	JF Perisalah legislatif dan asisten perisalah	PELATIHAN	Blended Learning	DPR RI	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Pelatihan Keprotokolan VVIP Pemerintahan	Terpenuhinya kompetensi dalam membawa acara, dan protokol	Pengelola Keprotokolan dan penata keprotokolan	PELATIHAN	Blended Learning	BPSDM	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Kehumasan dan Komunikasi Publik	Terpenuhinya kompetensi dalam kemampuan komunikasi verbal dan tulisan (pers rilis, media sosial)	JF Pranata Kehumasan	PELATIHAN	Blended Learning	BPSDM	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Jurnalistik Media Instansi Pemerintah	Terpenuhinya kompetensi dalam kemampuan komunikasi verbal dan tulisan (pers rilis, media sosial)	JF Pranata Kehumasan	PELATIHAN	Blended Learning	BPSDM	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Negosiasi & Resolusi Konflik Kehutanan	Terpenuhinya kompetensi dasar Negosiasi & Resolusi Konflik Kehutanan	ASN di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended learning	Widyaiswara Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas / terakreditasi	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)	Terpenuhinya kompetensi dasar Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)	ASN di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended learning	Widyaiswara Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas / terakreditasi	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Laboratorium Lingkungan	Terpenuhinya kompetensi dasar Manajemen Laboratorium Lingkungan	ASN di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended learning	Widyaiswara Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas / terakreditasi	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Terpenuhinya kompetensi dasar Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	ASN di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended learning	Widyaiswara Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas / terakreditasi	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Advokasi Kebijakan Lingkungan	Terpenuhinya kompetensi dasar Pelatihan Advokasi Kebijakan Lingkungan	ASN di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended learning	Widyaiswara Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas / terakreditasi	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Kebijakan Lingkungan	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu Kebijakan Lingkungan	ASN di bidang terkait	Formal learning	Tugas belajar	Lembaga pendidikan	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU									
N O	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Manajemen Rantai Pasok Pangan (<i>Supply Chain Management</i>)	Terpenuhinya kompetensi Manajemen rantai Pasok Pangan	Analisis Ketahanan Pangan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara Kompetensi	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Advokasi & Negosiasi Perdagangan Komoditas Pangan	Terpenuhinya manajemen advokasi perdagangan komoditas pangan	Analisis Ketahanan Pangan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara Kompetensi	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Inovasi kelembagaan Petani (Korporasi Petani)	Terpenuhinya Inovasi kelembagaan petani	PMHP	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara Kompetensi	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Perubahan Sektor Pertanian	Terpenuhinya manajemen Sektor Pertanian	PMHP, Alsintan, Pengawas benih tanaman, POPT	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara Kompetensi	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Agribisnis Kebijakan Publik	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu: Manajemen, Agribisnis dan Kebijakan Publik	PNS		Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Manajemen Krisis Kepariwisata (<i>Crisis Management</i>)	Terpenuhinya Kompetensi pembelajaran manajemen krisis kepariwisataan	Analisis Pariwisata	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM dan Kementerian Pariwisata	9	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Strategi <i>City Branding</i> & "Riau The Homeland of Melayu"	Terpenuhinya Kompetensi pembelajaran strategi City Branding "Riau The Homeland of Melayu"	Pengelola Media Desain dan Iftek	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Pariwisata dan Badan Sertifikasi Nasional (BSN)	9	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Ilmu Lingkungan (Ekowisata) 3. Hubungan Internasional 4. Antropologi Budaya	Terpenuhi Kompetensi di bidang Ilmu: Studi Pembangunan Berkelanjutan, Ilmu Lingkungan, Hubungan Internasional, Antropologi Budaya	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Manajemen Konflik Keluarga & Mediasi	Terpenuhinya kompetensi dalam manajemen Konflik Keluarga & Mediasi	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KIE) KB	Terpenuhinya kompetensi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KIE) KB	Penata KKB	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA BKKBN	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Pemulihan Trauma (Trauma Healing) Korban Bencana/Konflik	Terpenuhinya kompetensi Pemulihan Trauma (Trauma Healing) Korban Bencana/Konflik	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam Pembangunan	Terpenuhinya kompetensi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam Pembangunan	Analisis Kebijakan	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Advokasi Kebijakan Kependudukan & Bonus Demografi	Terpenuhinya kompetensi Kebijakan Kependudukan & Bonus Demografi	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BKKBN	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Digital Leadership bagi Kepala Sekolah	Terpenuhinya Digital Leadership bagi Kepala Sekolah	Kepala Sekolah	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	120	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Pengembangan Kewirausahaan Sekolah (Schoolpreneur)	Terpenuhinya kompetensi Pengembangan Kewirausahaan Sekolah (Schoolpreneur)	Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	120	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Konflik & Penanganan Kekerasan di Sekolah	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Konflik & Penanganan Kekerasan di Sekolah	Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	120	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Evaluasi Kinerja Guru (PKG) & Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Terpenuhinya kompetensi Evaluasi Kinerja Guru (PKG) & Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	150	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Public Speaking & Komunikasi Efektif untuk Guru	Terpenuhinya kompetensi Public Speaking & Komunikasi Efektif untuk Guru	Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	100	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Manajemen Inovasi Pendidikan	Terpenuhinya kompetensi dibidang Manajemen Inovasi Pendidikan	Fungsional Guru	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
7		Sosiologi Pendidikan	Terpenuhinya kompetensi dibidang Sosiologi Pendidikan	Fungsional Guru	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 3	Manajemen Krisis Transportasi & Mitigasi Bencana	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Krisis Transportasi & Mitigasi Bencana	ASN di Bidang Pengembangan Transportasi	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Inovasi Layanan Angkutan Massal Terintegrasi (Bus Rapid Transit)	Terpenuhinya kompetensi Inovasi Layanan Angkutan Massal Terintegrasi (Bus Rapid Transit)	ASN di Bidang Angkutan Jalan dan Bidang Pengembangan Transportasi	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Strategi Komunikasi & Edukasi Keselamatan Publik	Terpenuhinya kompetensi Strategi Komunikasi & Edukasi Keselamatan Publik	ASN di Bidang Angkutan Jalan dan Bidang Pengembangan Transportasi	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Perubahan Budaya Berlalu Lintas	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Perubahan Budaya Berlalu Lintas	ASN di Bidang Lalu Lintas Jalan dan Bidang Pengembangan Transportasi	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Magister Manajemen Transportasi	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu	ASN di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Kebijakan Publik	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu	ASN di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 3	Strategi Hilirisasi Industri Kelapa Sawit, Karet & Kelapa	Terpenuhinya kompetensi Strategi Hilirisasi Industri Kelapa Sawit, Karet & Kelapa	Penelaah Teknis Kebijakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN	12	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Advokasi Kebijakan Tata Niaga Perkebunan (Kemitraan)	Terpenuhinya kompetensi Advokasi Kebijakan Tata Niaga Perkebunan (Kemitraan)	Penelaah Teknis Kebijakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Kelembagaan Petani (Korporasi Petani)	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Kelembagaan Petani (Korporasi Petani)	Penelaah Teknis Kebijakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Inovasi Diversifikasi Produk Turunan Sawit	Terpenuhinya kompetensi Inovasi Diversifikasi Produk Turunan Sawit	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		1. Manajemen Agribisnis 2. Kebijakan Publik 3. Ekonomi Sumber Daya Alam	Terpenuhinya kompetensi di Bidang Ilmu: 1. Manajemen Agribisnis 2. Kebijakan Publik 3. Ekonomi Sumber Daya Alam	Penyuluh Pertanian Ahli Muda, Perencana Ahli Madya, Perencana Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Arsiparis Ahli Muda, Pengadministrasi Perkantoran, Analisis Pasar Pertanian Ahli Muda, Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Meningkatkan Literasi Masyarakat dan Tata Kelola Arsip	Manajemen Inovasi Layanan Publik Perpustakaan	Meningkatkan kapasitas merancang, mengelola, dan mengevaluasi inovasi layanan perpustakaan agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan pengguna melalui pendekatan teknologi, kreativitas, dan tata kelola layanan modern	Pustakawan, Pranata Komputer dan Pelaksana	Pelatihan	Blended Learning	Perpustakaan Nasional	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		<i>Storytelling & Public Speaking</i> untuk Kampanye Literasi	Menguasai keterampilan berbicara di depan publik dan teknik bercerita secara efektif, kreatif, dan persuasif untuk mendukung pelaksanaan kampanye literasi, sehingga pesan literasi dapat disampaikan dengan menarik, mudah dipahami, menyentuh emosi audiens	Pustakawan dan Pelaksana	Pelatihan	Blended Learning	Perpustakaan Nasional	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Advokasi Kebijakan Kearsipan & Perpustakaan	mengembangkan, menyusun, serta melaksanakan advokasi kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi, pengelolaan arsip, dan layanan perpustakaan yang berstandar nasional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan akses dan literasi informasi publik	Arsiparis	Pelatihan	Blended Learning	Arsip Nasional	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Risiko Bencana bagi Aset Arsip & Pustaka	Memahami, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko bencana yang dapat mengancam arsip maupun koleksi perpustakaan, sehingga mampu merancang dan menerapkan strategi perlindungan, mitigasi, serta pemulihan secara sistematis untuk menjamin keberlanjutan informasi, layanan, dan fungsi kelembagaan	Arsiparis dan Pustakawan	Pelatihan	Blended Learning	Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		1. Magister Manajemen 2. Magister Ilmu Perpustakaan 3. Kebijakan Publik	Terpenuhinya kompetensi dalam bidang ilmu: Magister Manajemen, Magister Ilmu Perpustakaan, dan Kebijakan Publik	ASN	Formal/ Learning	Tugas Belajar	Penyelenggaraan Pendidikan	2	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1 Misi 7	Teknik Mediasi & Resolusi Konflik Desa	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Pemerintahan Desa	JF Analis Kebijakan Ahli Muda dan Penelaah Teknis Kebijakan/Fasilitator Pemerintahan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	KEMENDES/ KEMENDAGRI	2	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Perubahan (<i>Change Management</i>)	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Pemerintahan	Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/JF Analis Kebijakan/ Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/	Blended Learning	KEMENDES/ KEMENDAGRI	3	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		<i>Public Speaking</i> & Negosiasi	Terpenuhinya kompetensi Dasar Komunikasi dan Public Speaking	JF Analis Kebijakan Ahli Muda/PSM/Analis SDM Aparatur/ Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		<i>Design Thinking</i> Inovasi Layanan	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Pemerintahan	JF Analis Kebijakan Ahli Muda dan Penelaah Teknis Kebijakan/Fasilitator Pemerintahan	Formal Learning/ Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning	DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI	1	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Kebijakan Publik, Ilmu Politik, dan Manajemen SDM	Terpenuhinya kompetensi dalam bidang ilmu: Kebijakan Publik, Ilmu Politik dan Manajemen SDM	ASN	FORMAL LEARNING	TUGAS BELAJAR	PENYELENGGARA PENDIDIKAN	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 3	Manajemen Kontrak & Mitigasi Risiko Konstruksi	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Kontrak & Mitigasi Risiko Konstruksi	ASN yang membidangi	Formal	Blended learning	BPSDM Provinsi Riau	20	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Teknik Mediasi & Penyelesaian Sengketa Lahan	Terpenuhinya Kompetensi Teknik Mediasi & Penyelesaian Sengketa Lahan	ASN yang membidangi	Formal	Blended learning	BPSDM Kementrian ATR	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Perubahan & Reformasi Birokrasi PUPR	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Perubahan & Reformasi Birokrasi PUPR	ASN yang membidangi	Formal	Blended learning	BPSDM Kemendagri	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		<i>Project Management Professional</i> (Standar PMBOK)	Terpenuhinya Kompetensi <i>Project Management Professional</i> (Standar PMBOK)	ASN yang membidangi	Formal	Blended learning	BPSDM Provinsi Riau	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		1. Magister Manajemen 2. Kebijakan Publik 3. Manajemen Sumber Daya Manusia 4. Hukum Kontrak Konstruksi	Terpenuhinya Kompetensi dalam bidang ilmu: 1. Magister Manajemen 2. Kebijakan Publik 3. Manajemen Sumber Daya Manusia 4. Hukum Kontrak Konstruksi 5. Ilmu Komunikasi (Humas Pemerintah)	ASN yang membidangi	Formal Learning	Tugas Belajar	BPSDM Provinsi Riau	5	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 4	Negosiasi Perdagangan Internasional	Terpenuhinya kompetensi Negosiasi Perdagangan Internasional	ASN yang membidangi perdagangan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Hilirisasi Produk Unggulan Daerah	Terpenuhinya kompetensi Workshop Hilirisasi Produk Unggulan Daerah	ASN yang membidangi industri	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Resiko Usaha & Koperasi	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Manajemen Resiko Usaha & Koperasi	ASN yang membidangi koperasi	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Inkubator Bisnis & Kewirausahaan	Terpenuhinya kompetensi Bimtek Inkubator Bisnis & Kewirausahaan	ASN yang membidangi koperasi dan perdagangan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Advokasi Kebijakan Industri & Perdagangan	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Advokasi Kebijakan Industri & Perdagangan	ASN yang membidangi industri dan perdagangan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		- Kebijakan Publik - Hubungan Internasional - Sosiologi Ekonomi - Psikologi Industri	Terpenuhinya kompetensi dibidang ilmu	ASN	Formal Learning	Tugas belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 dan 3	Pelatihan Aftercare Service & Retensi Investor	Terpenuhinya kompetensi Aftercare Service & Retensi Investor	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan,	Formal Learning, Experiential Learning dan Social Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM Kementerian PANRB Kementerian dalam Negeri	35	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
2		Workshop Ease of Doing Business (EoDB) & Deregulasi	Terpenuhinya kompetensi Ease of Doing Business (EoDB) & Deregulasi	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan,	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM Kementerian PANRB Kementerian dalam Negeri	25	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Manajemen Konflik Investasi & Agraria	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Konflik Investasi & Agraria	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan,	Formal Learning, Experiential Learning dan Social Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM Kementerian PANRB Kementerian dalam Negeri	35	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
4		Bimtek Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital	Terpenuhinya kompetensi Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan,	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM Kementerian PANRB Kementerian dalam Negeri	70	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Public Speaking & Presentasi Bisnis Internasional	Terpenuhinya kompetensi Public Speaking & Presentasi Bisnis Internasional	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan,	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/BKPM Kementerian PANRB Kementerian dalam Negeri	35	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah
6		Kebijakan Publik Studi Pembangunan Manajemen	Terpenuhinya Kompetensi di bidang ilmu: Kebijakan Publik Studi Pembangunan Manajemen	Aparatur Sipil Negara	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN, dan pembiayaan lain yang sah

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan Dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 dan Misi 5	Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik	Memahami konsep dasar kebijakan publik, Menganalisis masalah publik dan menentukan prioritas advokasi	Seluruh ASN Fungsional Analisis Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN, Universitas Negeri, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	13	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Pelaporan Kegiatan dan Program Pembangunan Daerah	Meningkatkan pemahaman aparatur terkait standar dan regulasi pelaporan. Memperkuat kemampuan teknis dalam penyusunan laporan fisik, dan laporan kinerja.	Seluruh ASN Fungsional Analisis Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN, Universitas Negeri, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	13	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Manajemen Krisis Komunikasi & <i>Public Relations</i>	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Krisis Komunikasi & <i>Public Relations</i>	JF Analisis Kebijakan, Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		<i>Public Speaking</i> & Teknik Wawancara Media	Terpenuhinya Kompetensi <i>Public Speaking</i> & Teknik Wawancara Media	JF Analisis Kebijakan, Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Strategi Komunikasi Kebijakan Pimpinan	Terpenuhinya Kompetensi Strategi Komunikasi Kebijakan Pimpinan	JF Analisis Kebijakan, Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Konflik & Diplomasi	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Konflik & Diplomasi	JF Analisis Kebijakan, Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Legal Drafting	Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan perundang-undangan	Fungsional perancang peraturan perundang-undangan, fungsional analis hukum, penyusun materi hukum & perundang-undangan dan analis kebijakan	Formal learning	Blended Learning	BPHN, Kemenkum dan Lembaga Diklat Swasta	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH)	Terpenuhinya kompetensi pengelolaan jaringan dokumentasi informasi	Analisis hukum, pengelola data dan informasi	Social learning	Blended Learning	Kemenkum	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Teknik penyuluhan hukum dan HAM	Terpenuhinya kompetensi penyuluhan hukum dan HAM	Analisis hukum, penelaah teknis kebijakan dan 5analis perkara peradilan	Formal learning	Blended Learning	Kemenkum dan Kemendagri	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pendidikan khusus advokasi hukum	Terpenuhinya kompetensi dalam penyelesaian masalah hukum di dalam peradilan	Fungsional tetap ahli hukum, analisis perkara peradilan dan penyusun materi hukum dan perundang-undangan	Formal learning	Blended Learning	BPHN, Kemenkum dan Organisasi advokasi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pendidikan dan pelatihan mediator	Terpenuhinya kompetensi dalam penyelesaian masalah hukum di luar peradilan	Fungsional tetap ahli hukum	Formal learning	Blended Learning	MA dan lembaga diklat swasta	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1, 4, dan 7	Pelatihan Manajemen Krisis & Bencana Sosial	Terpenuhinya Kompetensi dalam Pelatihan Manajemen Krisis & Bencana Sosial	ASN bidang sosial	Formal Learning/ Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Workshop Sinergitas Program Kesra dengan CSR Perusahaan	Terpenuhinya Kompetensi dalam Workshop Sinergitas Program Kesra dengan CSR Perusahaan	ASN bidang program kesra bantuan csr	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Public Speaking & Protokoler Kegiatan Keagamaan	Terpenuhinya Kompetensi dalam Pelatihan Public Speaking & Protokoler Kegiatan Keagamaan	ASN bidang keagamaan	Formal Learning/Experiential Learning/Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		- Studi Pembangunan - Manajemen Strategis	Terpenuhinya Kompetensi di bidang ilmu : - Studi Pembangunan - Manajemen Strategis	ASN	Tugas Belajar	Formal Learning	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	<i>Design Thinking</i> untuk Inovasi Kebijakan Kelembagaan	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran <i>Design Thinking</i> untuk Inovasi Kebijakan	ASN	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Teknik Negosiasi & Advokasi Penataan Organisasi	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Teknik Negosiasi & Advokasi Penataan Organisasi	ASN	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Kepemimpinan Transformasional dalam Reformasi Birokrasi	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Kepemimpinan Transformasional dalam Reformasi Birokrasi	ASN	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Magister Administrasi Publik	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Magister Administrasi Publik	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Magister Manajemen	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Magister Manajemen	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Ilmu Komunikasi (Strategis)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Ilmu Komunikasi (Strategis)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Pengembangan Organisasi (<i>Organization Development</i>)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Pengembangan Organisasi (<i>Organization Development</i>)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5 dan Misi 6	Teknik Negosiasi Tingkat Lanjut (G to G)	Terpenuhinya kompetensi Teknik Negosiasi Tingkat Lanjut (G to G)	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning, Experiential Learning, Social Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Konflik Pertanahan & Agraria	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Konflik Pertanahan & Agraria	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning, Experiential Learning, Social Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Strategi Kebijakan Otonomi Daerah & Desentralisasi	Terpenuhinya kompetensi Strategi Kebijakan Otonomi Daerah & Desentralisasi	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning, Experiential Learning, Social Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		<i>Public Speaking</i> & Diplomasi Protokoler	Terpenuhinya kompetensi <i>Public Speaking</i> & Diplomasi Protokoler	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning, Experiential Learning, Social Learning	Blended Learning	Kemendagri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		1. Doktor Ilmu Pemerintahan 2. Magister Manajemen Konflik 3. Hukum Agraria Lanjut 4. Ilmu Politik	Terpenuhinya Kompetensi pada Bidang Ilmu : 1. Doktor Ilmu Pemerintahan 2. Magister Manajemen Konflik 3. Hukum Agraria Lanjut 4. Ilmu Politik	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Pelatihan Contract Drafting & Contract Management Specialist	Terpenuhinya kompetensi Drafting & Contract Management Specialist	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Fomal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Workshop International Procurement (Pengadaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri)	Terpenuhinya kompetensi International Procurement (Pengadaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri)	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Fomal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pelatihan Mediasi dan Arbitrase Sengketa Pengadaan	Terpenuhinya kompetensi Mediasi dan Arbitrase Sengketa Pengadaan	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Fomal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Bimtek Clearing House Pengadaan	Terpenuhinya kompetensi Clearing House Pengadaan	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Fomal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pelatihan Public Speaking & Komunikasi Persuasif bagi Pokja Pemilihan	Terpenuhinya kompetensi Public Speaking & Komunikasi Persuasif bagi Pokja Pemilihan	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Fomal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Manajemen Logistik dan Hukum Bisnis Internasional	Terpenuhinya kebutuhan: Manajemen Logistik dan Hukum Bisnis Internasional	ASN Biro PBJ	Fomal Learning	Tugas belajar	Penyelenggara pendidikan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 dan Misi 3	Teknik Negosiasi Investasi & Kerjasama Ekonomi	Terpenuhinya kompetensi Teknik Negosiasi Investasi & Kerjasama Ekonomi	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experience, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Perubahan Transformasi BUMD	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Perubahan Transformasi BUMD	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experience, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Strategi <i>Holding Company</i> BUMD	Terpenuhinya kompetensi Strategi <i>Holding Company</i> BUMD	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experience, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Advokasi Kebijakan Ekonomi Makro Daerah	Terpenuhinya kompetensi Advokasi Kebijakan Ekonomi Makro Daerah	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experience, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		1. Ilmu Ekonomi / Manajemen 2. Kebijakan Publik 3. Ilmu Komunikasi (Negosiasi)	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu: 1. Ilmu Ekonomi / Manajemen 2. Kebijakan Publik 3. Ilmu Komunikasi (Negosiasi)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	7	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Komunikasi Efektif & <i>Public Speaking</i> Staf Pimpinan	Terpenuhinya kompetensi Komunikasi Efektif & <i>Public Speaking</i> Staf Pimpinan	Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Konflik & Keluhan Pelayanan	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Konflik & Keluhan Pelayanan	Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Acara Kenegaraan	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Acara Kenegaraan	Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Teknik Negosiasi Pengadaan & Kerjasama	Terpenuhinya kompetensi Teknik Negosiasi Pengadaan & Kerjasama	Jabatan Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		1. Magister Manajemen SDM 2. Ilmu Komunikasi 3. Kebijakan Publik	Terpenuhinya kompetensi dibidang 1. Magister Manajemen SDM 2. Ilmu Komunikasi 3. Kebijakan Publik	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2029					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Manajemen Krisis & <i>Public Relations</i>	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Krisis & <i>Public Relations</i>	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri, Lembaga Penyelenggara	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		<i>Public Speaking</i> & Komunikasi Efektif	Terpenuhinya Kompetensi <i>Public Speaking</i> & Komunikasi Efektif	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Strategi <i>Branding</i> & Citra Daerah	Terpenuhinya Kompetensi Strategi <i>Branding</i> & Citra Daerah	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Perubahan Budaya Kerja	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Perubahan Budaya Kerja	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		1. Kebijakan Publik 2. Kajian Pariwisata & Budaya 3. Manajemen SDM	Terpenuhinya Kompetensi: 1. Kebijakan Publik 2. Kajian Pariwisata & Budaya 3. Manajemen SDM	ASN Badan Penghubung	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyelenggara	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah



**DESAIN PEMBELAJARAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

TAHUN 2030

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Audit Lingkungan (Environmental Auditing) & Green Economy	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning	BPSDM Provinsi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Audit Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor /PPUPD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning (daring + luring)	BPSDM Provinsi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Sertifikasi Internasional (CIA, CISA, CFE)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional AUDITOR	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning (daring + luring)	BPKP/KPK/BPK	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Quality Assurance & Telaah Sejawat (Peer Review)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning	BPKP/BPK/BPSDM Provinsi Riau	6	APBD
5		Kepemimpinan Strategis Pengawasan (Strategic Oversight)	Meningkatkan kapabilitas pengawasan agar APIP bisa menjalankan peran strategisnya secara efektif	Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD	Learning/Mentoring & Coaching/ Lecture	Blended Learning (daring + luring)	BPKP/ BPK/BPSDM Provinsi Riau	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan Dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Benchmarking Sistem Merit & World Class Bureaucracy	Terpenuhinya Kompetensi Sistem Merit & World Class Bureaucracy	ASN BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, Pusbang ASN BKN.	9	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Pelatihan Strategic Workforce Planning	Terpenuhinya Kompetensi Strategic Workforce Planning	ASN Substansi Perencanaan BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, Pusbang ASN BKN.	7	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Workshop Green Government & Eco-Office	Terpenuhinya Kompetensi Green Government & Eco-Office	ASN BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, Pusbang ASN BKN.	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Audit Kinerja Jabatan Fungsional	Terpenuhinya Kompetensi Audit Kinerja Jabatan Fungsional	ASN Substansi Penilaian Kinerja dan Subbagian Kepegawaian dan Umum BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, Pusbang ASN BKN.	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pengembangan Simulasi Assessment Digital	Terpenuhinya Kompetensi Pengembangan Simulasi Assessment Digital	ASN UPT Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, Pusbang ASN BKN.	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Evaluasi Dampak Kebijakan Manajemen ASN	Terpenuhinya Kompetensi Evaluasi Dampak Kebijakan Manajemen ASN	ASN BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, Pusbang ASN BKN.	9	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Pelatihan Kepemimpinan Strategis	Terpenuhinya Kompetensi Kepemimpinan Strategis	ASN BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, Pusbang ASN BKN.	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Manajemen Sumber Daya Manusia, Ilmu Administrasi Publik, Studi Pembangunan dan Psikologi	Terpenuhinya Kompetensi di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Ilmu Administrasi Publik, Studi Pembangunan dan Psikologi	ASN BKD Provinsi Riau	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN, Universitas Negeri, Pusbang ASN BKN.	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 6	Riset & Kajian Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) dan Biru	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran	Peneliti, Analis Kebijakan, Perekayasa dan Pelaksana	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Strategi Riset Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Lembaga Pelatihan	Peneliti, Analis Kebijakan, Perekayasa dan Pelaksana	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Diplomasi Sains (<i>Science Diplomacy</i>) & Jejaring Global	Terpenuhinya kompetensi Diplomasi Sains (<i>Science Diplomacy</i>) & Jejaring Global	Peneliti, Analis Kebijakan, Perekayasa dan Pelaksana	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Perencanaan Strategis Pembangunan Riau 2045 Berbasis Riset	Terpenuhinya kompetensi Perencanaan Strategis Pembangunan Riau 2045 Berbasis Riset	Peneliti, Analis Kebijakan, Perekayasa dan Pelaksana	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Evaluasi Dampak Kebijakan Jangka Panjang	Terpenuhinya kompetensi Evaluasi Dampak Kebijakan Jangka Panjang	Seluruh Pegawai BRIDA	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	BRIN	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. S3 Ilmu Lingkungan (<i>Green Economy</i>) 2. Hubungan Internasional 3. Kajian Strategik Ketahanan Nasional 4. Antropologi 5. Kebijakan Sains & Teknologi	Terpenuhinya kompetensi dibidang ilmu: 1. S3 Ilmu Lingkungan (<i>Green Economy</i>) 2. Hubungan Internasional 3. Kajian Strategik Ketahanan Nasional 4. Antropologi 5. Kebijakan Sains & Teknologi	Seluruh Pegawai BRIDA	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning (daring + luring)	BRIN	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	RPJMD	1. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (Riau Hijau)	Terpenuhinya kompetensi dalam Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (Riau Hijau)	ASN di Bidang Perencanaan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklatren Bappenas Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		2. Integrasi SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>) dalam Dokumen Daerah	Terpenuhinya kompetensi dalam Integrasi SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>) dalam Dokumen Daerah	ASN di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklatren Bappenas Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		3. <i>Strategic Foresight</i> (Perencanaan Skenario Masa Depan)	Terpenuhinya kompetensi dalam <i>Strategic Foresight</i> (Perencanaan Skenario Masa Depan)	ASN di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklatren Bappenas Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		4. Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim	Terpenuhinya kompetensi dalam Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim	ASN di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklatren Bappenas Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		5. Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Terpenuhinya kompetensi dalam Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	ASN di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Pusbindiklatren Bappenas Lembaga Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Studi Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>) 2. Ekonomi Lingkungan (<i>Green Economy</i>) 3. Hubungan Internasional 4. Manajemen Strategis 5. Kajian Kependudukan (Demografi)	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu 1. Studi Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>) 2. Ekonomi Lingkungan (<i>Green Economy</i>) 3. Hubungan Internasional 4. Manajemen Strategis 5. Kajian Kependudukan	ASN di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Adaptasi Perubahan Iklim & <i>Green Disaster Recovery</i>	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaranAdaptasi Perubahan Iklim & <i>Green Disaster Recovery</i>	ASN di bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Ekosistem Gambut Berkelanjutan	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Lembaga Pelatihan . Manajemen Ekosistem Gambut Berkelanjutan	ASN di bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	KLHK	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Kerjasama Internasional Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya kompetensi teknis dibidang ilmu Kerjasama Internasional Penanggulangan Bencana	ASN di bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	BNPB	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Perencanaan Kota Tangguh Bencana (<i>Resilient City</i>)	Terpenuhinya kompetensi teknis dibidang ilmu Perencanaan Kota Tangguh Bencana (<i>Resilient City</i>)	ASN di bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	BNPB/BPBD	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Standar Internasional Penanganan Bencana (INSARAG)	Terpenuhinya kompetensi teknis dibidang ilmu Standar Internasional Penanganan Bencana (INSARAG)	ASN di bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	BNPB	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Manajemen Lingkungan (Gambut) 3. Hubungan Internasional 4. Kajian Strategik Ketahanan Nasional 5. Kehutanan (Konservasi)	Terpenuhinya kompetensi teknis dibidang ilmu Pendidikan Formal	ASN di bidang terkait	Pendidikan Formal	Pendidikan Formal	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Green Budgeting (Penganggaran Berwawasan Lingkungan)	Terpenuhinya kompetensi Green Budgeting (Penganggaran Berwawasan Lingkungan)	Bidang Anggaran, JFT AKPD, Bagian Program	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kemendagri dan Kementerian keuangan	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Aset Berkelanjutan (Sustainable Asset Management)	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Aset Berkelanjutan (Sustainable Asset Management)	Bidang PBMD dan Pengurus Barang	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BKAD Kemendagri, Kementerian keuangan	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Tata Kelola Keuangan Terbaik (Best Practice)	Terpenuhinya kompetensi Tata Kelola Keuangan Terbaik (Best Practice)	Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang PMBD	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kemendagri, Kemenkeu, BPK, BI	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		- Ekonomi Lingkungan (Green Economy) - Studi Pembangunan - Manajemen Sumber Daya Manusia - Hubungan Internasional	Terpenuhinya kompetensi Bidang Ilmu: - Ekonomi Lingkungan (Green Economy) - Studi Pembangunan - Manajemen Sumber Daya Manusia - Hubungan Internasional	ASN BPKAD Provinsi Riau	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 7	Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Terpenuhinya kompetensi Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	ASN Bidang Politik Dalam Negeri	Fomal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Strategi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Agama	Terpenuhinya kompetensi Strategi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Agama	ASN Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Fomal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Kepemimpinan Strategis Kewaspadaan Nasional	Terpenuhinya kompetensi Kepemimpinan Strategis Kewaspadaan Nasional	ASN Badan Kesbangpol	Fomal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Penanganan Radikalisme & Terorisme Berkelanjutan	Terpenuhinya kompetensi Penanganan Radikalisme & Terorisme Berkelanjutan	ASN Badan Kesbangpol	Fomal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Kerjasama Antar Lembaga Intelijen Daerah (Kominda)	Terpenuhinya kompetensi Kerjasama Antar Lembaga Intelijen Daerah (Kominda)	ASN Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Fomal Learning	Blended Learning	Kemendagri RI	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Hubungan Internasional, Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan Berkelanjutan, Antropologi Budaya, Manajemen Strategis	Terpenuhinya kompetensi Hubungan Internasional, Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan Berkelanjutan, Antropologi Budaya, Manajemen Strategis	ASN Badan Kesbangpol	Fomal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 5	Sistem Administrasi Perpajakan Modern (Best Practice)	Terpenuhinya kompetensi dalam mengidentifikasi Praktik terbaik untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menggali potensi wajib pajak	ASN Bidang terkait	Benchmarking	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Pelatihan Strategic Revenue Planning	Terpenuhinya kompetensi ASN dalam pembekalan peserta dengan kemampuan merumuskan, mengimplementasikan dan mengoptimalkan strategi pendapatan berbasis data	ASN Bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Green Tax & Insentif Fiskal Lingkungan	Terpenuhinya kompetensi ASN dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.	ASN Bidang terkait	Workshop	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Audit Kinerja Organisasi Pendapatan	Terpenuhinya kompetensi ASN dalam melaksanakan proses dan tahapan audit kinerja sesuai dengan standar yang berlaku	ASN Bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pengembangan Big Data Pendapatan Daerah Terintegrasi	Terpenuhinya kompetensi ASN untuk Integrasi data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memungkinkan analisis yang komprehensif dan pengambilan keputusan yang berbasis data.	ASN Bidang terkait	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Studi Pembangunan	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Studi Pembangunan	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Manajemen SDM	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Manajemen SDM	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Hukum Bisnis	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu Hukum Bisnis	ASN	Formal learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Kepemimpinan Berbasis MoT (Mentoring on the Job)	Meningkatkan kapasitas kepemimpinan strategis Kepala Badan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan kinerja organisasi, dan pencapaian target pembangunan daerah	Kepala Badan	Experiential Learning	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
2		Pelatihan Fungsional Widyaiswara	Meningkatkan kompetensi widyaiswara dalam melaksanakan tugas pembelajaran sesuai standar jabatan fungsional	Widyaiswara	TOT PKN 2	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
3		Pelatihan Sosialkultural Pengelolaan Kinerja ASN	Meningkatkan pemahaman widyaiswara terhadap aspek sosial dan budaya dalam pengelolaan kinerja ASN.	Widyaiswara	Experiential Learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
4		Pelatihan Pembelajaran Digital Berbasi AI	Meningkatkan kemampuan widyaiswara dalam memanfaatkan teknologi digital dan AI untuk pembelajaran ASN.	Widyaiswara	Patok banding, E-learning, Belajar mandiri, Komunitas belajar, Pembelajaran alam terbuka	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
5		Kursus TOEFL ITP. English For Presentation, Public Speaking Preparation Course	Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan komunikasi publik widyaiswara dalam mendukung tugas profesional.	Widyaiswara	Patok banding, E-learning, Belajar mandiri, Komunitas belajar, Pembelajaran alam terbuka	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
6		Pelatihan Manajemen Kinerja	Meningkatkan pemahaman widyaiswara dalam penerapan manajemen kinerja ASN secara efektif.	Widyaiswara	Patok banding (benchmarking)	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
7		Pelatihan tingkat Nasional	Meningkatkan wawasan dan pemahaman widyaiswara terhadap tugas dan fungsi DPR dalam sistem pemerintahan.	Widyaiswara	Experiential Learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	22	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
8		Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Kepala Bidang	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
9		Hospitality / Pelatihan Pelayanan Prima	Terpenuhinya kemampuan ASN yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas interaksi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.	Kepala Bidang	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah

10		Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur (Training Needs Analysis/TNA)	Terpenuhinya kemampuan menyusun peta & roadmap pengembangan kompetensi 1-5 thn	Kepala Bidang	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
11		Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Kepala Bidang	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
12		Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Kepala Bidang	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	4	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
13		Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kemampuan sekretaris dalam melakukan advokasi kebijakan otonomi daerah dan pengembangan SDM aparatur secara efektif.	Sekretaris (Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur)	Patok banding (benchmarking)	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
14		Pelatihan Sosialkultural	Meningkatkan pemahaman sekretaris terhadap aspek sosial dan budaya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.	Sekretaris (Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur)	ESQ	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
15		Pelatihan Pengendalian Evaluasi dan Anggaran	Meningkatkan kemampuan sekretaris dalam pengendalian, evaluasi, dan pengelolaan anggaran secara akuntabel.	Sekretaris (Advokasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Advokasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur)	Patok banding (benchmarking), Coaching, Mentoring	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah
16		Pelatihan Teknis Pengelolaan Kinerja ASN	Meningkatkan kemampuan ASN dalam mengelola kinerja secara terukur dan berkelanjutan.	Kasubbag Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Coaching Perencanaan Kepegawaian	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD, Non- APBD
17		Pelatihan Manajerial	Meningkatkan kompetensi manajerial ASN dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Coaching	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD , Non- APBD
18		Pelatihan Manajemen ASN	Meningkatkan pemahaman ASN terhadap sistem manajemen ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Coaching	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD , Non- APBD
19		Pelatihan Teknis Pengelolaan Kinerja ASN	Meningkatkan kemampuan ASN dalam pengelolaan kinerja berbasis indikator dan evaluasi.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Magang/praktik kerja, Coaching, E learning	Non Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	1	APBD , Non- APBD
20		Pelatihan Artificial Intelegensia (AI)	ASN mampu memanfaatkan teknologi AI untuk mempercepat proses birokrasi dan	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur	Formal learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	9	APBD, APBN,Pembiayaan Lain yang Sah

			meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan akurat	Sipil Negara Ahli Muda					
21		Pelatihan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
22		Hospitality / Pelatihan Pelayanan Prima	Terpenuhinya kemampuan ASN yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas interaksi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
23		Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan di bidang pengembangan kompetensi ASN	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
24		Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur (Training Needs Analysis/TNA)	Terpenuhinya kemampuan menyusun peta & roadmap pengembangan kompetensi 1-5 thn	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
25		Penyusunan Peta Kompetensi dan Roadmap Pengembangan SDM Aparatur	Terpenuhinya kemampuan melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi aparatur secara sistematis menggunakan pendekatan TNA untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi yang akurat dan relevan	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
26		Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
27		Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	9	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
28		Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan Teknik Identifikasi dan Pengukuran Kompetensi Aparatur	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	2	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
29		Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan Lembaga Administrasi Negara di bidang pengembangan kompetensi ASN	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Formal learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	2	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
30		Diklat TOC (Training Officer Coaches)	Memahami konsep dasar coaching, termasuk definisi, prinsip, peran coach, dan perbedaan coaching dengan mentoring, teaching, dan counseling.	Analisis pengembangan kompetensi ASN ahli pertama	Formal learning	Klasikal	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
31		Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur	Terpenuhinya kemampuan menyusun peta & roadmap pengembangan kompetensi 1-5 thn	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

32	Penyusunan Peta Kompetensi dan Roadmap Pengembangan SDM Aparatur	Terpenuhinya kemampuan melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi aparatur secara sistematis menggunakan pendekatan TNA untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi yang akurat dan relevan	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
33	Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Berbasis Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
34	Pelatihan Penyusunan Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menyusun kurikulum dan silabus diklat yang selaras dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	8	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
35	Pengelolaan Sistem Informasi Pelatihan	Peserta mampu menjelaskan fungsi, manfaat, alur kerja, serta komponen utama SIP dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan di instansi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
36	Pelatihan Penjaminan Mutu	Peserta mampu menjelaskan pengertian, prinsip, siklus, dan ruang lingkup penjaminan mutu dalam organisasi/instansi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
37	Pelatihan Pengelolaan Sertifikasi	Peserta mampu menjelaskan pengertian sertifikasi, standar kompetensi, skema sertifikasi, serta peran lembaga sertifikasi	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
38	Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Peserta memahami dasar hukum, standar kompetensi jabatan, serta ketentuan perencanaan pengembangan kompetensi di instansi pemerintah	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Klasikal	Kementerian Komunikasi dan Digital	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
39	Analisis Data dan Visualisasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi	Terpenuhinya kemampuan menganalisis data pelatihan dan menyajikannya dalam bentuk visualisasi (dashboard, infografis) untuk pengambilan keputusan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
40	Etika Profesi dalam Perumusan Kebijakan	Terpenuhinya kemampuan dalam Menerapkan nilai etika, transparansi, dan akuntabilitas	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
41	Literasi Digital untuk Riset Kebijakan (AI tools, e-library, data terbuka)	Terpenuhinya kemampuan memanfaatkan teknologi dalam riset kebijakan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Komdigi	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah
42	Penyusunan Peta Kompetensi dan Roadmap Pengembangan SDM Aparatur	Terpenuhinya kemampuan melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi aparatur secara sistematis menggunakan pendekatan TNA untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi yang akurat dan relevan	Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning	Blanded Learning	Lembaga Administrasi Negara	38	APBD, APBN, Pembiayaan Lain yang Sah

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 dan Misi 6	Carbon Trading & Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon	Terpenuhinya Kompetensi Carbon Trading & Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM Pusat/ Luar Negeri	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Formulasi Kebijakan Green Energy (Transisi Energi)	Terpenuhinya Kompetensi Pelatihan Formulasi Kebijakan Green Energy (Transisi Energi)	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM Pusat/ BPSDM Prov. Riau	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Transisi Energi Global & Best Practice	Terpenuhinya Kompetensi Transisi Energi Global & Best Practice	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM Pusat/ BPSDM Prov. Riau	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Hilirisasi Mineral & Batubara (Smelter/ Gasifikasi)	Terpenuhinya Kompetensi Hilirisasi Mineral & Batubara (Smelter/ Gasifikasi)	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM Pusat/ BPSDM Prov. Riau	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Evaluasi Dampak Kebijakan Ketenagalistrikan Daerah	Terpenuhinya Kompetensi Evaluasi Dampak Kebijakan Ketenagalistrikan Daerah	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Studi Pembangunan	Terpenuhinya Kompetensi Studi Pembangunan	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Hubungan Internasional (Diplomasi Energi)	Terpenuhinya Kompetensi Hubungan Internasional (Diplomasi Energi)	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Ilmu Lingkungan (Kajian Strategis)	Terpenuhinya Kompetensi Ilmu Lingkungan (Kajian Strategis)	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Teknik Kimia (Hilirisasi)	Terpenuhinya Kompetensi Teknik Kimia (Hilirisasi)	ASN Dinas ESDM Provinsi Riau	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 7	Pengelolaan Warisan Dunia (World Heritage) UNESCO	Terpenuhinya Pengelolaan Warisan Dunia (World Heritage) UNESCO	Pejabat Struktural, Pelaksana	Experience	Benchmarking	Kementerian Kebudayaan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Diplomasi Budaya & Kerjasama Internasional	Terpenuhinya Diplomasi Budaya & Kerjasama Internasional	Pejabat Struktural, Fungsional bidang diplomasi dan promosi budaya, Pelaksana	Experience	Blended Learning	Kementerian Kebudayaan, BPSDM	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Strategi Pemajuan Kebudayaan Melayu di Kancan Global	Terpenuhinya Strategi Pemajuan Kebudayaan Melayu di Kancan Global	Pejabat Struktural, Pelaksana	Experience	Blended Learning	Kementerian Kebudayaan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Audit Kinerja Program Pelestarian Budaya	Terpenuhinya kompetensi Audit Kinerja Program Pelestarian Budaya	Pejabat Struktural, Pelaksana	Experience	Blended Learning	Kementerian Kebudayaan	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Warisan Budaya	Terpenuhinya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Warisan Budaya	Pejabat Struktural, Pelaksana	Experience	Blended Learning	Kementerian Kebudayaan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor Kebudayaan	Terpenuhinya Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor Kebudayaan	Pejabat Struktural, Pelaksana	Experience	Blended Learning	BPSDM, Kementerian Kebudayaan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Tata Kelola Perikanan Internasional (Best Practice)	Terpenuhinya kompetensi dasar Tata Kelola Perikanan Internasional (Best Practice)	ASN	Pelatihan	Benchmarking	LAN/ Penyelenggara terkait lainnya	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Strategic Marine Spatial Planning (MSP)	Terpenuhinya kompetensi dasar Strategic Marine Spatial Planning (MSP)	ASN	Pelatihan	Blended Learning	LAN/ Penyelenggara terkait lainnya	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Blue Carbon & Perdagangan Karbon Sektor Kelautan	Terpenuhinya kompetensi dasar Blue Carbon & Perdagangan Karbon Sektor Kelautan	ASN	Workshop	Blended Learning	LAN/ Penyelenggara terkait lainnya	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Audit Kinerja Program Kelautan & Perikanan	Terpenuhinya kompetensi dasar Audit Kinerja Program	ASN	Pelatihan	Blended Learning	LAN/ Penyelenggara terkait lainnya	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pengembangan Sistem Informasi Perikanan Terintegrasi (Big Data)	Terpenuhinya kompetensi dasar Pengembangan Sistem Informasi Perikanan Terintegrasi (Big Data)	ASN	Pelatihan	Blended Learning	LAN/ Penyelenggara terkait lainnya	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Ilmu Lingkungan (Kajian Strategis)	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Lingkungan (Kajian Strategis)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Hubungan Internasional	Terpenuhinya Kompetensi di Bidang Ilmu Hubungan Internasional	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan Terkait	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 7	<i>Green Stadium Management</i> (Pengelolaan Venue Ramah Lingkungan)	Terpenuhinya kompetensi dalam mengelola venue ramah lingkungan	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Diplomasi Pemuda & Olahraga Internasional	Terpenuhinya kompetensi diplomasi pemuda dan olahraga internasional	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Perencanaan Jangka Panjang Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD)	Terpenuhinya kompetensi perencanaan jangka panjang desain besar olahraga daerah	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pemberdayaan Pemuda dalam SDGs	Terpenuhinya kompetensi dalam pemberdayaan pemuda dalam SDGs	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen <i>Legacy</i> Pasca Event Olahraga Besar	Terpenuhinya kompetensi manajemen legacy pasca event olahraga besar	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM Kemenpora dan Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Desain Komunikasi Visual (Multimedia) 3. Pemasaran Digital (<i>Digital Marketing</i>) 4. Sains Data (Statistik Olahraga) 5. Manajemen Bisnis Olahraga	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu: 1. Sistem Informasi / Teknik Informatika 2. Desain Komunikasi Visual (Multimedia) 3. Pemasaran Digital (<i>Digital Marketing</i>) 4. Sains Data (Statistik Olahraga) 5. Manajemen Bisnis Olahraga	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Manajemen <i>Green Hospital</i> & Limbah B3 Medis	Terpenuhinya kompetensi Manajemen <i>Green Hospital</i> & Limbah B3 Medis dibidang Kesehatan Masyarakat (Global Health)	JFT. Tenaga Sanitasi Lingkungan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	35	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Ketahanan Kesehatan Global (<i>Global Health Security</i>)	Terpenuhinya kompetensi Ketahanan Kesehatan Global (<i>Global Health Security</i>) dibidang . Kesehatan Lingkungan (<i>Environmental Health</i>)	JFT. Tenaga Sanitasi Lingkungan/JFT. Epidemiolog Kesehatan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	15	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Mitigasi Pandemi & Wabah Penyakit Baru	Terpenuhinya kompetensi Mitigasi Pandemi & Wabah Penyakit Baru dibidang Manajemen Bencana Kesehatan	JFT. Epidemiolog Kesehatan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	12	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Diplomasi Kesehatan Internasional	Terpenuhinya kompetensi Diplomasi Kesehatan Internasional dibidang . Kajian Strategik Kesehatan	JFT. Administrator Kesehatan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Perencanaan SDM Kesehatan Jangka Panjang	Terpenuhinya kompetensi Perencanaan SDM Kesehatan Jangka Panjang dibidang Epidemiologi Lanjut	JFT. Epidemiolog Kesehatan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	18	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

UPT BERSIFAT KHUSUS RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Pelayanan Rumah Sakit Berstandar Internasional (JCI)	Terpenuhinya kompetensi Pelayanan Rumah Sakit Berstandar Internasional (JCI)	ASN dibidang Terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Strategic Hospital Planning & Business Development	Terpenuhinya kompetensi dalam Strategic Hospital Planning & Business Development	ASN dibidang Terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Green Hospital & Pengelolaan Limbah Medis Terpadu	Terpenuhinya kompetensi dalam Green Hospital & Pengelolaan Limbah Medis Terpadu	ASN dibidang Terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Penelitian Klinis & Publikasi Ilmiah Kedokteran	Terpenuhinya kompetensi dalam Penelitian Klinis & Publikasi Ilmiah Kedokteran	JF Kedokteran	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) Terintegrasi	Terpenuhinya kompetensi dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) Terintegrasi	ASN dibidang Terkait	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Biomedik	Terpenuhinya Pendidikan dibidang Biomedik	JF Kesehatan ASN Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Pembelajaran	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Kedokteran Molekuler	Terpenuhinya Pendidikan dibidang Kedokteran Molekuler	JF Kedokteran	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Pembelajaran	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Manajemen Strategik RS	Terpenuhinya Pendidikan dibidang Manajemen Strategik RS	JF Kesehatan ASN Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Pembelajaran	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Hubungan Internasional (Medical Tourism)	Terpenuhinya Pendidikan dibidang Hubungan Internasional (Medical Tourism)	ASN Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyedia Pengembangan Pembelajaran	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

RSUD PETALA BUMI PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Implementasi <i>Green Hospital</i> & Pengelolaan Limbah B3 Berkelanjutan	Terpenuhinya kompetensi dibidang Implementasi <i>Green Hospital</i> & Pengelolaan Limbah B3 Berkelanjutan	Tenaga Sanitasi	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Kesiapsiagaan Bencana Rumah Sakit (<i>Hospital Disaster Plan</i>)	Terpenuhinya kompetensi dibidang Kesiapsiagaan Bencana Rumah Sakit (<i>Hospital Disaster Plan</i>)	Tenaga K3RS dan Seluruh Pegawai Rumah Sakit	Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	400	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Manajemen Energi & Efisiensi Sumber Daya RS	Terpenuhinya kompetensi dibidang Manajemen Energi & Efisiensi Sumber Daya RS	Petugas IPSRS	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pelayanan Kesehatan Ramah Lingkungan	Terpenuhinya kompetensi dibidang Pelayanan Kesehatan Ramah Lingkungan	Tenaga Sanitasi	Formal Learning dan Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Strategi Kemitraan & Jejaring Rujukan Global	Terpenuhinya kompetensi dibidang Strategi Kemitraan & Jejaring Rujukan Global	Tenaga Promotor Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Formal Learning dan Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		S3 Ilmu Kesehatan/ Biomedis	Terpenuhinya kompetensi S3 Ilmu Kesehatan / Biomedis	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		S3 Farmasi/ Kefarmasian	Terpenuhinya Kompetensi S3 Farmasi / Kefarmasian	ASN Apoteker	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Kesehatan Lingkungan	Terpenuhinya Kompetensi Kesehatan Lingkungan	ASN Kesehatan Lingkungan	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Manajemen Bencana	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Bencana	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
10		Studi Pembangunan Berkelanjutan	Terpenuhinya Kompetensi Studi Pembangunan Berkelanjutan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Konsep <i>Green Hospital</i> (RS Ramah Lingkungan) & Limbah B3	Terpenuhinya kompetensi dasar Konsep <i>Green Hospital</i> (RS Ramah Lingkungan) & Limbah B3	Tim K3 Tenaga kesehehatan Klinis Tim non klinis – manajemen	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended learning	KARS Konten internal LHK	20-30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Layanan Kesehatan Jiwa Berbasis Pemulihan (<i>Recovery Oriented</i>)	Terpenuhi nya kompetensi dasar Layanan Kesehatan Jiwa Berbasis Pemulihan (<i>Recovery Oriented</i>)	Perawat Psikiarti Psikolog	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended learning	Organisasi (PPNI, IDI, PDSKJI) LSM	20-30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Kerjasama & Jejaring Kesehatan Jiwa Internasional Manajemen Rumah Sakit Kajian Kesehatan Global	Terpenuhi nya kompetensi dasar Kerjasama & Jejaring Kesehatan Jiwa Internasional	Manajemen RSJ Tenaga Ahli klinis (dokter, perawat) Tim mutu	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended learning	WHO Kemenkes	20-30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Mitigasi Bencana di Rumah Sakit (<i>Hospital Disaster Plan</i>)	Terpenuhi nya kompetensi dasar Mitigasi Bencana di Rumah Sakit (<i>Hospital Disaster Plan</i>)	Dokter Perawat Staf pemeliharaan fasilitas Tenaga non klinis	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended learning	Kemenkes BNPB KARS	20-30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Perencanaan Strategis Pengembangan Layanan Unggulan RSJ	Terpenuhi nya kompetensi dasar Perencanaan Strategis Pengembangan Layanan Unggulan RSJ	Dokter umum Kepala bidang perencanaan Kepala ruangan Tim humas Akuntansi keuangan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended learning	Kemenkes KARS	20-30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Pendekatan <i>One Health</i> (Zoonosis & Resistensi Antimikroba)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Pendekatan <i>One Health</i> (Zoonosis & Resistensi Antimikroba)	ASN	Formal Learning / Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Peternakan Ramah Lingkungan (<i>Low Carbon Livestock</i>) & Biogas	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Peternakan Ramah Lingkungan (<i>Low Carbon Livestock</i>) & Biogas	ASN	Formal Learning / Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Strategi Ketahanan Pangan Hewani Berkelanjutan (SDGs)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Strategi Ketahanan Pangan Hewani Berkelanjutan (SDGs)	ASN	Formal Learning / Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Diplomasi Perdagangan Ternak Global	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Diplomasi Perdagangan Ternak Global	ASN	Formal Learning / Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Mitigasi Bencana Sektor Peternakan	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis Mitigasi Bencana Sektor Peternakan	ASN	Formal Learning / Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Ilmu Veteriner / Biomedis 2. Ilmu Lingkungan 3. Hubungan Internasional 4. Manajemen Strategis 5. Studi Pembangunan Berkelanjutan	Terpenuhinya kompetensi dibidang Ilmu-ilmu 1. Ilmu Veteriner / Biomedis 2. Ilmu Lingkungan 3. Hubungan Internasional 4. Manajemen Strategis 5. Studi Pembangunan Berkelanjutan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikann	7	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 7	Sistem Jaminan Sosial Negara Maju (Best Practice)	Terpenuhinya Kompetensi Sistem Jaminan Sosial Negara Maju (Best Practice)	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Strategic Social Planning	Terpenuhinya Kompetensi Strategic Social Planning	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Sustainable Livelihood untuk Pemberdayaan Ekonomi	Terpenuhinya Kompetensi Sustainable Livelihood untuk Pemberdayaan Ekonomi	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Audit Forensik Bantuan Sosial	Terpenuhinya Kompetensi Audit Forensik Bantuan Sosial	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pengembangan Big Data Kesejahteraan Sosial Terintegrasi	Terpenuhinya Kompetensi Pengembangan Big Data Kesejahteraan Sosial Terintegrasi	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		- Studi Pembangunan - Ilmu Lingkungan (Sosial) - Manajemen SDM - Kebijakan Sosial	Terpenuhinya Kompetensi - Studi Pembangunan - Ilmu Lingkungan (Sosial) - Manajemen SDM - Kebijakan Sosial	ASN Dinas Sosial Provinsi Riau	Formal Learning	Blended Learning	BPSDM	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan Dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Manajemen Perubahan Transformasi Digital	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Perubahan Transformasi Digital	ASN Bidang Terkait	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting	5 + 3 + 5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		<i>Green Data Center Management</i> (Pusat Data Hijau)	Terpenuhinya Kompetensi <i>Green Data Center Management</i> (Pusat Data Hijau)	ASN Bidang Terkait	ASN Bidang Terkait	Blended Learning	Komdigi, BPSDM, LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting	5 + 23	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Kerjasama Internasional bidang TIK	Terpenuhinya Kompetensi Kerjasama Internasional bidang TIK	ASN Bidang Terkait	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting dan atau	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Perencanaan Strategis Riau Digital 2045	Terpenuhinya Kompetensi Perencanaan Strategis Riau Digital 2045	ASN Bidang Terkait	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM, LAN RI, Telkom PCC, Course-net, Inixindo, SUHU Profesional Training and Consulting dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	2 + 2 +5 + 23	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Tata Kelola Data (<i>Data Governance</i>) Berstandar Global	Terpenuhinya Kompetensi Tata Kelola Data (<i>Data Governance</i>) Berstandar Global	ASN Bidang Terkait	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	23	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Aplikasi Penginderaan Jauh Untuk Pemetaan	Terpenuhinya Kompetensi Aplikasi Penginderaan Jauh Untuk Pemetaan	ASN Bidang Terkait	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BPSDM dan atau Penyelenggara lainnya yang terkait dan terakreditasi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Tugas Belajar S2 Teknik Geomatika	Terpenuhinya Kompetensi Teknik Geomatika	ASN Bidang Terkait	Formal Learning	Blended Learning	Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 4	Standar Kompetensi Kerja Internasional (Best Practice)	Terpenuhinya kompetensi terkait pemenuhan Standar Kompetensi Kerja Internasional (Best Practice)	Struktural, Pengawas Ketengakerjaan, Mediator, Pengantar Kerja, Instruktur	Pelatihan	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Strategic Workforce Planning	Terpenuhinya kompetensi Strategic Workforce Planning	Struktural, Pengawas Ketengakerjaan, Mediator, Pengantar Kerja, Instruktur	Pelatihan	Blended Learning	Kementerian Ketenagakerjaan, BPSDM Provinsi Riau	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Green Jobs dan Transisi Energi di Sektor Ketenagakerjaan	Terpenuhinya kompetensi Green Jobs dan Transisi Energi di Sektor Ketenagakerjaan	Struktural, Pengawas Ketengakerjaan, Mediator, Pengantar Kerja, Instruktur	Workshop	Blended Learning	BPSDM Provinsi Riau	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Inklusif	Terpenuhinya kompetensi Ekosistem Ketenagakerjaan yang Inklusif	Struktural, Pengawas Ketengakerjaan, Mediator, Pengantar Kerja, Instruktur	Pelatihan	Blended Learning	BPSDM Provinsi Riau	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Pengelolaan Taman Nasional & Hutan Kota Terbaik (Best Practice)	Terpenuhinya kompetensi dasar Pengelolaan Taman Nasional & Hutan Kota Terbaik (Best Practice)	ASN di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended learning	Widyaiswara Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas/terakreditasi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Strategic Environmental Assessment (KLHS)	Terpenuhinya kompetensi dasar Strategic Environmental Assessment (KLHS)	ASN di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended learning	Widyaiswara Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas/terakreditasi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Green Economy & Circular Economy	Terpenuhinya kompetensi dasar Green Economy & Circular Economy	ASN di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended learning	Widyaiswara Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas/terakreditasi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Audit Kinerja Program LHK	Terpenuhinya kompetensi dasar Audit Kinerja Program LHK	Pengawas Lingkungan Hidup	Formal learning Experience learning	Blended learning	Widyaiswara Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas/terakreditasi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup & Kehutanan Terintegrasi	Terpenuhinya kompetensi dasar Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup & Kehutanan Terintegrasi	ASN di bidang terkait	Formal learning Experience learning	Blended learning	Widyaiswara Pusdiklat Lembaga pembelajaran di universitas/terakreditasi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Studi Pembangunan	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu Studi Pembangunan	ASN di bidang terkait	Formal learning	Tugas belajar	Lembaga pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Agroteknologi	Terpenuhinya kompetensi bidang ilmu Agroteknologi	ASN di bidang terkait	Formal learning	Tugas belajar	Lembaga pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Strategi Pertanian Ramah Lingkungan & Rendah Karbon (<i>Green Agriculture</i>)	Terpenuhinya kompetensi Strategis Pertanian	JF PMHP	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Adaptasi & Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pangan	Terpenuhinya kompetensi Adaptasi & Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pangan	JF Analis Ketahanan Pangan	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Standar Global Keamanan Pangan (HACCP/ISO 22000)	Terpenuhinya Kompetensi Standar Global Keamanan Pangan	JF Analis Ketahanan Pangan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Perencanaan Strategis Ketahanan Pangan Jangka Panjang (SDGs)	Terpenuhinya Kompetensi Perencanaan Strategis Ketahanan Pangan (SDGs)	JF Analis Ketahanan Pangan	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Diplomasi Pangan & Kerjasama Pertanian Global	Terpenuhinya Kompetensi Diplomasi Pangan & Kerjasama Pertanian Global	JF PMHP, JF Alsintan, JF PSP	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Pertanian Berkelanjutan (<i>Sustainable Agriculture</i>) 2. Ketahanan Nasional	Terpenuhinya kompetensi di bidang ilmu-ilmu: Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan Nasional	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1.	Misi 7	Penegakan Perda Lingkungan Hidup (<i>Green Enforcement</i>)	Terpenuhinya kompetensi Penegakan Perda Lingkungan Hidup (<i>Green Enforcement</i>)	ASN di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2.		Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok & Limbah (Perda Hijau)	Terpenuhinya kompetensi Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok & Limbah (Perda Hijau)	ASN di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3.		Sinergitas Satpol PP dalam Pembangunan Berkelanjutan	Terpenuhinya kompetensi Sinergitas Satpol PP dalam Pembangunan Berkelanjutan	ASN Satpol PP	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri dan Instansi lainnya	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4.		Kepemimpinan Strategis Perlindungan Masyarakat	Terpenuhinya kompetensi Kepemimpinan Strategis Perlindungan Masyarakat	ASN di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5.		Kemitraan Trantibum Global/Regional	Terpenuhinya kompetensi Kemitraan Trantibum Global/Regional	ASN di Bidang terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6.		1. Ilmu Lingkungan 2. Studi Pembangunan Berkelanjutan 3. Kajian Strategik Ketahanan Nasional 4. Sosiologi Perkotaan	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang: 1. Ilmu Lingkungan 2. Studi Pembangunan Berkelanjutan 3. Kajian Strategik Ketahanan Nasional 4. Sosiologi Perkotaan	ASN di Bidang terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2	Pariwisata Berkelanjutan (<i>Sustainable Tourism Development</i>)	Terpenuhinya Kopetensi pembelajaran dasar	Analisis Pariwisata	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Pariwisata, Penyelenggara Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Manajemen Ekowisata (Mangrove & Gambut)	Terpenuhinya Kopetensi pembelajaran dasar	Pengelola Pariwisata	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Pariwisata, Penyelenggara Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	9	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		<i>Green Hospitality</i> & Pariwisata Ramah Lingkungan	Terpenuhinya Kopetensi pembelajaran dasar	Pengelola Pariwisata	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Pariwisata, Penyelenggara Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	9	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Kerjasama Pariwisata Global (IMT-GT)	Terpenuhinya Kopetensi pembelajaran dasar	Analisis Data dan Informasi	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Pariwisata, Penyelenggara Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	9	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Warisan Budaya (<i>Heritage</i>)	Terpenuhinya Kopetensi pembelajaran dasar	Manajemen Pariwisata	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Kementerian Pariwisata, Penyelenggara Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	9	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Ilmu Lingkungan (Ekowisata) 3. Hubungan Internasional 4. Antropologi Budaya 5. Manajemen Warisan Budaya (<i>Heritage</i>)	Terpenuhi Kopetensi	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Kebijakan Pengarusutamaan Gender & Anak (Best Practice)	Terpenuhinya kompetensi KebijakanPengarusutamaan Gender & Anak (Best Practice)	Analisis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Strategic Population Planning	Terpenuhinya kompetensi Strategic Population Planning	Penata KKB	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pembangunan Keluarga Berkualitas & Ketahanan Keluarga	Terpenuhinya kompetensi Pembangunan Keluarga Berkualitas & Ketahanan Keluarga	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Audit Kinerja Program Bangga Kencana	Terpenuhinya kompetensi Audit Kinerja Program Bangga Kencana	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pengembangan Sistem Informasi Perlindungan Anak Terintegrasi	Terpenuhinya kompetensi Pengembangan Sistem Informasi Perlindungan Anak	ASN	Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Kementerian PPA	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		- Studi Gender - Kebijakan Sosial - Manajemen SDM	Terpenuhinya kompetensi - Studi Gender - Kebijakan Sosial - Manajemen SDM	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	Sistem Pendidikan Berkualitas (Nasional/Internasional)	Terpenuhinya kompetensi Sistem Pendidikan Berkualitas (Nasional/Internasional)	Kepala Sekolah, Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	80	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Strategic Education Planning	Terpenuhinya kompetensi Strategic Education Planning	Kepala Sekolah, Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	50	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Green School & Pendidikan Lingkungan Hidup	Terpenuhinya kompetensi Green School & Pendidikan Lingkungan Hidup	Kepala Sekolah, Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	50	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Audit Kinerja Program Pendidikan	Terpenuhinya kompetensi Audit Kinerja Program Pendidikan	Kepala Sekolah, Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	70	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pengembangan Smart School & Ekosistem Pendidikan Digital	Terpenuhinya kompetensi Smart School & Ekosistem Pendidikan Digital	Kepala Sekolah, Fungsional Guru	Formal Learning	Blended Learning	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	60	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Studi Pembangunan	Terpenuhinya kompetensi dibidang Pembangunan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Ilmu Lingkungan (Sekolah Adiwiyata)	Terpenuhinya kompetensi dibidang Ilmu Lingkungan (Sekolah Adiwiyata)	Fungsional Guru	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Manajemen Strategis	Terpenuhinya kompetensi dibidang Manajemen Strategis	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 3	Manajemen Transportasi Hijau (Green Transport) & Emisi Rendah	Terpenuhinya kompetensi Manajemen Transportasi Hijau (Green Transport) & Emisi Rendah	ASN Bidang lalu Lintas Jalan dan Bidang Pengembangan Transportasi	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Ekosistem Kendaraan Listrik (EV) & Infrastruktur Pengisian	Terpenuhinya kompetensi Ekosistem Kendaraan Listrik (EV) & Infrastruktur Pengisian	ASN Bidang Angkutan Jalan dan Bidang Pengembangan Transportasi	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Perencanaan Transportasi Multimoda Berkelanjutan (SDGs)	Terpenuhinya kompetensi Perencanaan Transportasi Multimoda Berkelanjutan (SDGs)	ASN Bidang Pengembangan Transportasi	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Integrasi Transportasi Regional (Konektivitas Sumatera)	Terpenuhinya kompetensi Integrasi Transportasi Regional (Konektivitas Sumatera)	ASN di Bidang Terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Transportasi	Terpenuhinya kompetensi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Transportasi	ASN di Bidang Terkait	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	BPSDM Kementerian Perhubungan	20	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Studi Pembangunan Berkelanjutan (Transportasi)	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu	ASN di Bidang Terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Teknik Lingkungan (Emisi)	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu	ASN di Bidang Terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Manajemen Strategis	Terpenuhinya kompetensi teknis di bidang ilmu	ASN di Bidang Terkait	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 3	Pemanfaatan Energi Terbarukan (Biomasa/Bioga) Limbah Sawit	Terpenuhinya kompetensi Pemanfaatan Energi Terbarukan (Biomasa/Biogas) Limbah Sawit	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Perhitungan Emisi & Perdagangan Karbon Sektor Perkebunan	Terpenuhinya kompetensi Perhitungan Emisi & Perdagangan Karbon Sektor Perkebunan	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Diplomasi Sawit Berkelanjutan di Pasar Global (EUDR)	Terpenuhinya kompetensi Diplomasi Sawit Berkelanjutan di Pasar Global (EUDR)	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Manajemen Perkebunan di Lahan Gambut Berkelanjutan	Manajemen Perkebunan di Lahan Gambut Berkelanjutan	Penelaah Teknis Kebijakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Perencanaan Jangka Panjang Perkebunan Riau Hijau	Terpenuhinya kompetensi Perencanaan Jangka Panjang Perkebunan Riau Hijau	Penyuluh Pertanian Ahli Muda, Perencana Ahli Madya, Perencana Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Arsiparis Ahli Muda, Pengadministrasi Perkantoran, Analisis Pasar Pertanian Ahli Muda, Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1	<i>Green Library Management</i> (Perpustakaan Ramah Lingkungan)	Membentuk pengelolaan perpustakaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan (sustainable library) melalui penerapan prinsip ramah lingkungan dalam seluruh aspek layanan, pengadaan, fasilitas, pengelolaan energi, pengelolaan sampah, hingga edukasi pengguna, sehingga perpustakaan mampu berperan aktif dalam pelestarian lingkungan dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan	JFT Pustakawan dan Pelaksana	Pelatihan	Blended Learning	Perpustakaan Nasional	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Preservasi Warisan Dokumenter Dunia (<i>Memory of The World</i>)	Memberikan pemahaman dan kemampuan kepada peserta untuk melindungi, mengelola, dan melestarikan warisan dokumenter agar tetap autentik, aman, mudah diakses, serta dapat diwariskan kepada generasi mendatang sesuai dengan prinsip program UNESCO Memory of the World	ASN	Pelatihan	Blended Learning	Diskominfo	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Strategi Literasi untuk Kesejahteraan (SDGs)	Memahami peran literasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pencapaian SDGs, serta mampu merancang strategi literasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan	ASN	Pelatihan	Blended Learning	Perpustakaan Nasional	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Kerjasama Jejaring Perpustakaan Internasional	Mampu memahami konsep, prinsip, dan praktik kerjasama perpustakaan internasional serta mengembangkan kemampuan untuk membangun, memelihara, dan memanfaatkan jejaring perpustakaan internasional guna meningkatkan layanan, akses informasi, dan pengembangan sumber daya perpustakaan secara global	JFT Pustakawan dan JFT Pranata Komputer	Pelatihan	Blended Learning	Perpustakaan Nasional	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1 Misi 7	Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) di Desa	Terpenuhinya kompetensi Pengembangan Ekonomi Desa	Analisis Kebijakan, Penelaah Teknis Kebijakan	Formal Learning/ Experiential Learning/	Blended Learning	BPSDM/LAN/ KEMENDAGRI	4	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Perencanaan Strategis SDGs Desa	Terpenuhinya kompetensi Dalam Upaya terpadu Pembangunan Desa Berkelanjutan.	Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Penelaah Teknis Kebijakan/ Fasilitator Pemerintahan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	KEMENDES/ KEMENDAGRI	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Kemitraan Strategis & Fundraising	Terpenuhinya kompetensi komunikasi persuasif, manajemen hubungan, negosiasi dan daya penyampaian narasi	Pejabat Administrator/ Pejabat Pengawas/ Analisis Kebijakan/	Formal Learning/ Experiential Learning/	Blended Learning	KEMENDES/ KEMENDAGRI	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat	Terpenuhinya kompetensi teknis pemetaan resiko, SOP Bencana, Keterampilan evakuasi, pengelolaan logistik darurat, komunikasi dan pengambilan keputusan, sikap sadar bencana dan kolaborasi untuk membangun ketangguhan kolektif	Pejabat Adminisrator/ Analisis Kebijakan Ahli Muda	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	BNPB/BPBD/	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PEKERJAAN UMUM. PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 3	Konsep <i>Green Building</i> & Infrastruktur Hijau	Terpenuhinya Kompetensi Konsep <i>Green Building</i> & Infrastruktur Hijau	ASN yang membidangi	Formal	Blended learning	BPSDM Kementerian PU	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Teknologi Konstruksi di Lahan Gambut (Spesifik Riau)	Terpenuhinya Kompetensi Teknologi Konstruksi di Lahan Gambut (Spesifik Riau)	ASN yang membidangi	Formal	Blenden learning	BPSDM Kementerian PU	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Perencanaan Kota Tangguh Bencana (<i>Resilient City</i>)	Terpenuhinya Kompetensi Perencanaan Kota Tangguh Bencana (<i>Resilient City</i>)	ASN yang membidangi	Formal	Blenden learning	BPSDM Kementerian PU	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Sanitasi Lingkungan & Pengelolaan Limbah Terpadu	Terpenuhinya Kompetensi Sanitasi Lingkungan & Pengelolaan Limbah Terpadu	ASN yang membidangi	Formal	Blenden learning	BPSDM Kemendagri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Rekayasa Infrastruktur Lingkungan 3. Manajemen Bencana 4. Perencanaan Perumahan & Permukiman 5. Kajian Strategik Pembangunan	Terpenuhinya Kompetensi 1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Rekayasa Infrastruktur Lingkungan 3. Manajemen Bencana 4. Perencanaan Perumahan & Permukiman 5. Kajian Strategik Pembangunan	ASN yang membidangi	Formal	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 4	Kawasan Industri & KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)	Terpenuhinya kompetensi Kawasan Industri & KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)	ASN yang membidangi industri	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Strategic Industrial Planning	Terpenuhinya kompetensi Strategic Industrial Planning	ASN yang membidangi industri	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Circular Economy & Sustainability Business	Terpenuhinya kompetensi Circular Economy & Sustainability Business	ASN yang membidangi perdagangan dan sertifikasi penguji mutu barang	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Audit Kinerja Program Indagkop	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Audit Kinerja Program Indagkop	ASN yang membidangi industri, perdagangan, koperasi dan ukm	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Terintegrasi	Terpenuhinya kompetensi Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Terintegrasi	ASN yang membidangi industri	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	30	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor Riil	Terpenuhinya kompetensi Pelatihan Kepemimpinan Strategis Sektor Riil	Pengelola, penyelenggara	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		- Studi Pembangunan - Ilmu Lingkungan (Industri Hijau) - Manajemen Strategis - Teknik Logistik	Terpenuhinya kompetensi dibidang ilmu: Studi Pembangunan, Ilmu Lingkungan, Manajemen Strategik dan Teknik Logistik	ASN	Formal Learning	Tugas belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 & 3	Benchmarking Iklim Investasi & Pelayanan Publik Global (Best Practice)	Terpenuhnya Kompetensi Iklim Investasi & Pelayanan Publik Global (Best Practice)	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan	Formal Learning, Experiential Learning dan Social Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/ BKPM, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri	35	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Pelatihan Strategic Investment Planning	Terpenuhnya Kompetensi Strategic Investment Planning	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan	Formal Learning, Experiential Learning dan Social Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/ BKPM, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri	35	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Workshop Green Investment & Sustainable Finance	Terpenuhnya Kompetensi Green Investment & Sustainable Finance	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan	Formal Learning, Experiential Learning dan Social Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/ BKPM, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri	35	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pelatihan Audit Kinerja Pelayanan Publik	Terpenuhnya Kompetensi Audit Kinerja Pelayanan Publik	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan, Kepegawaian dan Umum	Formal Learning, Experiential Learning dan Social Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/ BKPM, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri	35	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Pengembangan Ekosistem Investasi Digital Terintegrasi	Terpenuhnya Kompetensi Ekosistem Investasi Digital Terintegrasi	Penyelenggara pada Penanaman Modal dan Perizinan	Formal Learning, Experiential Learning dan Social Learning	Blended Learning	Kementerian Investasi/ BKPM, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri	35	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Ilmu Lingkungan (Green Investment) Manajemen SDM Ekonomi Syariah Diplomat Ekonomi	Terpenuhnya Kompetensi di bidang ilmu: Ilmu Lingkungan (Green Investment) Manajemen SDM Ekonomi Syariah Diplomat Ekonomi	Aparatur Sipil Negara	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD APBN Pembiayaan lain yang sah

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
No	Tujuan Organisasi	Kebutuhan Dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 dan Misi 5	Advokasi Kebijakan Publik	Memahami konsep dasar kebijakan public. Menganalisis masalah publik dan menentukan prioritas advokasi	Analisis Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan	Formal Learning/Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN, Universitas Negeri,Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	13	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Tata Kelola Pelaporan Kegiatan dan Program Pembangunan Daerah	Meningkatkan pemahaman aparatur terkait standar dan regulasi pelaporan. Memperkuat kemampuan teknis dalam penyusunan laporan fisik, dan laporan kinerja.	Analisis Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan	Formal Learning/Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	LAN, Universitas Negeri, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan	13	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Protokol Internasional & Diplomasi Luar Negeri	Terpenuhinya Kompetensi Protokol Internasional dan Diplomasi Luar Negeri	Analisis Kebijakan, Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		<i>Green Event Management</i> (Penyelenggaraan Acara Ramah Lingkungan)	Terpenuhinya Kompetensi Penyelenggaraan Acara Ramah Lingkungan	Analisis Kebijakan, Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		<i>Strategic Leadership</i> Pendampingan Pimpinan	Terpenuhinya Kompetensi Pendampingan Pimpinan	Analisis Kebijakan, Pelaksana	Formal Learning/ Experiential Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	6	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO HUKUM PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Legal Drafting	Meningkatkan kompetensi aparaturnya dalam penyusunan perundang-undangan	Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analisis Hukum, Penyusun Materi Hukum & Perundang-undangan dan Analisis Kebijakan	Formal learning	Blended Learning	BPHN, Kementerian Hukum dan Lembaga Diklat Swasta	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Teknik penyuluhan hukum dan HAM	Terpenuhinya kompetensi penyuluhan hukum dan HAM	Analisis hukum, penelaah teknis kebijakan dan analisis perkara peradilan	Formal learning	Blended Learning	Kementerian Hukum dan Kementerian Dalam Negeri	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pendidikan khusus advokasi hukum	Terpenuhinya kompetensi dalam penyelesaian masalah hukum di dalam peradilan	Fungsional tetap ahli hukum, analisis perkara peradilan dan penyusun materi hukum dan perundang-undangan	Formal learning	Blended Learning	BPHN, Kementerian Hukum dan Organisasi advokasi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pendidikan dan pelatihan mediator	Terpenuhinya kompetensi dalam penyelesaian masalah hukum di luar peradilan	Fungsional tetap ahli hukum	Formal learning	Blended Learning	MA dan lembaga diklat swasta	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 1 Misi 4 Misi 7	Strategic Social Planning	Terpenuhinya Kompetensi dalam Strategic Social Planning	ASN yang membidangi bidang sosial	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Moderasi Beragama & Wawasan Kebangsaan	Terpenuhinya Kompetensi dalam Moderasi Beragama & Wawasan Kebangsaan	ASN yang membidangi keagamaan	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Audit Forensik Bantuan Sosial	Terpenuhinya Kompetensi dalam Audit Forensik Bantuan Sosial	ASN yang membidangi bidang sosial	Formal Learning/ Experiential Learning/ Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pengembangan Sistem Database Kesejahteraan Rakyat Terintegrasi	Terpenuhinya Kompetensi dalam Pengembangan Sistem Database Kesejahteraan Rakyat Terintegrasi	ASN yang membidangi sistem database kesra	Formal Learning/ Experiential Learning /Social Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Kompetensi	2	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO ORGANISASI SEDA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (<i>Dynamic Governance</i>)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (<i>Dynamic Governance</i>)	ASN	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Strategi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia (<i>World Class Bureaucracy</i>)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Strategi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia (<i>World Class Bureaucracy</i>)	ASN	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Perencanaan Strategis Organisasi Pemerintah Adaptif	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Perencanaan Strategis Organisasi Pemerintah Adaptif	ASN	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Kolaborasi Lintas Sektor (<i>Whole of Government</i>) Berkelanjutan	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Kolaborasi Lintas Sektor (<i>Whole of Government</i>) Berkelanjutan	ASN	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Evaluasi Dampak Kebijakan Reformasi Birokrasi Jangka Panjang	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Evaluasi Dampak Kebijakan Reformasi Birokrasi Jangka Panjang	ASN	Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyedia Layanan Kompetensi	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		Studi Pembangunan Berkelanjutan	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Studi Pembangunan Berkelanjutan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
7		Hubungan Internasional (<i>Comparative Government</i>)	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Hubungan Internasional (<i>Comparative Government</i>)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
8		Kajian Kebijakan Publik Lanjut	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Kajian Kebijakan Publik Lanjut	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
9		Administrasi Pembangunan	Terpenuhinya kompetensi dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran Administrasi Pembangunan	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5 dan Misi 6	Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (<i>Collaborative Governance</i>)	Terpenuhinya kompetensi Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (<i>Collaborative Governance</i>)	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning, Experiential Learning, Social Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara/Daerah	Terpenuhinya kompetensi Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara/Daerah	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning, Experiential Learning, Social Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Diplomasi Kerjasama Luar Negeri (<i>Sister Province</i>)	Terpenuhinya kompetensi Diplomasi Kerjasama Luar Negeri (<i>Sister Province</i>)	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning, Experiential Learning, Social Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Perencanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa)	Terpenuhinya kompetensi Perencanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa)	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning, Experiential Learning, Social Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah Jangka Panjang	Terpenuhinya kompetensi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah Jangka Panjang	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning, Experiential Learning, Social Learning	Blended Learning	Kementerian Dalam Negeri	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Kajian Strategik Ketahanan Nasional 3. Manajemen Strategis 4. Hukum Internasional	Terpenuhinya Kompetensi pada Bidang Ilmu : 1. Studi Pembangunan Berkelanjutan 2. Kajian Strategik Ketahanan Nasional 3. Manajemen Strategis 4. Hukum Internasional	ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	3	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Terpenuhinya kompetensi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Terbaik (Best Practice)	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Fomal Learning	Benchmarking	LKPP RI	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Pelatihan Strategic Supply Chain Management	Terpenuhinya kompetensi Strategic Supply Chain Management	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Fomal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Workshop Sustainable Procurement & Circular Economy	Terpenuhinya kompetensi Sustainable Procurement & Circular Economy	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Fomal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Pengembangan Sistem Big Data Analitik Pengadaan Daerah	Terpenuhinya kompetensi Pengembangan Sistem Big Data Analitik Pengadaan Daerah	JFT Pengelola Pengadaan barang/jasa	Fomal Learning	Blended Learning	LKPP RI	40	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 2 Misi 4	Implementasi Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) & Perdagangan Karbon	Terpenuhinya kompetensi Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) & Perdagangan Karbon	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experience, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan (PI 10%)	Terpenuhinya kompetensi Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experience, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Strategi Ketahanan Pangan & Energi Jangka Panjang	Terpenuhinya kompetensi Strategi Ketahanan Pangan & Energi Jangka Panjang	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experience, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Diplomasi Ekonomi Global & Regional (IMT-GT)	Terpenuhinya kompetensi Diplomasi Ekonomi Global & Regional (IMT-GT)	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experience, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Perencanaan Ekonomi Sirkular (<i>Circular Economy</i>)	Terpenuhinya kompetensi Perencanaan Ekonomi Sirkular (<i>Circular Economy</i>)	Penanggungjawab, ketua tim, ASN yg menbidangi	Experience, formal	Blended Learning	Lembaga Penyedia Pengembangan Kompetensi	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5	Konsep Kantor Ramah Lingkungan (<i>Eco-Office / Green Building</i>)	Terpenuhinya kompetensi Konsep Kantor Ramah Lingkungan (<i>Eco-Office / Green Building</i>)	ASN	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Efisiensi Energi & Audit Energi Gedung Pemerintah	Terpenuhinya kompetensi Efisiensi Energi & Audit Energi Gedung Pemerintah	ASN	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Pengelolaan Limbah Domestik Perkantoran	Terpenuhinya kompetensi Pengelolaan Limbah Domestik Perkantoran	ASN	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Strategi Pelayanan Publik Inklusif (Ramah Disabilitas)	Terpenuhinya kompetensi Strategi Pelayanan Publik Inklusif (Ramah Disabilitas)	ASN	Pelatihan	Blended Learning	Lembaga Pengembangan Kompetensi	8	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Manajemen Lingkungan 2. Studi Pembangunan Berkelanjutan 3. Teknik Lingkungan 4. Manajemen Strategis 5. Kajian Budaya (Adat Melayu)	Terpenuhinya kompetensi dibidang 1. Manajemen Lingkungan 2. Studi Pembangunan Berkelanjutan 3. Teknik Lingkungan 4. Manajemen Strategis 5. Kajian Budaya (Adat Melayu)	ASN	Formal Learning	Tugas Belajar	Penyelenggara Pendidikan	10	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU									
NO	Tujuan Organisasi	Kebutuhan dan Jenis Kompetensi	Desain Pembelajaran Tahun 2030					Jumlah Peserta	Anggaran
			Tujuan Pembelajaran	Sasaran Peserta	Metode Pembelajaran	Jalur Pembelajaran	Ketersediaan Konten Pembelajaran		
1	Misi 5 dan Misi 6	Analisis Manajemen <i>Green Hospitality</i> (Mess Ramah Lingkungan)	Terpenuhinya kompetensi Manajemen <i>Green Hospitality</i> (Mess Ramah Lingkungan)	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
2		Strategi Kerjasama & Kemitraan Pusat-Daerah	Terpenuhinya kompetensi Strategi Kerjasama & Kemitraan Pusat-Daerah	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Kemendagri, Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
3		Promosi Investasi & Potensi Daerah Global	Terpenuhinya Kompetensi Promosi Investasi & Potensi Daerah Global	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
4		Kepemimpinan Strategis	Terpenuhinya Kompetensi Kepemimpinan Strategis	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
5		Manajemen Jaringan (<i>Networking</i>) Nasional	Terpenuhinya Kompetensi Manajemen Jaringan (<i>Networking</i>) Nasional	ASN Badan Penghubung	Experiential Learning Social Learning Formal Learning	Blended Learning	Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi	5	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah
6		1. Hubungan Internasional 2. Studi Pembangunan 3. Manajemen Lingkungan (<i>Green Building</i>) 4. Ilmu Politik	Terpenuhinya Kompetensi dalam Bidang Ilmu: 1. Hubungan Internasional 2. Studi Pembangunan 3. Manajemen Lingkungan (<i>Green Building</i>) 4. Ilmu Politik	ASN Badan Penghubung	Formal Learning	Tugas Belajar	Lembaga Penyelenggara Pendidikan	1	APBD, APBN dan Pembiayaan lain yang sah